

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Laporan Keuangan dipergunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan disusunnya LKPD adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan (baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik) dengan.

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dana lokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, LKPD menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan Arus Kas Pemerintah Daerah.

A.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

LKPD Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan LKPD Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016;
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah;
- cc. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual;
- gg. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Operasional;
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- jj. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ll. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- nn. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- oo. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo;
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- rr. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ss. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- uu. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
- vv. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- ww. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023;
- xx. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- yy. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi di Kabupaten Probolinggo;
- zz. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo;
- aaa. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang/Jasa/Surat Berharga yang Diterima oleh Perangkat Daerah;
- bbb. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencairan Dana Cadangan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
- ccc. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ddd. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Peraturan Daerah Waluyojeti Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- eee. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- fff. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- ggg. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- hhh. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo;

- iii. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- jjj. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Belanja Wajib Dalam Rangka penanganan Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Probolinggo;
- kkk. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Probolinggo;
- lll. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- mmm. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026;
- nnn. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025;
- ooo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ppp. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
- qqq. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo;
- rrr. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- sss. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- ttt. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- uuu. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025;
- vvv. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023;
- www. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- xxx. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- yyy. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

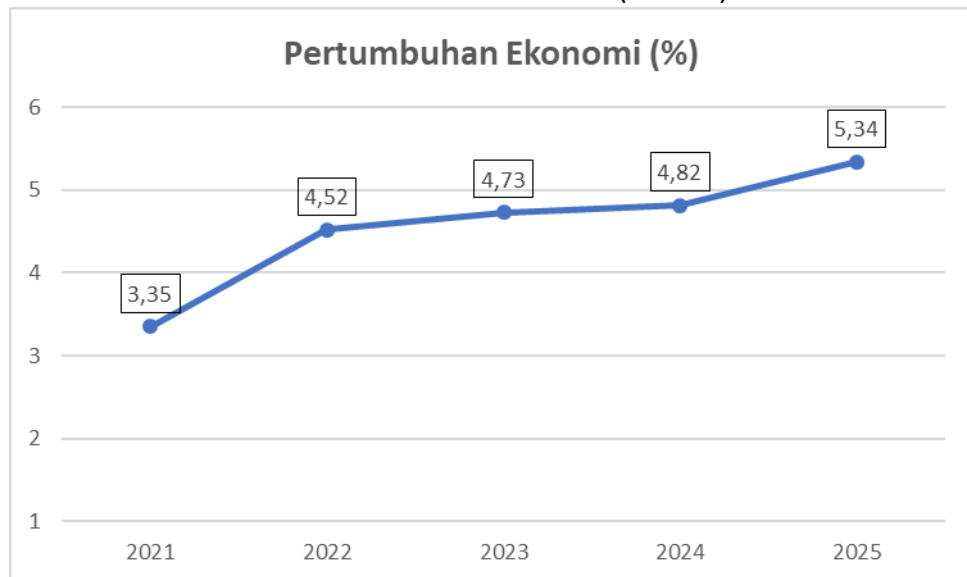
Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Probolinggo, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Probolinggo namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi regional dan nasional dan bahkan ekonomi global.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan satu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terjadi ketika pertumbuhan itu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam grafik berikut.

**Grafik 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Tahun Dasar 2010 (Dalam%)**



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Aktivitas perekonomian Kabupaten Probolinggo tahun 2025 secara umum menunjukkan geliat pertumbuhan yang semakin positif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang mencapai 5,34%, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sebesar 4,82%. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 2025 sedikit di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,33%. Pasca berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo terus mengalami kenaikan, yang berarti

bahwa perekonomian Kabupaten Probolinggo semakin baik. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Probolinggo di urutan ke-20 kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2025.

**Tabel 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Probolinggo Tahun Dasar 2010 (Dalam %)**

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,03	2,11	3,33	1,58	3,45
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,02	3,06	8,49	6,35	5,97
3	Industri Pengolahan	6,44	5,33	5,58	7,16	7,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,85	5,96	4,74	5,83	2,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,99	0,44	3,01	-3,80	2,17
6	Konstruksi	2,07	7,25	6,28	6,38	5,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,23	6,34	4,96	4,11	5,42
8	Transportasi dan Pergudangan	8,34	15,05	11,64	12,31	8,07
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,00	12,76	5,57	6,23	6,61
10	Informasi dan Komunikasi	4,77	4,44	4,41	6,53	7,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,31	1,84	7,44	5,07	3,05
12	<i>Real Estate</i>	0,85	3,78	4,71	3,93	3,35
13	Jasa Perusahaan	1,52	4,32	8,31	7,94	9,93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,37)	1,05	0,92	7,25	1,45
15	Jasa Pendidikan	0,88	0,07	6,72	4,74	5,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,74	3,56	1,17	4,5	6,26
17	Jasa lainnya	3,01	16,51	1,20	7,77	7,62
Pertumbuhan Ekonomi		3,35	4,52	4,73	4,82	5,34

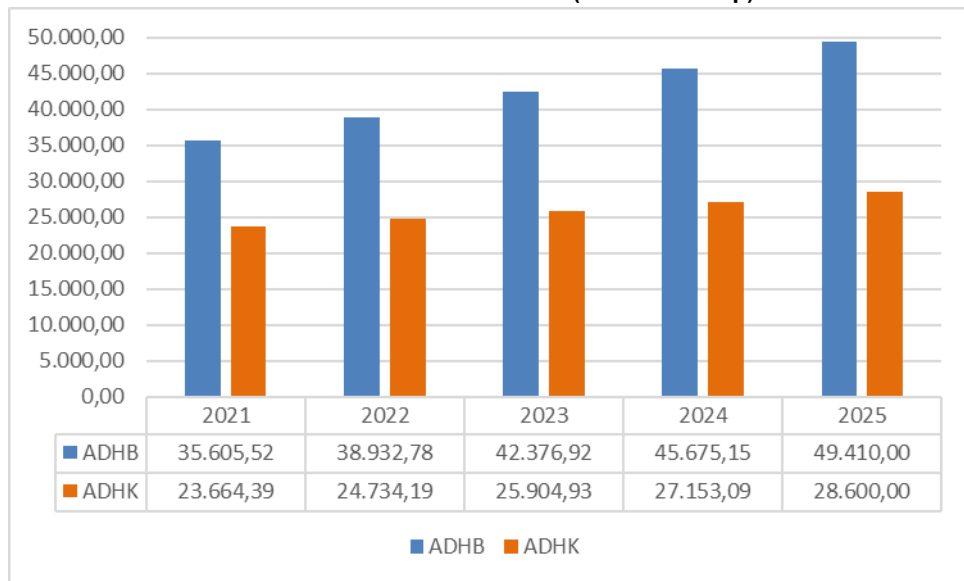
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi.

PDRB ADHK bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo berdasarkan Tahun Dasar 2010. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 2 Perbandingan Hasil Perhitungan PDRB ADHB dan ADHK Berdasarkan Tahun Dasar 2010 (Dalam Juta Rp)

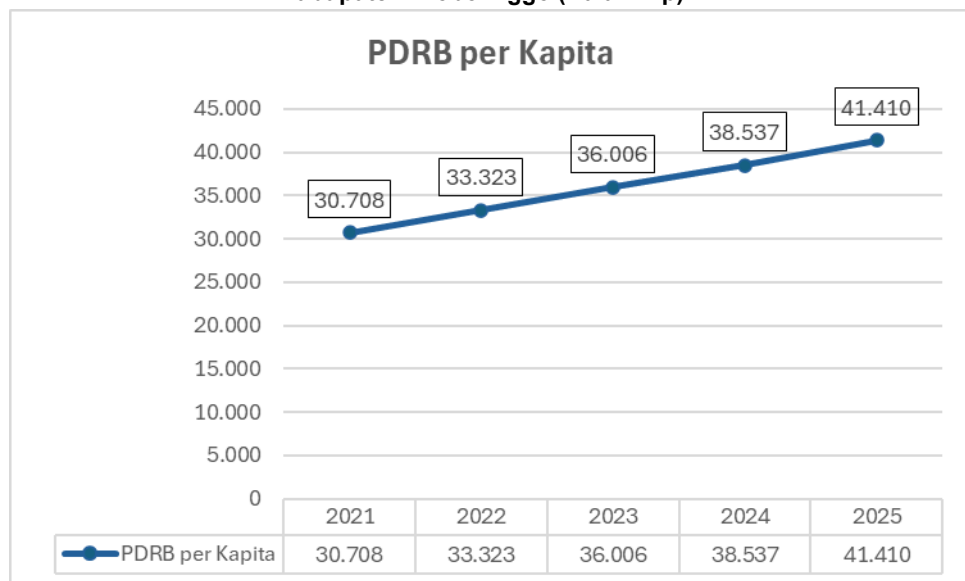


Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah total nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berdasarkan angka dari BPS Kabupaten Probolinggo, PDRB perkapita Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengacu pada Tahun Dasar 2010, dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan regional perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan kondisi empiris tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam grafik berikut.

Grafik 3 Laju Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Probolinggo (Dalam Rp)



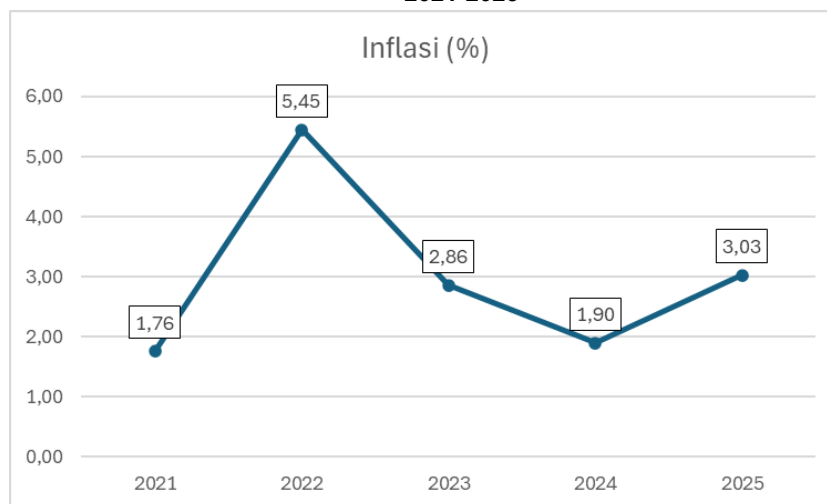
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

d. Inflasi

Selain variabel PDRB (sisi pertumbuhan), variabel ekonomi makro daerah lainnya yang seringkali menjadi indikator bagi perekonomian daerah adalah tingkat penyerapan tenaga kerja dan inflasi. Faktor-faktor lokal yang juga mempengaruhi perekonomian daerah adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi daerah harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut melalui tingginya penyerapan tenaga kerja dan kestabilan tingkat harga-harga umum.

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Perkembangan inflasi Kabupaten Probolinggo Tahun 2021–2025 dapat dilihat dalam grafik berikut.

**Grafik 4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Probolinggo
2021-2025**



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

e. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Persentase Penduduk Usia Kerja dan Besaran Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2 Persentase Penduduk Usia Kerja dan Besaran Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Probolinggo (Dalam %)**

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Usia Kerja	80,59	80,90	79,16	78,18	79,06
Bukan Angkatan Kerja	26,76	28,44	30,52	20,97	23,28
Angkatan Kerja	73,24	71,56	69,48	57,21	76,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,24	71,56	69,48	73,18	76,72
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,45	96,75	96,76	97,00	97,08
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,55	3,25	3,24	3,00	2,92

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 76,72% atau mengalami peningkatan sebesar 3,54% poin dibandingkan TPAK Agustus 2024. Peningkatan TPAK ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2025, TPAK laki-laki sebesar 88,85%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 65,13%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 2,92%, turun 0,8% dibandingkan dengan Agustus 2024. Lulusan Sekolah Menengah atas (SMA) Umum memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Probolinggo, yaitu sebesar 35,01% disusul lulusan Sekolah Dasar (SD) yang memiliki TPT sebesar 28,70%.

f. Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk memantau status pembangunan manusia di suatu wilayah. Pada Tahun 2014 terjadi perubahan metodologi penghitungan IPM. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Diantaranya, Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB).

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup, terdiri dari komponen kesehatan (usia-hidup), yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks Pendidikan, yang terdiri dari komponen pengetahuan, yang diukur dengan Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah. Indeks Standar Hidup Layak yang terdiri dari komponen pendapatan, yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan atau pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap kabupaten. Nilai IPM berkisar antara 0-100. Artinya semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah/tertinggal pembangunan wilayah atau negara tersebut. Besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Nilai IPM Kabupaten Probolinggo dan Komponennya

No	Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
1	IPM	66,26	66,96	67,79	70,85	71,65
2	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,20	67,78	68,12	73,93	74,10
3	EYS / Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,35	12,58	12,63	12,64	12,80
4	MYS / Angka Rata-rata Lamanya Sekolah (Tahun)	6,11	6,13	6,29	6,31	6,43
5	Pengeluaran Per Kapita / Kemampuan Daya Beli (Ribu Rupiah)	10.969	11.254	11,756	12,258	12.749

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

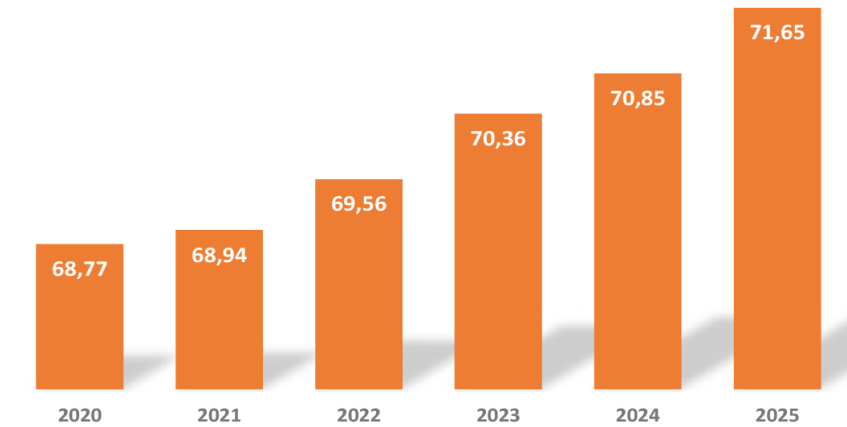
Berdasarkan skala internasional, capaian IPM Kabupaten Probolinggo untuk Tahun 2025 sebesar 71,65 termasuk dalam kategori tinggi, dimana kategori tinggi berkisar antara 70-80. Secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo selama Periode 2020-2025 mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian daerah. Peningkatan ini juga tidak lepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pada dasarnya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerintah harus fokus di tiga komponen seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Beberapa strategi umum yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan maupun pembangunan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan terpencil.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Secara umum Angka Harapan Hidup di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka Rata-Rata Lamanya Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Rata-Rata Lamanya Sekolah (MYS) di Kabupaten Probolinggo meningkat setiap tahun.

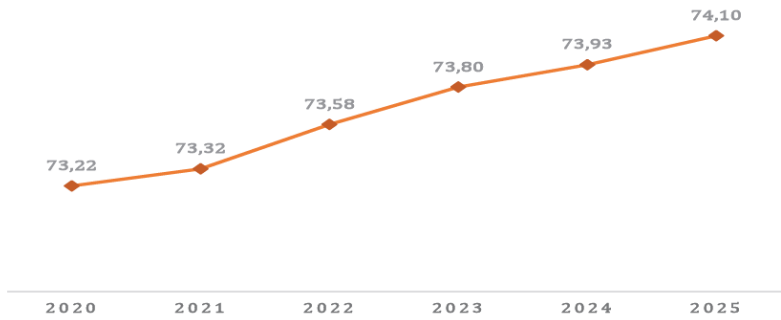
Selain Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS), komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (EYS). EYS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) di Kabupaten Probolinggo juga meningkat setiap tahun. Grafik besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2025 juga dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo



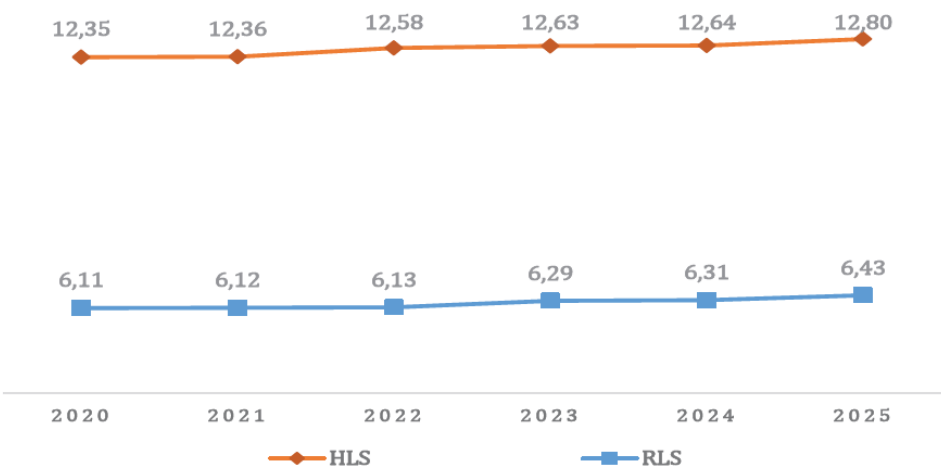
Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Grafik 6 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Probolinggo



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Grafik 7 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah



Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

g. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Sedangkan untuk perkembangan kondisi kemiskinan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4 Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Probolinggo

No	Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penduduk Miskin	18,91	17,12	17,19	16,45	16,31
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	223.32	203.23	205.02	197.11	196.26
3	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	451.395	475.713	514.274	537.724	545.221
4	Gini Ratio	0,32	0,275	0,319	0,24	0,377
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,26	2,54	2,87	2,63	1,84
6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,81	0,59	0,70	0,60	0,39

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

Persentase penduduk miskin berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilainya menunjukkan tingkat/derajat kemiskinan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah kedalam empat klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu.

- Klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10;
- Klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10-25;
- Klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25-40;
- Klasifikasi tinggi dengan nilai lebih dari 40.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo termasuk ke dalam klasifikasi menengah rendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 mengalami penurunan 0,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo meningkat.

Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin timpang dan begitu sebaliknya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 16,31% artinya menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 16,45%. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 2,63 pada

Tahun 2024 menjadi 1,84 pada Tahun 2025. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,60 pada Tahun 2024 menjadi 0,39 pada Tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat.

2. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

a. Tema Pembangunan

Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 berdasarkan strategi umum dan perumusan arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen RPD Kabupaten Probolinggo 2024-2026 yaitu ***“Pemantapan Pendapatan Masyarakat Didukung oleh Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”***.

b. Prioritas Pembangunan

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025, perlu untuk dikorelasikan dengan beberapa aspek, yaitu.

1) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi Jawa Timur

Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Tema pembangunan nasional tahun 2025 adalah ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***, yang difokuskan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional, yaitu.

- a) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
- e) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
- h) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 memperhatikan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045. Tema pembangunan provinsi Jawa Timur tahun 2025. Tema pembangunan Provinsi Jawa Timur 2025 adalah ***“Peningkatan Kualitas Sumber***

Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan antara lain.

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
4. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
5. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
6. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUMDes dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa;
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi;
9. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

2) RPJPD Kabupaten Probolinggo 2025-2045

Tertuang dalam RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, khususnya pelaksanaan periode pertama dengan Visi *“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)”*, dimana penekanan kebijakannya adalah sebagai berikut.

- (1) Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi, Kolaboratif dan Inovatif (SAE Pemerintahan). Hal ini dilakukan dengan membangun tata kelola pemerintah yang baik melalui dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat sampai pada level pemerintah desa. Memastikan kualitas aparatur organisasi pemerintah daerah yang kompeten prestasi, berkinerja dan loyal, didukung dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Menciptakan Ketahanan Ekonomi Lokal yang Kreatif dan Inovatif di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Berbasis Desa dan Komunitas untuk Menciptakan Lapangan Kerja dan Memberantas Kemiskinan (SAE Ekonomi). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat memperkuat daya saing daerah terutama dalam meningkatkan nilai investasi, salah satunya melalui revitalisasi BUMD. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan produktivitas para pelaku ekonomi maupun sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan yang terstandarisasi secara global, berakar pada budaya lokal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
- (3) Membangun SDM Unggul, Religius, Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang Terjangkau (SAE Pendidikan dan Kesehatan). Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Manusia, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, membutuhkan komitmen dan kerja sama dari para pemangku kepentingan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pengembangan karakter (religius dan berbudi pekerti luhur) bersama dengan

lembaga pendidikan formal dan non formal berbasis agama dan kepercayaan secara bertahan dan terukur.

- (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur). Infrastruktur yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pembangunan ekonomi daerah. Penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan sebagainya. Infrastruktur yang kuat akan mempercepat respon pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan daerah seperti ketimpangan akses dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan lapangan kerja.
- (5) Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Rentan dan Disabilitas (SAE Sosial). Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses layanan publik yang inklusif dan responsif harus diwujudkan, khususnya bagi perempuan, masyarakat adat, pemuda, masyarakat rentan dan disabilitas. Penyelenggaraan pemerintahan yang menegakkan keadilan sosial, dengan mendorong kesetaraan gender dan keberpihakan terhadap kelompok marginal dan rentan dapat diwujudkan baik dalam bentuk program maupun regulasi atau kebijakan. Dengan memberdayakan kelompok rentan, tidak hanya akan menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah. Selain itu, dapat pula menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan harmonis, dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sehingga terwujud masyarakat yang adil, inklusif dan damai sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

3) RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Probolinggo

Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 berdasarkan strategi umum dan perumusan arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen RPD Kabupaten Probolinggo 2024-2026 yaitu ***“Pemantapan Pendapatan Masyarakat Didukung oleh Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”***, yang difokuskan pada 6 (enam) prioritas pembangunan nasional, yaitu:

- a) Peningkatan Skor PPH;
- b) Pengendalian Inflasi di Daerah;
- c) Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat;
- d) Pembentukan BUMD/BUMDes/BPR dan *Food Estate*;
- e) Peningkatan Konektivitas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- f) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun Prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dan capaian atas target kinerja sasaran pembangunan dalam dokumen RPD Kabupaten Probolinggo 2024-2026.

Setelah dilakukan harmonisasi dan sinergitas perencanaan antara dengan Pusat maupun Provinsi Jawa Timur, maka Tema Pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2025

adalah *“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial yang Didukung oleh Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas, Merata dan Berwawasan Lingkungan”*, dengan prioritas pembangunan, yaitu.

- a) Membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru;
- b) Peningkatan diversifikasi pangan;
- c) Pengendalian inflasi daerah;
- d) Peningkatan kualitas SDM;
- e) Peningkatan kemandirian masyarakat miskin;
- f) Peningkatan tata kelola pemerintah;
- g) Peningkatan ketahanan daerah;
- h) Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas; dan
- i) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4) RKPD Tahun 2025 Kabupaten Probolinggo

RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2045 dan RPD Kabupaten Probolinggo 2024-2026 yaitu pemantapan pencapaian tujuan kedua dengan arah kebijakan pemantapan pendapatan masyarakat didukung oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus pembangunan peningkatan skor PPH, pengendalian inflasi di daerah, peningkatan jumlah Koperasi Sehat, Pembentukan BUMD/BPR/BUMDes bersama, peningkatan konektivitas jalan kabupaten dan jalan desa. Serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Masa Reses adalah masa di mana anggota DPR/DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor. Masa Reses adalah waktu anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPR/DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Karena hal tersebut diatas, pokok-pokok pikiran DPRD dapat diperoleh dari Masa Reses/Penjangkaran Aspirasi. Sehingga pokok-pokok pikiran yang diperoleh dalam Masa Reses Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Tahap I Tahun Sidang IV Tahun Anggaran 2024 dapat digunakan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara umum dalam pokok-pokok pikiran dari masing-masing unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, tersirat hal utama harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan infrastuktur jalan dan jembatan di wilayah timur, tengah dan barat Kabupaten Probolinggo.

Pokok-pokok pikiran Tahun 2025 DPRD Kabupaten Probolinggo yang diperoleh dari hasil reses/jaring aspirasi Tahap II Tahun Sidang V Tahun Anggaran 2024 terdapat 9 garis besar Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo diantaranya pembangunan kabupaten yang berkelanjutan didukung oleh infrastruktur, utilitas dan selanjutnya kebutuhan dasar pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, program pendidikan, program sosial, program pendidikan, program perekonomian.

6) Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau permasalahan daerah bersifat mendesak yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam merancang pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa mendatang. Isu strategis ini disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Secara konseptual, isu strategis memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu strategis RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 berdasarkan tema pembangunan serta melalui telaah permasalahan dan isu internasional hingga regional antara lain sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata daerah, tata kelola KSPN BTS dan peningkatan ekosistem ekonomi kreatif;
- 2) Peningkatan sektor pertanian yang didukung pengembangan sektor strategis lainnya menuju industri pengolahan pertanian dan perikanan;
- 3) Peningkatan kualitas ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan;
- 4) Penguatan koperasi dalam mendukung sektor pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan wirausaha baru dan membentuk forum ekonomi digital;
- 5) Mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing SDM;
- 6) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dan kualitas pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat;
- 7) Perluasan aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi angkatan kerja;
- 8) Pemberdayaan masyarakat dan tatakelola pemerintah desa;
- 9) Mendorong peningkatan aksesibilitas, kuantitas dan kualitas ketersediaan data melalui forum satu data;
- 10) Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 11) Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik;
- 12) Pengendalian tutupan lahan dan mitigasi bencana;
- 13) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

3. Mandatory Program-Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- a. Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut.

1) SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 22,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- 2) SPM Bidang Kesehatan
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 9,16% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - 3) SPM Bidang Pekerjaan Umum
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 11,86% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 0,66% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - 5) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas di Kabupaten Probolinggo pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 57,45% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Trantibum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 6) SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial di Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar 6,70% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

1) Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran fungsi Pendidikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar 31,24% dari total belanja daerah. Sebagaimana ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Anggaran infrastruktur Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar 30,06% terhadap total belanja daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

3) Alokasi Anggaran untuk Pengawasan.

Alokasi belanja daerah dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar 0,39% dari total belanja daerah.

4) Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalokasikan anggaran pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebesar 0,46% dari total Belanja Daerah. Penganggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk Pendidikan dan Pelatihan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dianggarkan sebesar 0,10% dari total Belanja Daerah.

5) Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Tahun 2025 anggaran untuk percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 36,69% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Probolinggo dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu Tahun Anggaran dengan komponen pokoknya adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan keuangan Kabupaten Probolinggo mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah diarahkan sebagai berikut:

a. **Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang di alokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas sebagai berikut.

- 1) Prioritas Pertama, dalam rangka membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- 2) Prioritas Kedua, dalam rangka membiayai belanja Prioritas Pembangunan Tahun 2025;
- 3) Prioritas Ketiga, dalam rangka membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pemerintah Daerah dapat menargetkan Pendapatan Daerah sepanjang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun 2024 berpengaruh yang cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan mengalami peningkatan, karena beralihnya mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah menjadi Opsen Pajak Daerah dimana sebelumnya pada mekanisme Bagi Hasil Pajak Daerah, prosentase provinsi sebesar 70% dan prosentase kabupaten/kota sebesar 30% sedangkan pada mekanisme Opsen Pajak Daerah prosentase kabupaten/kota sebesar 66%.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Retribusi Daerah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi PAD Kabupaten Probolinggo.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Prediksi Penerimaan dari Dana Perimbangan sepenuhnya tergantung pada Pemerintah Pusat karena data penetapan pembagian sementara dan pembagian definitif untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan sehingga dalam penetapan target Pemerintah Kabupaten Probolinggo hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan yang diperoleh dari Dana

Perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap Dana Perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Daerah secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB sektor kehutanan dan pertambangan, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi;
- 2) Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2025 total Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo diproyeksikan sebesar Rp2.440.490.628.243,00 atau naik dibanding tahun 2024. Mengingat Pendapatan Daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pusat maupun Provinsi maka penerimaan daerah yang dapat dipacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah, namun pada sisi lain berdasarkan realisasi PAD, khususnya pendapatan dari sektor penerimaan pajak (dalam kurun waktu tiga tahun terakhir) yang masih terjadi fluktuasi maka fokusnya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring meningkatnya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Adapun beberapa kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya;
- 2) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi Pajak maupun Retribusi Daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, rasionalisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber Pendapatan Daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat;
- 3) Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung Pembiayaan Daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap objek pajak dan retribusi;
- 5) Menurunkan tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun Retribusi Daerah melalui peningkatan sistem pemungutan, sistem pengawasan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

- 6) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 7) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi Pajak Daerah.
- b. Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah
- Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan mencakup sebagai berikut.
- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut objek pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Peningkatan penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, dilakukan melalui upaya memaksimalkan (intensifikasi) potensi penerimaan yang sudah ada, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah penggalan sumber penerimaan baru dilakukan melalui upaya ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah termasuk cukup besar maka dalam rangka memenuhi target penerimaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Makanan dan Minuman dan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam rangka pengembangan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, dengan harapan pelayanan yang diberikan akan semakin mudah, cepat, sederhana dan dekat kepada masyarakat.

Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan supaya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain pelayanan pembayaran Pajak PBBP2 dan BPHTB di seluruh cabang Bank Jatim di Probolinggo. Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya (ekstensifikasi) seiring dengan kebutuhan akan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Penerimaan bagian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2), Provisi Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Prediksi penerimaan Dana Perimbangan dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi objek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

c. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang taat membayar pajak (*sustainable compliance*);
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*excellent service*), terpercaya dan transparan. Rencana ini dilaksanakan melalui program pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan, pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
- 3) Mencetak Sumber Daya Aparatur yang potensial, berintegritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. Rencana ini dilaksanakan melalui program penyederhanaan peraturan perundangundangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, program Rekrutmen Sumber Daya Aparatur berbasis Kompetensi;
- 4) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5) Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan nontunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via SMS (*Short Message Service*) BPD Jatim dan *Internet Banking*;

- 6) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 7) Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan;
- 8) Memanfaatkan Aset/Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- 9) Mengembangkan pola kemitraan (*public private partnership*) untuk menyelenggarakan pelayanan publik/pembayaran pajak dengan pihak swasta.

d. Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2025.

- 1) Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Probolinggo menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
- 2) Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.
 - a) Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD, belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dan belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - b) Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2025;

- c) Pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, meliputi sasaran pembangunan daerah sebagai prioritas utama dalam RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yaitu.
 - (1) Membuka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru;
 - (2) Peningkatan diversifikasi pangan;
 - (3) Pengendalian inflasi daerah;
 - (4) Peningkatan layanan infrastruktur berkualitas;
 - (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - (6) Peningkatan kemandirian masyarakat miskin;
 - (7) Peningkatan kualitas SDM;
 - (8) Peningkatan tata kelola pemerintah daerah; dan
 - (9) Meningkatkan ketahanan daerah.
- d) Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026; dan
- e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan kewenangan meliputi pelayanan dasar yaitu pendidikan dasar, pendidikan khusus, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pemenuhan kebutuhan air bersih, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat pra sejahtera, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
- 4) Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJM Provinsi Jawa Timur;
- 5) Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi nonurusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
- 7) Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan yang dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan;
- 8) Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Asumsi proyeksi Belanja Operasional dan Belanja Transfer Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja Pegawai diasumsikan gaji PNS dan pejabat negara dan PNS termasuk di dalamnya TPP, tunjangan sertifikasi guru, iuran kepada BPJS dan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, khusus gaji PNS ditambah *accres* 2.5% (kenaikan pangkat, golongan dan gaji berkala);
- 2) Belanja Hibah dianggarkan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, tidak terus menerus dikecualikan yang diatur Undang-Undang serta hibah dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi;
- 3) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;

- 4) Belanja Bagi Hasil dianggarkan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota;
- 5) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan non alam serta bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 6) Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

e. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah lain yang diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta dua tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik tentunya akan memudahkan penatausahaan BMD dan merupakan sumber daya penting bagi Pemerintah Daerah sebagai penopang utama PAD. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola BMD secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan BMD, Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar BMD mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan BMD yang ruang lingkupnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan pelaporan sesungguhnya sudah dapat memberikan *guide*/petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam Pengelolaan BMD berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD dan sesuai dengan perkembangan akhir-akhir ini terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan BMD yaitu.

- 1) Berbagai tantangan dan respon tentunya telah dilakukan sebagai upaya nyata yang sistematis dan menyeluruh utamanya Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan BMD dan tentunya secara seksama masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan/melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dengan mempedomani Peraturan Bupati dimaksud;
- 2) Manajemen barang daerah seperti kita lihat saat ini telah berkembang cukup pesat, bermula dengan orientasi yang statis, berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis yaitu sebagai berikut.
 - a) Orientasi yang statis, dengan memperhatikan kontrol biaya pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan penggunaan; dan
 - b) Dinamis sudah melakukan kegiatan proaktif manajemen, diketahui nilai barang, akuntabilitas pengelolaan, sudah dilakukan optimalisasi pemanfaatan barang.
- 3) Strategi manajemen telah dilakukan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik dengan meliputi kegiatan antara lain.
 - a) Melakukan inventarisasi dengan baik;
 - b) Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif; dan
 - c) *Monitoring* dan evaluasi.

Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka pengelolaan BMD antara lain.

1) Penatausahaan BMD

Penatausahaan BMD dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan penatausahaan BMD masing-masing Perangkat Daerah menunjuk Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang/Operator E-BMD. Selain itu setiap Perangkat Daerah akan didampingi oleh Operator Pengelola BMD yang tugasnya adalah melakukan pendampingan dalam rangka pengelolaan BMD dan mempersiapkan proses rekonsiliasi

dan *desk* BMD. Aplikasi yang digunakan dalam penatausahaan BMD adalah Aplikasi E-BMD. Terdapat serah terima pengelolaan sementara dari Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur berupa hasil pekerjaan konstruksi penataan KSPN Bromo Tengger Semeru Tahap IV dengan Nomor BAST 936/BASTO/Cb.5.1/2024 tanggal 4 Desember 2024.

Terdapat aset berupa Tanah dan Bangunan yang sudah dilakukan *appraisal* tetapi belum terbit SK Penetapan Status sehingga belum tercatat pada daftar barang milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

2) Persertipikatan Tanah Hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Data per 31 Desember 2025, jumlah bidang tanah bersertipikat sebanyak 2.720, jumlah bidang yang belum bersertipikat sebanyak 1.074, dari total bidang tanah sebanyak 3.794, sedangkan untuk capaian persentase sebesar 71,69%.

3) Pemanfaatan

a) Pinjam Pakai

Pinjam Pakai dilaksanakan terhadap kendaraan dinas, tanah, dan/atau bangunan.

b) Sewa

Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa yaitu tanah eks bengkok berlokasi di Kecamatan Kraksaan, sewa Kasda Bank Jatim dan ATM Bank Jatim di Kantor Bupati Kraksaan dan Mall Pelayanan Publik, kantin dan foodcourt di Mall Pelayanan Publik, lahan pertanian di Wangkal, alat berat, tanah di daerah irigasi dan jaringan irigasi, lahan pertanian, Rumah dinas, Lapangan Pajajaran, Bangunan Multi Fungsi bawah Terminal Serunipoint.

c) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

KSP dilaksanakan di Pantai Bentar dan Eks Rumah Dinas Perikanan.

4) Penjaminan BMD

Penjaminan BMD berupa asuransi kendaraan dinas dan gedung kantor.

5) Pemusnahan

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.2.3.2/34/426.32/2025 tentang Penghapusan Barang Tahun 2025 yaitu Penghapusan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2021 dan Puskesmas Wonomerto.

6) Penghapusan

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/29/426.32/2025 tentang Penghapusan Barang Tahun Anggaran 2025 berupa.

- i. Hibah Tanah dan Bangunan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU);
- ii. Hibah Tanah dan Bangunan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
- iii. Hibah Bangunan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- iv. Hibah kendaraan ke Yayasan Raudlatul Quran Al-Manshuri.

Terdapat hibah yang belum terbit SK Penghapusan kepada Pemerintah Provinsi berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan hibah kepada Yayasan Nurul Hasyim Kalidandan berupa Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

7) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan BMD

Pelaksanaan Pembinaan BMD dilakukan dengan sosialisasi kepada pengurus barang dan pengurus barang pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah. Pengelolaan BMD dilaksanakan dengan melakukan rekonsiliasi BMD, rekonsiliasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dalam tahun anggaran. Selain itu dilaksanakan desk dan verifikasi terhadap usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penghapusan serta melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah.

8) Aset Dalam Permasalahan atau Sengketa

- SDN Curahsawo Perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Krs.

Putusan tanggal 11 Januari 2024 dengan hasil Akta perdamaian yang isinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengganti tanah penggugat yang berdiri SDN Curahsawo dengan nilai sesuai hasil *appraisal* dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan Bulan Desember 2025.

- SDN Banyuanyar Kidul Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Krs

Putusan tanggal 18 November 2024 dengan hasil Akta perdamaian yang isinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengganti tanah penggugat yang berdiri SDN Banyuanyar Kidul sesuai hasil *appraisal* dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan Desember 2026.

- SDN Talkandang

Putusan tanggal 15 Desember 2025 dengan hasil Akta perdamaian yang isinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengganti tanah penggugat yang berdiri SDN Talkandang dengan nilai sesuai hasil *appraisal* dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan Bulan Desember tahun 2027.

- SDN Condong

Putusan tanggal 09 Juli 2025 dengan hasil Akta perdamaian yang isinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengganti tanah penggugat yang berdiri SDN Condong dengan nilai sesuai hasil *appraisal* dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan Bulan Desember tahun 2027.

6. Perubahan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah substansi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti.

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya;
- d. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran juga menjadi dasar pelaksanaan perubahan APBD, antara lain dengan terjadinya.

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Bulan Juni 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam P-APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilakukannya penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
- c. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
- d. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- e. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- f. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah diukur dengan indikator kinerja pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU adalah ukuran ketercapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, atau dengan kata lain indikator kinerja tujuan pembangunan. IKU merupakan indikator makro yang menggambarkan tanggungjawab dan kontrak kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara itu, IKD adalah ukuran kinerja ketercapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) menggambarkan ukuran keberhasilan terhadap program Perangkat Daerah (PD).

Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan apakah sudah berada di arah yang benar seperti yang direncanakan atau tidak. Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan yang perlu guna memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang.

- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Capaian dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 beserta nilai targetnya disajikan, sebagai berikut.

**Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024-2026**

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	Persentase Penduduk Miskin	17.12	16.21	16.00	15.75	15.50	15.50
2	Indeks Pembangunan Manusia	66.96	67.83	68.30	68.75	61.25	61.25
3	Indeks Pembangunan Gender	NA	86.06	86.25	86.45	86.70	86.70
4	Indeks Kesalehan Sosial	NA	NA	82.00	82.25	82.5	82.5
5	Pertumbuhan Ekonomi	4.52	3.67	4.03	4.35	5.27	5.27
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.25	2.75	2.44	2.16	1.89	1.89
7	Indeks Gini	0.275	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33
8	Indeks Pembangunan Infrastruktur	NA	55.60	56.53	58.45	59.57	59.57
9	Indeks Reformasi Birokrasi	63.05	66.5	63.5	64	64.5	64.5

Sumber: RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026

b. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah dituntut untuk melaporkan nilai capaian indikator pembangunan berdasarkan empat aspek kondisi daerah yaitu.

- 1) Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menggambarkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga yang diukur melalui indikator makro sebagai indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan bidang ekonomi sosial. Indikator aspek kesejahteraan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan pemerintahan secara keseluruhan untuk mewujudkannya umumnya diisi oleh Indikator Kinerja Utama Daerah;
- 2) Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan urusan, baik wajib maupun pilihan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator dalam aspek ini tidak lain adalah indikator sasaran pembangunan tertinggi yang ada di setiap urusan penyelenggaraan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) akan menjadi indikator pada urusan penyelenggaraan daerah penanggungjawab utama indikator ini. Sementara itu, untuk urusan penyelenggaraan daerah yang tidak bertanggung jawab langsung pada IKD akan diisi oleh indikator kinerja tertinggi pada urusan tersebut, yang dalam hirarki indikator kinerja dapat berupa indikator kinerja utama urusan dan/atau indikator kinerja sasaran untuk urusan tersebut;
- 3) Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator aspek ini dapat diisi dengan indikator yang telah disediakan dalam indikator Aspek Daya Saing dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan ketersediaan data.

Capaian dan target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan RPD 2024-2026 Kabupaten Probolinggo memperlihatkan indikator kinerja setiap aspek pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2024 sebagai berikut.

**Tabel 6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024-2026**

No	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2022 (baseline)	Target				PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Penurunan PPKS	NA	3.47	3.99	4.50	5.02	Dinas Sosial
2	Skor Pola Pangan Harapan	79.80	79.3	80.62	81.94	83.26	Dinas Ketahanan Pangan
3	Indeks Ketahanan Daerah	0.60	0.58	0.61	0.62	0.63	BPBD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun 2022 (baseline)	Target				PD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	
4	Indeks Pendidikan	0.56	0.56	0.57	0.57	0.58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Indeks Kesehatan	0.73	0.76	0.77	0.78	0.79	Dinas Kesehatan dan RSUD
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	72.44	72.5	72.70	72.95	DP3AP2KB
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	NA	NA	1.38	1.40	1.43	Satpol PP
8	Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud	NA	NA	25%	27%	30%	Bakesbagpol
9	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dalam Arti Luas. (Pertanian, Peternakan, Perikanan)	NA	NA	2.30	2.46	2.67	Dinas Pertanian; Dinas Perikanan
10	Pertumbuhan Sub Sektor Industri dan Perdagangan.	NA	NA	6.47	6.80	7.04	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
11	Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan	NA	NA	3.31	4.28	4.62	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
12	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	NA	NA	4.50	5.00	5.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
13	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah.	NA	NA	90.82	91.31	91.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96.74	93.81	96.80	96.85	96.90	Dinas Tenaga Kerja
15	Persentase Desa Mandiri	7.07	9.23	10	16	20	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60.38	62.75	62.86	62.92	62.97	Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase Kawasan Pemukiman Layak	73.41	72.5	72.07	73.60	73.82	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18	Indeks Kebinamargaan, SDA dan Tata Ruang	NA	20.376	20.676	24.576	27.276	Dinas PUPR
19	Indeks Layanan Perhubungan	NA	68.8	70.5	72.7	74.2	Dinas Perhubungan
20	Nilai SAKIP	68.68	83	74	74.5	75	Setda; Irda; Bappelitbangda;
21	Indeks SPBE	2.42	2.85	2.99	3.14	3.28	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
22	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah
23	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	74	76.20	78.40	80.60	BPPKAD
24	Nilai Sistem Merit	269.50	NA	309.5	323	370.5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
25	Survey Penilaian Integritas (SPI)	69.26	NA	72	73	74	Inspektorat Daerah
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.61	84	85	86	87	Setda, Setwan, Kecamatan, Disperpusarsip Dispendukcapil

Tabel 7 Penetapan Indikator Kinerja per Aspek Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Capaian Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.52	3.67	4.03	4.35	5.27	5.27
1.1.2	Indeks Gini	Indeks	0.275	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33
1.2	Kesejahteraan Sosial							

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Capaian Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66.96	67.83	68.30	68.75	61.25	61.25
1.2.2.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	NA	86.06	86.25	86.45	86.70	86.70
1.2.3.	Persentase Penduduk Miskin	%	16.21	16.21	16.00	15.75	15.50	15.50
1.2.4.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	NA	NA	82.00	82.25	82.5	82.5
1.3	Layanan Infrastruktur							
1.3.1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	NA	1.92	1.96	2.01	2.05	2.05
1.3.2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63.05	66.5	63.5	64	64.5	64.5
2.	Aspek Pelayanan Umum							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Indeks Pendidikan	%	0.56	0.56	0.57	0.57	0.58	0.58
2.1.2	Kesehatan							
2.1.1.1	Indeks Kesehatan	%	0.73	0.76	0.77	0.78	0.79	0.79
2.1.1.2	Persentase Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah Sakit Probolinggo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
2.1.3.1	Indeks Kebinamargaan, SDA dan Rata Ruang	Indeks	NA	56.376	59.676	59.976	60.276	60.276
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.1.4.1	Persentase Kawasan Pemukiman Layak	Persen	73.41	72.5	72.07	73.60	73.82	73.82
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	NA	NA	1.38	1.40	1.43	1.43
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase Penurunan PPKS	%	NA	3.47	3.99	4.50	5.02	5.02
2.1.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.60	0.58	0.61	0.62	0.63	0.63
2.2	Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
2.2.1	Tenaga Kerja							
2.2.1.1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96.74	93.81	96.80	96.85	96.90	96.90
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	NA	72.44	72.5	72.70	72.95	72.95
2.2.3	Pangan							
2.2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	79.80	79.3	80.62	81.94	83.26	83.26
2.2.4	Lingkungan Hidup							
2.2.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60.38	62.75	62.86	62.92	62.97	62.97
2.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	90.07	90.2	90.5	90.6	90.7	90.7
2.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.6.1	Persentase Desa Mandiri	%	7.07	9.23	10	16	20	20
2.2.7	Pengendalian Penduduk dan KB							
2.2.7.1.	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	1.7%	1.7%	1.7%	1.6%	1.5%	1.5%
2.2.8	Perhubungan							

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Capaian Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.2.8.1	Indeks Layanan Perhubungan	Indeks	NA	68.8	70.5	72.7	74.2	74.2
2.2.9	Komunikasi dan Informatika							
2.2.9.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.42	2.85	2.99	3.14	3.28	3.28
2.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro							
2.2.10.1	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi dan Usaha Mikro	%	NA	NA	4.50	5.00	5.00	5.00
2.2.11	Penanaman Modal							
2.2.11.1	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	%	NA	NA	90.82	91.31	91.81	91.81
2.2.12	Kepemudaan dan Olahraga							
2.2.12.1	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat regional	%	0.56%	0.56%	0.56%	0.81%	1.05%	1.05%
2.2.13	Kebudayaan							
2.2.13.1	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	12.50	12.50	43.75	50	56.25	56.25
2.2.13	Perpustakaan							
2.2.13.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12.6	14	15.10	16.20	17.30	17.30
2.2.14	Kearsipan							
2.2.14.1	Indeks Kepuasan Layanan Kearsipan	Indeks	78	78	82	85	87	87
2.3	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.3.1.	Pariwisata							
2.3.1.1	Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan	%	NA	2.02	3.31	4.28	4.62	4.62
2.3.2.	Pertanian (arti luas)							
2.3.2.1	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dalam Arti Luas. (Pertanian, Peternakan, Perikanan)	%	2.11	Na	2.30	2.46	2.67	2.67
2.3.3	Perdagangan dan Perindustrian							
2.3.3.1	Pertumbuhan Sub Sektor Industri dan Perdagangan.	%	NA	NA	6.47	6.80	7.04	7.04
2.4	Urusan Fungsi Penunjang Urusan							
2.4.1	Perencanaan Pembangunan							
2.4.1.1	Persentase Capaian nilai AKIP Kabupaten pada komponen perencanaan Kinerja	%	21.92	22	22	22.5	23	23
2.4.2	Keuangan							
2.4.2.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	NA	74	76.20	78.40	80.60	80.60
2.4.3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
2.4.3.1	Nilai Sistem Merit	Indeks	269.50	NA	309.5	323	370.5	370.5
2.4.4	Penelitian dan Pengembangan							
2.4.4.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	40	40	42.5	45	45.5	45.5
2.4.5	Pengawasan							
2.4.5.1	Maturitas SPIP	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.4.5.2	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	69.26	NA	72	73	74	74
2.4.6	Sekretariat DPRD							
2.4.6.1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Indeks	83	83	83	83	83	83
2.4.7	Sekretariat Daerah							
2.4.7.1	Nilai SAKIP	Indeks	68.68	83	74	74.5	75	75
2.5	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik							
2.5.1	Kesatuan Bangsa dan Politik							
2.5.1.1	Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud	%	NA	NA	25%	27%	30%	30%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Target Capaian Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.6	Urusan Kewilayahan							
2.6.1	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	88	90	91	92	93	93
3	Aspek Daya Saing Daerah							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	8.142	8.17	11.09	14.77	21.76	21.76
3.1.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%						
3.2	Kondisi Infrastruktur							
3.2.1	Persentase kawasan Permukiman layak	%	73.41	72.5	72.90	73.31	73.71	73.71
3.2.2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	NA	64.60	66.28	67.30	67.82	67.82
3.3.	Kondisi Sumberdaya Manusia							
3.3.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66.96	67.83	68.30	68.75	61.25	61.25
3.3.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	NA	86.06	86.25	86.45	86.70	86.70
3.3.3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63.05	66.5	63.5	64	64.5	64.5

Sumber: RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang telah disusun payung hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026, penjabaran tujuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dituangkan dalam bentuk agenda (tujuan) dan prioritas (sasaran) pembangunan pada RPD Tahun 2024-2026. Keberhasilan dan kurang optimalnya kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 perlu dievaluasi guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat sebagai pertimbangan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan birokrasi berdampak, sekaligus sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 telah ditetapkan 3 tujuan yaitu.

- Tujuan I : Menurunkan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat yang Harmonis, Setara, Aman serta Tentram.
- Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Meningkatkan Kesempatan Kerja di Dukung Infrastruktur Berkelanjutan.
- Tujuan III : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing.

Tujuan ini diukur dengan sembilan Indikator Kinerja dan guna mencapai tujuan ditetapkan 11 Sasaran Strategis yang diukur dengan 26 Indikator Kinerja.

Dari hasil evaluasi keberhasilan pencapaian 3 tujuan diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. **Empat Indikator tujuan** dengan kategori **Sangat Baik (SB)**;
- b. **Dua Indikator tujuan** dengan kategori **Baik (B)**; dan
- c. **Tiga Indikator tujuan belum diketahui capaian kinerjanya** yaitu indeks pembangunan *gender* (masih menunggu rilis data BPS pada pertengahan 2025), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Reformasi Birokrasi (masih menunggu LHE dari Kementerian PAN dan RB).

Dari 26 indikator Sasaran Strategis diperoleh hasil capaian sebagai berikut.

- a. **13 Indikator sasaran** atau 50 % dengan kategori **Sangat Baik**;
- b. **Delapan Indikator sasaran** atau 30,77 % dengan kategori **Baik**;
- c. **Satu Indikator sasaran** atau 3,80 % dengan kategori **Cukup**;
- d. **Empat Indikator sasaran** atau 15, 38% dengan **realisasi nilai capaian kinerja belum dapat ditetapkan** yaitu indeks pemberdayaan gender (telah dirubah menjadi indeks ketimpangan *gender*), Indeks ketentraman dan ketertiban (masih dalam perhitungan perangkat daerah terkait), pertumbuhan subsektor pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, dan perikanan), serta pertumbuhan subsektor industri dan perdagangan (menunggu rilis data dari BPS).

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dan capaian realisasi keuangan, dari indikator tujuan dan sasaran, menunjukkan:

- a. **Lima Indikator tujuan memiliki tingkat efisiensi**;
- b. **Satu Indikator tujuan tidak mengalami efisiensi** yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka;
- c. **Tiga Indikator tujuan belum dapat dihitung tingkat efisiensi**, dikarenakan belum ada hasil perhitungan realisasi kinerjanya;
- d. **19 indikator sasaran strategis memiliki tingkat efisiensi**;
- e. **Tiga Indikator strategis tidak mengalami efisiensi** yaitu Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan, Nilai Sakip dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. **Empat Indikator sasaran belum dapat dihitung tingkat efisiensinya**, dikarenakan belum ada hasil perhitungan realisasi kinerjanya.

Dari hasil rata-rata perhitungan 26 indikator sasaran diperoleh rata-rata capaian realisasi sebesar **141,31%** atau termasuk kategori **Sangat Baik (SB)**.

c. Strategi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang, langkah kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain sebagai berikut.

- a. Capaian indikator tujuan dan sasaran RPD tahun 2025 yang sudah berpredikat Sangat Baik dan Baik hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk Indikator yang masih berpredikat Cukup, perlu segera melakukan strategi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerjanya. Beberapa indikator yang masih menunggu hasil penilaian dari K/L, BPS, dan Perangkat Daerah terkait segera dikoordinasikan untuk memperoleh hasil penilaian.
- b. Pada komponen perencanaan kinerja akan dilaksanakan pada.
 - Penyelarasan perencanaan jangka menengah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang sudah mengakomodir program prioritas Presiden, Gubernur, dan Bupati terpilih;
 - Penyelarasan perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi komponen perencanaan, pengukuran kinerja (pemenuhan indikator SMART), evaluasi capaian kinerja dan pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan;
 - Penyempurnaan Pohon Kinerja dengan melaksanakan pendampingan pada seluruh SKPD.
- c. Pada komponen pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada.
 - Penyusunan Definisi Operasional IKU dan IKI agar memenuhi unsur SMART;
 - Penerapan integrasi sistem pengelolaan kinerja (e-kinerja BKN) dan

- implementasinya dengan melibatkan seluruh level jabatan.
- d. Pada komponen pelaporan kinerja akan dilaksanakan pembangunan media *centre* yang berfungsi sebagai pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja perangkat daerah dan pelayanan publik serta publikasi laporan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
 - e. Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja akan dilaksanakan peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui penyusunan mitigasi resiko dan penerapannya oleh seluruh Perangkat Daerah bertujuan untuk meminimalisir kegagalan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.
 - f. Untuk mendukung peningkatan capaian seluruh kinerja dengan mendorong Pembangunan inovasi baru dan pemantauan keberlanjutan inovasi yang sudah ada, melibatkan seluruh *stakeholder* (ASN, pemerintah desa, perguruan tinggi, masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dll) dengan harapan mampu mengatasi permasalahan di masyarakat.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen penuh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan pelayanan prima serta mewujudkan tema pembangunan Tahun 2025 yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Potensial yang Didukung oleh Pemenuhan Infrastruktur Berkualitas, Merata dan Berwawasan Lingkungan.”***

A.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD. APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar Rp2.440.490.628.243,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp422.849.901.243,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.017.640.727.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar Rp2.510.467.061.816,29 (tercapai 102,86%) yang terdiri dari PAD sebesar Rp443.705.697.344,29 (tercapai 104,93%), Pendapatan Transfer sebesar Rp2.066.120.505.472,00 (tercapai 102,40%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp640.859.000,00.

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar Rp2.613.805.620.536,12 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.867.848.912.162,33, Belanja Modal sebesar Rp229.502.457.373,79, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.505.000.000,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp504.949.251.000,00.

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 sebesar Rp2.492.824.117.872,00 (tercapai 95,37%) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.786.817.147.586,00 (tercapai 95,66%), Belanja Modal sebesar Rp204.034.945.952,00 (tercapai 88,90%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.129.741.334,00 (tercapai 88,05%) dan Belanja Transfer sebesar Rp491.842.283.000,00 (tercapai 97,40%).

LRA Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	PENDAPATAN-LRA	2.440.490.628.243,00	2.510.467.061.816,29
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	422.849.901.243,00	443.705.697.344,29
3	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	147.888.731.000,00	159.992.935.526,20
4	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	252.398.961.152,00	260.624.542.220,98
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	6.866.387.067,00	6.948.415.848,34
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	15.695.822.024,00	16.139.803.748,77
7	PENDAPATAN TRANSFER	2.017.640.727.000,00	2.066.120.505.472,00
8	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.904.973.377.000,00	1.942.295.065.922,00
9	Dana Perimbangan	1.570.034.869.000,00	1.619.557.025.922,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
11	Dana Desa	327.771.213.000,00	315.570.745.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
12	Insentif Fiskal	7.167.295.000,00	7.167.295.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	112.667.350.000,00	123.825.439.550,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	101.791.546.000,00	112.999.635.550,00
14	Bantuan Keuangan	10.875.804.000,00	10.825.804.000,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	640.859.000,00
16	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	640.859.000,00
18	BELANJA	2.613.805.620.536,12	2.492.824.117.872,00
19	BELANJA OPERASI	1.867.848.912.162,33	1.786.817.147.586,00
20	Belanja Pegawai	1.109.750.844.671,51	1.086.155.532.740,00
21	Belanja Barang dan Jasa	652.456.975.990,82	597.129.232.773,00
22	Belanja Bunga	0,00	0,00
23	Belanja Subsidi	832.157.000,00	831.792.000,00
24	Belanja Hibah	89.071.934.900,00	87.054.332.773,00
25	Belanja Bantuan Sosial	15.736.999.600,00	15.646.257.300,00
27	BELANJA MODAL	229.502.457.373,79	204.034.945.952,00
28	Belanja Modal Tanah	2.395.445.941,00	735.000.000,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.227.280.425,41	93.105.679.455,00
30	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	80.003.860.994,38	74.337.108.591,00
31	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.627.354.772,00	24.779.019.625,00
32	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.848.947.241,00	8.788.868.081,00
33	Belanja Modal Aset Lainnya	3.399.586.000,00	2.289.270.200,00
34	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.505.000.000,00	10.129.741.334,00
35	Belanja Tidak Terduga	11.505.000.000,00	10.129.741.334,00
36	BELANJA TRANSFER	504.949.251.000,00	491.842.283.000,00
37	Belanja Bagi Hasil	18.425.665.000,00	18.425.655.000,00
38	Belanja Bantuan Keuangan	486.523.596.000,00	473.416.628.000,00
39	SURPLUS/(DEFISIT)	(173.314.992.293,12)	17.642.943.944,29
40	PEMBIAYAAN	173.314.992.293,12	173.371.603.908,12
41	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	173.314.992.293,12	173.371.603.908,12
42	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	173.314.992.293,12	173.314.992.567,28
43	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
44	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	56.611.340,84
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
47	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
48	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
49	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
50	PEMBIAYAAN NETTO	173.314.992.293,12	173.371.603.908,12
51	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	191.014.547.852,41

2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja Keuangan yang Ditetapkan

Untuk menjelaskan mengenai hambatan dan kendala atas pencapaian target kinerja pengelolaan keuangan dapat dijelaskan melalui pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan, baik dari sisi Pendapatan maupun dari sisi Belanja.

a. Penjelasan Terkait Target Pendapatan Daerah

Tabel 9 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 per Perangkat Daerah Keadaan sampai dengan 31 Desember 2025

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Kesehatan	224.679.774.529,00	235.821.727.005,91	11.141.952.476,91	104,96
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.371.500,00	225.846.900,00	15.475.400,00	107,36
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.444.750.000,00	3.884.829.292,00	1.440.079.292,00	158,90
4	Dinas Lingkungan Hidup	2.427.890.000,00	2.573.648.250,00	145.758.250,00	106,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
5	Dinas Perhubungan	5.918.164.000,00	7.001.669.000,00	1.083.505.000,00	118,31
6	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	8.653.514.000,00	5.937.763.714,00	(2.715.750.286,00)	68,62
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.800.000,00	138.700.000,00	2.900.000,00	102,14
8	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	6.718.070.900,00	4.332.913.043,00	(2.385.157.857,00)	64,50
9	Dinas Perikanan	447.525.500,00	363.980.500,00	(83.545.000,00)	81,33
10	Dinas Pertanian	1.766.824.950,00	1.512.753.425,00	(254.071.525,00)	85,62
11	Sekretariat Daerah	230.900.000,00	231.100.000,00	200.000,00	100,09
12	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2.186.735.796.064,00	2.248.204.539.086,38	61.468.743.022,38	102,81
13	Dinas Tenaga Kerja	121.246.800,00	237.591.600,00	116.344.800,00	195,96
Jumlah Pendapatan Daerah		2.440.490.628.243,00	2.510.467.061.816,29	69.976.433.573,29	102,87

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD 100% di masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Tidak tercapainya target 100% pendapatan PAD karena retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (18,35%) dibebankan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai *appraisal*.

2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Tidak tercapai target 100% pendapatan karena adanya rehab pemenuhan sarana dan prasarana yang belum selesai. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (55,58%) tidak tercapai karena berkurangnya jumlah wisatawan yang rekreasi dan perubahan iklim yang ekstrem menjadi pertimbangan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata alam. Kurangnya sarana dan prasarana di beberapa objek seperti Ronggojalu dan Bahak tanpa pagar sehingga pengunjung masuk tidak melalui pintu utama. Kunjungan keagamaan dan agenda-agenda adat yang bersamaan dengan hari libur berdampak pada perolehan tiket masuk.

3) Dinas Perikanan

Tidak tercapainya target pendapatan 100% karena cuaca panas ekstrim dan kondisi induk ikan yang sudah tidak produktif, banyak predator yang memangsa benih ikan serta benih juga didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan (76,53%) mengalami penurunan kunjungan kapal ditahun 2025 dengan jumlah 2.212 dibandingkan dengan Tahun 2024 sejumlah 2.951.

4) Dinas Pertanian

Tidak tercapai target realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan (73,24%) karena masih terdapat pemotongan hewan yang dilakukan diluar fasilitas RPH (Rumah Potong Hewan), tingkat pemotongan RPH sangat bergantung pada permintaan pasar serta kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang secara langsung mempengaruhi jumlah pemotongan hewan di RPH.

b. Penjelasan Terkait Target Belanja dan Transfer Daerah

**Tabel 10 Rekapitulasi Anggaran serta Realisasi Belanja Daerah
per Urusan Pemerintah Daerah (Dalam Rupiah)**

Kode Rek	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1.01	Pendidikan	804.138.911.521,00	796.852.034.227,00	(7.286.877.294,00)	99,09
1.02	Kesehatan	580.764.629.228,10	553.451.960.484,00	(27.312.668.744,10)	95,30
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	91.010.883.051,00	79.492.320.755,00	(11.518.562.296,00)	87,34
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17.588.203.287,00	15.525.296.840,00	(2.062.906.447,00)	88,27
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32.160.765.566,00	30.168.115.074,00	(1.992.650.492,00)	93,80
1.06	Sosial	32.010.757.188,00	30.267.703.019,00	(1.743.054.169,00)	94,55
2.01	Tenaga Kerja	18.002.200.598,00	15.564.037.824,00	(2.438.162.774,00)	86,46
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	763.957.030,00	715.842.345,00	(48.114.685,00)	93,70
2.03	Pangan	7.508.561.378,00	6.877.045.169,00	(631.516.209,00)	91,59
2.04	Pertanahan	163.598.752,00	71.854.459,00	(91.744.293,00)	43,92
2.05	Lingkungan Hidup	21.861.916.967,00	21.051.162.628,00	(810.754.339,00)	96,29
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	6.988.473.486,00	6.334.046.875,00	(654.426.611,00)	90,64
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.106.635.035,00	13.197.540.015,00	(1.909.095.020,00)	87,36
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.956.410.717,00	18.848.375.586,00	(1.108.035.131,00)	94,45
2.09	Perhubungan	36.556.597.104,00	34.837.959.396,00	(1.718.637.708,00)	95,30
2.10	Komunikasi dan Informatika	11.758.712.291,00	11.105.411.467,00	(653.300.824,00)	94,44
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.661.460.512,00	17.877.699.171,00	(783.761.341,00)	95,80
2.12	Penanaman Modal	7.150.147.140,00	6.748.501.663,00	(401.645.477,00)	94,38
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	13.520.841.646,00	13.126.328.950,00	(394.512.696,00)	97,08
2.14	Statistik	96.866.950,00	54.542.680,00	(42.324.270,00)	56,31
2.15	Persandian	7.080.000,00	5.862.500,00	(1.217.500,00)	82,80
2.16	Kebudayaan	1.610.000.000,00	1.529.691.141,00	(80.308.859,00)	95,01
2.17	Perpustakaan	5.308.045.883,00	4.738.725.890,00	(569.319.993,00)	89,27
2.18	Kearsipan	85.549.300,00	83.272.280,00	(2.277.020,00)	97,34
3.01	Kelautan dan Perikanan	7.512.583.820,00	7.029.245.715,00	(483.338.105,00)	93,57
3.02	Pariwisata	6.006.163.282,00	5.645.318.559,00	(360.844.723,00)	93,99
3.03	Pertanian	42.435.544.614,00	37.704.460.734,00	(4.731.083.880,00)	88,85
3.06	Perdagangan	2.449.904.960,00	1.928.552.487,00	(521.352.473,00)	78,72
3.07	Perindustrian	8.139.564.690,00	1.401.799.054,00	(6.737.765.636,00)	17,22
4.01	Administrasi Pemerintahan	60.031.045.238,00	56.716.290.475,00	(3.314.754.763,00)	94,48
4.02	Pengawasan	21.340.389.226,00	18.601.829.461,00	(2.738.559.765,00)	87,17
4.03	Perencanaan	9.497.847.488,00	8.539.693.118,00	(958.154.370,00)	89,91
4.04	Kuangan	550.602.928.690,02	529.703.132.408,00	(20.899.796.282,02)	96,20
4.05	Kepegawaian	9.901.937.111,00	9.164.049.159,00	(737.887.952,00)	92,55
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	1.716.215.491,00	1.260.351.390,00	(455.864.101,00)	73,44
4.07	Penelitian dan Pengembangan	520.200.000,00	482.106.081,00	(38.093.919,00)	92,68
4.08	Sekretariat DPRD	69.406.305.839,00	64.944.152.956,00	(4.462.152.883,00)	93,57
4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	73.176.536.972,00	63.649.242.166,00	(9.527.294.806,00)	86,98
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	8.287.248.485,00	7.528.563.671,00	(758.684.814,00)	90,85
Jumlah Belanja		2.613.805.620.536,12	2.492.824.117.872,00	(120.981.502.664,12)	95,37

Secara umum Belanja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Urusan dan Bidang Kewenangan persentasenya di bawah atau tidak mencapai 100,00% dari *plafond* anggaran yang disediakan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target Belanja pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan target yang disediakan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Adanya efisiensi anggaran dari belanja modal dan kegiatan lain yang telah dilaksanakan;
- 2) Adanya perubahan DED (*Detail Engineering Design*) pembangunan infrastuktur, berakibat pada perubahan jadwal proses pengadaan barang dan jasa serta waktu pelaksanaan pembangunannya terbatas.
- 3) Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper DPRD) atas rekomendasi KPK untuk tidak dilanjutkan. Menghasilkan SiLPA cukup besar diseluruh Perangkat Daerah karena baru melaksanakan separuh kegiatan Sosper.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo atau Perangkat Daerah lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan Perangkat Daerah dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan;
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo;
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan (konsolidasi) pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo terdapat 87 Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntansi.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan Basis Kas; dan
- b. Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca menggunakan Basis Akrua.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pendapatan
 - 1) Pendapatan diakui: (1) Pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); (2) Diterima oleh Bendahara Penerimaan; (3) Diterima Bendahara BLUD tanpa disetor ke RKUD; (4) Pendapatan Hibah atau lainnya telah diterima entitas penerima digunakan untuk mendanai kegiatan entitas tersebut, dan berkewajiban untuk melaporkan ke BUD; dan (5) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan;
 - 2) Pendapatan dicatat secara bruto; dan
 - 3) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis Pendapatan dalam LRA sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS) dan rincian lebih lanjut jenis Pendapatan disajikan dalam CaLK.
- b. Belanja
 - 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
 - 2) Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah;
 - 3) Belanja disajikan berdasarkan jenis Belanja dalam LRA dan rincian lebih lanjut jenis Belanja disajikan dalam CaLK. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD kecuali untuk SILPA;
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD;
 - 3) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dicatat berdasarkan asas bruto; dan

- 4) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis Pembiayaan dalam LRA dan rincian lebih lanjut jenis Pembiayaan disajikan dalam CaLK.
- d. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material pada LRA antara anggaran dan realisasinya diungkapkan dalam CaLK.
- e. Kas
 - 1) Kas Pemerintah Daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD yang meliputi:
 - a) Saldo rekening Kas Daerah (Kasda) yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - b) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan Deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c) Kas transitoris berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Langsung (LS) potongan pada BUD;
 - d) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - e) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - f) Kas di BLUD;
 - g) Kas di FKTP;
 - h) Kas di BOS;
 - i) Kas Lainnya;
 - j) Kas di Bendahara BOSP;
 - k) Kas di Bendahara BOK Puskesmas.
 - 2) Penerimaan kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan/RKUD dan pengeluaran kas diakui pada saat dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran/RKUD; dan
 - 3) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- f. Piutang
 - 1) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya;
 - 2) Piutang diakui sebesar nilai nominal dari Piutang;
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun;
 - 4) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yang jatuh tempo tahun berikutnya;
 - 5) Bagian Lancar TP/TGR dicatat sebesar nilai nominal yang akan diterima dalam waktu satu tahun;
 - 6) Piutang Pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang pembayarannya belum diterima/belum dilunasi oleh wajib pajak;
 - 7) Piutang Pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang pembayarannya belum diterima/belum dilunasi;
 - 8) Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan Piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar TP/TGR, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
 - 9) Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan umur Piutang;

- 10) Aset berupa Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *Net Realizable Value* (NRV), sehingga nilai Piutang harus disesuaikan dengan melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 11) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang didasarkan pada umur Piutang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan sebagai berikut.
- Piutang Lancar : ≤ 1 tahun dari tanggal jatuh tempo;
 - Piutang Kurang Lancar : $> 1 - 2$ tahun setelah tanggal jatuh tempo;
 - Piutang Diragukan : $> 2 - 3$ tahun setelah tanggal jatuh tempo; dan
 - Piutang Macet : > 3 tahun setelah tanggal jatuh tempo (kecuali untuk Piutang Pajak Daerah umur Piutang > 3 s/d 5 tahun dikategorikan ragu-ragu, umur Piutang > 5 tahun dikategorikan piutang macet).
- 12) Kebijakan penggolongan kualitas Piutang menurut jenis/objek Piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut.

Tabel 11 Kebijakan Penggolongan Kualitas Piutang Menurut Jenis/Objek Piutang, Umur dan Tingkat Kolektibilitas

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	Macet	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

- 13) Besarnya persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang didasarkan pada umur Piutang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 12 Besarnya Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang Didasarkan pada Umur Piutang

No	Uraian	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d 3	> 3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %
2	Piutang Retribusi	0 %	40 %	70 %	100 %	100 %
3	Bagian Laba BUMN/D	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
4	Biaya Dibayar di Muka	0 %	5 %	30 %	60 %	100 %
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi	0 %	20 %	40 %	70 %	100 %
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0 %	20 %	40 %	60 %	100 %
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %
12	Piutang Lain-Lain	0 %	10 %	30 %	60 %	100 %

- 14) Penyajian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada CaLK selama Piutang pokok masih tercantum atau belum dihapus;
- 15) Penyajian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di Neraca merupakan unsur pengurangan dari Piutang yang bersangkutan;
- 16) Pemberhentian pengakuan atas Piutang dapat dilakukan dengan cara.
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan Piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai NRV.

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut.

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan;
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan Piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut.

 - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara;
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik;
 - (3) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - d) Penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
 - e) Penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapustagihkan

Suatu piutang yang dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

- f) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan Utang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.
- 17) Pengungkapan piutang di CaLK harus menunjukkan posisi piutang pada tanggal Laporan Keuangan dan menunjukkan asal usul piutang.
- g. Persediaan
 - 1) Metode pencatatan Persediaan dilakukan dengan:
 - a) Metode Perpetual
Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.
 - b) Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat Persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
 - 2) Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka Laporan Keuangan (Neraca) tetapi diungkapkan dalam CaLK;
 - 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - 4) Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a) Persediaan Barang Pakai Habis;
 - b) Persediaan Bahan Material;
 - c) Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Persediaan Makanan dan Minuman;
 - e) Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - f) Persediaan Pakaian Kerja;
 - g) Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu; dan
 - h) Persediaan Barang Lainnya.
 - 5) Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam BAS.
- h. Investasi
 - 1) Dicatat sebesar biaya perolehan
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Dicatat sebesar nilai wajar
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat

berharga diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

- 3) Dicatat sebesar nilai nominal
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - 4) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya
Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 5) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a) Metode biaya jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20% pada BUMD;
 - b) Metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%;
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - 6) Pengakuan hasil investasi dicatat sebagai pendapatan investasi (termasuk kelompok Lain-Lain PAD yang Sah) apabila.
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*);
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya;
 - c) Pengakuan hasil investasi tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, apabila bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah apabila menggunakan metode ekuitas, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
- i. Aset Tetap
- 1) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - 2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya

- perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- 4) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 5) Kapitalisasi aset, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi;
 - 6) Tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan Tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - 7) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 - 8) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak;
 - 9) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 - 10) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 11) Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
 - 12) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui setiap terjadi pembayaran;
 - 13) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit dan harus diungkapkan dalam CaLK. Aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya;
 - 14) KDP
 - a) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut

selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasi ke dalam aset tetap;

- b) KDP diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang;
- c) Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa KDP.

15) Penyusutan

- a) Didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan;
- b) Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan;
- c) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam LO;
- d) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.

j. Properti Investasi

- 1) Didefinisikan sebagai menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk.
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi menyediakan barang atau jasa, untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 2) Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lainnya yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- 3) Properti investasi diakui aset jika.
 - a) Menerima manfaat yang akan datang atau risiko yang terkait di masa depan atas aset properti investasi;
 - b) Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.
- 4) Pengukuran properti investasi
 - a) Saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan. Apabila diperoleh dari transaksi non pertukaran maka dinilai dengan menggunakan nilai wajar saat perolehan.
 - b) Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur dengan metode biaya yaitu sebesar nilai perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Revaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi selektif dan pelaporan laporan keuangan yang berisi biaya dan nilai, namun revaluasi properti investasi dapat secara bertahap jika revaluasi diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap terbaru.
- 5) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan,
 - a) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;

- b) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti inventaris;
 - d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/direklasifikasi dari persediaan menjadi properti inventaris
- 6) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 7) Penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

k. Kewajiban

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan atau sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca;
- 3) Kewajiban kepada pihak ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal Neraca;
- 4) Kewajiban bunga adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah pada tanggal penyusunan Neraca;
- 5) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal Neraca;
- 6) Kewajiban dalam negeri perbankan adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca;
- 7) Kewajiban jangka panjang lainnya diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- 8) Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

l. Ekuitas

Diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah aktiva dikurangi dengan utang yang ada pada periode akuntansi yang bersangkutan.

m. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan akuntansi atas penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya; dan
- 2) Kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

a. Pedoman Kapitalisasi BMD

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut;
- 2) Pengeluaran belanja modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual harus dikapitalisasi;
- 3) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis BMD harus dilakukan kapitalisasi;
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas.
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintahan Daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi.
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki;
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk.
 - Pengadaan Tanah;
 - Pembelian/Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan;
 - Pembelian/Pembuatan Aset Tetap Lainnya.
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut.
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan;
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - c) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai;
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan

- pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan;
- g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi aset tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi aset tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan;
 - j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - k) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut siap digunakan;
 - l) Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut siap digunakan;
 - m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - n) Pembuatan/Pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan;
 - o) Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari.
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi Aset Tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
 - b) Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi Aset Tetap;

- c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut.
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk.
 - a) Pengadaan/Pembelian Tanah;
 - b) Pembelian/Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan;
 - c) Pengadaan/Pembelian/Pembuatan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.
- b. Pedoman Pencatatan BMD
 - 1) BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris;
 - 2) Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak;
 - 3) Barang persediaan merupakan aset lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain;
 - 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (*intracompatible*) dan pencatatan di luar pembukuan (*extracompatible*);
 - 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intracompatible*);
 - 6) BMD yang mempunyai nilai aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracompatible*).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

	Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
B.1	Daerah	2.440.490.628.243,00	2.510.467.061.816,29	102,87	2.451.836.697.993,34

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.440.490.628.243,00 dan terealisasi sebesar Rp2.510.467.061.816,29 atau 102,87%. Pendapatan Tahun 2025 naik 2,39% atau sebesar Rp58.630.363.822,95 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan kelompok rekening sebagai berikut.

**Tabel 13 Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	422.849.901.243,00	443.705.697.344,29	104,93	348.707.288.652,34
2	Pendapatan Transfer	2.017.640.727.000,00	2.066.120.505.472,00	102,40	2.101.934.396.441,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	640.859.000,00	-	1.195.012.900,00
Jumlah		2.440.490.628.243,00	2.510.467.061.816,29	102,87	2.451.836.697.993,34

Penjelasan secara terperinci untuk masing-masing kelompok rekening di atas sebagai berikut.

	Pendapatan Asli	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
B.1.1	Daerah	422.849.901.243,00	443.705.697.344,29	104,93	348.707.288.652,34

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp422.849.901.243,00 dan terealisasi sebesar Rp443.705.697.344,29 atau 104,93%. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 naik 27,24% atau sebesar Rp94.998.408.691,95 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian objek sebagai berikut.

**Tabel 14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	147.888.731.000,00	159.992.935.526,20	108,18	104.459.105.973,05
2	Retribusi Daerah	252.398.961.152,00	260.624.542.220,98	103,26	25.284.094.729,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.866.387.067,00	6.948.415.848,34	101,19	6.906.966.783,06
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.695.822.024,00	16.139.803.748,77	102,83	212.057.121.167,23
Jumlah		422.849.901.243,00	443.705.697.344,29	104,93	348.707.288.652,34

Pada tabel 14 di atas kenaikan yang signifikan terjadi pada Retribusi Daerah sebesar Rp235.340.447.491,98 atau 930,78%. Kenaikan Retribusi Daerah dikarenakan penyesuaian kodifikasi rekening Tahun 2025.

B.1.1.1 Pajak Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	147.888.731.000,00	159.992.935.526,20	108,18	104.459.105.973,05

Pajak Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp147.888.731.000,00 dan terealisasi sebesar Rp159.992.935.526,20 atau 108,18%. Pajak Daerah Tahun 2025 naik 53,16% atau sebesar Rp55.533.829.553,15 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 15 Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame	1.275.000.000,00	1.910.300.621,00	149,82	1.180.378.865,00
2	Pajak Air Tanah	975.000.000,00	1.006.650.901,30	103,24	1.182.152.368,60
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	2.985.737.389,60	157,14	7.619.395.981,75
4	PBB Perdesaan dan Perkotaan	22.500.000.000,00	23.484.775.183,00	104,37	22.232.504.264,00
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	20.000.000.000,00	16.986.393.667,00	84,93	18.110.289.075,00
6	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.800.000.000,00	9.908.367.159,30	145,71	9.278.019.569,70
7	PBJT-Tenaga Listrik	35.050.000.000,00	38.450.103.758,00	109,70	40.135.746.549,00
8	PBJT-Jasa Perhotelan	3.000.000.000,00	3.897.887.798,00	129,92	4.181.162.522,00
9	PBJT-Jasa Parkir	150.000.000,00	171.125.234,00	114,08	196.514.455,00
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	246.000.000,00	320.455.315,00	130,26	342.942.323,00
11	Opsen PKB	39.641.552.600,00	42.973.657.400,00	108,40	0,00
12	Opsen BBNKB	16.351.178.400,00	17.897.481.100,00	109,45	0,00
Jumlah		147.888.731.000,00	159.992.935.526,20	108,18	104.459.105.973,05

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Daerah periode Tahun 2025 secara persentase hampir semua objek Pajak Daerah melampaui target Tahun 2025 yang ditetapkan namun juga terdapat objek pajak yang tidak melampaui target yang ditetapkan. Berikut objek Pajak Daerah yang melampaui dan tidak melampaui target.

- Objek Pajak Daerah yang realisasinya melebihi target yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Bukan Logam dan Batuan, PBBP2, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Diantara objek pajak tersebut yang realisasinya tertinggi yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 157,14%.
- Objek Pajak Daerah yang realisasinya tidak memenuhi target yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan sebesar 84,53%. Hal ini dikarenakan perubahan jumlah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), target Tahun 2025 terlalu tinggi dibanding tahun sebelumnya, adanya kebijakan pengenaan pembebasan BPHTB rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta adanya indikasi nilai pengajuan tidak wajar dan tidak sesuai antara nilai yang diajukan dengan nilai riil transaksi.

Pajak Daerah terdiri dari dua kelompok yaitu Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau *Self Assessment* antara lain PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT-Jasa Parkir, PBJT-Tenaga Listrik dan BPHTB. Kelompok Pendapatan Pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau *Official Assessment* antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBBP2, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

B.1.1.2	Retribusi Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		252.398.961.152,00	260.624.542.220,98	103,26	25.284.094.729,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp252.398.961.152,00 dan terealisasi sebesar Rp260.624.542.220,98 atau 103,26%. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp235.340.447.491,98 atau 930,78% dari Tahun 2024 karena adanya penyesuaian kodefikasi rekening sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kenaikan terbesar adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp227.739.784.937,00 atau 6.606,29% yang terdiri atas pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur perubahan ketentuan atas jasa layanan BLUD dari rekening Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD. Ketentuan tersebut juga telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut rincian Retribusi Jasa Umum.

**Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	234.542.714.002,00	246.124.554.843,98	104,93	17.559.925.816,00
2	Retribusi Jasa Usaha	15.490.250.350,00	10.490.988.825,00	67,72	5.832.494.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.365.996.800,00	4.008.998.552,00	169,44	1.891.674.413,00
Jumlah		252.398.961.152,00	260.624.542.220,98	103,26	25.284.094.729,00

Retribusi Daerah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau bukti transaksi penerimaan pendapatan lainnya yang setara. Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat uang diterima pada RKUD.

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kelompok Retribusi Daerah di atas sebagai berikut.

(1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp234.542.714.002,00 dan terealisasi sebesar Rp246.124.554.843,98 atau 104,93%. Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 naik 1.301,63% atau sebesar Rp228.564.629.027,98 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	220.834.017.502,00	231.187.103.137,00	104,68	3.447.318.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	-	2.216.746.875,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.917.664.000,00	7.000.669.000,00	118,30	6.823.008.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.197.132.500,00	5.319.237.714,00	102,34	4.957.815.241,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	-	9.555.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	-	105.482.500,00
7	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.593.900.000,00	2.617.544.992,98	100,91	0,00
Jumlah		234.542.714.002,00	246.124.554.843,98	103,28	17.559.925.816,00

(2) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.490.250.350,00 dan terealisasi sebesar Rp10.490.988.825,00 atau 67,72%. Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 naik

79,87% atau sebesar Rp4.658.494.325,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	-	393.003.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	156.398.500,00	119.694.000,00	76,53	145.348.500,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	-	2.890.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	-	486.572.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	80.000.000,00	36.600.000,00	45,75	23.150.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	186.900.000,00	136.900.000,00	73,24	156.525.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.477.970.900,00	3.600.628.600,00	55,58	4.361.241.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	-	263.765.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	3.047.367.500,00	559.204.000,00	18,35	0,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	355.878.600,00	350.336.500,00	98,44	0,00
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.185.734.850,00	5.687.625.725,00	109,67	0,00
Jumlah		15.490.250.350,00	10.490.988.825,00	67,72	5.832.494.500,00

Berikut penjelasan dari rincian Retribusi Jasa Usaha.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2025 tidak ada realisasi karena terdapat kodefikasi rekening ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- Retribusi Tempat Pelelangan (76,53%) dikarenakan menurunnya kunjungan kapal di Tahun 2025 dengan jumlah 2.212 dibandingkan dengan Tahun 2024 sejumlah 2.951;
- Retribusi Terminal pada Tahun 2025 tidak ada realisasi karena objek Retribusi yaitu Terminal Jorong sudah tidak difungsikan;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun 2025 tidak ada realisasi karena terdapat kodefikasi rekening ke Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (45,75%) dikarenakan adanya rehab pemenuhan sarpras yang belum selesai;
- Retribusi Rumah Potong Hewan (73,24%) yang dikarenakan masih terdapat pemotongan hewan yang dilakukan diluar fasilitas RPH, tingkat pemotongan RPH sangat bergantung pada permintaan pasar serta kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang secara langsung mempengaruhi jumlah pemotongan hewan di RPH;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (55,58%) yang dikarenakan berkurangnya jumlah wisatawan yang rekreasi dan perubahan iklim yang ekstrem menjadi pertimbangan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata alam. Kurangnya sarpras di beberapa objek seperti Ronggojalu dan Bahak tanpa pagar sehingga pengunjung masuk tidak melalui pintu utama. Kunjungan keagamaan dan agenda-agenda adat yang bersamaan dengan hari libur berdampak pada perolehan tiket masuk;
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun 2025 tidak ada realisasi karena terdapat kodefikasi rekening ke Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (18,35%) dikarenakan target yang dibebankan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai *appraisal*;

- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan (90,18%) dikarenakan cuaca panas ekstrim dan kondisi induk ikan yang sudah tidak produktif, banyak predator yang memangsa benih ikan serta benih juga didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan;
- Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (50,60%) berupa laboratorium pengujian konstruksi tidak mencapai target disebabkan oleh penurunan volume permintaan jasa pengujian sebagai dampak berkurangnya kegiatan proyek konstruksi akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kinerja layanan laboratorium, mengingat layanan pengujian konstruksi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.365.996.800,00 dan terealisasi sebesar Rp4.008.998.552,00 atau 169,44%. Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 naik 111,93% atau sebesar Rp2.117.324.139,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.244.750.000,00	3.771.406.952,00	168,01	1.853.280.413,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	121.246.800,00	237.591.600,00	195,95	38.394.000,00
Jumlah		2.365.996.800,00	4.008.998.552,00	169,44	1.891.674.413,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
B.1.1.3		6.866.387.067,00	6.948.415.848,34	101,19	6.906.966.783,06

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp6.866.387.067,00 dan terealisasi sebesar Rp6.948.415.848,34 atau 101,19% yaitu berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD bagian Tahun 2024 yang diterimakan Tahun 2025. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 naik 0,60% atau sebesar Rp41.449.065,28 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	BPD Jatim	6.807.681.067,00	6.889.709.848,34	101,20	6.849.411.783,06
2	BPR Jatim	58.706.000,00	58.706.000,00	100,00	57.555.000,00
Jumlah		6.866.387.067,00	6.948.415.848,34	101,19	6.906.966.783,06

Pendapatan dividen atas kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPD Jatim Tahun Buku 2024, sesuai surat Nomor: 064/564/KRA/OPSDN/SRT tanggal 20 Juni 2025, dividen yang diterima sebesar Rp6.889.709.848,34 tanggal 19 Juni 2025. Pengumuman Laba BPD Jatim Dividen yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 adalah sebesar 64,12% dari laba bersih Tahun Buku 2024 atau sebesar Rp821.497.900.066,22 dan dibagikan 100% dalam bentuk *cash dividend*, dengan *dividend yield* 21,88%.

Pengumuman Dividen BPR Jatim yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 sebesar Rp58.706.000,00 dari 22.000 lembar saham yang dimiliki. Pembagian dividen tersebut sesuai dengan surat Nomor 0407/Pmr.Tre/2025 tanggal 8 Juli 2025.

B.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		15.695.822.024,00	16.139.803.748,77	102,83	212.057.121.167,23

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.695.822.024,00 dan terealisasi sebesar Rp16.139.803.748,77 atau 102,83%. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 turun (92,39%) atau sebesar (Rp195.917.317.418,46) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.500.000,00	12.100.000,00	484,00	1.440.136.500,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	-	39.097.000,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	785.114.000,00	1.088.849.543,00	138,68	2.119.250.516,00
4	Jasa Giro	2.878.185.181,00	1.013.902.803,08	35,22	1.330.200.665,04
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
6	Pendapatan Bunga	5.522.628.492,00	3.615.068.492,76	65,45	4.608.794.619,66
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.826.774.904,74	-	753.130.353,96
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	177.665.848,02	-	232.806.598,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	138.941.181,96	-	220.465.966,23
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	89.475.398,00	-	170.380.954,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	6.420.750,00	160,51	4.780.400,00
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	-	186.210.772,00
13	Pendapatan dari Pengembalian	5.939.137.324,00	6.534.141.958,30	110,02	751.714.940,00
14	Pendapatan BLUD	510.757.027,00	635.652.868,91	124,45	200.192.951.882,34
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	52.500.000,00	810.000,00	1,54	0,00
Jumlah		15.695.822.024,00	16.139.803.748,77	102,83	212.057.121.167,23

Penjelasan Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp16.139.803.748,77 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.100.000,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan turun (99,16%) atau sebesar (Rp1.428.036.500,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	9.550.000,00	-	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.550.000,00	102,00	2.520.000,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	-	1.437.616.500,00
Jumlah		2.500.000,00	12.100.000,00	484,00	1.440.136.500,00

Penjelasan dari masing-masing rincian adalah sebagai berikut.

- (a) Realisasi Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.550.000,00 berupa penjualan bongkaran triplek aula Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp50.000,00 dan berupa penjualan sisa bongkaran Dinas Perikanan di Jalan Dr Moh Saleh Kota Probolinggo sebesar Rp9.500.000,00 berdasarkan dokumen *Appraisal* Nomor 00837/2.004-01/PI/07/0378/1/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
- (b) Realisasi Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya berupa Hasil Penjualan Tanaman sebesar Rp2.550.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp785.114.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.088.849.543,00. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan turun (48,62%) atau sebesar (Rp1.030.400.973,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	784.614.000,00	547.495.600,00	69,77	2.107.490.516,00
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	500.000,00	541.353.943,00	108.270,78	11.760.000,00
Jumlah		785.114.000,00	1.088.849.543,00	138,68	2.119.250.516,00

Penjelasan dari masing-masing rincian adalah sebagai berikut.

- (a) Realisasi Hasil Sewa BMD sebesar Rp547.495.600,00 berasal dari.

- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp29.680.000,00, terdiri dari.

- Sewa tanah Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakon, Kabupaten Probolinggo dengan luas tanah 4.000 m² yang disewakan selama 30 hari dengan Perjanjian Sewa Nomor 00025/95/426.416/2025 tanggal 11 April 2025 sebesar Rp3.200.000,00;
- Sewa tanah di halaman Kantor Kecamatan Sukapura, Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan luas tanah 15 m² disewakan selama 1 tahun dengan Perjanjian Sewa Nomor 000/232/369/426.203/2025 dan Nomor 064/001/UM-AKT/PROB/PKS tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp15.000.000,00;
- Sewa tanah di Jalan Raya Besuk Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dengan luas tanah 35 m² yang disewakan selama 5 tahun dengan Perjanjian Sewa Nomor 00027/700/426.413 /2025 tanggal 1 September 2025 sebesar Rp5.000.000,00, serta
- Sewa tanah di Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakon, Kabupaten Probolinggo dengan luas tanah 3.000 m² yang disewakan selama 30 hari dengan Perjanjian Sewa Nomor 900/473/426.203/2025 tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp6.480.000,00;

- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp85.567.500,00 terdiri dari.

- Sewa Stadion Gelora Merdeka sebesar Rp20.280.000,00 dengan Perjanjian Sewa Nomor 027/35.1/426.117/2025 tanggal 17 Januari 2025;

- Sewa Stadion Gelora Merdeka sebesar Rp1.600.000,00 dengan Perjanjian Sewa Nomor 027/01/426.117/2025 tanggal 15 Juli 2025;
 - Sewa Stadion Gelora Merdeka sebesar Rp8.000.000,00 dengan Perjanjian Sewa Nomor 027/646.1/426.117/2025 tanggal 27 Oktober 2025; dan
 - Sewa Tanah dan Bangunan Multifungsi yang berlokasi di Terminal Wisata Seruni Point sebesar Rp55.687.500,00 dengan Perjanjian Sewa Nomor 500.13/662.3/426.117/2025 tanggal 7 November 2025.
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp118.000.000,00 berupa Sewa Bedak Rest Area Tongas sebesar Rp108.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 510/5106/426.110/2022 tanggal 1 November Tahun 2022 dan Sewa RM Sholeh sebesar Rp10.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 181/13/426.12/2008 tanggal 28 April 2008;
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.341.100,00 terdiri dari.
- Sewa Lahan Pertanian JLU sebesar Rp426.300,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 611/013/SP-JLU/426.112/2025 tanggal 1 September 2025;
 - Sewa Lahan Pertanian JLU sebesar Rp436.800,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 611/012/SP-JLU/426.112/2025 tanggal 1 September 2025;
 - Sewa Lahan Pertanian JLU sebesar Rp991.200,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 611/011/SP-JLU/426.112/2025 tanggal 1 September 2025 dan
 - Sewa Lahan Pertanian JLU sebesar Rp1.486.800,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 611/016/SP-JLU/426.112/2025 tanggal 20 Oktober 2025.
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12.807.000,00 berupa sewa halaman Stadion Gelora Merdeka Kraksaan sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 900/840/426.111/2025 tanggal 18 Desember 2025;
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp138.700.000,00 terdiri dari.
- Sewa *foodcourt* sebesar Rp20.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 0.2.3.2/1/426.116/2025 tanggal 2 Januari 2025;
 - Sewa kantor *payment point* dan ATM BPD Jatim sebesar Rp56.800.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 0.2.3.2/4/426.116/2025 tanggal 2 Januari 2026;
 - Sewa pengelolaan lahan parkir sebesar Rp59.900.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 000.2.3.2/3/426.116/2025 tanggal 2 Januari 2025, dan
 - Sewa *stand fotocopy* sebesar Rp2.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 000.2.3.2/2/426.116.2025 tanggal 2 Januari 2025.
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Perikanan berupa hasil sewa tambak sebesar Rp40.000.000,00 rincian terdapat pada **Lampiran 1**;
- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Sekretariat Daerah sebesar Rp89.400.000,00 terdiri dari.
- Sewa Kantor Kasda BPD Jatim sebesar Rp45.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/003/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025;
 - Sewa ATM BPD Jatim sebesar Rp 30.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/002/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025;

- Sewa Kantin Kantor Bupati oleh Neni Apriyani sebesar Rp3.600.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/020/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Sewa Kantin Kantor Bupati oleh Maisaroh Triwuri sebesar Rp3.600.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/021/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Sewa Kantin Kantor Bupati oleh Aufin Rochmatin sebesar Rp3.600.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/022/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Sewa Kantin Kantor Bupati oleh Nuriyati sebesar Rp3.600.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 028/023/426.51/2025 tanggal 2 Januari 2025.

- Realisasi Hasil Sewa BMD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp30.000.000,00 terdiri dari.

- Sewa gedung Koperasi Karya Wira Husada sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 100.3.7.1/003.1/426.102/2025 tanggal 2 Januari 2025;
- Sewa Rumah Dinas di Jl KH Hasyim Asri, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sebesar Rp15.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Sewa Nomor 500.17.1/578/426.102/2025 tanggal 10 Februari 2025.

(b) Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp541.356.443,00 terdiri dari.

- Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp66.625.000,00 berupa angsuran ke dua hasil kerjasama pemanfaatan BMD atas rumah dinas di Jalan M. Saleh Nomor 43 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 22 Maret 2024;
- Dinas Perhubungan sebesar Rp1.000.000,00 berupa kerjasama sewa lahan parkir sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/215/426.107/2025 tanggal 11 Desember 2025;
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp473.731.443,00 berupa kerjasama sewa lahan parkir sebesar Rp11.500.000,00 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 500.13/67.1/426.117/2025 tanggal 1 Februari 2025, kontribusi tetap pengelolaan Pantai Bentar sebesar Rp425.375.000,00 dengan pembagian laba sebesar Rp36.806.443,00 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 1 tanggal 20 Maret 2024.

(3) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.878.185.181,00 dan terealisasi sebesar Rp1.013.902.803,08 atau 35,22%. Penerimaan Jasa Giro turun (23,78%) atau sebesar (Rp316.297.861,96) dibandingkan dengan Tahun 2024. Penerimaan Jasa Giro meliputi Jasa Giro Kas Daerah, Jasa Giro Pemegang Kas di Bendahara dan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS.

**Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.771.984.423,00	866.035.362,06	31,24	1.197.375.374,30
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	86.389.404,00	147.179.084,05	170,36	131.605.175,51
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	19.811.354,00	0,00	-	0,00
4	Jasa Giro Pada Rekening Dana BOS	0,00	688.356,97	-	1.220.115,23
Jumlah		2.878.185.181,00	1.013.902.803,08	35,22	1.330.200.665,04

(4) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 yang merupakan Realisasi bunga atas Kredit Modal Usaha Ternak yang diberikan Dinas Pertanian.

(5) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.522.628.492,00 dan terealisasi sebesar Rp3.615.068.492,76 atau 65,45%. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah turun (21,56%) atau sebesar (Rp993.726.126,90) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Bunga Deposito	5.522.628.492,00	3.615.068.492,76	65,45	4.401.369.862,66
2	TDF Remunerasi	0,00	0,00	-	207.424.757,00
Jumlah		5.522.628.492,00	3.615.068.492,76	65,45	4.608.794.619,66

Berikut ini merupakan tabel perhitungan Bunga Deposito atas penempatan Deposito selama Tahun 2025.

Tabel 26 Perhitungan Bunga Deposito Tahun 2025

No	Bulan	Tanggal Penempatan	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Penempatan	% Bunga	Jumlah Hari dalam Satu Bulan	Jumlah Hari dalam Satu Tahun	Bunga Deposito	Penerimaan Bunga Deposito
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (5*6*7)/8	10
1	Januari	22/01/2025		100.000.000.000,00	3,50%	0	365	-	-
2	Februari		22/02/2025		3,50%	31	365	297.260.273,97	297.260.273,94
3	Februari		24/02/2025	100.000.000.000,00	3,50%	2	365	19.178.082,19	19.178.082,15
4	Februari	24/02/2025		100.000.000.000,00	4,25%	0	365	-	-
5	Maret		24/03/2025	100.000.000.000,00	4,25%	28	365	326.027.397,26	326.027.397,24
6	April		24/04/2025	100.000.000.000,00	4,25%	31	365	360.958.904,11	360.958.904,10
7	Mei		24/05/2025	100.000.000.000,00	4,25%	30	365	349.315.068,49	349.315.068,45
8	Juni		24/06/2025	100.000.000.000,00	4,25%	31	365	360.958.904,11	360.958.904,10
9	Juni	25/06/2025		100.000.000.000,00	4,00%	0	365	-	-
10	Juli		24/07/2025	100.000.000.000,00	4,00%	30	365	328.767.123,29	328.767.123,25
11	Agustus		24/08/2025	100.000.000.000,00	4,00%	31	365	339.726.027,40	339.726.027,35
12	September		24/09/2025	100.000.000.000,00	4,00%	31	365	339.726.027,40	339.726.027,35
13	September	24/09/2025		100.000.000.000,00	3,75%	0	365	-	-
14	Oktober		24/10/2025	100.000.000.000,00	3,75%	30	365	308.219.178,08	308.219.178,05
15	Oktober	24/10/2025		100.000.000.000,00	3,50%	0	365	-	-
16	November		24/11/2025	100.000.000.000,00	3,50%	31	365	297.260.273,97	297.260.273,94
17	Desember		24/12/2025	100.000.000.000,00	3,50%	30	365	287.671.232,88	287.671.232,84
Jumlah								3.615.068.493,15	3.615.068.492,76

Pada tabel terdapat selisih sebesar Rp0,39 antara nilai Perhitungan Bunga Deposito dengan Bunga Deposito yang telah diterima dikarenakan pembulatan angka di belakang koma.

(6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara Tahun 2025 sebesar Rp2.826.774.904,74. Rincian penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada **Lampiran 3**.

(7) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Tahun 2025 sebesar Rp177.665.848,02 berasal dari.

- Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp177.663.501,00 dengan rincian berikut.
 - Penerimaan PBBP2 diatas Tahun 2012 sebesar Rp82.742.052,00;
 - Kelebihan Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Alat Instrumen Kultur oleh PT Dimensi Citra Semesta pada RSUD Waluyojati Kabupaten Probolinggo sebesar Rp9.600,00;
 - Kelebihan Pengembalian Temuan Inspektorat atas kelebihan Pembayaran Tunjangan Suami a.n Khusnul Hotimah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebesar Rp240,00;
 - Kelebihan Pengembalian Temuan Inspektorat atas kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai a.n Iis Ekowati pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo sebesar Rp40,00;
 - Penerimaan Iklan Radio Bulan Desember 2024 dari UPT PPD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.380.000,00;
 - Pengembalian atas Subsidi Pembelian Mobil Kepala Dinas Perkim Kabupaten Probolinggo sebesar Rp10.700.000,00;
 - Pengembalian atas Subsidi Pembelian Mobil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo sebesar Rp10.700.000,00;
 - Pengembalian PPNBM Mobil Zenix Ren Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp27.000.000,00, dan
 - Penerimaan RKUD yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp45.131.569,00.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.347,02 merupakan pengembalian potongan *gris*.

(8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 sebesar Rp138.941.181,96.

(9) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp89.475.398,00 merupakan Pendapatan Denda PBBP2.

(10) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum berupa Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.420.750,00 atau 160,52%.

(11) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp6.534.141.958,30 terdiri dari.

- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp518.666.848,00;

- b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp3.691.286,00;
- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp65.620.196,00;
- d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp6.649.724,00;
- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp68.000,00;
- f. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp308.580,00;
- g. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5.939.137.324,30.

(12) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp510.757.027,00 dengan realisasi sebesar Rp635.652.868,91 atau 124,45%. Pendapatan BLUD Tahun 2025 turun (99,68%) atau sebesar (Rp199.577.299.013,43) dibandingkan dengan Tahun 2024 karena adanya penyesuaian kodifikasi Pendapatan dari Jasa Pelayanan Kesehatan dari rekening Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Puskesmas Bago	2.345.000,00	940.457,01	40,10	1.549.253.825,19
2	Puskesmas Bantaran	3.210.000,00	2.340.589,29	72,92	3.050.665.423,68
3	Puskesmas Banyuwang	2.500.000,00	702.721,78	28,11	1.970.471.616,46
4	Puskesmas Besuk	7.700.000,00	9.624.372,01	24,99	1.927.702.706,29
5	Puskesmas Condong	2.910.000,00	5.288.967,17	181,75	1.964.042.241,68
6	Puskesmas Curah Tulis	571.000,00	720.630,30	126,20	1.824.377.435,62
7	Puskesmas Dringu	2.268.000,00	919.380,67	40,54	2.057.999.448,02
8	Puskesmas Gending	7.040.000,00	6.135.034,51	87,15	3.589.779.680,49
9	Puskesmas Glagah	1.140.000,00	744.459,90	65,30	1.434.595.089,11
10	Puskesmas Jabungsir	2.550.000,00	4.917.524,34	192,84	1.493.089.643,74
11	Puskesmas Jorongan	1.000.000,00	775.544,98	77,55	897.521.765,12
12	Puskesmas Klenang Kidul	2.000.000,00	2.889.753,35	144,49	1.634.912.180,79
13	Puskesmas Kotaanyar	12.398.887,00	13.223.141,51	06,65	2.775.224.873,97
14	Puskesmas Kraksaan	6.800.000,00	12.471.281,25	183,40	2.977.512.273,13
15	Puskesmas Krejengan	9.000.000,00	11.967.986,36	132,98	2.650.409.218,58
16	Puskesmas Krucil	6.000.000,00	7.720.210,42	128,67	4.270.609.026,66
17	Puskesmas Kuripan	2.000.000,00	2.860.470,32	43,02	1.930.266.413,32
18	Puskesmas Leces	3.672.750,00	4.382.226,07	19,32	3.160.246.967,61
19	Puskesmas Lumbang	3.777.035,00	3.136.779,69	83,05	2.080.694.405,38
20	Puskesmas Maron	34.500.000,00	36.750.043,44	106,52	4.606.893.915,30
21	Puskesmas Paiton	5.000.000,00	2.589.353,73	51,79	2.592.261.141,51
22	Puskesmas Pajarakan	2.363.725,00	3.288.754,98	139,13	2.829.231.946,14
23	Puskesmas Pakuniran	4.231.170,00	4.893.254,55	15,65	1.921.424.076,94

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
24	Puskesmas Ranugedang	2.085.000,00	837.888,33	40,19	2.555.031.823,35
25	Puskesmas Sukapura	1.230.000,00	1.803.331,65	146,61	1.305.338.404,20
26	Puskesmas Suko	410.000,00	446.046,36	108,79	889.946.414,03
27	Puskesmas Sumber	879.863,00	872.394,74	99,15	1.813.735.387,84
28	Puskesmas Sumberasih	6.700.000,00	8.109.858,73	121,04	3.921.576.653,61
29	Puskesmas Tegalsiwalan	3.600.000,00	4.990.658,01	38,63	2.347.770.476,36
30	Puskesmas Tiris	3.003.396,00	4.382.422,79	45,92	2.740.839.928,32
31	Puskesmas Tongas	800.000,00	1.174.015,42	146,75	2.370.089.233,66
32	Puskesmas Wangkal	8.000.000,00	11.919.853,55	49,00	3.278.843.995,67
33	Puskesmas Wonomerto	7.450.000,00	6.115.488,75	82,09	2.639.950.035,14
34	RSUD Tongas	208.500.000,00	161.272.284,55	77,35	17.246.275.670,68
35	RSUD Waluyoaji	143.121.201,00	294.445.688,40	205,73	103.894.368.544,75
Jumlah		510.757.027,00	635.652.868,91	124,45	200.192.951.882,34

Pelaksanaan Anggaran DPA-BLUD telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

B.1.2	Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Transfer	2.017.640.727.000,00	2.066.120.505.472,00	102,40	2.101.934.396.441,00

Pendapatan Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.017.640.727.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.066.120.505.472,00 atau 102,40%. Pendapatan Transfer Tahun 2025 turun (1,70%) atau sebesar (Rp35.813.890.969,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.570.034.869.000,00	1.619.557.025.922,00	103,15	1.562.539.188.585,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	334.938.508.000,00	322.738.040.000,00	96,35	353.125.187.000,00
3	Pendapatan Transfer antar Daerah	112.667.350.000,00	123.825.439.550,00	109,90	186.270.020.856,00
Jumlah		2.017.640.727.000,00	2.066.120.505.472,00	102,40	2.101.934.396.441,00

Rincian dan uraian atas Pendapatan Transfer sebagai berikut.

	Pendapatan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
B.1.2.1	Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.570.034.869.000,00	1.619.557.025.922,00	103,15	1.562.539.188.585,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.570.034.869.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.619.557.025.922,00 atau 103,15%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 naik 3,65% atau sebesar Rp57.017.837.337,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

B.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		132.834.272.000,00	135.267.028.300,00	101,83	119.522.271.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp132.834.272.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.267.028.300,00 atau 101,83%. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 naik 13,17% atau sebesar Rp15.744.757.300,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DBH PBB	6.518.749.000,00	6.907.797.100,00	105,96	5.951.195.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	23.532.721.000,00	22.833.313.900,00	97,02	19.826.605.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	1.924.077.000,00	1.913.580.300,00	99,45	1.391.391.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	100.858.725.000,00	103.612.337.000,00	102,73	92.353.080.000,00
Jumlah		132.834.272.000,00	135.267.028.300,00	101,83	119.522.271.000,00

B.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		30.694.042.000,00	33.500.186.000,00	109,14	42.161.966.000,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp30.694.042.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.500.186.000,00 atau 109,14%. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun 2025 turun (20,54%) atau sebesar (Rp8.661.780.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	24.629.565.000,00	25.992.327.000,00	105,53	33.723.604.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.867.329.000,00	3.965.499.000,00	138,29	5.605.882.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	41.707.000,00	45.053.000,00	108,02	59.145.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.351.000,00	2.302.000,00	170,39	7.729.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.578.910.000,00	1.899.797.000,00	120,32	941.035.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	450.398.000,00	470.426.000,00	104,44	344.541.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.124.782.000,00	1.124.782.000,00	100,00	1.480.030.000,00
Jumlah		30.694.042.000,00	33.500.186.000,00	109,14	42.161.966.000,00

B.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		1.035.500.515.000,00	1.075.371.349.176,00	103,85	1.043.467.100.603,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.035.500.515.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.075.371.349.176,00 atau 103,85%. DAU Tahun 2025 naik 3,06% atau sebesar Rp31.904.248.573,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAU	888.928.761.000,00	928.805.549.650,00	104,48	840.275.799.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	998.949.000,00	992.994.526,00	99,40	28.960.181.603,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	68.297.703.000,00	68.297.703.000,00	100,00	67.278.892.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	76.275.102.000,00	76.275.102.000,00	100,00	88.752.363.000,00

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	-	17.199.865.000,00
Jumlah		1.035.500.515.000,00	1.075.371.349.176,00	103,85	1.043.467.100.603,00

B.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		10.398.711.000,00	10.171.016.405,00	97,81	61.416.967.828,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.398.711.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.171.016.405,00 atau 97,81%. DAK Fisik Tahun 2025 turun (83,44%) atau sebesar (Rp51.245.951.423,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 32 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	-	2.801.879.231,00
2	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	-	3.988.987.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	-	4.629.238.579,00
4	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	-	6.675.086.820,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.217.670.000,00	1.190.031.618,00	97,73	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	312.054.000,00	307.659.156,00	98,59	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	207.928.000,00	199.814.199,00	96,09	2.537.585.756,00
8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	262.831.000,00	249.070.000,00	94,76	2.121.146.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	8.398.228.000,00	8.224.441.432,00	97,93	11.185.587.070,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	0,00	-	8.902.888.372,00
11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	-	7.576.039.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	-	10.998.530.000,00
Jumlah		10.398.711.000,00	10.171.016.405,00	97,81	61.416.967.828,00

Daftar Bidang DAK Fisik 2024 yang tidak dialokasikan lagi di Tahun 2025 sesuai rincian Alokasi DAK Fisik 2025.

Tabel 33 DAK Fisik 2024 yang Tidak Dialokasikan lagi di Tahun 2025

No	Jenis/Bidang/Sub Bidang
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
2	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
3	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
4	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
6	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM
7	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM

B.1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		360.607.329.000,00	365.247.446.041,00	101,28	295.970.883.154,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp360.607.329.000,00 dan terealisasi sebesar Rp365.247.446.041,00 atau 101,28%. DAK Non Fisik Tahun 2025 naik 23,41% atau sebesar Rp69.276.562.887,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	-	100.382.364.005,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	-	3.480.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	185.943.522.000,00	197.312.787.500,00	106,11	136.877.605.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	830.135.000,00	741.000.000,00	89,26	5.688.000.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	-	19.323.306.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5.492.600.000,00	5.485.725.000,00	99,87	5.680.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	19.006.702.000,00	17.828.008.016,00	93,79	11.864.314.367,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	474.839.000,00	474.839.000,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12.119.605.000,00	11.262.467.125,00	92,92	10.827.281.532,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	11.432.846.000,00	7.479.985.562,00	65,42	0,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	97.990.320.000,00	97.865.174.738,00	99,87	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	17.772.000.000,00	17.563.793.500,00	98,82	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	-	1.847.312.250,00
17	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	4.526.400.000,00	4.215.305.600,00	93,13	0,00
19	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	483.360.000,00	483.360.000,00	100,00	0,00
Jumlah		360.607.329.000,00	365.247.446.041,00	101,28	295.970.883.154,00

B.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		334.938.508.000,00	322.738.040.000,00	96,35	353.125.187.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp334.938.508.000,00 dan terealisasi sebesar Rp322.738.040.000,00 atau 96,35%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2025 turun (8,61%) atau sebesar (Rp30.387.147.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

B.1.2.2.1	Dana Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		327.771.213.000,00	315.570.745.000,00	96,27	347.071.330.000,00

Pendapatan Dana Desa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp327.771.213.000,00 dan terealisasi sebesar Rp315.570.745.000,00 atau 96,27%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dana Desa Tahun 2025 turun (9,08%) atau sebesar (Rp11.500.585.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.1.2.2.2	Insentif Fiskal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		7.167.295.000,00	7.167.295.000,00	100,00	6.053.857.000,00

Insentif Fiskal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp7.167.295.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.167.295.000,00 atau 100,00% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Insentif Fiskal Tahun 2025 naik 18,39% atau sebesar Rp1.113.438.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		112.667.350.000,00	123.825.439.550,00	109,90	186.270.020.856,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp112.667.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp123.825.439.550,00 atau 109,90%. Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 turun (33,52%) atau sebesar (Rp62.444.581.306,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

B.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		101.791.546.000,00	112.999.635.550,00	111,01	163.546.795.856,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp101.791.546.000,00 dan terealisasi sebesar Rp112.999.635.550,00 atau 111,01%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 turun (30,91%) atau sebesar (Rp50.547.160.306,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 karena terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah. Berikut rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025.

Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	282.000.000,00	4.465.125.900,00	1.583,37	42.832.835.800,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	113.000.000,00	2.174.420.400,00	1.924,26	21.565.286.300,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.299.000.000,00	42.947.673.600,00	106,57	43.914.359.000,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	422.000.000,00	527.909.750,00	125,09	470.147.600,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.675.546.000,00	62.884.505.900,00	103,64	54.764.167.156,00
Jumlah		101.791.546.000,00	112.999.635.550,00	111,01	163.546.795.856,00

B.1.2.3.2	Bantuan Keuangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		10.875.804.000,00	10.825.804.000,00	99,54	22.723.225.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp10.805.804.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/176/KPTS/013/2025 Tanggal 10 Maret Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/KPTS/013/2025 Tanggal 3 Februari 2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Jawa Timur

Nomor 100.3.3.1/99/KPTS/013/2025 tanggal 14 Pebruari 2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/KPTS/013/2025 Tanggal 25 Juni 2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa atau Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Tahun Anggaran 2025. Bantuan Keuangan Tahun 2025 turun (52,36%) atau sebesar (Rp11.897.421.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumil Risti sebesar Rp119.477.000,00;
2. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Bunda Anak Impian (BUAIAN) Pendampingan Bumil KEK dalam Pencegahan Stunting sebesar Rp119.477.000,00;
3. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) sebesar Rp76.000.000,00;
4. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Pendidikan Kesetaraan Vokasi (Kejar Paket) sebesar Rp454.500.000,00;
5. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS sebesar Rp602.400.000,00;
6. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP sebesar Rp84.000.000,00;
7. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebesar Rp6.796.200.000,00;
8. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Atau Bantuan Keuangan Perangkat Desa Indonesia sebesar Rp2.453.750.000,00;
9. Bantuan keuangan khusus dari provinsi Biaya Operasional Pemerintah Kabupaten Dalam Rangka Program Jatim Puspa, BUMDesa dan Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur sebesar Rp120.000.000,00.

B.1.3	Lain-Lain Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Daerah yang Sah	0,00	640.859.000,00	-	1.195.012.900,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp640.859.000,00 dimana naik 147,42% atau sebesar Rp381.846.100,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

B.1.3.1	Pendapatan Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	0,00	-	936.000.000,00

Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

B.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	640.859.000,00	-	259.012.900,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp640.859.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 36 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025**

No	Nama Lembaga	Alamat	Nominal (Rp)	Keterangan
1	TP Mutiara	Kecamatan Leces	5.700.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena keterbatasan tenaga administrasi.
2	TP Permata Hati	Kecamatan Tongas	375.000,00	Pengembalian SILPA dana BOP PAUD Tahap ke II Tahun 2024 dan tidak dipergunakan lagi.
3	TP Permata Hati	Kecamatan Tongas	2.700.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena tidak mempunyai laptop dan pengelola masih baru.
4	TP Melati Dungun	Kecamatan Tongas	7.800.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu (mandiri untuk membiayai Lembaga).
5	KB Sunan Ampel	Kecamatan Tongas	3.300.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu (mandiri untuk membiayai Lembaga).
6	TP Mangga Ceria	Kecamatan Tongas	5.100.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu (mandiri untuk membiayai Lembaga).
7	TP Klumpit Ceria	Kecamatan Tongas	6.600.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu (mandiri untuk membiayai Lembaga).
8	TP Melati 1	Kecamatan Tongas	5.400.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu (mandiri untuk membiayai Lembaga).
9	KB Al Iman	Kecamatan Leces	3.300.000,00	Lembaga mengembalikan dana BOP PAUD karena Kepala Sekolah lama yang di DAPODIK meninggal dunia dan Kepala sekolah yang baru belum masuk di DAPODIK.
10	PKBM Amanah	Kecamatan Wonomerto	484.000,00	Pengembalian dana BOP Kesetaraan Thn 2022 karena Lembaga sudah tidak aktif / tutup (Silpa BOP Kesetaraan 2022).
11	TK Sirojul Ibad	Kecamatan Besuk	900.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah tidak aktif ada.
12	PKBM Iqro	Kecamatan Tongas	45.000.000,00	Pengembalian dana BOP Kesetaraan karena Lembaga menolak BOP Kinerja.
13	KB Anak Bangsa	Kecamatan Sumberasih	11.100.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena Lembaga sudah mampu pembiayaan mandiri.
14	PKBM Iqro	Kecamatan Tongas	542.500.000,00	Pengembalian dana BOP Kesetaraan karena Lembaga menolak BOP Reguler
15	TK Al Hasanain	Kecamatan Tiris	600.000,00	Pengembalian dana BOP PAUD karena lembaga menolak.
Jumlah			640.859.000,00	

Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp640.859.000,00 merupakan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik (BOS Reguler, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan) yang dikembalikan oleh lembaga karena lembaga tutup, menolak dan SILPA yang tidak digunakan kembali di tahun berikutnya.

B.2 Belanja dan Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	2.613.805.620.536,12	2.492.824.117.872,00	95,37	2.570.938.839.627,99

Belanja dan Transfer adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang berkenaan. Belanja dan Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.613.805.620.536,12 dan terealisasi sebesar Rp2.492.824.117.872,00 atau 95,37%. Belanja dan Transfer Tahun 2025 turun (3,04%) atau sebesar (Rp78.114.721.755,99) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian berikut.

**Tabel 37 Rincian Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.867.848.912.162,33	1.786.817.147.586,00	95,66	1.768.005.833.840,99
2	Belanja Modal	229.502.457.373,79	204.034.945.952,00	88,90	270.139.109.894,00
3	Belanja Tidak Terduga	11.505.000.000,00	10.129.741.334,00	88,04	2.081.957.893,00
4	Belanja Transfer	504.949.251.000,00	491.842.283.000,00	97,40	530.711.938.000,00
Jumlah		2.613.805.620.536,12	2.492.824.117.872,00	95,37	2.570.938.839.627,99

Rincian dan uraian lebih lanjut atas Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

B.2.1 Belanja Operasi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	1.867.848.912.162,33	1.786.817.147.586,00	95,66	1.768.005.833.840,99

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.867.848.912.162,33 dan terealisasi sebesar Rp1.786.817.147.586,00 atau 95,66% merupakan Belanja yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Belanja Operasi Tahun 2025 naik 1,06% atau sebesar Rp18.811.313.745,01 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 38 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.109.750.844.671,51	1.086.155.532.740,00	97,87	1.000.328.023.269,00
2	Belanja Barang dan Jasa	652.456.975.990,82	597.129.232.773,00	91,52	585.772.857.759,99
3	Belanja Subsidi	832.157.000,00	831.792.000,00	99,95	2.834.616.000,00
4	Belanja Hibah	89.071.934.900,00	87.054.332.773,00	97,73	171.313.904.712,00
5	Belanja Bantuan Sosial	15.736.999.600,00	15.646.257.300,00	99,42	7.756.432.100,00
	Jumlah	1.867.848.912.162,33	1.786.817.147.586,00	95,66	1.768.005.833.840,99

B.2.1.1 Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	1.109.750.844.671,51	1.086.155.532.740,00	97,87	1.000.328.023.269,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.109.750.844.671,51 dan terealisasi sebesar Rp1.086.155.532.740,00 atau 97,87%. Belanja Pegawai Tahun 2025 naik 8,58% atau sebesar Rp85.827.509.471,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 39 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	493.500.336.885,72	480.339.257.722,00	97,33	477.991.044.627,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	46.305.053.431,00	45.199.732.611,00	97,61	45.387.853.604,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.642.334.662,00	6.132.145.000,00	92,31	6.521.808.594,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.816.500.155,00	20.433.715.000,00	98,16	21.853.055.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.509.817.943,00	13.268.739.207,00	98,21	12.184.864.950,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.895.831.751,00	27.233.160.795,00	97,62	27.102.623.550,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.626.740.182,40	6.201.158.420,00	81,30	1.436.807.747,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.796.375,00	7.547.709,00	85,80	7.468.462,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.441.981.160,40	30.838.473.097,00	92,21	28.808.437.181,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.112.938.885,00	987.301.826,00	88,71	987.605.512,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.298.089.817,00	2.961.877.710,00	89,80	2.962.792.354,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	72.702.726.064,40	67.939.301.417,00	93,44	103.021.313.910,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	564.995.968,00	486.782.740,50	86,15	450.187.329,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.440.443.820,00	3.110.470.677,00	90,40	3.306.147.190,00
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	431.370.730,00	156.382.183,00	36,25	229.011.537,00
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	38.498.695.573,80	35.126.751.723,50	91,24	208.469.449,00
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	224.148.936.546,00	232.310.147.721,00	103,64	162.782.785.167,00

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
18	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.107.960.000,00	99,43	1.100.820.000,00
19	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	148.278.900,00	137.571.000,00	92,77	136.657.500,00
20	Belanja Tunjangan Beras DPRD	202.776.000,00	143.147.520,00	70,59	143.845.120,00
21	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	94.794.000,00
22	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.661.352.000,00	1.606.542.000,00	96,70	1.596.189.000,00
23	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	175.941.400,00	151.641.000,00	86,18	139.004.250,00
24	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.761.200.000,00
25	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.455.300.000,00
26	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	474.059.526,00	473.196.676,00	99,81	427.156.380,00
27	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.974.131.292,00	5.938.207.200,00	99,39	5.708.971.198,00
28	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.375.600.000,00	6.375.600.000,00	100,00	6.072.000.000,00
29	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.750.000,00	0,00	-	412.965.000,00
30	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.692.000,00	43.358.640,00	77,85	0,00
31	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.797.000,00	6.006.000,00	77,02	0,00
32	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.246.000,00	84.780.000,00	86,29	18.900.000,00
33	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.274.000,00	6.372.960,00	77,02	0,00
34	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.341.000,00	684.107,00	20,47	828.520,00
35	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000,00	840,00	28,00	0,00
36	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.348.000,00	4.430.160,00	69,78	756.000,00
37	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.000,00	93.600,00	70,37	0,00
38	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	398.000,00	280.800,00	70,55	0,00
39	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.152.118.754,00	829.994.084,00	72,04	125.284.186,00
40	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	278.412.376,00	153.790.082,00	55,23	34.110.279,00
41	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00
42	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	653.469.951,00	653.469.948,00	99,99	550.000.000,00
43	Belanja Pegawai BLUD	85.885.244.522,79	84.191.832.564,00	98,02	77.946.605.673,00
Jumlah		1.109.750.844.671,51	1.086.155.532.740,00	97,87	1.000.328.023.269,00

Berikut penjelasan atas Realisasi Belanja Pegawai yang terdapat perubahan realisasi yang signifikan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025.

1. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp412.965.000,00, sedangkan pada Tahun 2025 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan pada Tahun 2024 merupakan akhir masa jabatan anggota DPRD, sehingga dilakukan pembayaran uang jasa pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kepada anggota DPRD yang meninggal dunia dalam masa jabatannya. Sementara, pada Tahun 2025 tidak terdapat pembayaran dimaksud karena tidak terdapat kondisi yang memenuhi kriteria pemberian uang jasa pengabdian.
2. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp18.900.000,00 sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp84.780.000,00. Perbedaan realisasi tersebut disebabkan pada Tahun 2024 masa jabatan Bupati telah berakhir dan dijabat oleh Penjabat (Pj.) Bupati, sehingga pembayaran tunjangan jabatan tidak terealisasi 100%. Sementara, pada Tahun 2025 dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif sehingga realisasi tunjangan jabatan meningkat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah, realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp125.284.186,00 sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp829.994.084,00. Kenaikan realisasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah di Kabupaten Probolinggo yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak sebagai dasar perhitungan insentif. Selain itu, pada Tahun 2024 masa jabatan Kepala Daerah telah berakhir dan dijabat oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sehingga pemberian insentif tidak terealisasi 100%. Sementara, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif, sehingga realisasi insentif dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH, realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp34.110.279,00 sedangkan pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp153.790.082,00. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh optimalisasi kinerja pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Probolinggo yang berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi sebagai dasar perhitungan insentif. Selain itu, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif, sehingga pemberian insentif dapat direalisasikan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.2.1.2	Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Barang dan Jasa	652.456.975.990,82	597.129.232.773,00	91,52	585.772.857.759,99

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp652.456.975.990,82 dan terealisasi sebesar Rp597.129.232.773,00 atau 91,52%. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 naik 1,94% atau sebesar Rp11.356.375.013,01 dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	117.565.463.717,92	95.500.073.148,00	81,23	99.509.090.940,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.002.000,00	101.898,00	1,01	50.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.380.998.824,00	1.358.976.845,00	98,40	375.067.790,00
4	Belanja Jasa Kantor	140.811.042.535,63	125.428.963.444,00	89,07	113.908.138.584,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	83.494.213.090,38	76.670.435.987,00	91,82	59.432.492.151,00
6	Belanja Sewa Tanah	25.000.000,00	0,00	-	2.500.000,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.309.431.100,00	1.960.498.465,00	84,89	2.553.002.500,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	143.702.000,00	108.879.500,00	75,76	115.500.000,00
9	Belanja Sewa Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.700.000,00	5.289.256,00	92,79	5.185.545,00
10	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	98.750.000,00	91.837.000,00	92,99	20.500.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.871.015.100,00	3.222.230.880,00	83,23	831.057.505,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.608.023.000,00	5.442.406.667,00	82,36	3.505.512.277,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	-	95.000.000,00
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.352.396.465,00	5.296.816.075,00	83,38	6.926.602.500,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.261.947.352,00	1.096.116.521,00	86,85	1.080.038.028,00
16	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	521.575.000,00	515.631.300,00	98,86	362.477.572,00
17	Belanja Pemeliharaan Tanah	440.030.000,00	424.346.333,00	96,43	66.118.260,00
18	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.224.072.112,00	9.345.076.982,00	91,40	7.693.104.333,00
19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.987.695.598,27	5.285.715.711,00	88,27	6.067.233.522,00
20	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.847.536.000,00	1.714.529.941,00	92,80	2.115.718.227,00
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	86.600.000,00	68.820.000,00	79,46	17.500.000,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.020.518.567,10	28.146.194.950,00	93,75	65.571.742.018,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	-	70.166.644,00
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.760.662.000,00	26.213.736.263,00	97,95	25.030.145.291,00

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.214.650.000,00	3.051.408.800,00	94,92	796.400.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	-	61.415.546.976,00
27	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	59.464.697.774,00	59.370.913.178,00	99,84	0,00
28	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	161.024.000,00	160.946.000,00	99,95	0,00
29	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	414.900.000,00	459.900.000,00	110,84	0,00
30	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.487.789.319,00	16.800.992.213,00	96,07	13.433.015.948,00
31	Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.887.540.435,52	129.388.395.416,00	98,10	114.773.951.148,99
Jumlah		652.456.975.990,82	597.129.232.773,00	91,52	585.772.857.759,99

Berikut penjelasan atas realisasi Belanja Jasa yang terdapat perubahan realisasi yang signifikan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025.

1. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp796.400.000,00 sedangkan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.051.408.800,00. Peningkatan signifikan realisasi tersebut terutama pada Dinas Perhubungan dengan realisasi sebesar Rp1.289.210.100,00. Kenaikan ini disebabkan pada Tahun 2024 penganggaran belanja jasa pihak ketiga masih tercatat pada rekening Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir. Hal tersebut terjadi karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2024, klasifikasi rekening belanja jasa pihak ketiga belum terakomodasi dalam aplikasi SIPD hingga penetapan APBD, sehingga penganggaran masih menggunakan rekening dimaksud. Sementara itu, pada Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian klasifikasi kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga belanja dimaksud dicatat pada rekening yang semestinya.
2. Belanja Barang dan Jasa BOS, realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp61.415.546.976,00 sedangkan pada Tahun 2025 tidak ada realisasi. Tidak adanya realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan kebijakan teknis penganggaran dan penyesuaian klasifikasi kode rekening. Seluruh alokasi dana operasional sekolah pada Tahun 2025 telah dialihkan dan diklasifikasikan ke dalam rekening Dana BOSP yang lebih spesifik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak lagi dianggarkan maupun direalisasikan pada rekening Belanja Barang dan Jasa BOS. Pada Tahun 2025, seluruh alokasi dana operasional sekolah yang sebelumnya belum diklasifikasikan secara spesifik telah dialihkan dan dicatat pada rekening Dana BOSP-BOS, penganggaran dana tersebut selanjutnya dibagi dan dialokasikan secara rinci berdasarkan masing-masing jenjang pendidikan, meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta kesetaraan sesuai peruntukan dan kebutuhan operasional masing-masing satuan pendidikan.
3. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS, tidak ada realisasi pada Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp59.464.697.774,00. Terdapat realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan kebijakan penganggaran dan penyesuaian klasifikasi kode rekening sesuai ketentuan terbaru, dimana dana operasional sekolah dikategorikan secara khusus dalam skema Dana BOSP. Realisasi tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa BOSP – Jenjang SD (BOS Reguler) yang diperuntukkan bagi sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP. Penganggaran ini mencerminkan penyaluran dana operasional sekolah yang lebih terstruktur dan spesifik sesuai jenjang pendidikan, sehingga pada Tahun 2024 belum tercatat pada rekening dimaksud, namun pada Tahun 2025 telah diakomodir secara penuh dalam klasifikasi BOSP-BOS.
4. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD, tidak ada realisasi pada Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp160.946.000,00. Terdapat realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan kebijakan penganggaran dan penyesuaian klasifikasi kode rekening sesuai ketentuan terbaru, dimana dana operasional satuan pendidikan anak usia dini diklasifikasikan secara khusus dalam skema Dana BOSP. Realisasi tersebut merupakan

Belanja Barang dan Jasa BOSP – Jenjang PAUD (BOP PAUD) yang diperuntukkan bagi TK Negeri, sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan operasional satuan pendidikan PAUD. Pada Tahun 2024, belanja dimaksud belum dicatat pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa BOSP – Jenjang PAUD, sedangkan pada Tahun 2025 telah diakomodir secara spesifik sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan, tidak ada realisasi pada Tahun 2024 sedangkan pada Tahun 2025 realisasi sebesar Rp459.900.000,00. Terdapat realisasi pada Tahun 2025 disebabkan oleh perubahan kebijakan penganggaran dan penyesuaian klasifikasi kode rekening sesuai ketentuan terbaru, dimana dana operasional pendidikan kesetaraan diklasifikasikan secara khusus dalam skema Dana BOSP. Realisasi tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa BOSP – Jenjang Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan kesetaraan negeri di Kabupaten Probolinggo, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pada Tahun 2024, belanja dimaksud belum dicatat pada rekening Belanja Barang dan Jasa BOSP-Kesetaraan, sedangkan pada Tahun 2025 telah diakomodir secara spesifik sesuai ketentuan yang berlaku.

B.2.1.3 Belanja Subsidi	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	832.157.000,00	831.792.000,00	99,95	2.834.616.000,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp832.157.000,00 dan terealisasi sebesar Rp831.792.000,00 atau 99,95%. Belanja Subsidi Tahun 2025 turun (70,67%) atau sebesar (Rp2.002.824.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perubahan kebijakan penganggaran dan penyesuaian prioritas belanja subsidi di Kabupaten Probolinggo, dimana pada Tahun 2025 tidak lagi dialokasikan subsidi kepada BUMN serta dilakukan rasionalisasi dan penyesuaian besaran subsidi kepada koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi terhadap efektivitas pemberian subsidi pada tahun sebelumnya. Selain itu, pada Tahun 2024 terdapat penyaluran subsidi yang bersifat insidentil atau program tertentu yang tidak berlanjut pada Tahun 2025. Realisasi Belanja Subsidi merupakan pemberian subsidi kepada Koperasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok.

Dalam pengadaan dan pendistribusian bahan kebutuhan pokok Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Prastiwi dengan Nomor Perjanjian: 500.2/454/426.110/2025.

**Tabel 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	-	78.486.000,00
2	Belanja Subsidi kepada Koperasi	832.157.000,00	831.792.000,00	99,95	2.756.130.000,00
Jumlah		832.157.000,00	831.792.000,00	99,95	2.834.616.000,00

Belanja Subsidi kepada Koperasi senilai Rp831.792.000,00 adalah Subsidi harga bahan pokok berupa beras kemasan 5kg, gula pasir kemasan 1kg, dan minyak goreng kemasan 1liter yang dibebankan kepada pemerintah terhadap inflasi harga untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo. Besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp26.000,00 per paket dengan rincian :

- Subsidi beras 5kg sebesar Rp20.000,00;
- Subsidi gula pasir sebesar Rp3000,00/kg;
- Subsidi minyak goreng sebesar Rp3000,00/liter.

Kegiatan pasar murah dilaksanakan pada 24 kecamatan dengan kuota subsidi masing-masing kecamatan sebanyak 1.333 paket.

B.2.1.4 Belanja Hibah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	89.071.934.900,00	87.054.332.773,00	97,73	171.313.904.712,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp89.071.934.900,00 dan terealisasi sebesar Rp87.054.332.773,00 atau 97,73%. Belanja Hibah Tahun 2025 turun (49,18%) atau sebesar (Rp84.259.571.939,00) dibandingkan dengan Tahun 2024. Terdapat penurunan realisasi yang signifikan pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disebabkan oleh adanya reklasifikasi penganggaran ke kode rekening Belanja Hibah Dana BOSP. Rincian Belanja Hibah Tahun 2025 sebagaimana **Lampiran 2** sebagai berikut.

**Tabel 42 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	52.900.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	-	2.358.063.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	43.158.395.400,00	41.496.023.573,00	96,14	91.885.253.678,00
4	Belanja Hibah Dana BOS	21.376.800.000,00	21.278.115.700,00	99,53	22.605.681.801,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.607.239.500,00	1.607.175.000,00	99,99	1.564.906.233,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	22.929.500.000,00	22.673.018.500,00	98,88	0,00
Jumlah		89.071.934.900,00	87.054.332.773,00	97,73	171.313.904.712,00

Penjelasan dari masing-masing Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2025 tidak ada Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. Tahun 2025 tidak ada Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
3. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp41.496.023.573,00 terdiri dari.

**Tabel 43 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025**

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.000.000,00	Diberikan kepada: - KORPRI sebesar Rp200.000.000,00 Nomor BAST: 900/705/426.204/2025 Tanggal 3 Juli 2025 - SATLAK P4GN sebesar Rp200.000.000,00 Nomor BAST: 900/823/426.204/2025 Tanggal 28 Juli 2025
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11.728.000.000,00	Hibah untuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membayar guru ngaji dan pembangunan atau perbaikan lembaga tersebut.
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.949.998.000,00	Diberikan kepada: - KONI sebesar Rp3.999.998.000,00 Nomor BAST 900.1/169/426.117/2025, tanggal 28 April 2025 dan 900.1/169/426.117/2025, tanggal 22 September 2025 - PRAMUKA sebesar Rp700.000.000,00 Nomor BAST 900.1/363/426.117/2025, tanggal 15 Juli 2025 - KORMI sebesar Rp150.000.000,00 Nomor BAST 900.1/199/426.117/2025, tanggal 5 Mei 2025 - PERWOSI sebesar Rp100.000.000,00 Nomor BAST 900.1/267/426.117/2025, tanggal 2 Juni 2025
4	Dinas Kesehatan	953.250.000,00	Diberikan kepada: - PMI sebesar Rp400.000.000,00 Nomor BAST

No	Perangkat Daerah	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	Keterangan
			400.7/879/426.102/2025 tanggal 28 Februari 2025 - Komisi Penanggulangan AIDS sebesar Rp300.000.000,00 Nomor BAST 400.7/1006/426.102/2025 tanggal 10 Maret 2025 - Forum Kabupaten Probolinggo Sehat sebesar Rp150.000.000,00 Nomor BAST 400.07/3255/426.102/2025 tanggal 17 Juli 2025 - Komite Mata Daerah sebesar Rp131.800.000,00 Nomor BAST 400.7/881/426.102/2025 tanggal 28 Februari 2025
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	250.000.000,00	Diberikan kepada DEKRANASDA untuk menunjang capaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam bentuk Pengembangan dan Promosi Produk Kerajinan Kabupaten Probolinggo
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	413.000.000,00	Diberikan kepada TP PKK Kabupaten Probolinggo digunakan sebagai dana untuk menunjang 10 Program Pokok PKK. Tahap I hibah sebesar Rp165.200.000,00 Tahap II hibah sebesar Rp247.800.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	Diberikan kepada: - Dharma Wanita Persatuan sebesar Rp175.000.000,00 Nomor BAST 900/91/426.115/2025 tanggal 23 April 2025 - Lembaga Perlindungan Anak sebesar Rp75.000.000,00 Nomor BAST 900/89/426.115/2025 tanggal 23 April 2025 - Gabungan Organisasi Wanita sebesar Rp50.000.000,00 Nomor BAST 900/93/426.115/2025 tanggal 23 April 2025
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.552.884.200,00	Hibah Uang diberikan kepada: - BOSDA Madin bantuan untuk Santri dan Guru Sedangkan untuk Kinerja diperuntukan bagi Guru - Tukin diperuntukan bagi Guru di lembaga Negeri dan Swasta Hibah Barang diberikan kepada: - Pekerjaan konsultasi Perencanaan Pemb. Ruang kelas TK Satap Tanjungrejo Tongas No Kontrak : 420.27/03.51.PAUD.02/SPK.JKr/426.101/2025 Tanggal 28 Mei 2025 - Perkerjaan Pembangunan Ruang kelas TK Satap Tanjungrejo Kec.Tongas No Kontrak 420.27/03.51.PAUD.07/SPK.PL.PK/426.101/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 - Pekerjaan Pengawasan Pembangunan ruang kelas TK Satap Tanjungrejo II Tongas No Kontrak 420.27/03.51.PAUD.01/SPK.PL.JKw/426.101/2025 Tanggal 21 Agustus 2025.
9	Dinas Pertanian	9.931.981.415,00	Diberikan kepada Kelompok Tani untuk Pembangunan prasarana pertanian dan pengawasan penggunaan sarana pertanian.
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.816.909.958,00	Diberikan kepada: - Koramil sebesar Rp293.669.000,00 Nomor BAST 900.1/708.PBG.BAST/426.113/2025, tanggal 15 Desember 2025 - Kejaksaan Negeri Kraksaan Rp1.441.068.748,00 Nomor BAST 900.1/707.PBG.BAST/426.113/2025, tanggal 15 Desember 2025 - Polres Kabupaten Probolinggo sebesar Rp2.836.525.960,00 Nomor BAST 900.1/708.PBG.BAST/426.113/2025, tanggal 15 Desember 2025 - MWC NU sebesar Rp245.646.250,00 Nomor BAST 028/720.BAPHB/426.113/2025, tanggal 15 Desember 2025
11	Dinas Sosial	200.000.000,00	Diberikan kepada: - Karang Taruna sebesar Rp150.000.000,00 Nomor BAST 979/124.6/426.103/2025, tanggal 8 Mei 2025 - Pertuni sebesar Rp50.000.000,00 Nomor BAST 979/124.4/426.103/2025, tanggal 8 Mei 2025
Jumlah		41.496.023.573,00	

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2025 turun (54,83%) atau sebesar (Rp50.389.230.105,00) dibandingkan dengan Tahun 2024. Penurunan disebabkan karena perubahan kodefikasi rekening yaitu Hibah pada Lembaga TK dan Kesetaraan Swasta dianggarkan dan direalisasikan pada rekening Belanja Hibah Dana BOSP;

4. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa hibah uang kepada SD swasta dan SMP swasta sebesar Rp21.278.115.700,00.
5. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik kepada Partai Politik di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp1.607.175.000,00, terdiri dari.
 - a. Partai Gerindra sebesar Rp314.892.500,00 Nomor BAST 900/406/426.204/2025 tanggal 21 April 2025;
 - b. Partai Golkar sebesar Rp305.075.000,00 Nomor BAST 900/416/426.204/2025 tanggal 22 April 2025;
 - c. Partai NASDEM sebesar Rp255.177.500,00 Nomor BAST 900/484/426.204/2025 tanggal 6 Mei 2025;
 - d. Partai PKB sebesar Rp330.665.000,00 Nomor BAST 900/415/426.204/2025 tanggal 22 April 2025;
 - e. Partai PDI Perjuangan sebesar Rp175.222.500,00 Nomor BAST 900/414/426.204/2025 tanggal 22 April 2025;
 - f. Partai PKS sebesar Rp36.077.500,00 Nomor BAST 900/428/426.204/2025 tanggal 24 Januari 2025;
 - g. Partai PPP sebesar Rp190.065.000,00 Nomor BAST 900/407/426.204/2025 tanggal 21 April 2025.
6. Belanja Hibah Dana BOSP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa hibah uang kepada lembaga PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp22.673.018.500,00 atau mencapai 98,88% dari anggaran sebesar Rp22.929.500.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Ketiadaan nilai realisasi pada Tahun 2024 bukan disebabkan oleh ketiadaan kegiatan pada tahun sebelumnya, melainkan karena pada Tahun 2025 telah dilakukan penerapan kode rekening spesifik untuk Dana BOSP untuk PAUD dan Kesetaraan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan khusus dana alokasi non-fisik, sehingga pencatatannya tidak lagi bercampur dengan belanja hibah umum lainnya.

B.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		15.736.999.600,00	15.646.257.300,00	99,42	7.756.432.100,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp15.736.999.600,00 dan terealisasi sebesar Rp15.646.257.300,00 atau 99,42%. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 naik 101,72% atau sebesar Rp7.889.825.200,00 dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.677.000.000,00	8.648.600.000,00	99,67	6.417.800.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	282.999.600,00	278.257.300,00	98,32	185.132.100,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.702.000.000,00	6.644.400.000,00	99,14	1.153.500.000,00
Jumlah		15.736.999.600,00	15.646.257.300,00	99,42	7.756.432.100,00

Penjelasan dari masing-masing Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebesar Rp8.648.600.000,00 terdapat pada.
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp6.720.000.000,00 untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 336 rumah sebagai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
 - Dinas Sosial sebesar Rp1.911.600.000,00 untuk kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial berupa dana bantuan sosial bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB), dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT);
 - Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp17.000.000,00 sebagai bantuan pemulangan jenazah tenaga migran atas nama Sugiharto warga Kecamatan Tiris.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp278.257.300,00 direalisasikan untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak enam unit.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp75.000.000,00 pada Dinas Sosial diberikan kepada Yayasan Dharma Asih sebagai penunjang kegiatan yayasan.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp6.644.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direalisasikan sesuai dengan SK Bupati Nomor: 400.3/301/426.32/2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kepada Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak Swasta, Sekolah Dasar Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada guru mulai dari jenjang PAUD sampai SMP.

B.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	229.502.457.373,79	204.034.945.952,00	88,90	270.139.109.894,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp204.034.945.952,00 atau 88,90% dari anggaran sebesar Rp229.502.457.373,79. Belanja Modal Tahun 2025 turun (24,47%) atau sebesar (Rp66.104.163.942,00) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 45 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	2.395.445.941,00	735.000.000,00	30,68	825.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.227.280.425,41	93.105.679.455,00	90,19	114.249.090.560,00
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	80.003.860.994,38	74.337.108.591,00	92,91	69.119.424.441,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.627.354.772,00	24.779.019.625,00	78,35	79.091.932.786,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.848.947.241,00	8.788.868.081,00	99,32	5.468.383.614,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.399.568.000,00	2.289.270.200,00	67,34	1.385.278.493,00
Jumlah		229.502.457.373,79	204.034.945.952,00	88,90	270.139.109.894,00

Adapun rincian Belanja Modal per jenis Belanja sebagai berikut.

B.2.2.1	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		2.395.445.941,00	735.000.000,00	30,68	825.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sebesar Rp735.000.000,00 atau 30,68% dari anggaran sebesar Rp2.395.445.941,00. Belanja Modal Tanah Tahun 2025 turun (10,91%) atau sebesar (Rp90.000.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024, sebagaimana rincian berikut.

**Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	760.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.635.445.941,00	735.000.000,00	44,94	825.000.000,00
	Jumlah	2.395.445.941,00	735.000.000,00	30,68	825.000.000,00

B.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		103.227.280.425,41	93.105.679.455,00	90,19	114.249.090.560,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp93.105.679.455,00 atau 90,19% dari anggaran sebesar Rp103.227.280.425,41. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 turun (18,51%) atau sebesar (Rp21.143.411.105,00) dibandingkan dengan Tahun 2024, sebagaimana rincian berikut.

**Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.620.004.200,00	0,00	-	2.753.590.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	2.907.929.900,00	1.618.154.960,00	55,64	979.565.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.746.832.579,00	9.384.661.446,00	96,28	14.543.092.767,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.548.000,00	8.300.003,00	97,09	0,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	13.326.000,00	12.804.070,00	96,08	10.400.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	29.879.500,00	29.660.000,00	99,26	0,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	87.775.300,00	66.328.296,00	75,56	155.454.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	36.992.400,00	32.686.100,00	88,35	1.092.627.000,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	1.730.181.900,00	1.607.467.093,00	92,90	5.653.112.670,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.274.504.901,00	4.828.410.104,00	91,54	2.920.918.650,00
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	906.158.000,00	808.029.580,00	89,17	860.921.800,00
12	Belanja Modal Alat Studio	378.105.100,00	338.738.051,00	89,58	6.842.655.000,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	52.908.000,00	30.268.803,00	57,21	220.167.240,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	27.763.431.428,00	27.191.490.830,00	97,93	44.942.133.416,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	515.794.210,00	500.887.702,00	97,10	34.320.000,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.572.248.435,00	2.369.067.710,00	92,10	625.800.000,00
17	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.406.522.404,00	524.763.156,00	21,80	44.637.540,00
18	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	122.000.000,00
19	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	-	4.580.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	-	709.672.530,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	5.155.004.700,00	4.869.909.052,00	94,46	2.677.773.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.550.496.480,00	1.393.202.863,00	89,85	2.454.028.500,00
23	Belanja Modal Alat Deteksi	4.714.374.400,00	4.548.246.128,00	96,47	0,00
24	Belanja Modal Alat SAR	138.764.720,00	138.062.670,00	99,49	0,00
25	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	-	104.625.000,00
26	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.232.090.327,00	3.838.933.177,00	90,71	2.275.120.450,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	197.829.783,00	195.530.000,00	98,83	3.074.700,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	-	14.557.787.442,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12.014.162.385,00	12.010.590.885,00	99,97	0,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	6.000.000,00	4.042.000,00	67,36	0,00
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.167.415.373,41	16.755.444.776,00	87,41	9.661.033.855,00
	Jumlah	103.227.280.425,41	93.105.679.455,00	90,19	114.249.090.560,00

B.2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		80.003.860.994,38	74.337.108.591,00	92,91	69.119.424.441,00

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2025 sebesar Rp74.337.108.591,00 atau 92,91% dari anggaran sebesar Rp80.003.860.994,38. Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2025 naik 7,55% atau sebesar Rp5.217.684.150,00 dibandingkan dengan Tahun 2024, sebagaimana rincian berikut.

**Tabel 48 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.350.040.721,00	70.168.154.418,00	93,12	64.378.479.448,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.034.573.900,00	1.977.740.730,00	97,20	0,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	43.316.000,00	29.459.400,00	68,01	148.740.000,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.575.930.373,38	2.161.754.043,00	83,92	4.592.204.993,00
Jumlah		80.003.860.994,38	74.337.108.591,00	92,91	69.119.424.441,00

B.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		31.627.354.772,00	24.779.019.625,00	78,34	79.091.932.786,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp24.779.019.625,00 atau 78,34% dari anggaran sebesar Rp31.627.354.772,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 turun (68,67%) atau sebesar (Rp54.312.913.161,00) dibandingkan dengan Tahun 2024, sebagaimana rincian berikut.

**Tabel 49 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	24.253.866.583,00	19.958.628.261,00	82,29	64.432.448.475,00
2	Belanja Modal Jembatan	185.754.000,00	168.054.556,00	90,47	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.470.396.650,00	3.102.554.700,00	89,40	9.328.308.980,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	-	78.625.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	-	408.616.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	-	231.587.000,00
7	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.314.813.387,00	1.232.628.705,00	93,74	3.698.968.331,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	94.200.000,00	93.091.316,00	98,82	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	2.308.324.152,00	224.062.087,00	9,70	913.379.000,00
Jumlah		31.627.354.772,00	24.779.019.625,00	78,34	79.091.932.786,00

B.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		8.848.947.241,00	8.788.868.081,00	99,32	5.468.383.614,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp8.788.868.081,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp8.848.947.241,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 naik 60,72% atau sebesar Rp3.320.484.467,00 dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 50 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	227.605.400,00	217.012.440,00	95,34	135.409.500,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	48.506.000,00	45.954.000,00	94,73	20.500.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	-	21.550.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	8.572.835.841,00	8.525.901.641,00	99,45	5.290.924.114,00
Jumlah		8.848.947.241,00	8.788.868.081,00	99,32	5.468.383.614,00

B.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		3.399.568.000,00	2.289.270.200,00	67,34	1.385.278.493,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.289.270.200,00 atau 67,34% dari anggaran sebesar Rp3.399.568.000,00. Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 naik 65,26% atau sebesar Rp903.991.707,00 dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.343.000.000,00	2.268.180.200,00	96,80	1.206.449.653,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.056.568.000,00	21.090.000,00	1,99	178.828.840,00
	Jumlah	3.399.568.000,00	2.289.270.200,00	67,34	1.385.278.493,00

B.2.3	Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		11.505.000.000,00	10.129.741.334,00	88,04	2.081.957.893,00

Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.505.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.129.741.334,00 atau 88,04%. Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 naik 386,55% atau sebesar Rp8.047.783.441,00 dari realisasi Tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kejadian luar biasa/bencana yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penanganan kejadian darurat bencana di Kabupaten Probolinggo. Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 52 Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana	8.374.345.061,00
2	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024	1.755.396.273,00
	Jumlah	10.129.741.334,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025 sebesar Rp8.374.345.061,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Nomor Keputusan Bupati
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.344.039.600,00	
	- Penanganan Darurat Bencana Dampak Cuaca Ekstrem di Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Dringu	489.898.300,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Penanganan Darurat Bencana Dampak Cuaca Ekstrem di Kecamatan Dringu dan Kecamatan Lumbang	280.500.000,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Penanganan Bencana Hidrometeorologi basah perbaikan darurat pagar SMPN 2 Lumbang Kecamatan Lumbang	63.000.000,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Biaya Operasional Pelaksanaan Penanganan Darurat pembersihan material banjir dan longsor dan perbaikan darurat jembatan Desa Andungsari Kecamatan Tiris	56.837.600,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Biaya Operasional Pelaksanaan Penanganan Darurat krisis air bersih di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Leces, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Tiris, Kecamatan Tongas, Kecamatan Wonomerto dan Gading	43.400.000,00	300.2/279/426.32/2025
	- Biaya Operasional Pelaksanaan Penanganan Darurat pengadaan pipa air bersih di kecamatan Sukapura dan Kecamatan Lumbang, pengadaan kawat bronjong di kecamatan Lumbang	150.609.000,00	300.2/279/426.32/2025 300.2/319/426.32/2025
	- Biaya penanganan darurat dampak banjir di kecamatan tiris	259.794.700,00	300.2/319/426.32/2025
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.811.796.461,00	
	- Penanganan Bencana Hidrometeorologi perbaikan jembatan di Desa Seboro Kecamatan Krejengan, Desa Betek Kecamatan Gading, dan	4.070.983.485,00	300.2/1126/426.32/2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)	Nomor Keputusan Bupati
	Desa Batur Kecamatan Gading		
	- Penanganan Bencana Hidrometeorologi pemasangan bronjong kawat di dua kecamatan di Kecamatan Gading dan Kecamatan Kraksaan	939.129.100,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Penanganan Bencana Hidrometeorologi perbaikan tebing sungai di Kecamatan Pajarak dan perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Tiris	677.723.874,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Penanganan Tembok Penahan Tanah (TPT) Ruas Jalan Sukapura, Ngadisari Kecamatan Sukapura	202.416.690,00	300.2/1126/426.32/2024
	- Penanganan Darurat pembangunan penahan jalan ruas jalan pesawahan, Tiris Kecamatan Tiris	921.543.312,00	300.2/279/426.32/2025 300.2/319/426.32/2025
3	Dinas Sosial	14.745.000,00	
	- Biaya Operasional Dapur Umum Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Krejengan	14.745.000,00	300.2/1126/426.32/2024
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	203.764.000,00	
	- Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Pakuniran	203.764.000,00	300.2/1126/426.32/2024 300.2/116/426.32/2025
Jumlah		8.374.345.061,00	

Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sebesar Rp1.755.396.273,00 dengan Nota Dinas Nomor 900/089/426.203/2025 terdiri dari.

- Bantuan Keuangan Bidang Pariwisata Rp84.371.979,00;
- Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan Rp927.281.250,00;
- Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Rp420.500.000,00;
- Bantuan Keuangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp314.635.044,00;
- Bantuan Keuangan Perhubungan Rp8.608.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, apabila Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan atau penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi.

B.2.4	Belanja Transfer	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		504.949.251.000,00	491.842.283.000,00	97,40	530.711.938.000,00

Belanja Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp504.949.251.000,00 dan terealisasi sebesar Rp491.842.283.000,00 atau 97,40%. Belanja Transfer Tahun 2025 turun (7,32%) atau sebesar (Rp38.869.655.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi hasil	18.425.655.000,00	18.425.655.000,00	100,00	11.368.682.000,00
	a) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.853.490.000,00	14.853.490.000,00	100,00	8.760.000.000,00
	b) Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	3.572.165.000,00	3.572.165.000,00	100,00	2.608.682.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	486.523.596.000,00	473.416.628.000,00	97,31	519.343.256.000,00
	a) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	454.500.000,00	0,00	-	0,00
	b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	486.069.096.000,00	473.416.628.000,00	97,39	519.343.256.000,00
Jumlah		504.949.251.000,00	491.842.283.000,00	97,40	530.711.938.000,00

B.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		18.425.655.000,00	18.425.655.000,00	100,00	11.368.682.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp18.425.655.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp18.425.655.000,00. Belanja Bagi Hasil Tahun 2025 naik 62,07% atau sebesar Rp7.056.973.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024, terdiri dari.

B.2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		14.853.490.000,00	14.853.490.000,00	100,00	8.760.000.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2025 sebesar Rp14.853.490.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.853.490.000,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2025 naik 69,56% atau sebesar Rp6.093.490.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		3.572.165.000,00	3.572.165.000,00	100,00	2.608.682.000,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2025 sebesar Rp3.572.165.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.572.165.000,00. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 naik 36,93% atau sebesar Rp963.483.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		486.523.596.000,00	473.416.628.000,00	97,31	519.343.256.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp473.416.628.000,00 atau 97,31% dari anggaran sebesar Rp486.523.596.000,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 turun (8,84%) atau sebesar (Rp45.926.628.000,00) dibandingkan dengan Tahun 2024. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari.

- Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp119.902.883.000,00;
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp37.943.000.000,00; dan
- Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp315.570.745.000,00 sebagaimana dirinci pada **Lampiran 4**.

B.3	Surplus/(Defisit)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		(173.314.992.293,12)	17.642.943.944,29	(10,18)	(119.102.141.634,65)

Surplus/(Defisit) Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar (Rp173.314.992.293,12) dan terealisasi sebesar 17.642.943.944,29 atau (10,18%). Surplus/(Defisit) Tahun 2025 naik 114,81% atau sebesar Rp136.745.085.578,94 dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.4	Pembiayaan Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		173.314.992.293,12	173.371.603.908,12	100,03	292.417.133.927,77

Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp173.314.992.293,12 dan terealisasi sebesar 173.371.603.908,12 atau 100,03%. Pembiayaan Tahun 2025 turun (40,71%) atau sebesar (Rp119.045.530.019,65) dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.4.1	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		173.314.992.293,12	173.371.603.908,12	100,03	292.417.133.927,77

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp173.314.992.293,12 dan terealisasi sebesar Rp173.371.603.908,12 atau 100,03%. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 turun (40,71%) atau sebesar (Rp119.045.530.019,65) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

B.4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		173.314.992.293,12	173.314.992.567,28	100,00	292.183.859.175,15

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp173.314.992.567,28 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp173.314.992.293,12. SiLPA Tahun Sebelumnya Tahun 2025 turun (40,68%) atau sebesar (Rp118.868.866.607,87) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

B.4.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	56.611.340,84	-	233.274.752,62

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2025 sebesar Rp56.611.340,84. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025 merupakan Hasil Perolehan Pokok Dana Bergulir. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025 turun (75,73%) atau sebesar (Rp176.663.411,78) dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 55 Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	56.611.340,84	-	228.460.347,62
2	Dinas Pertanian	0,00	0,00	-	4.814.405,00
	- Kredit Modal Usaha Ternak	0,00	0,00	-	4.814.405,00
	- Disbunhut/Mekanisasi/Pembelian Gabah	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	0,00	56.611.340,84	-	233.274.752,62

B.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	0,00	-	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

B.5	Pembiayaan Netto	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		173.314.992.293,12	173.371.603.908,12	100,03	292.417.133.927,77

Pembiayaan Netto Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp173.314.992.293,12 dan terealisasi sebesar Rp173.371.603.908,12 atau 100,03%. Pembiayaan Tahun 2025 turun (40,71%) atau sebesar (Rp119.045.530.019,65) dibandingkan dengan Tahun 2024.

B.6	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
		0,00	191.014.547.852,41	-	173.314.992.293,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp191.014.547.852,41. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi Pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer ditambah dengan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2025, dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 56 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Daerah	2.440.490.628.243,00	2.510.467.061.816,29	102,87	2.451.836.697.993,34
2	Belanja Daerah	2.613.805.620.536,12	2.492.824.117.872,00	95,37	2.570.938.839.627,99
3	Surplus / Defisit	(173.314.992.293,12)	17.642.943.944,29	(10,18)	(119.102.141.634,65)
4	Pembiayaan Netto	173.314.992.293,12	173.371.603.908,12	100,03	292.417.133.927,77
	SiLPA	0,00	191.014.547.852,41	-	173.314.992.293,12

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 naik 10,21% atau sebesar Rp17.699.555.559,29 dibandingkan dengan Tahun 2024.

Berikut rincian dana-dana yang telah ditetapkan peruntukannya atas SiLPA Tahun 2025.

Tabel 57 Rincian Dana yang Telah Ditetapkan Peruntukannya atas SiLPA Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	DAU Pendidikan	4.058.061.450,00
2	DAU Kesehatan	6.028.922.288,00
3	DAU Kelurahan	41.172.000,00
4	DAU Pekerjaan Umum	10.655.706,00
5	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	40.232.088.000,00
6	DANA Insentif Fiskal	201.553.172,00
7	DBH CHT	15.201.620.110,00
8	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	940.879.800,00
	Jumlah	66.714.952.526,00

Tabel 58 Rincian SiLPA Tahun 2025 yang Berasal dari Pendapatan Transfer

No	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan	1.716.568,00
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan	63.000,00
3	DAK Fisik Bidang Jalan	35.655.629,00
4	DAK Fisik Bidang Sanitasi	78.212.940,00
5	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	6.897.164,00
6	DAK Non Fisik-TPG PNSD	714.177.222,00
7	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	369.925.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.565.669.436,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	78.359.474,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	577.388.675,00
11	DAK Non Fisik-KPP-Pangan	116.307.845,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.387.367.734,00
	Jumlah	4.931.740.687,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan, terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir. Rincian dari masing-masing Pos Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	173.314.992.293,12	292.183.859.175,17

Merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL Tahun 2024 sebesar Rp292.183.859.175,17. Sedangkan SAL Awal Tahun 2025 sebesar Rp173.314.992.293,12 yang merupakan SAL akhir Tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Ekuitas Dana	173.314.992.567,28	292.183.859.175,15

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2025 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp173.314.992.567,28. Tidak terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih awal dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	191.014.547.852,41	173.314.992.293,12

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2025 sebesar Rp191.014.547.852,41 terdiri atas Surplus/Defisit-LRA dan Pembiayaan Netto yang terdiri dari.

- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit-LRA Tahun 2025 sebesar Rp17.642.943.944,29.
- Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2025 sebesar Rp173.371.603.908,12.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	274,16	(0,02)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun 2025 sebesar Rp274,16 merupakan koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP SDN Tandosentul II.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.5 Lain – lain	0,00	0,00

Saldo Lain-lain dari laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	191.014.547.852,41	173.314.992.293,12

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah Saldo Anggaran Akhir yang berasal dari akumulasi Saldo Akhir pada Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOSP, Kas Lainnya dan Kas BOK Puskesmas tahun berjalan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 59 Saldo Anggaran Lebih Akhir
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	SILPA Kas di Kas Daerah	168.829.181.249,01	149.639.148.881,88
2	SILPA Kas Bendahara Penerimaan	70.242.000,00	319.812.473,00
3	SILPA BLUD	21.116.425.448,57	22.036.248.328,66
4	SILPA BOSP	249.461.775,31	141.088.625,58
5	SILPA BOK Puskesmas	742.492.373,00	1.178.693.984,00
6	SILPA Kas Lainnya	6.745.006,52	0,00
Jumlah		191.014.547.852,41	173.314.992.293,12

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp191.014.547.852,41 dengan saldo Kas di Neraca sebesar Rp191.015.217.189,41 terdapat selisih sebesar Rp669.337,00 yang terdiri dari.

Tabel 60 Rincian Selisih SAL dengan Saldo Kas di Neraca

No	Uraian	Kas di Neraca (Rp)	SAL (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Kas di Kas Daerah	168.829.181.249,01	168.829.181.249,01	0,00	-
2	Kas Bendahara Penerimaan	70.242.000,00	70.242.000,00	0,00	-
3	Kas di BLUD	21.117.094.785,57	21.116.425.448,57	669.337,00	Pencatatan Utang PFK atas kurang bayar PPN sebesar Rp556.937,00 dan PPh 23 sebesar Rp112.400,00 pada Puskesmas Wangkal
4	Kas di BOSP	249.461.775,31	249.461.775,31	0,00	-
5	Kas di BOK Puskesmas	742.492.373,00	742.492.373,00	0,00	-
6	Kas Lainnya	6.745.006,52	6.745.006,52	0,00	-
Jumlah		191.015.217.189,41	191.014.547.852,41	669.337,00	

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca merupakan Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 61 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

Neraca	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lancar	268.996.525.808,02	243.492.934.742,29	10,47
Investasi Jangka Panjang	35.758.000.859,00	36.164.150.899,00	(1,12)
Aset Tetap	2.715.233.640.148,68	2.660.955.545.327,88	2,04
Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Aset Lainnya	95.865.166.225,51	36.872.148.388,08	159,99
Properti Investasi	28.006.993.084,49	23.938.284.414,96	17,00
Jumlah Aset	3.143.860.326.125,70	3.001.423.063.772,21	4,75
Kewajiban Jangka Pendek	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72	120,19
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72	120,19
Ekuitas	3.043.157.332.175,38	2.955.689.014.944,49	2,96
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.143.860.326.125,70	3.001.423.063.772,21	4,75

Aset per 31 Desember 2025 naik 4,75% dari per 31 Desember 2024, demikian juga dengan Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 naik 4,75% dari per 31 Desember 2024. Kenaikan tertinggi kelompok Aset berasal dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 naik 159,99% dibandingkan nilai per 31 Desember 2024. Sementara nilai Kewajiban per 31 Desember 2025 naik signifikan sebesar 120,19% dibandingkan nilai per 31 Desember 2024.

	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
D.1 Aset	3.143.860.326.125,70	3.001.423.063.772,21

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp3.143.860.326.125,70 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62 Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	268.996.525.808,02	243.492.934.742,29
2	Investasi Jangka Panjang	35.758.000.859,00	36.164.150.899,00
3	Aset Tetap	2.715.233.640.148,68	2.660.955.545.327,88
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	95.865.166.225,51	36.872.148.388,08
6	Properti Investasi	28.006.993.084,49	23.938.284.414,96
	Jumlah	3.143.860.326.125,70	3.001.423.063.772,21

Penjelasan dari masing-masing rincian Aset adalah sebagai berikut.

D.1.1	Aset Lancar	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		268.996.525.808,02	243.492.934.742,29

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp268.996.525.808,02 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 63 Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	168.829.181.249,01	149.639.148.881,88	12,82
2	Kas di Bendahara Penerimaan	70.242.000,00	319.812.473,00	(78,04)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	-
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	21.117.094.785,57	22.036.248.328,66	(4,17)
5	Kas di Bendahara BOSP	249.461.775,31	141.088.625,58	76,81
6	Kas Dana BOK Puskesmas	742.492.373,00	1.178.693.984,00	(37,01)
7	Kas Lainnya	6.745.006,52	0,00	-
8	Piutang Pajak Daerah	31.469.810.004,27	29.584.551.048,50	6,37
9	Piutang Retribusi Daerah	25.303.425.785,00	2.978.996.793,00	749,39
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.843.938.926,45	26.998.332.036,84	(63,54)
12	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.443.900.121,00	1.443.900.121,00	0,00
13	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	-
14	Piutang Lainnya	0,00	0,00	-
15	Penyisihan Piutang	(31.989.950.416,66)	(29.745.404.923,07)	7,55
16	Beban Dibayar Dimuka	706.777.147,98	492.391.740,00	43,54
17	Persediaan	41.203.407.050,57	38.425.175.632,90	7,23
	Jumlah	268.996.525.808,02	243.492.934.742,29	10,47

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dibandingkan per 31 Desember 2024 naik 10,47%. Kenaikan tertinggi kelompok Aset Lancar berasal dari Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp22.324.428.992,00 atau 749,39%. Sementara Kas di Bendahara Penerimaan turun (78,04%).

Penjelasan secara rinci masing-masing akun dalam Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

D.1.1.1	Kas di Kas Daerah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		168.829.181.249,01	149.639.148.881,88

Kas di Rekening Kas Umum Daerah pada BPD Jatim Kraksaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp168.829.181.249,01 dan Rp149.639.148.881,88. Saldo Kas di Kas Daerah naik 12,82% atau sebesar Rp19.190.032.367,13 dibandingkan Tahun 2024. Rincian saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah pada BPD Jatim disajikan pada tabel berikut.

Tabel 64 Rekapitulasi Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Giro BUD Rekening 0131000100	149.639.148.881,88	1.634.828.370.255,13	(1.615.638.337.888,00)	168.829.181.249,01
2	Deposito BUD	0,00	100.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	0,00
	Jumlah	149.639.148.881,88	1.734.828.370.255,13	(1.715.638.337.888,00)	168.829.181.249,01

Penjelasan dari saldo Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

(1) Giro BUD

Jumlah saldo Giro BUD sebesar Rp168.829.181.249,01 merupakan saldo Giro BUD Tahun 2025 pada BPD Jatim Cabang Kraksaan dengan Nomor Rekening 0131000100. Mutasi saldo Giro BUD Tahun 2025 terdiri dari.

Tabel 65 Rekapitulasi Mutasi Giro BUD per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo awal Kas di Kas Daerah	149.639.148.881,88
Mutasi Tambah :	
- Kas di Bendahara Penerimaan yang Disetor ke RKUD pada Awal Tahun 2025	319.712.473,00
- Pendapatan Tahun 2025	1.622.523.077.508,29
- Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025	56.611.340,84
- STS Pengembalian	1.310.496.623,00
- S3UP	10.618.372.310,00
- Pencairan Deposito	100.000.000.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.734.828.270.255,13
Mutasi Kurang :	
- Belanja Tahun 2025	(1.615.638.237.888,00)
- Penempatan Deposito	(100.000.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.715.638.237.888,00)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	168.829.181.249,01

(2) Deposito BUD

Jumlah saldo Deposito BUD periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Penempatan Deposito Jangka Pendek Kabupaten Probolinggo pada BPD Jatim Kraksaan Tahun 2025 adalah sebesar Rp100.000.000.000,00. Dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

Tabel 66 Rekapitulasi Mutasi Deposito Per 31 Desember 2025

No	Tanggal	Uraian	Referensi		Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
			Nomor	Tanggal			
1	22 Februari 2025	Penempatan Deposito Nomor DB. 580207 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900/97/426.2 03/2025	22 Februari 2025	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00
2	22 Februari 2025	Penempatan Deposito Nomor DB. 580208 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900/97/426.2 03/2025	22 Februari 2025	20.000.000.000,00	0,00	70.000.000.000,00
3	22 Februari 2025	Penempatan Deposito Nomor DB. 580209 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900/97/426.2 03/2025	22 Februari 2025	10.000.000.000,00	0,00	80.000.000.000,00
4	22 Februari 2025	Penempatan Deposito Nomor DB. 580210 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900/97/426.2 03/2025	22 Februari 2025	10.000.000.000,00	0,00	90.000.000.000,00
5	22 Februari 2025	Penempatan Deposito Nomor DB. 580211 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900/97/426.2 03/2025	22 Februari 2025	10.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00
6	22 Desember 2025	Pencairan Deposito Nomor DB. 580396 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900.1/581/42 6.203/2025	24 Desember 2025	0,00	(50.000.000.000,00)	50.000.000.000,00
7	22 Desember 2025	Pencairan Deposito Nomor DB. 580397 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900.1/581/42 6.203/2025	24 Desember 2025	0,00	(20.000.000.000,00)	30.000.000.000,00
8	22 Desember 2025	Pencairan Deposito Nomor DB. 580398 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900.1/581/42 6.203/2025	24 Desember 2025	0,00	(10.000.000.000,00)	20.000.000.000,00
9	22 Desember 2025	Pencairan Deposito Nomor DB. 580399 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900.1/581/42 6.203/2025	24 Desember 2025	0,00	(10.000.000.000,00)	10.000.000.000,00
10	22 Desember 2025	Pencairan Deposito Nomor DB. 580400 pada Bank JATIM Cabang Kraksaan	900.1/581/42 6.203/2025	24 Desember 2025	0,00	(10.000.000.000,00)	0,00
Jumlah					100.000.000.000,00	(100.000.000.000,00)	0,00

Penempatan Deposito Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPD Jatim Cabang Kraksaan telah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 24 Desember 2025, sehingga Saldo Deposito Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	70.242.000,00	319.812.473,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp70.242.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp249.570.473,00) dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp319.812.473,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 adalah pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan disetor ke RKUD pada Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025

No	Uraian	OPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1	PBJT–Makanan dan/atau Minuman	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	5.523.000,00	1 Januari 2026
2	PBBP2	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	63.015.000,00	2 Januari 2026
3	Retribusi Pelayanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	1.600.000,00	1 Januari 2026
4	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	4.000,00	1 Januari 2026
5	Saldo Minimal di Buku Tabungan BPR Jatim	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	100.000,00	
Jumlah			70.242.000,00	

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp100.000,00 adalah saldo minimal pada Buku Tabungan Rekening Pokok dan Buku Tabungan Rekening Bunga pada BPR Jatim sehingga tidak dipindahbukukan ke RKUD.

D.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00.

D.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	21.117.094.785,57	22.036.248.328,66

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.117.094.785,57 atau turun (4,17%) sebesar (Rp919.153.543,09) dibandingkan Tahun 2024. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 terdiri dari Saldo Kas pada RSUD Waluyoaji Kraksaan sebesar Rp7.988.135.102,50, saldo Kas pada RSUD Tongas sebesar Rp5.875.441.320,67 dan Saldo Kas pada 33 Puskesmas sebesar Rp7.253.518.362,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68 Rekapitulasi Mutasi Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1.	RSUD Waluyoaji Kraksaan	4.172.606.376,10	117.494.046.979,40	(113.678.518.253,00)	7.988.135.102,50
	Giro RSUD Waluyoaji Kraksaan (0131010931)	4.155.689.743,10	117.481.921.107,40	(113.663.335.873,00)	7.974.274.977,50
	Giro RSUD Waluyoaji Kraksaan (1430027959467 Bank Mandiri)	2.799.253,00	2.030.185,00	(1.065.000,00)	3.764.438,00
	Bendahara Penerimaan RSUD Waluyoaji Kraksaan	14.117.380,00	10.095.687,00	(14.117.380,00)	10.095.687,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
2. RSUD Tongas		11.008.526.236,12	22.450.656.158,55	(27.583.741.074,00)	5.875.441.320,67
	Giro RSUD Tongas (1611002871 Bank Jatim Cab Dringu)	11.006.337.981,12	22.449.106.194,55	(27.581.552.819,00)	5.873.891.356,67
	Bendahara Penerimaan RSUD Tongas	2.188.255,00	1.549.964,00	(2.188.255,00)	1.549.964,00
3. Puskesmas		6.855.115.716,44	91.878.052.867,96	(91.479.650.222,00)	7.253.518.362,40
	Puskesmas Bago	111.817.706,30	1.818.560.189,01	(1.805.664.916,00)	124.712.979,31
	Puskesmas Bantaran	229.041.409,03	3.675.542.919,29	(3.571.841.290,00)	332.743.038,32
	Puskesmas Banyuwanyar	61.006.843,09	2.432.406.949,78	(2.371.971.432,00)	121.442.360,87
	Puskesmas Besuk	221.708.491,92	2.130.315.238,01	(2.215.126.339,00)	136.897.390,93
	Puskesmas Condong	249.124.722,38	2.181.480.100,17	(2.430.157.155,00)	447.667,55
	Puskesmas Curah Tulis	26.921.387,51	2.032.453.831,30	(2.015.459.130,00)	43.916.088,81
	Puskesmas Dringu	125.645.071,56	2.398.310.374,67	(2.417.612.906,00)	106.342.540,23
	Puskesmas Gending	218.709.845,71	4.053.881.203,51	(4.146.795.360,00)	125.795.689,22
	Puskesmas Glagah	7.232.994,16	1.762.524.041,90	(1.595.462.873,00)	174.294.163,06
	Puskesmas Jabung Sisir	202.061.334,20	1.685.162.941,34	(1.796.933.451,00)	90.290.824,54
	Puskesmas Jorongan	100.162.383,86	1.115.460.681,98	(1.064.787.889,00)	150.835.176,84
	Puskesmas Klenang Kidul	160.417.050,63	1.689.994.171,35	(1.822.484.312,00)	27.926.909,98
	Puskesmas Kotaanyar	153.412.886,05	3.064.223.691,51	(3.076.060.354,00)	141.576.223,56
	Puskesmas Kraksaan	3.572.167,51	3.453.221.773,25	(3.097.181.964,00)	359.611.976,76
	Puskesmas Krejengan	229.999.528,46	3.202.172.202,36	(3.137.673.182,00)	294.498.548,82
	Puskesmas Krucil	600.453.271,09	5.566.073.736,42	(5.491.072.907,00)	675.454.100,51
	Puskesmas Kuripan	218.520.511,79	2.389.413.728,32	(2.266.001.379,00)	341.932.861,11
	Puskesmas Leces	342.425.376,87	3.382.537.883,07	(3.588.475.616,00)	136.487.643,94
	Puskesmas Lumbang	242.709.527,04	2.533.438.394,69	(2.497.067.634,00)	279.080.287,73
	Puskesmas Maron	249.513.848,55	5.111.575.633,44	(4.992.207.958,00)	368.881.523,99
	Puskesmas Paiton	253.935.402,15	3.140.661.898,73	(2.864.588.805,00)	530.008.495,88
	Puskesmas Pajajaran	185.429.833,19	3.075.634.398,98	(3.257.547.285,00)	3.516.947,17
	Puskesmas Pakuniran	190.839.453,32	2.244.904.955,55	(2.048.945.367,00)	386.799.041,87
	Puskesmas Ranu Gedang	49.313.398,26	3.088.629.459,33	(2.818.628.495,00)	319.314.362,59
	Puskesmas Sukapura	144.255.893,13	1.617.593.429,65	(1.586.431.576,00)	175.417.746,78
	Puskesmas Suko	78.448.105,62	957.279.200,36	(1.008.036.924,00)	27.690.381,98
	Puskesmas Sumber	37.601.486,40	1.960.211.315,74	(1.892.086.283,00)	105.726.519,14
	Puskesmas Sumberasih	423.079.765,92	4.462.493.470,73	(4.764.681.815,00)	120.891.421,65
	Puskesmas Tegalsiwalan	553.809.672,30	2.560.382.687,01	(2.564.111.758,00)	550.080.601,31
	Puskesmas Tiris	243.337.377,00	3.627.359.483,79	(3.383.039.143,00)	487.657.717,79
	Puskesmas Tongas	36.855.387,23	2.710.296.388,42	(2.676.675.845,00)	70.475.930,65
	Puskesmas Wangkal	496.666.563,72	3.688.603.393,55	(3.997.030.579,00)	188.239.378,27
	Puskesmas Wonomerto	407.087.020,49	3.065.253.100,75	(3.217.808.300,00)	254.531.821,24
Jumlah		22.036.248.328,66	231.822.756.005,91	(232.741.909.549,00)	21.117.094.785,57

D.1.1.5 Kas Lainnya	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	6.745.006,52	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.745.006,52 yang berasal dari koreksi atas Jasa Giro Rekening Penampungan Rumah Tidak Layak Huni (1611221122), sampai dengan 31 Desember 2025 belum dipindahbukukan ke RKUD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

D.1.1.6 Kas di Bendahara BOSP	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	249.461.775,31	141.088.625,58

Yang digolongkan dalam Kas di Bendahara BOSP adalah penerimaan Dana BOSP oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai hibah dari pemerintah provinsi

yang langsung diterima dan digunakan untuk operasional sekolah sebagai entitas penerima tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp249.461.775,31 atau naik 76,81% sebesar Rp108.373.149,73 dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp141.088.625,58.

Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69 Rekapitulasi Mutasi Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal Tahun Sebelumnya	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	BOSP Negeri						
	- SD	121.607.616,90	274,16	121.607.891,06	59.618.900.477,00	(59.568.605.941,43)	171.902.426,63
	- SMP	19.481.008,68	0,00	19.481.008,68	20.398.158.561,00	(20.340.080.221,00)	77.559.348,68
	Jumlah	141.088.625,58	274,16	141.088.899,74	80.017.059.038,00	(79.908.686.162,43)	249.461.775,31

Pada akun Kas di Bendahara BOSP untuk posisi akhir per 31 Desember 2025 data di lembaga sekolah sesuai dengan saldo bank dan tunai dari masing-masing satuan didik dengan total Kas di Bendahara BOSP sebesar Rp249.461.775,31 sebagaimana **Lampiran 5**. Mutasi saldo Kas di Bendahara BOSP terdiri dari.

**Tabel 70 Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOSP
per 31 Desember 2025**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Kas di Bendahara BOSP	141.088.625,58
Koreksi Saldo Awal Dana BOSP SDN Tandosentul II	274,16
Saldo Awal Setelah Koreksi	141.088.899,74
Mutasi Tambah	
Penerimaan Dana BOSP Tahap I dan Tahap II	77.259.559.038,00
Penerimaan Afiriasi & Kinerja	2.757.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	80.017.059.038,00
Mutasi Kurang	
Biaya Administrasi Pada Rekening Giro Lembaga Penerima Dana BOSP	(1.000,00)
Belanja Barang dan Jasa Dana BOSP	(59.370.912.178,00)
Belanja Modal Dana BOSP	(20.529.880.526,00)
Pengembalian BOSP	(7.892.458,43)
Jumlah Mutasi Kurang	(79.908.686.162,43)
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	249.461.775,31

D.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	742.492.373,00	1.178.693.984,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp742.492.373,00 mengalami penurunan sebesar (37,01%) atau (Rp436.201.611,00) dibandingkan dengan saldo Tahun 2024 sebesar Rp1.178.693.984,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas terdiri dari.

**Tabel 71 Rekapitulasi Mutasi Kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Puskesmas	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Bago	32.714.668,00	517.144.332,00	(545.289.000,00)	4.570.000,00
2	Puskesmas Bantaran	26.486.936,00	710.160.864,00	(697.618.611,00)	39.029.189,00
3	Puskesmas Banyuwang	12.071.899,00	485.756.101,00	(493.937.000,00)	3.891.000,00
4	Puskesmas Besuk	14.110.660,00	550.358.840,00	(548.931.939,00)	15.537.561,00
5	Puskesmas Condong	17.239.027,00	428.679.973,00	(428.846.216,00)	17.072.784,00
6	Puskesmas Curah Tulis	8.906.612,00	505.180.388,00	(506.665.396,00)	7.421.604,00
7	Puskesmas Dringu	136.196.814,00	514.896.186,00	(636.745.565,00)	14.347.435,00
8	Puskesmas Gending	14.818.298,00	568.468.992,00	(566.820.085,00)	16.467.205,00
9	Puskesmas Glagah	11.099.031,00	525.619.969,00	(533.649.678,00)	3.069.322,00
10	Puskesmas Jabungsir	28.087.214,00	451.916.736,00	(472.409.303,00)	7.594.647,00
11	Puskesmas Jorong	48.599.332,00	312.030.668,00	(348.894.000,00)	11.736.000,00
12	Puskesmas Klenang Kidul	114.897.227,00	320.278.773,00	(410.220.205,00)	24.955.795,00
13	Puskesmas Kotaanyar	17.957.910,00	572.065.240,00	(562.808.027,00)	27.215.123,00

No	Puskesmas	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
14	Puskesmas Kraksaan	27.707.485,00	951.643.345,00	(955.048.299,00)	24.302.531,00
15	Puskesmas Krejengan	36.179.500,00	652.030.200,00	(626.801.984,00)	61.407.716,00
16	Puskesmas Krucil	6.939.758,00	892.149.242,00	(886.729.000,00)	12.360.000,00
17	Puskesmas Kuripan	75.654.432,00	399.583.568,00	(444.348.000,00)	30.890.000,00
18	Puskesmas Leces	13.999.012,00	650.142.988,00	(648.091.707,00)	16.050.293,00
19	Puskesmas Lumbang	23.615.996,00	413.769.004,00	(429.751.338,00)	7.633.662,00
20	Puskesmas Maron	36.507.823,00	652.378.177,00	(668.693.895,00)	20.192.105,00
21	Puskesmas Paiton	47.877.877,00	654.528.923,00	(693.435.654,00)	8.971.146,00
22	Puskesmas Pajarakan	32.109.400,00	612.177.600,00	(617.272.323,00)	27.014.677,00
23	Puskesmas Pakuniran	110.876.542,00	303.829.458,00	(373.450.977,00)	41.255.023,00
24	Puskesmas Ranugedang	23.794.365,00	392.971.445,00	(370.076.318,00)	46.689.492,00
25	Puskesmas Sukapura	43.057.173,00	369.409.827,00	(369.721.785,00)	42.745.215,00
26	Puskesmas Suko	8.766.358,00	356.040.642,00	(364.137.633,00)	669.367,00
27	Puskesmas Sumber	29.662.281,00	438.710.719,00	(441.116.204,00)	27.256.796,00
28	Puskesmas Sumberasih	9.098.555,00	869.633.445,00	(870.021.708,00)	8.710.292,00
29	Puskesmas Tegalsiwalan	23.669.814,00	677.858.786,00	(619.374.032,00)	82.154.568,00
30	Puskesmas Tiris	62.493.733,00	430.579.867,00	(462.831.164,00)	30.242.436,00
31	Puskesmas Tongas	6.133.230,00	524.532.770,00	(519.845.749,00)	10.820.251,00
32	Puskesmas Wangkal	53.545.228,00	647.850.842,00	(669.492.932,00)	31.903.138,00
33	Puskesmas Wonomerto	23.819.794,00	475.630.106,00	(481.133.900,00)	18.316.000,00
Jumlah		1.178.693.984,00	17.828.008.016,00	(18.264.209.627,00)	742.492.373,00

Terdapat selisih antara saldo kas bank dengan BKU pada Puskesmas Sukapura dikarenakan *double* transfer Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp12.979.616,00 pada tanggal 29 Desember 2025 dan dikembalikan ke rekening BOK Puskesmas pada tanggal 2 Januari 2026.

D.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	31.469.810.004,27	29.584.551.048,50

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.469.810.004,27 mengalami kenaikan 6,37% atau sebesar Rp1.885.258.955,77 dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Pajak Reklame	368.157.300,00	1.873.594.621,00	(2.109.576.921,00)	132.175.000,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	135.276.368,00	978.953.971,40	(1.001.829.884,90)	112.400.454,50
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	582.633.731,50	2.973.737.389,60	(2.985.737.389,60)	570.633.731,50
4	Piutang PBBP2	23.086.614.792,00	26.031.088.481,00	(23.484.775.183,00)	25.632.928.090,00
5	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	490.260.195,00	10.134.346.846,04	(9.962.403.852,22)	662.203.188,82
6	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	3.402.752.820,00	38.538.192.666,00	(38.450.103.758,00)	3.490.841.728,00
7	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	1.283.245.453,00	3.354.831.651,45	(3.983.147.343,00)	654.929.761,45
8	Piutang PBJT-Jasa Parkir	30.243.469,00	167.423.435,00	(171.125.234,00)	26.541.670,00
9	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	205.366.920,00	302.244.775,00	(320.455.315,00)	187.156.380,00
Jumlah		29.584.551.048,50	84.354.413.836,49	(82.469.154.880,72)	31.469.810.004,27

Rincian dari Piutang Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut.

(a) Piutang Pajak Reklame

Saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp368.157.300,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya sebesar Rp18.815.000,00 dan terdapat penghapusan piutang Tahun 2015-2019 sebesar Rp285.001.300,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 900.1.12.1/368/426.31/2025 tanggal 25 November 2025 tentang

Penghapusan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp1.873.594.621,00 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp1.805.760.621,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp132.175.000,00 atau turun (64,10%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 73 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak Reklame
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2015	8.716.000,00	0,00	(8.716.000,00)	0,00
2	2016	48.535.000,00	0,00	(48.535.000,00)	0,00
3	2017	51.850.000,00	0,00	(51.850.000,00)	0,00
4	2018	152.683.750,00	0,00	(152.683.750,00)	0,00
5	2019	23.216.550,00	0,00	(23.216.550,00)	0,00
6	2022	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
7	2024	71.156.000,00	0,00	(18.815.000,00)	52.341.000,00
8	2025	0,00	1.873.594.621,00	(1.805.760.621,00)	67.834.000,00
Jumlah		368.157.300,00	1.873.594.621,00	(2.109.576.921,00)	132.175.000,00

Rincian Piutang Pajak Reklame masing-masing wajib pajak tiap tahun terdapat pada **Lampiran 6.1**.

(b) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo awal Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp135.276.368,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada Tahun 2025 sebesar Rp91.255.839,50. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp978.953.971,40 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp910.574.045,40, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp112.400.454,50 atau turun (16,91%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 74 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak Air Tanah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2019	502.350,00	0,00	0,00	502.350,00
2	2020	2.657.700,00	0,00	0,00	2.657.700,00
3	2021	10.670.150,00	0,00	(1.040.080,00)	9.630.070,00
4	2022	10.658.565,00	0,00	(2.399.860,00)	8.258.705,00
5	2023	9.251.750,00	0,00	(3.093.380,00)	6.158.370,00
6	2024	101.535.853,00	0,00	(84.722.519,50)	16.813.333,50
7	2025	0,00	978.953.971,40	(910.574.045,40)	68.379.926,00
Jumlah		135.276.368,00	978.953.971,40	(1.001.829.884,90)	112.400.454,50

Rincian Piutang Pajak Air Tanah masing-masing wajib pajak tiap tahun terdapat pada **lampiran 6.2**.

(c) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo awal Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp582.633.731,50. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada Tahun 2025 sebesar Rp12.000.000,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025 sebesar Rp2.973.737.389,60 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp2.973.737.389,60, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp570.633.731,50 atau turun (2,06%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2024	582.633.731,50	0,00	(12.000.000,00)	570.633.731,50
2	2025	0,00	2.973.737.389,60	(2.973.737.389,60)	0,00
Jumlah		582.633.731,50	2.973.737.389,60	(2.985.737.389,60)	570.633.731,50

Berikut rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 76 Rincian Piutang Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025

No	Nama Wajib Pajak	Jumlah (Rp)
1	Sunanik Ispahani	276.055.000,00
2	CV Lancar Jaya	21.822.481,50
3	Yudha Makmur Artanti	272.756.250,00
Jumlah		570.633.731,50

(d) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Terdapat saldo awal Piutang PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp23.086.614.792,00, atas piutang tersebut telah diterima pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp893.503.018,00. Nilai Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 900.1.13.1/109/426.32/2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 sebesar Rp26.031.088.481,00 dan realisasi atas ketetapan Tahun 2025 sebesar Rp22.591.272.165,00 sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp25.632.928.090,00 atau naik 11,03% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBBP2 per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2013	3.201.753.335,00	0,00	(54.536.702,00)	3.147.216.633,00
2	2014	2.292.249.274,00	0,00	(33.553.476,00)	2.258.695.798,00
3	2015	749.227.678,00	0,00	(17.178.417,00)	732.049.261,00
4	2016	931.335.347,00	0,00	(19.568.830,00)	911.766.517,00
5	2017	2.516.321.602,00	0,00	(53.259.629,00)	2.463.061.973,00
6	2018	2.013.087.378,00	0,00	(52.410.075,00)	1.960.677.303,00
7	2019	1.972.715.769,00	0,00	(56.990.828,00)	1.915.724.941,00
8	2020	1.815.207.531,00	0,00	(40.891.393,00)	1.774.316.138,00
9	2021	2.542.795.663,00	0,00	(55.275.493,00)	2.487.520.170,00
10	2022	1.439.811.964,00	0,00	(93.453.558,00)	1.346.358.406,00
11	2023	1.337.169.643,00	0,00	(99.750.975,00)	1.237.418.668,00
12	2024	2.274.939.608,00	0,00	(316.633.642,00)	1.958.305.966,00
13	2025	0,00	26.031.088.481,00	(22.591.272.165,00)	3.439.816.316,00
Jumlah		23.086.614.792,00	26.031.088.481,00	(23.484.775.183,00)	25.632.928.090,00

Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2014 PBBP2 dilimpahkan pengelolaannya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Probolinggo kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-1B/WPJ.12/KP.06/2014 dan menjadi Pajak Daerah sebesar Rp40.562.701.617,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78 Rincian Piutang PBBP2 Pelimpahan dari KPP Pratama

No	Tahun	Piutang (Rp)
1	1994	1.372.047.404,00
2	1995	1.232.070.599,00
3	1996	266.544.755,00
4	1997	766.507.993,00

No	Tahun	Piutang (Rp)
5	1998	335.804.335,00
6	1999	225.601.438,00
7	2000	973.042.101,00
8	2001	1.255.340.936,00
9	2002	1.870.512.988,00
10	2003	3.014.008.740,00
11	2004	855.266.356,00
12	2005	1.456.503.222,00
13	2006	1.405.844.393,00
14	2007	3.251.418.986,00
15	2008	2.586.332.409,00
16	2009	2.076.060.399,00
17	2010	2.661.585.048,00
18	2011	3.870.227.976,00
19	2012	6.346.170.484,00
20	2013	4.741.811.055,00
Jumlah		40.562.701.617,00

Atas pelimpahan Piutang dari KPP Pratama sebesar Rp40.562.701.617,00. Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi dan cek lapangan dengan membentuk Tim Fokus Verifikasi Piutang PBBP2 dengan menerbitkan SK Bupati Probolinggo Nomor 973/1497/426.12/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemutakhiran Data Piutang PBBP2 Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.

Adapun hasil verifikasi yang telah berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Piutang yang memiliki umur lebih dari lima tahun sebesar Rp20.866.846.655,00 (1994-2008) dapat dikategorikan sebagai Piutang kadaluarsa sesuai Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga dipisahkan dalam objek pelaksanaan verifikasi lapangan.
- Fokus pelaksanaan verifikasi Piutang PBBP2 hasil pelimpahan dari KPP Pratama adalah Piutang yang memiliki umur Piutang lima Tahun (2009-2013) sebesar Rp19.695.854.962,00 dan belum dapat dikategorikan sebagai Piutang kadaluarsa. Dari hasil verifikasi Piutang PBBP2 Tahun 2015 dari lima kategori yaitu kategori perekaman, kategori objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya (K1), objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (K2), objek pajak yang subjek pajaknya tidak teridentifikasi dengan jelas (K3), objek pajak yang lokasi peruntukannya fasilitas umum (K4) diperoleh rincian sebagai berikut.

Tabel 79 Rincian Hasil Verifikasi Piutang PBBP2 Tahun 2015

Tahun Pajak	Perekaman (Rp)	Hasil Verifikasi Lapangan				Jumlah (Rp)
		Objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya K(1) (Rp)	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (K2) (Rp)	Objek pajak yang subjek pajaknya tidak teridentifikasi dengan jelas (K3) (Rp)	Objek pajak yang lokasi peruntukannya fasilitas umum (K4) (Rp)	
2009	367.567.768,00	4.654.818,00	1.582.062,00	8.459.111,00	938.444,00	383.202.203,00
2010	653.259.618,00	5.225.382,00	1.775.679,00	8.303.328,00	1.456.538,00	670.020.545,00
2011	1.200.287.728,00	9.054.619,00	1.736.838,00	10.702.768,00	1.737.448,00	1.223.519.401,00
2012	1.767.148.507,00	10.288.917,00	2.521.678,00	17.227.052,00	2.009.605,00	1.799.195.759,00
2013	1.338.736.484,00	9.291.406,00	2.918.024,00	12.745.377,00	2.015.025,00	1.365.706.316,00
2014	0,00	9.291.406,00	2.918.024,00	12.745.377,00	2.015.025,00	26.969.832,00

Tahun Pajak	Perekaman (Rp)	Hasil Verifikasi Lapangan				Jumlah (Rp)
		Objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya K(1) (Rp)	Objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP (K2) (Rp)	Objek pajak yang subjek pajaknya tidak teridentifikasi dengan jelas (K3) (Rp)	Objek pajak yang lokasi peruntukannya fasilitas umum (K4) (Rp)	
2015	0,00	9.291.406,00	2.918.024,00	12.745.377,00	1.919.025,00	26.873.832,00
Jumlah	5.327.000.105,00	57.097.954,00	16.370.329,00	82.928.390,00	12.080.270,00	5.495.583.888,00

Realisasi PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp23.657.124.202,00 terdiri dari Pokok PBBP2 sebesar Rp23.484.775.183,00, denda PBBP2 sebesar Rp96.031.956,00 dan piutang pokok dan denda Tahun 2012 yang sudah dihapus sebesar Rp76.317.063,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80 Rincian Realisasi PBBP2

No	Tahun	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Piutang Pokok dan Denda Tahun 2012 yang sudah dihapus (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)
1	2012	0,00	9.760.928,00	76.317.063,00	86.077.991,00
2	2013	54.536.702,00	7.289.018,00	0,00	61.825.720,00
3	2014	33.553.476,00	4.537.304,00	0,00	38.090.780,00
4	2015	17.178.417,00	1.426.393,00	0,00	18.604.810,00
5	2016	19.568.830,00	1.526.036,00	0,00	21.094.866,00
6	2017	53.259.629,00	3.929.974,00	0,00	57.189.603,00
7	2018	52.410.075,00	3.579.152,00	0,00	55.989.227,00
8	2019	56.990.828,00	3.704.131,00	0,00	60.694.959,00
9	2020	40.891.393,00	3.028.940,00	0,00	43.920.333,00
10	2021	55.275.493,00	4.401.754,00	0,00	59.677.247,00
11	2022	93.453.558,00	8.200.920,00	0,00	101.654.478,00
12	2023	99.750.975,00	6.381.277,00	0,00	106.132.252,00
13	2024	316.633.642,00	11.739.879,00	0,00	328.373.521,00
12	2025	22.591.272.165,00	26.526.250,00	0,00	22.617.798.415,00
Jumlah		23.484.775.183,00	96.031.956,00	76.317.063,00	23.657.124.202,00

(e) Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Saldo awal Piutang PBJT-Makanan dan/atau Tahun 2025 sebesar Rp490.260.195,00. Atas piutang tersebut diterima pembayaran pada Tahun 2025 sebesar Rp47.804.882,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp10.134.346.846,04 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp9.860.562.277,30, serta terdapat koreksi atas ketetapan sebesar Rp54.036.692,92 sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp662.203.188,82, naik sebesar Rp171.942.993,82 atau 35,07% dari Tahun 2024 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 81 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBJT- Makanan dan/atau Minuman per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2023	490.260.195,00	0,00	(47.804.882,00)	442.455.313,00
2	2025	0,00	10.134.346.846,04	(9.914.598.970,22)	219.747.875,82
Jumlah		490.260.195,00	10.134.346.846,04	(9.962.403.852,22)	662.203.188,82

Berikut rincian Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman per masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 82 Rincian Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman

No	Nama Wajib Pajak	Nominal (Rp)
1	Ayam Bawangan Sukapura	331.536.239,00
2	Kampoeng Kita	54.398.609,00
3	Hotel Bromo Permai	56.520.463,00
4	RC Leces	1,00
5	Lava View Lodge	1,00
6	Resto Artotel Cabin Bromo	40.513.323,82
7	Cala Coffee & Eatery	169.988.052,00
8	Piutang PBJT-Jasa Boga/Katering	9.246.500,00
Jumlah		662.203.188,82

(f) Piutang PBJT-Tenaga Listrik

Saldo awal Piutang PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp3.402.752.820,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada tanggal 15 Januari 2025. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas PBJT-Tenaga Listrik Tahun 2025 sebesar Rp38.538.192.666,00 dan realisasi penerimaan atas SKP tersebut sebesar Rp35.047.350.938,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.490.841.728,00 naik sebesar Rp88.088.908,00 atau 2,59% dari Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 83 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBJT-Tenaga Listrik per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2025	3.402.752.820,00	38.538.192.666,00	(38.450.103.758,00)	3.490.841.728,00
Jumlah		3.402.752.820,00	38.538.192.666,00	(38.450.103.758,00)	3.490.841.728,00

(g) Piutang PBJT-Jasa Perhotelan

Saldo awal Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp1.283.245.453,00. Atas Piutang tersebut diterima pembayaran pada Tahun 2025 sebesar Rp835.958.176,00 dan terdapat koreksi atas saldo piutang sebesar Rp85.259.545,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp3.354.831.651,45 dan realisasi penerimaan atas SKP tersebut sebesar Rp3.061.929.622,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp654.929.761,45 atau turun (48,96%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 84 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2023	447.287.279,00	0,00	(85.259.547,00)	362.027.732,00
2	2024	835.958.174,00	0,00	(835.958.174,00)	0,00
3	2025	0,00	3.354.831.651,45	(3.061.929.622,00)	292.902.029,45
Jumlah		1.283.245.453,00	3.354.831.651,45	(3.983.147.343,00)	654.929.761,45

Berikut rincian Piutang PBJT-Jasa Perhotelan per masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 85 Rincian Piutang PBJT-Jasa Perhotelan

No	Nama Wajib Pajak	Nominal (Rp)
1	Hotel Sumber Makmur	34.447.273,00
2	Kampoeng Kita	33.196.831,00
3	Hotel Bromo Permai	294.383.628,00

No	Nama Wajib Pajak	Nominal (Rp)
4	Bromo Permai I	92.108.702,10
5	Hotel Artotel Cabin Bromo	200.793.327,35
Jumlah		654.929.761,45

(h) Piutang PBJT-Jasa Parkir

Saldo awal Piutang PBJT-Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp30.243.469,00. Atas piutang tersebut telah diterima pembayarannya Tahun 2025 sebesar Rp3.701.799,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas PBJT-Jasa Parkir Tahun 2025 sebesar Rp167.423.435,00 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp167.423.435,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp26.541.670,00 atau turun (12,24%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 86 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBJT-Jasa Parkir per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2024	30.243.469,00	0,00	(3.701.799,00)	26.541.670,00
2	2025	0,00	167.423.435,00	(167.423.435,00)	0,00
Jumlah		30.243.469,00	167.423.435,00	(171.125.234,00)	26.541.670,00

Berikut rincian Piutang PBJT-Jasa Parkir per masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 87 Rincian Piutang PBJT-Jasa Parkir Tahun 2025

No	Nama Wajib Pajak	Nominal (Rp)
1	Parkir Diva Swalayan	26.541.666,00
2	Parkir RS Rizani	4,00
Jumlah		26.541.670,00

(i) Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Saldo awal Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp205.366.920,00. Atas piutang tersebut telah diterima pembayarannya Tahun 2025 sebesar Rp18.210.540,00. Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp302.244.775,00 dan realisasi penerimaan atas SKP Tahun 2025 sebesar Rp302.244.775,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp187.156.380,00 atau turun (8,87%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 88 Rekapitulasi Mutasi Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2024	205.366.920,00	0,00	(18.210.540,00)	187.156.380,00
2	2025	0,00	302.244.775,00	(302.244.775,00)	0,00
Jumlah		205.366.920,00	302.244.775,00	(320.455.315,00)	187.156.380,00

Berikut rincian Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan per masing-masing Wajib Pajak.

Tabel 89 Rincian Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025

No	Nama Wajib Pajak	Nominal (Rp)
1	Karaoke Galiel Kampoeng Kita	15.357.880,00
2	Kitoz Plaground	500,00
3	Area Permainan Diva Zone	72.200.000,00
4	JR Karaoke	39.500.000,00
5	Happy GYM	4.763.000,00
6	Jazz Gunung Bromo	55.335.000,00
Jumlah		187.156.380,00

D.1.1.9	Piutang Retribusi Daerah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		25.303.425.785,00	2.978.996.793,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.303.425.785,00 naik sebesar Rp22.324.428.992,00 atau sebesar 749,39% dari Tahun 2024 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 90 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	17.081.711.062,00	(106.916.224,00)	21.130.833.233,00	(16.399.825.449,00)	21.705.802.622,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	31.900.000,00	0,00	0,00	2.498.100.000,00	(2.438.275.000,00)	91.725.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2.769.596.793,00	0,00	0,00	4.270.942.000,00	(3.891.872.714,00)	3.148.666.079,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	177.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500.000,00
5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	4.445.000,00	0,00	337.779.967,00	(162.492.883,00)	179.732.084,00
Jumlah		2.978.996.793,00	17.086.156.062,00	(106.916.224,00)	28.237.655.200,00	(22.892.466.046,00)	25.303.425.785,00

(a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp21.705.802.622,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 91 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Pendapatan BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	0,00	14.679.763.635,00	(106.916.224,00)	16.910.702.013,00	(13.997.878.022,00)	17.485.671.402,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	2.401.947.427,00	0,00	4.220.131.220,00	(2.401.947.427,00)	4.220.131.220,00
Jumlah		0,00	17.081.711.062,00	(106.916.224,00)	21.130.833.233,00	(16.399.825.449,00)	21.705.802.622,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Tahun 2025 sebesar Rp17.485.671.402,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 92 Rekapitulasi Mutasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Pendapatan BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD Tongas	0,00	1.721.938.123,00	(37.420.300,00)	2.742.565.378,00	(1.643.155.407,00)	2.783.927.794,00
	Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	2.742.565.378,00	0,00	2.742.565.378,00
-	Piutang Obat Karyawan	0,00	0,00	0,00	3.024.270,00	0,00	3.024.270,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Pendapatan BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
-	Piutang Pasien Umum 2025	0,00	0,00	0,00	18.313.616,00	0,00	18.313.616,00
-	Klaim JR	0,00	0,00	0,00	21.542.938,00	0,00	21.542.938,00
-	Klaim BPJS TK 2025	0,00	0,00	0,00	59.208.267,00	0,00	59.208.267,00
-	Klaim BPJS Obat	0,00	0,00	0,00	83.427.620,00	0,00	83.427.620,00
-	Klaim BPJS Ambulan	0,00	0,00	0,00	19.550.713,00	0,00	19.550.713,00
-	Klaim BPJS Susulan September 2025	0,00	0,00	0,00	13.348.000,00	0,00	13.348.000,00
-	Klaim BPJS Susulan Oktober 2025	0,00	0,00	0,00	196.327.495,00	0,00	196.327.495,00
-	Klaim BPJS Susulan November 2025	0,00	0,00	0,00	320.793.500,00	0,00	320.793.500,00
-	Klaim BPJS Reguler Desember 2025	0,00	0,00	0,00	1.854.176.200,00	0,00	1.854.176.200,00
-	Klaim BPJS Susulan Desember 2025	0,00	0,00	0,00	152.852.759,00	0,00	152.852.759,00
Tahun 2024		0,00	1.655.042.452,00	(37.420.300,00)	0,00	(1.615.952.381,00)	1.669.771,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	1.669.771,00	0,00	0,00	0,00	1.669.771,00
-	Piutang Obat Karyawan	0,00	1.596.581,00	0,00	0,00	(1.596.581,00)	0,00
-	Klaim BPJS 2024	0,00	1.651.776.100,00	(37.420.300,00)	0,00	(1.614.355.800,00)	0,00
Tahun 2023		0,00	6.225.266,00	0,00	0,00	(204.026,00)	6.021.240,00
-	Piutang Pasien Umum Maret	0,00	6.021.240,00	0,00	0,00	0,00	6.021.240,00
-	Piutang Obat Karyawan	0,00	204.026,00	0,00	0,00	(204.026,00)	0,00
Tahun 2022		0,00	3.875.296,00	0,00	0,00	0,00	3.875.296,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	3.875.296,00	0,00	0,00	0,00	3.875.296,00
Tahun 2021		0,00	26.999.000,00	0,00	0,00	(26.999.000,00)	0,00
-	Klaim Covid Juni-Oktober	0,00	26.999.000,00	0,00	0,00	(26.999.000,00)	0,00
Tahun 2019		0,00	11.435.849,00	0,00	0,00	0,00	11.435.849,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	11.435.849,00	0,00	0,00	0,00	11.435.849,00
Tahun 2018		0,00	9.135.260,00	0,00	0,00	0,00	9.135.260,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	9.135.260,00	0,00	0,00	0,00	9.135.260,00
Tahun 2016		0,00	9.225.000,00	0,00	0,00	0,00	9.225.000,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	9.225.000,00	0,00	0,00	0,00	9.225.000,00
2	RSUD Waluyoaji Kraksaan	0,00	12.957.825.512,00	(69.495.924,00)	14.168.136.635,00	(12.354.722.615,00)	14.701.743.608,00
Tahun 2025		0,00	0,00	0,00	14.168.136.635,00	0,00	14.168.136.635,00
-	Piutang Pasien Umum	0,00	0,00	0,00	8.929.323,00	0,00	8.929.323,00
-	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Oktober Tahap 2	0,00	0,00	0,00	1.067.274.524,00	0,00	1.067.274.524,00
-	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Oktober Tahap 3	0,00	0,00	0,00	14.474.000,00	0,00	14.474.000,00
-	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan November Tahap 2	0,00	0,00	0,00	849.484.969,00	0,00	849.484.969,00
-	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	0,00	0,00	0,00	177.407.074,00	0,00	177.407.074,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Pendapatan BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	November Tahap 3						
	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Desember Tahap 1	0,00	0,00	0,00	9.726.213.529,00	0,00	9.726.213.529,00
-	Piutang BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan Desember Tahap 2	0,00	0,00	0,00	734.427.685,00	0,00	734.427.685,00
-	Piutang BPJS Obat Kronis Desember 2025	0,00	0,00	0,00	292.152.097,00	0,00	292.152.097,00
-	Piutang BPJS Ambulance dan Alkes Desember 2025	0,00	0,00	0,00	60.697.513,00	0,00	60.697.513,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	20.109.825,00	0,00	20.109.825,00
-	Piutang Jasa Raharja	0,00	0,00	0,00	1.022.794.399,00	0,00	1.022.794.399,00
-	Piutang Taspen	0,00	0,00	0,00	13.949.207,00	0,00	13.949.207,00
-	Piutang Inhealth	0,00	0,00	0,00	6.556.105,00	0,00	6.556.105,00
-	Piutang Pomi	0,00	0,00	0,00	73.194.731,00	0,00	73.194.731,00
-	Piutang Rs. Rizani	0,00	0,00	0,00	97.027.654,00	0,00	97.027.654,00
-	Piutang Rs. Graha Sehat	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
-	Piutang Rs. Wonolangan	0,00	0,00	0,00	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00
	Tahun 2024	0,00	12.065.521.255,00	0,00	0,00	(11.949.056.815,00)	116.464.440,00
-	Pasien Umum	0,00	116.464.440,00	0,00	0,00	0,00	116.464.440,00
-	Piutang Jasa Raharja	0,00	332.317.947,00	0,00	0,00	(332.317.947,00)	0,00
-	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	107.308.731,00	0,00	0,00	(107.308.731,00)	0,00
-	Piutang LAB dan Radiologi Rujukan	0,00	35.545.185,00	0,00	0,00	(35.545.185,00)	0,00
-	Piutang ABIPRAYA	0,00	4.912.367,00	0,00	0,00	(4.912.367,00)	0,00
-	Piutang BPJS	0,00	11.468.972.585,00	0,00	0,00	(11.468.972.585,00)	0,00
	Tahun 2023	0,00	410.723.842,00	(332.900,00)	0,00	(402.665.800,00)	7.725.142,00
-	Pasien Umum	0,00	7.725.142,00	0,00	0,00	0,00	7.725.142,00
-	Piutang Covid	0,00	402.998.700,00	(332.900,00)	0,00	(402.665.800,00)	0,00
	Tahun 2022	0,00	46.125.385,00	0,00	0,00	0,00	46.125.385,00
-	Pasien Umum	0,00	46.125.385,00	0,00	0,00	0,00	46.125.385,00
	Tahun 2021	0,00	26.988.891,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	23.988.891,00
-	Pasien Umum	0,00	26.988.891,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	23.988.891,00
	Tahun 2020	0,00	55.998.172,00	0,00	0,00	0,00	55.998.172,00
-	Pasien Umum	0,00	55.998.172,00	0,00	0,00	0,00	55.998.172,00
	Tahun 2019	0,00	23.356.815,00	0,00	0,00	0,00	23.356.815,00
-	Pasien Umum	0,00	23.356.815,00	0,00	0,00	0,00	23.356.815,00
	Tahun 2018	0,00	67.428.155,00	(48.682.000,00)	0,00	0,00	18.746.155,00
-	Pasien Umum	0,00	18.746.155,00	0,00	0,00	0,00	18.746.155,00
-	BPJS Pending	0,00	48.682.000,00	(48.682.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Tahun 2017	0,00	72.882.023,00	(19.142.370,00)	0,00	0,00	53.739.653,00
-	Pasien Umum	0,00	53.739.653,00	0,00	0,00	0,00	53.739.653,00
-	Jasa Raharja 2017 - Periode 1 s/d 9	0,00	4.506.170,00	(4.506.170,00)	0,00	0,00	0,00
-	BPJS Pending	0,00	14.636.200,00	(14.636.200,00)	0,00	0,00	0,00
	Tahun 2016	0,00	67.055.954,00	(1.338.654,00)	0,00	0,00	65.717.300,00
-	Pasien Umum	0,00	65.717.300,00	0,00	0,00	0,00	65.717.300,00
-	Jasa Raharja	0,00	1.338.654,00	(1.338.654,00)	0,00	0,00	0,00
	Tahun 2015	0,00	34.976.305,00	0,00	0,00	0,00	34.976.305,00
-	Pasien Umum	0,00	22.750.805,00	0,00	0,00	0,00	22.750.805,00
-	BPJS Ketenagakerjaan - Pelayanan bulan Januari (NRM:249520 a.n Rahmatin)	0,00	12.225.500,00	0,00	0,00	0,00	12.225.500,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Pendapatan BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Tahun 2014	0,00	29.207.646,00	0,00	0,00	0,00	29.207.646,00
-	Pasien Umum	0,00	29.207.646,00	0,00	0,00	0,00	29.207.646,00
	Tahun 2013	0,00	20.528.992,00	0,00	0,00	0,00	20.528.992,00
-	Pasien Umum	0,00	20.528.992,00	0,00	0,00	0,00	20.528.992,00
	Tahun 2012	0,00	37.032.077,00	0,00	0,00	0,00	37.032.077,00
-	Pasien Umum	0,00	37.032.077,00	0,00	0,00	0,00	37.032.077,00
	Jumlah	0,00	14.679.963.635,00	(106.916.224,00)	16.910.702.013,00	(13.997.878.022,00)	17.485.671.402,00

Terdapat Koreksi Pengurangan Piutang pada RSUD Waluyoajati sebesar (Rp69.495.924,00) dengan rincian sebagai berikut.

- Berdasarkan Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Data Pembiayaan Klaim JKN INACBG BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sampai dengan Agustus Tahun 2023 Nomor: 8037/BA/VII-06/1223 telah disampaikan bahwa per Agustus 2023 yang diakui belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sebesar nihil. Sehingga piutang dari Covid tahun 2023 sebesar Rp332.900,00, piutang BPJS yang statusnya Pending Tahun 2017 sebesar Rp48.682.000,00 dan piutang BPJS yang statusnya Pending Tahun 2018 sebesar Rp14.636.200,00 status pengajuannya dinyatakan ditolak.
- Berdasarkan Surat dari RSUD Waluyoajati kepada PT Jasa Raharja Nomor: 790/471/426.102.35/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Perihal Tagihan yang belum dibayar dan Berdasarkan Surat balasan dari Jasa Raharja Nomor: PL/R/13/2025 perihal Penolakan Pembayaran Tagihan telah disampaikan bahwa terdapat Piutang Jasa Raharja Tahun 2017 sebesar Rp4.506.170,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.338.654,00 status pengajuannya dinyatakan kadaluarsa.

Koreksi Pengurangan Piutang pada RSUD Tongas sebesar (Rp37.420.300,00) berdasarkan Dokumen Berita Acara Pengembalian Dana Lebih Bayar Hasil Verifikasi Pasca Klaim Nomor: 510/BA/VII-06/0125 dinyatakan bahwa terdapat perubahan dalam pengkodean kode diagnosa sebesar Rp37.420.300,00 sehingga pihak BPJS akan melakukan pemotongan klaim bulan pelayanan Desember 2024.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp4.220.131.220,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Piutang BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Bago	0,00	41.466.500,00	0,00	80.687.500,00	(41.466.500,00)	80.687.500,00
2	Puskesmas Bantaran	0,00	75.519.620,00	0,00	187.971.360,00	(75.519.620,00)	187.971.360,00
3	Puskesmas Banyuwang	0,00	24.883.000,00	0,00	59.810.500,00	(24.883.000,00)	59.810.500,00
4	Puskesmas Besuk	0,00	33.679.926,00	0,00	81.565.500,00	(33.679.926,00)	81.565.500,00
5	Puskesmas Condong	0,00	110.260.000,00	0,00	190.910.000,00	(110.260.000,00)	190.910.000,00
6	Puskesmas Curah Tulis	0,00	24.065.000,00	0,00	67.100.000,00	(24.065.000,00)	67.100.000,00
7	Puskesmas Dringu	0,00	32.474.500,00	0,00	108.757.500,00	(32.474.500,00)	108.757.500,00
8	Puskesmas Gending	0,00	155.014.620,00	0,00	195.409.890,00	(155.014.620,00)	195.409.890,00
9	Puskesmas Glagah	0,00	44.900.000,00	0,00	147.751.500,00	(44.900.000,00)	147.751.500,00
10	Puskesmas Jabung Sisir	0,00	116.150.000,00	0,00	65.942.500,00	(116.150.000,00)	65.942.500,00
11	Puskesmas Jorong	0,00	28.367.500,00	0,00	70.622.395,00	(28.367.500,00)	70.622.395,00
12	Puskesmas	0,00	27.667.600,00	0,00	53.276.000,00	(27.667.600,00)	53.276.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Piutang BLUD (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Klenang Kidul						
13	Puskesmas Kotaanyar	0,00	72.309.574,00	0,00	81.535.174,00	(72.309.574,00)	81.535.174,00
14	Puskesmas Kraksaan	0,00	77.255.500,00	0,00	125.122.000,00	(77.255.500,00)	125.122.000,00
15	Puskesmas Krejengan	0,00	57.585.000,00	0,00	90.701.000,00	(57.585.000,00)	90.701.000,00
16	Puskesmas Krucil	0,00	238.154.030,00	0,00	347.297.700,00	(238.154.030,00)	347.297.700,00
17	Puskesmas Kuripan	0,00	21.725.500,00	0,00	79.900.000,00	(21.725.500,00)	79.900.000,00
18	Puskesmas Leces	0,00	104.284.260,00	0,00	244.337.937,00	(104.284.260,00)	244.337.937,00
19	Puskesmas Lumbang	0,00	47.214.735,00	0,00	113.813.240,00	(47.214.735,00)	113.813.240,00
20	Puskesmas Maron	0,00	157.014.000,00	0,00	330.603.000,00	(157.014.000,00)	330.603.000,00
21	Puskesmas Paiton	0,00	64.401.785,00	0,00	113.546.025,00	(64.401.785,00)	113.546.025,00
22	Puskesmas Pajajaran	0,00	92.315.000,00	0,00	143.646.500,00	(92.315.000,00)	143.646.500,00
23	Puskesmas Pakuniran	0,00	53.666.500,00	0,00	54.653.500,00	(53.666.500,00)	54.653.500,00
24	Puskesmas Ranu Gedang	0,00	124.075.400,00	0,00	109.749.800,00	(124.075.400,00)	109.749.800,00
25	Puskesmas Sukapura	0,00	47.087.985,00	0,00	124.679.590,00	(47.087.985,00)	124.679.590,00
26	Puskesmas Suko	0,00	13.684.580,00	0,00	42.362.095,00	(13.684.580,00)	42.362.095,00
27	Puskesmas Sumber	0,00	12.610.060,00	0,00	50.283.190,00	(12.610.060,00)	50.283.190,00
28	Puskesmas Sumberasih	0,00	81.723.592,00	0,00	226.876.700,00	(81.723.592,00)	226.876.700,00
29	Puskesmas Tegalsiwalan	0,00	33.837.300,00	0,00	89.063.804,00	(33.837.300,00)	89.063.804,00
30	Puskesmas Tiris	0,00	63.569.000,00	0,00	99.253.000,00	(63.569.000,00)	99.253.000,00
31	Puskesmas Tongas	0,00	28.427.500,00	0,00	71.152.000,00	(28.427.500,00)	71.152.000,00
32	Puskesmas Wangkal	0,00	191.041.000,00	0,00	274.967.500,00	(191.041.000,00)	274.967.500,00
33	Puskesmas Wonomerto	0,00	105.516.860,00	0,00	96.782.820,00	(105.516.860,00)	96.782.820,00
Jumlah		0,00	2.401.947.427,00	0,00	4.220.131.220,00	(2.401.947.427,00)	4.220.131.220,00

(b) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp31.900.000,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada Tahun 2025 sebesar Rp8.250.000,00. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada Tahun 2025 sebesar Rp2.498.100.000,00. Atas SKRD Tahun 2025 telah diterima pembayaran sebesar Rp2.430.025.000,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp91.725.000,00 atau naik 187,54% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 94 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2023	16.100.000,00	0,00	(3.200.000,00)	12.900.000,00
2	2024	15.800.000,00	0,00	(5.050.000,00)	10.750.000,00
3	2025	0,00	2.498.100.000,00	(2.430.025.000,00)	68.075.000,00
Jumlah		31.900.000,00	2.498.100.000,00	(2.438.275.000,00)	91.725.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp91.725.000,00 dengan rincian masing-masing wajib retribusi terdapat pada **Lampiran 6.3**.

(c) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sebesar Rp2.769.596.793,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya Tahun 2025 sebesar Rp229.766.000,00. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada Tahun 2025 sebesar Rp4.270.942.000,00. Atas SKRD Tahun 2025 telah diterima pembayaran sebesar Rp3.661.606.714,00, sehingga saldo akhir Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.148.666.079,00 atau naik 13,69% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 95 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2017	20.239.500,00	0,00	0,00	20.239.500,00
2	2018	34.320.534,00	0,00	0,00	34.320.534,00
3	2019	358.332.766,00	0,00	(500.000,00)	357.832.766,00
4	2020	119.436.250,00	0,00	0,00	119.436.250,00
5	2021	412.660.500,00	0,00	(2.190.000,00)	410.470.500,00
6	2022	412.373.500,00	0,00	(87.000,00)	412.286.500,00
7	2023	505.833.484,00	0,00	(2.860.000,00)	502.973.484,00
8	2024	906.400.259,00	0,00	(224.629.000,00)	681.771.259,00
9	2025	0,00	4.270.942.000,00	(3.661.606.714,00)	609.335.286,00
Jumlah		2.769.596.793,00	4.270.942.000,00	(3.891.872.714,00)	3.148.666.079,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.148.666.079,00 dengan rincian masing-masing wajib retribusi terdapat pada **Lampiran 6.4**.

(d) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Saldo awal Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp177.500.000,00 dan tidak ada pembayaran di Tahun 2025, sehingga saldo piutang Tahun 2025 sebesar Rp177.500.000,00 berupa Perjanjian antara Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Kepala Desa Randu Tatah tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor 100.3.7.1/12212/PKS/426.31/2023 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Pantai Duta Wisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2024	177.500.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00
Jumlah		177.500.000,00	0,00	0,00	177.500.000,00

(e) Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 sebesar Rp179.732.084,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 97 Rekapitulasi Mutasi Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas dari Hasil Sewa BMD (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2025	0,00	4.445.000,00	337.779.967,00	(162.492.883,00)	179.732.084,00
Jumlah		0,00	4.445.000,00	337.779.967,00	(162.492.883,00)	179.732.084,00

Saldo Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp179.732.084,00 dengan rincian masing-masing wajib retribusi terdapat pada **Lampiran 6.5**.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

D.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	9.843.938.926,45	26.998.332.036,84

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 Rp9.843.938.926,45 turun sebesar (63,54%) atau (Rp17.154.393.110,39) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 98 Rekapitulasi Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Hasil Sewa BMD	191.487.000,00	(4.445.000,00)	187.042.000,00	259.717.500,00	(287.617.500,00)	159.142.000,00
2	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	3.682.876.712,01	(3.615.068.492,76)	67.808.219,25
3	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	241.057.756,00	0,00	241.057.756,00	0,00	(810.000,00)	240.247.756,00
4	Piutang Denda PBBP2	9.483.567.638,84	0,00	9.483.567.638,84	143.403.939,30	(259.096.626,94)	9.367.874.951,20
5	Piutang dari Pengembalian	308.580,00	0,00	308.580,00	0,00	(308.580,00)	0,00
6	Piutang BLUD	17.081.911.062,00	(17.081.711.062,00)	200.000,00	8.866.000,00	(200.000,00)	8.866.000,00
	Jumlah	26.998.332.036,84	(17.086.156.062,00)	9.912.175.974,84	4.094.864.151,31	(4.163.101.199,70)	9.843.938.926,45

(a) Piutang Hasil Sewa BMD

Saldo awal Piutang Hasil Sewa BMD Tahun 2025 sebesar Rp191.487.000,00 reklas ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp4.445.000,00 dan telah terdapat pembayaran Tahun 2025 sebesar Rp287.617.500,00 sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp159.142.000,00 atau turun sebesar (Rp32.345.000,00) atau 16,89% dari Tahun 2024, berikut rekapitulasi Piutang Hasil Sewa BMD per Tahun.

Tabel 99 Rekapitulasi Mutasi Piutang Hasil Sewa BMD per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Rp)	Saldo setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Piutang Hasil Sewa BMD DPMPTSP	53.244.000,00	0,00	53.244.000,00	135.800.000,00	(138.700.000,00)	50.344.000,00
Tahun 2023	31.344.000,00	0,00	31.344.000,00	0,00	0,00	31.344.000,00
Tahun 2024	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	0,00	(21.900.000,00)	0,00
Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	135.800.000,00	(116.800.000,00)	19.000.000,00
Piutang Hasil Sewa BMD DISPORAPAR	138.243.000,00	(4.445.000,00)	133.798.000,00	85.567.500,00	(118.917.500,00)	100.448.000,00
Tahun 2020	11.718.000,00	(1.320.000,00)	10.398.000,00	0,00	(600.000,00)	9.798.000,00
Tahun 2021	26.130.000,00	(2.040.000,00)	24.090.000,00	0,00	(100.000,00)	23.990.000,00
Tahun 2022	23.055.000,00	(485.000,00)	22.570.000,00	0,00	(600.000,00)	21.970.000,00
Tahun 2023	36.815.000,00	0,00	36.815.000,00	0,00	(2.050.000,00)	34.765.000,00
Tahun 2024	40.525.000,00	(600.000,00)	39.925.000,00	0,00	(30.000.000,00)	9.925.000,00
Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	85.567.500,00	(85.567.500,00)	0,00
Piutang Hasil Sewa BMD DKUPP	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
Piutang Hasil Sewa BMD Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(30.000.000,00)	5.000.000,00
Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(30.000.000,00)	5.000.000,00
Jumlah	191.487.000,00	(4.445.000,00)	187.042.000,00	259.717.500,00	(287.617.500,00)	159.142.000,00

- Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp53.244.00,00 dan telah diterima pembayarannya Tahun 2025 sebesar Rp21.900.000,00. Surat Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan Tahun 2025

sebesar Rp135.800.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp116.800.000,00, sehingga saldo akhir Piutang Tahun 2025 sebesar Rp50.344.000,00.

- Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp138.243.000,00 terdapat reklasifikasi ke Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp4.445.000,00 dan telah diterima pembayarannya Tahun 2025 sebesar Rp30.000.000,00. Atas saldo Piutang tersebut terdapat reklasifikasi antar entitas ke Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.350.000,00. Surat Perjanjian Kerjasama yang diterbitkan Tahun 2025 sebesar Rp85.567.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp85.567.500,00, sehingga saldo akhir Piutang Tahun 2025 sebesar Rp100.448.000,00.
- Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 sebesar Rp3.350.000,00 berupa reklasifikasi antar entitas dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000,00.

Rincian Piutang Hasil Sewa BMD terdapat pada **Lampiran 6.6**.

(b) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Saldo Piutang Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp67.808.219,25 merupakan kekurangan bunga deposito Bulan Januari Tahun 2025.

Tabel 100 Rekapitulasi Piutang Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	3.682.876.712,01	(3.615.068.492,76)	67.808.219,25
	Jumlah	0,00	3.682.876.712,01	(3.615.068.492,76)	67.808.219,25

(c) Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo awal Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2025 sebesar Rp241.057.756,00. Atas Piutang tersebut diterima pembayaran pada Tahun 2025 sebesar Rp810.000,00, sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp240.247.756,00 turun sebesar (Rp810.000,00) atau (0,34%) dari Tahun 2024. Piutang Pengelolaan Dana Bergulir dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 101 Rekapitulasi Mutasi Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	219.859.006,00	0,00	(810.000,00)	219.049.006,00
	UKM				
	Tahun 2014 s/d lebih dari Tahun 2014	81.271.500,00	0,00	(810.000,00)	80.461.500
	Tahun 2015	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
	Tahun 2016	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	Tahun 2017	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Tahun 2018	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Tahun 2019	10.920.000,00	0,00	0,00	10.920.000,00
	Tahun 2020	4.917.506,00	0,00	0,00	4.917.506,00
	Total UKM	114.209.006,00	0,00	(810.000,00)	113.399.006,00
	DAC				
	Tahun 2010	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
	Tahun 2012	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
	Total DAC	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00

No	Uraian		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Usaha Produktif	Tahun 2014	38.400.000,00	0,00	0,00	38.400.000,00
		Tahun 2015	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Tahun 2018	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Tahun 2020	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		Total Usaha Produktif	50.400.000,00	0,00	0,00	50.400.000,00
	Mikro	Tahun 2014	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
		Tahun 2015	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Tahun 2016	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
		Total Mikro	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00
2	Dinas Pertanian		21.198.750,00	0,00	0,00	21.198.750,00
		Tahun 2008 (4 Tahun)	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00
		Tahun 2009 (4 Tahun)	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
		Tahun 2010 (4 Tahun)	2.043.750,00	0,00	0,00	2.043.750,00
		Tahun 2011 (4 Tahun)	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
		Tahun 2012 (4 Tahun)	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
	Jumlah		241.057.756,00	0,00	(810.000,00)	240.247.756,00

(d) Piutang Denda PBBP2

Saldo awal Piutang Denda PBBP2 Tahun 2025 sebesar Rp9.483.567.638,84 dan telah terbayar pada Tahun 2025 sebesar Rp59.744.778,00. Terdapat koreksi tambah karena kenaikan persentase potensi denda sebesar Rp143.403.939,30 dan koreksi kurang karena pembebasan pembayaran denda sebesar Rp172.825.598,94. Sehingga saldo Piutang Tahun 2025 sebesar Rp9.367.874.951,20 turun sebesar (Rp115.692.687,64) atau 1,22% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 102 Rekapitulasi Mutasi Piutang Denda PBBP2
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Realisasi		Saldo Setelah Pembayaran (Rp)	Mutasi Koreksi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Koreksi Tambah (Rp)	Koreksi Kurang (Rp)	
1	2013	1.538.546.573,56	0,00	(7.289.018,00)	1.531.257.555,56	0,00	(9.226.237,92)	1.522.031.317,64
2	2014	1.101.155.875,16	0,00	(4.537.304,00)	1.096.618.571,16	0,00	(5.306.121,60)	1.091.312.449,56
3	2015	359.855.430,40	0,00	(1.426.393,00)	358.429.037,40	0,00	(4.832.001,12)	353.597.036,28
4	2016	447.440.309,36	0,00	(1.526.036,00)	445.914.273,36	0,00	(5.704.261,44)	440.210.011,92
5	2017	1.209.288.567,08	0,00	(3.929.974,00)	1.205.358.593,08	0,00	(15.494.486,88)	1.189.864.106,20
6	2018	967.111.648,96	0,00	(3.579.152,00)	963.532.496,96	0,00	(16.326.852,00)	947.205.644,96
7	2019	947.614.355,32	0,00	(3.704.131,00)	943.910.224,32	0,00	(18.798.603,36)	925.111.620,96
8	2020	871.933.963,20	0,00	(3.028.940,00)	868.905.023,20	0,00	(12.251.251,20)	856.653.772,00
9	2021	1.222.942.013,32	0,00	(4.401.754,00)	1.218.540.259,32	0,00	(16.124.188,32)	1.202.416.071,00
10	2022	554.219.296,36	0,00	(8.200.920,00)	546.018.376,36	0,00	(25.313.636,16)	520.704.740,20
11	2023	214.857.427,12	0,00	(6.381.277,00)	208.476.150,12	34.377.188,34	(30.574.587,36)	212.278.751,10
12	2024	48.602.179,00	0,00	(11.739.879,00)	36.862.300,00	5.832.261,48	(12.873.371,58)	29.821.189,90
13	2025	0,00	103.194.489,48	(26.526.250,00)	76.668.239,48	0,00	0,00	76.668.239,48
Jumlah		9.483.567.638,84	103.194.489,48	(86.271.028,00)	9.500.491.100,32	40.209.449,82	(172.825.598,94)	9.367.874.951,20

(e) Piutang dari Pengembalian

Saldo awal Piutang dari Pengembalian Tahun 2025 sebesar Rp308.580,00. Atas Piutang tersebut telah diterima pembayarannya pada Tahun 2025 sebesar Rp308.580,00. Saldo Piutang dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp308.580,00 yang merupakan Kelebihan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 yang disetor ke RKUD pada tanggal 7 Januari 2025.

**Tabel 103 Rekapitulasi Mutasi Piutang dari Pengembalian
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2024	308.580,00	0,00	(308.580,00)	0,00
Jumlah		308.580,00	0,00	(308.580,00)	0,00

(f) Piutang BLUD

Saldo akhir Piutang BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.866.000,00 turun (99,95%) atau sebesar (Rp17.073.045.062,00) dibandingkan dengan Tahun 2024 karena adanya penyesuaian kodefikasi Pendapatan dari Jasa Pelayanan Kesehatan dari rekening Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rincian piutang BLUD Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 104 Rekapitulasi Mutasi Piutang BLUD
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Bago	41.466.500,00	(41.466.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Bantaran	75.519.620,00	(75.519.620,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Puskesmas Banyuwangi	24.883.000,00	(24.883.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Puskesmas Besuk	33.679.926,00	(33.679.926,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Puskesmas Condong	110.260.000,00	(110.260.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Curah Tulis	24.065.000,00	(24.065.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Dringu	32.474.500,00	(32.474.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Puskesmas Gending	155.014.620,00	(155.014.620,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Puskesmas Glagah	44.900.000,00	(44.900.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Puskesmas Jabung Sisir	116.150.000,00	(116.150.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Puskesmas Jorongan	28.367.500,00	(28.367.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Puskesmas Klenang Kidul	27.667.600,00	(27.667.600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Puskesmas Kotaanyar	72.309.574,00	(72.309.574,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Puskesmas Kraksaan	77.255.500,00	(77.255.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Krejengan	57.585.000,00	(57.585.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Puskesmas Krucil	238.154.030,00	(238.154.030,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Puskesmas Kuripan	21.725.500,00	(21.725.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Puskesmas Leces	104.284.260,00	(104.284.260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Puskesmas Lumbang	47.214.735,00	(47.214.735,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Puskesmas Maron	157.014.000,00	(157.014.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Puskesmas Paiton	64.401.785,00	(64.401.785,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Puskesmas Pajajaran	92.315.000,00	(92.315.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Puskesmas Pakuniran	53.666.500,00	(53.666.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Ranu Gedang	124.075.400,00	(124.075.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Puskesmas Sukapura	47.087.985,00	(47.087.985,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
26	Puskesmas Suko	13.684.580,00	(13.684.580,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Puskesmas Sumber	12.610.060,00	(12.610.060,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Puskesmas Sumberasih	81.723.592,00	(81.723.592,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Puskesmas Tegalsiwalan	33.837.300,00	(33.837.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Puskesmas Tiris	63.569.000,00	(63.569.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Puskesmas Tongas	28.427.500,00	(28.427.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Puskesmas Wangkal	191.041.000,00	(191.041.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Puskesmas Wonomerto	105.516.860,00	(105.516.860,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RSUD Tongas	1.721.938.123,00	(1.721.938.123,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RSUD Waluyoaji	12.958.025.512,00	(12.957.825.512,00)	200.000,00	8.866.000,00	(200.000,00)	8.866.000,00
Jumlah		17.081.911.062,00	(17.081.711.062,00)	200.000,00	8.866.000,00	(200.000,00)	8.866.000,00

Saldo akhir Piutang BLUD per 31 Desember 2025 pada RSUD Waluyoaji sebesar Rp8.866.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 105 Rekapitulasi Mutasi Piutang BLUD pada RSUD Waluyoaji per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tahun 2025	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00	0,00	8.866.000,00
- Piutang Parkir	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00	0,00	8.866.000,00
Tahun 2024	12.065.521.255,00	(12.065.521.255,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	116.464.440,00	(116.464.440,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang Jasa Raharja	332.317.947,00	(332.317.947,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang BPJS Ketenagakerjaan	107.308.731,00	(107.308.731,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang LAB dan Radiologi Rujukan	35.545.185,00	(35.545.185,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang ABIPRAYA	4.912.367,00	(4.912.367,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang BPJS	11.468.972.585,00	(11.468.972.585,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2023	410.723.842,00	(410.723.842,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	7.725.142,00	(7.725.142,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang Covid	402.998.700,00	(402.998.700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2022	46.125.385,00	(46.125.385,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	46.125.385,00	(46.125.385,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2021	26.988.891,00	(26.988.891,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	26.988.891,00	(26.988.891,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2020	55.998.172,00	(55.998.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	55.998.172,00	(55.998.172,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2019	23.556.815,00	(23.356.815,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	23.356.815,00	(23.356.815,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piutang Sewa Listrik Kantin 2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
Tahun 2018	67.428.155,00	(67.428.155,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	18.746.155,00	(18.746.155,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- BPJS Pending	48.682.000,00	(48.682.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2017	72.882.023,00	(72.882.023,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	53.739.653,00	(53.739.653,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jasa Raharja 2017 - Periode 1 s/d 9	4.506.170,00	(4.506.170,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- BPJS Pending	14.636.200,00	(14.636.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Reklas ke Piutang Retribusi (Rp)	Saldo Setelah Reklas (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tahun 2016	67.055.954,00	(67.055.954,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	65.717.300,00	(65.717.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Jasa Raharja	1.338.654,00	(1.338.654,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2015	34.976.305,00	(34.976.305,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	22.750.805,00	(22.750.805,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- BPJS Ketenagakerjaan - Pelayanan bulan Januari (NRM:249520 a.n Rahmatin)	12.225.500,00	(12.225.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2014	29.207.646,00	(29.207.646,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	29.207.646,00	(29.207.646,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2013	20.528.992,00	(20.528.992,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	20.528.992,00	(20.528.992,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tahun 2012	37.032.077,00	(37.032.077,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pasien Umum	37.032.077,00	(37.032.077,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	12.958.025.512,00	(12.957.825.512,00)	200.000,00	8.866.000,00	(200.000,00)	8.866.000,00

Pada RSUD Waluyoati terdapat piutang dari Pasien Umum yang biaya perawatannya tidak dapat ditanggung BPJS dan SKTM serta memberikan jaminan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 106 Rincian Pasien Umum RSUD Waluyoati yang Biaya Perawatannya Tidak Ditanggung BPJS dan SKTM

No	Tahun	Nama	Nilai Piutang	Keterangan
1	2025	Ahmad Dani	8.929.323,00	Jaminan BPKB Sepeda Motor
2	2024	Joko Hermanto	75.834.141,00	Jaminan Sertifikat Tanah
Jumlah			84.763.464,00	

D.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	1.443.900.121,00	1.443.900.121,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp1.443.900.121,00 yang merupakan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil Tahun 2019 dan 2020 sesuai PMK Nomor 36/PMK.07/2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107 Rekapitulasi Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak	1.046.466.494,00	0,00	0,00	1.046.466.494,00
2	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	397.433.627,00	0,00	0,00	397.433.627,00
Jumlah		1.443.900.121,00	0,00	0,00	1.443.900.121,00

D.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.13 Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.14 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025 (Rp) Per 31 Desember 2024 (Rp)
(31.989.950.416,66) (29.745.404.923,07)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar (Rp31.989.950.416,66). Perhitungan umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagai berikut.

Tabel 108 Perhitungan Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Klasifikasi Piutang					Jumlah (Rp)
		0 s.d 1 th (Rp)	> 1 s.d 2 th (Rp)	> 2 s.d 3 th (Rp)	> 3 s.d 5 th (Rp)	>5 th (Rp)	
Piutang							
1	Piutang Pajak	7.570.275.375,27	2.811.792.082,00	2.048.060.082,00	3.863.767.351,00	15.166.668.614,00	31.460.563.504,27
2	Piutang Retribusi	21.978.830.603,00	988.155.470,00	529.619.866,00	896.746.572,00	900.928.274,00	25.294.280.785,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	182.142.458,73	40.246.189,90	280.437.751,10	1.772.305.811,20	7.577.951.715,52	9.853.083.926,45
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.900.121,00	1.443.900.121,00
Jumlah		29.731.248.437,00	28.896.609.570,00	2.858.117.699,10	6.532.819.734,20	25.089.448.724,52	68.051.828.336,72
Penyisihan Piutang Tak Tertagih							
1	Piutang Pajak	0%	20%	40%	70%	100%	
		0,00	(562.358.416,40)	(819.224.032,80)	(2.704.637.145,70)	(15.166.668.614,00)	(19.252.888.208,90)
2	Piutang Retribusi	0%	40%	70%	100%	100%	
		0,00	(395.262.188,00)	(370.733.906,20)	(896.746.572,00)	(900.928.274,00)	(2.563.670.940,20)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0%	10%	30%	60%	100%	
		0,00	(4.024.618,99)	(84.131.325,33)	(1.063.383.486,72)	(7.577.951.715,52)	(8.729.491.146,56)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0%	10%	30%	60%	100%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	(1.443.900.121,00)	(1.443.900.121,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0,00	(961.645.223,39)	(1.274.089.264,33)	(4.664.767.204,42)	(25.089.448.724,52)	(31.989.950.416,66)

(a) Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp19.252.888.208,90) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 109 Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Pengakuan Penyisihan Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	2025	132.175.000,00	(18.868.200,00)	113.306.800,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	2025	112.400.454,50	(21.508.207,20)	90.892.247,30
3	Piutang Minerba	2025	570.633.731,50	(114.126.746,30)	456.506.985,20
4	Piutang PBBP2	2025	25.632.928.090,00	(18.733.852.227,60)	6.899.075.862,40
5	Piutang PBJT-Jasa Makanan dan/atau Minuman	2025	662.203.188,82	(176.982.125,00)	485.221.063,82
6	Piutang PBJT-Tenaga Listrik	2025	3.490.841.728,00	0,00	3.490.841.728,00
7	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	2025	654.929.761,45	(144.811.092,80)	510.118.668,65
8	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2025	26.541.670,00	(5.308.334,00)	21.233.336,00
9	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2025	187.156.380,00	(37.431.276,00)	149.725.104,00
Jumlah			31.469.810.004,27	(19.252.888.208,90)	12.216.921.795,37

Adapun *aging schedule* dari masing-masing Piutang Pajak Tak Tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 110 Aging Schedule dari Masing-Masing Piutang Pajak Tak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 20% (2024)	> 2 s.d 3 40% (2023)	> 3 s.d 5 70% (2022 - 2021)	> 5 100% (2020)		
1	Piutang Pajak Reklame	132.175.000,00	0,00	(10.468.200,00)	0,00	(8.400.000,00)	0,00	(18.868.200,00)	113.306.800,00
	2022	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	(8.400.000,00)	3.600.000,00
	2024	52.341.000,00	0,00	(10.468.200,00)	0,00	0,00	0,00	(10.468.200,00)	41.872.800,00
	2025	67.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.834.000,00
2	Piutang Pajak Air	112.400.454,50	0,00	(3.362.666,70)	(2.463.348,00)	(12.522.142,50)	(3.160.050,00)	(21.508.207,20)	90.892.247,30

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 20% (2024)	> 2 s.d 3 40% (2023)	> 3 s.d 5 70% (2022 - 2021)	> 5 100% (2020)		
	Tanah								
	2019	502.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(502.350,00)	(502.350,00)	0,00
	2020	2.657.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.657.700,00)	(2.657.700,00)	0,00
	2021	9.630.070,00	0,00	0,00	0,00	(6.741.049,00)	0,00	(6.741.049,00)	2.889.021,00
	2022	8.258.705,00	0,00	0,00	0,00	(5.781.093,50)	0,00	(5.781.093,50)	2.477.611,50
	2023	6.158.370,00	0,00	0,00	(2.463.348,00)	0,00	0,00	(2.463.348,00)	3.695.022,00
	2024	16.813.333,50	0,00	(3.362.666,70)	0,00	0,00	0,00	(3.362.666,70)	13.450.666,80
	2025	68.379.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.379.926,00
3	Piutang Pajak Minerba	570.633.731,50	0,00	(114.126.746,30)	0,00	0,00	0,00	114.126.746,30	456.506.985,20
	2024	570.633.731,50	0,00	(114.126.746,30)	0,00	0,00	0,00	114.126.746,30	456.506.985,20
4	Piutang PBBP2	25.632.928.090,00	0,00	(391.661.193,20)	(494.967.467,20)	(2.683.715.003,20)	(15.163.508.564,00)	(18.733.852.227,60)	6.899.075.862,40
	2013	3.147.216.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.147.216.633,00)	(3.147.216.633,00)	0,00
	2014	2.258.695.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.258.695.798,00)	(2.258.695.798,00)	0,00
	2015	732.049.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(732.049.261,00)	(732.049.261,00)	0,00
	2016	911.766.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(911.766.517,00)	(911.766.517,00)	0,00
	2017	2.463.061.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.463.061.973,00)	(2.463.061.973,00)	0,00
	2018	1.960.677.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.960.677.303,00)	(1.960.677.303,00)	0,00
	2019	1.915.724.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.915.724.941,00)	(1.915.724.941,00)	0,00
	2020	1.774.316.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.774.316.138,00)	(1.774.316.138,00)	0,00
	2021	2.487.520.170,00	0,00	0,00	0,00	(1.741.264.119,00)	0,00	(1.741.264.119,00)	746.256.051,00
	2022	1.346.358.406,00	0,00	0,00	0,00	(942.450.884,20)	0,00	(942.450.884,20)	403.907.521,80
	2023	1.237.418.668,00	0,00	0,00	(494.967.467,20)	0,00	0,00	(494.967.467,20)	742.451.200,80
	2024	1.958.305.966,00	0,00	(391.661.193,20)	0,00	0,00	0,00	(391.661.193,20)	1.566.644.772,80
	2025	3.439.816.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.816.316,00
5	Piutang PBJT- Makanan dan Minuman	662.203.188,82	0,00	0,20	(176.982.124,80)	0,00	0,00	(176.982.125,00)	485.221.063,82
	2023	442.455.312,00	0,00	0,00	(176.982.124,80)	0,00	0,00	(176.982.124,80)	265.473.187,20
	2024	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,80
	2025	219.747.875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.747.875,82
6	Piutang PBJT- Tenaga Listrik	3.490.841.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.841.728,00
	2025	3.490.841.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.841.728,00
7	Piutang PBJT- Jasa Perhotelan	654.929.761,45	0,00	0,00	(144.811.092,80)	0,00	0,00	(144.811.092,80)	510.118.668,65
	2023	362.027.732,00	0,00	0,00	(144.811.092,80)	0,00	0,00	(144.811.092,80)	217.216.639,20
	2025	292.902.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.902.029,45
8	Piutang PBJT- Jasa Parkir	26.541.670,00	0,00	(5.308.334,00)	0,00	0,00	0,00	(5.308.334,00)	21.233.336,00
	2024	26.541.670,00	0,00	(5.308.334,00)	0,00	0,00	0,00	(5.308.334,00)	21.233.336,00
9	Piutang PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	187.156.380,00	0,00	(37.431.276,00)	0,00	0,00	0,00	(37.431.276,00)	149.725.104,00
	2024	187.156.380,00	0,00	(37.431.276,00)	0,00	0,00	0,00	(37.431.276,00)	149.725.104,00
	Jumlah	31.469.810.004,27	0,00	(562.358.416,40)	(819.224.032,80)	(2.704.637.145,70)	(15.166.668.614,00)	(19.252.888.208,90)	12.216.921.795,37

(b) Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.563.670.940,20) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 111 Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Pengakuan Penyisihan Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2025	21.705.802.622,00	(499.964.947,80)	21.205.837.674,20
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2025	91.725.000,00	(13.330.000,00)	78.395.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	2025	3.148.666.079,00	(1.979.375.992,40)	1.169.290.086,60

No	Uraian	Tahun Pengakuan Penyisihan Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2025	177.500.000,00	(71.000.000,00)	106.500.000,00
5	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2025	179.732.084,00	0,00	179.732.084,00
Jumlah			25.303.425.785,00	(2.563.670.940,20)	22.739.754.844,80

Adapun *aging schedule* dari masing-masing Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 112 Aging Schedule dari Masing-Masing Piutang Retribusi Tak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 40% (2024)	> 2 s.d 3 70% (2023)	> 3 s.d 5 100% (2022 - 2021)	>5 100% (>2020)		
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.705.802.622,00	0,00	(47.253.684,40)	(9.622.467,40)	(73.989.572,00)	(369.099.224,00)	(499.964.947,80)	21.205.837.674,20
	2012	37.032.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(37.032.077,00)	(37.032.077,00)	0,00
	2013	20.528.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.528.992,00)	(20.528.992,00)	0,00
	2014	29.207.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(29.207.646,00)	(29.207.646,00)	0,00
	2015	34.976.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.976.305,00)	(34.976.305,00)	0,00
	2016	74.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.942.300,00)	(74.942.300,00)	0,00
	2017	53.739.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.739.653,00)	(53.739.653,00)	0,00
	2018	27.881.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.881.415,00)	(27.881.415,00)	0,00
	2019	34.792.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.792.664,00)	(34.792.664,00)	0,00
	2020	55.998.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.998.172,00)	(55.998.172,00)	0,00
	2021	23.988.891,00	0,00	0,00	0,00	(23.988.891,00)	0,00	(23.988.891,00)	0,00
	2022	50.000.681,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.681,00)	0,00	(50.000.681,00)	0,00
	2023	13.746.382,00	0,00	0,00	(9.622.467,40)	0,00	0,00	(9.622.467,40)	4.123.914,60
	2024	118.134.211,00	0,00	(47.253.684,40)	0,00	0,00	0,00	(47.253.684,40)	70.880.526,60
	2025	21.130.833.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.130.833.233,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	91.725.000,00	0,00	(4.300.000,00)	(9.030.000,00)	0,00	0,00	(13.330.000,00)	78.395.000,00
	2023	12.900.000,00	0,00	0,00	(9.030.000,00)	0,00	0,00	(9.030.000,00)	3.870.000,00
	2024	10.750.000,00	0,00	(4.300.000,00)	0,00	0,00	0,00	(4.300.000,00)	6.450.000,00
	2025	68.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.075.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	3.148.666.079,00	0,00	(272.708.503,60)	(352.081.438,80)	(822.757.000,00)	(531.829.050,00)	(1.979.375.992,40)	1.169.290.086,60
	2017	20.239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.239.500,00)	(20.239.500,00)	0,00
	2018	34.320.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.320.534,00)	(34.320.534,00)	0,00
	2019	357.832.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(357.832.766,00)	(357.832.766,00)	0,00
	2020	119.436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(119.436.250,00)	(119.436.250,00)	0,00
	2021	410.470.500,00	0,00	0,00	0,00	(410.470.500,00)	0,00	(410.470.500,00)	0,00
	2022	412.286.500,00	0,00	0,00	0,00	(412.286.500,00)	0,00	(412.286.500,00)	0,00
	2023	502.973.484,00	0,00	0,00	(352.081.438,80)	0,00	0,00	(352.081.438,80)	150.892.045,20
	2024	681.771.259,00	0,00	(272.708.503,60)	0,00	0,00	0,00	(272.708.503,60)	409.062.755,40
	2025	609.335.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.335.286,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	177.500.000,00	0,00	(71.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(71.000.000,00)	106.500.000,00
	2024	177.500.000,00	0,00	(71.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(71.000.000,00)	106.500.000,00
5	Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	170.587.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.587.084,00
	2025	170.587.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.587.084,00
Jumlah		25.303.425.785,00	0,00	(395.262.188,00)	(370.733.906,20)	(896.746.572,00)	(900.928.274,00)	(2.563.670.940,20)	22.739.754.844,80

(c) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 sebesar (Rp8.729.491.146,56) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 113 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tak Tertagih Tahun 2025

No	Uraian	Tahun Pengakuan Penyisihan Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	Piutang Hasil Sewa BMD	2025	159.142.000,00	(62.719.200,00)	96.422.800,00
2	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2025	67.808.219,25	0,00	67.808.219,25
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2025	240.247.756,00	(240.247.756,00)	0,00
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2025	9.367.874.951,20	(8.426.524.190,56)	941.350.760,64
5	Piutang Pendapatan BLUD RSUD Waluyoaji Kraksaan	2025	8.866.000,00	0,00	8.866.000,00
Jumlah			9.843.938.926,45	(8.729.491.146,56)	1.114.447.779,89

Adapun *aging schedule* dari masing-masing Piutang Lain-lain PAD yang sah Tak Tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 114 Aging Schedule dari Masing-Masing Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 10% (2024)	> 2 s.d 3 30% (2023)	> 3 s.d 5 60% (2022 - 2021)	>5 100% (2020)		
1	Piutang dari Hasil Sewa BMD	168.287.000,00	0,00	(1.042.500,00)	(20.447.700,00)	(29.511.000,00)	(11.718.000,00)	(62.719.200,00)	105.567.800,00
	2020	11.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.718.000,00)	(11.718.000,00)	0,00
	2021	26.130.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.678.000,00)	0,00	(15.678.000,00)	10.452.000,00
	2022	23.055.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.833.000,00)	0,00	(13.833.000,00)	9.222.000,00
	2023	68.159.000,00	0,00	0,00	(20.447.700,00)	0,00	0,00	(20.447.700,00)	47.711.300,00
	2024	10.425.000,00	0,00	(1.042.500,00)	0,00	0,00	0,00	(1.042.500,00)	9.382.500,00
	2025	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
2	Piutang dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	67.808.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.808.219,25
	2025	67.808.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.808.219,25
3	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	219.049.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.049.006,00)	(219.049.006,00)	0,00
	≥2014	166.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(166.111.500,00)	(166.111.500,00)	0,00
	2015	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.800.000,00)	(14.800.000,00)	0,00
	2016	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.400.000,00)	(6.400.000,00)	0,00
	2017	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	0,00
	2018	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.900.000,00)	(9.900.000,00)	0,00
	2019	10.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.920.000,00)	(10.920.000,00)	0,00
	2020	7.917.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.917.506,00)	(7.917.506,00)	0,00
4	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pertanian	21.198.750	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.198.750)	(21.198.750)	0,00
	2008	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.050.000,00)	(4.050.000,00)	0,00
	2009	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.050.000,00)	(4.050.000,00)	0,00
	2010	2.043.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.043.750,00)	(2.043.750,00)	0,00
	2011	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.750.000,00)	(6.750.000,00)	0,00
	2012	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.305.000,00)	(4.305.000,00)	0,00
5	Piutang Denda PBBP2	9.367.874.951,20	0,00	(2.982.118,99)	(63.683.625,33)	(1.033.872.486,72)	(7.325.985.959,52)	(8.426.524.190,56)	941.350.760,64
	2013	1.522.031.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.522.031.317,64)	(1.522.031.317,64)	0,00
	2014	1.091.312.449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.091.312.449,56)	(1.091.312.449,56)	0,00

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 10% (2024)	> 2 s.d 3 30% (2023)	> 3 s.d 5 60% (2022 - 2021)	> 5 100% (2020)		
	2015	353.597.036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	(353.597.036,28)	(353.597.036,28)	0,00
	2016	440.210.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	(440.210.011,92)	(440.210.011,92)	0,00
	2017	1.189.864.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.189.864.106,20)	(1.189.864.106,20)	0,00
	2018	947.205.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(947.205.644,96)	(947.205.644,96)	0,00
	2019	925.111.620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	(925.111.620,96)	(925.111.620,96)	0,00
	2020	856.653.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(856.653.772,00)	(856.653.772,00)	0,00
	2021	1.202.416.071,00	0,00	0,00	0,00	(721.449.642,60)	0,00	(721.449.642,60)	480.966.428,40
	2022	520.704.740,20	0,00	0,00	0,00	(312.422.844,12)	0,00	(312.422.844,12)	208.281.896,08
	2023	212.278.751,10	0,00	0,00	(63.683.625,33)	0,00	0,00	(63.683.625,33)	148.595.125,77
	2024	29.821.189,90	0,00	(2.982.118,99)	0,00	0,00	0,00	(2.982.118,99)	26.839.070,91
	2025	76.668.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.668.239,48
6	Piutang BLUD RSUD Waluyo Jati	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00
	2015	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00
	Jumlah	9.843.938.926,45	0,00	(4.024.618,99)	(84.131.325,33)	(1.063.383.486,72)	(7.577.951.715,52)	(8.729.491.146,56)	1.114.447.779,89

(d) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.443.900.121,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 115 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Tahun Pengakuan Penyisihan Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	Piutang Dana Perimbangan	2025	1.443.900.121,00	(1.443.900.121,00)	0,00
	Jumlah		1.443.900.121,00	(1.443.900.121,00)	0,00

Adapun *aging schedule* dari masing-masing Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

Tabel 116 Aging Schedule dari Masing-Masing Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2025

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih					Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
			0 s.d 1 0% (2025)	> 1 s.d 2 10% (2024)	> 2 s.d 3 30% (2023)	> 3 s.d 5 60% (2022 - 2021)	> 5 100% (2020)		
1	Piutang Dana Perimbangan	1.443.900.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.443.900.121,00)	1.443.900.121,00	0,00
	2019	1.443.900.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.443.900.121,00)	1.443.900.121,00	0,00
	Jumlah	1.443.900.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.443.900.121,00)	1.443.900.121,00	0,00

D.1.1.15	Beban Dibayar Dimuka	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		706.777.147,98	492.391.740,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp706.777.147,98 terdiri dari Belanja Jasa Pengukuran Tanah Tahun 2017-2023 sebesar Rp455.549.960,00, Belanja Sewa Jaringan Transmisi sebesar Rp440.771,33, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp207.958.333,32 dan Belanja Sewa Aset Tak Berwujud sebesar Rp42.828.083,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 117 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025

No	Uraian	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Biaya sertifikat yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikasi yang belum jadi TA 2017	BPPKAD	34.126.400,00	0,00	(6.551.600,00)	27.574.800,00
2	Biaya sertifikat yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikasi yang belum	BPPKAD	24.783.120,00	0,00	(907.680,00)	23.875.440,00

No	Uraian	SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	jadi 2018					
3	Biaya sertifikat yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikasi yang belum jadi TA 2019	BPPKAD	3.205.420,00	0,00	(2.354.800,00)	850.620,00
4	Biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikat yang belum jadi TA 2020	BPPKAD	487.700,00	0,00	(487.700,00)	0,00
5	Biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikat yang belum jadi TA 2021	BPPKAD	218.292.580,00	0,00	0,00	218.292.580,00
6	Biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikat yang belum jadi TA 2021	DPKPP	26.324.600,00	0,00	0,00	26.324.600,00
7	Biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikat yang belum jadi TA 2022	BPPKAD	174.675.320,00	0,00	(26.540.000,00)	148.135.320,00
8	Biaya Sertifikasi yang telah dibayarkan ke BPN untuk biaya sertifikat yang belum jadi TA 2023	BPPKAD	10.496.600,00	0,00	0,00	10.496.600,00
9	Belanja Sewa Jaringan Transmisi TA 2025	BPBD	0,00	440.771,33	0,00	440.771,33
10	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah – bangunan TA 2025	BPPKAD	0,00	82.041.666,66	0,00	82.041.666,66
11	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah – kendaraan TA 2025	BPPKAD	0,00	125.916.666,66	0,00	125.916.666,66
12	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise TA 2025	DISKOMINFO	0,00	42.828.083,33	0,00	42.828.083,33
Jumlah			492.391.740,00	251.227.187,98	(36.841.780,00)	706.777.147,98

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah terdiri dari.

1. Belanja Sewa Jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sewa transmisi Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (BHP ISR) antara BPBD dan Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan masa manfaat mulai 25 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2026 sebesar Rp5.289.256,00, sampai dengan akhir periode pelaporan terdapat sisa manfaat yang belum direalisasikan sebesar Rp440.771,33;
2. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Asuransi Gedung antara BPPKAD dan PT. Asuransi Sinar Mas dengan masa manfaat mulai 14 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2026 sebesar Rp196.900.000,00 sampai dengan akhir periode pelaporan terdapat sisa manfaat yang belum direalisasikan Rp82.041.666,66;
3. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Asuransi Kendaraan antara BPPKAD dan PT. Asuransi Sinar Mas dengan masa manfaat mulai 14 Mei 2025 sampai dengan 14 Mei 2026 sebesar Rp302.200.000,00 sampai dengan akhir periode pelaporan terdapat sisa manfaat yang belum direalisasikan Rp125.916.666,66;

4. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan *Franchise* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp160.291.000,00 merupakan perjanjian sewa antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan CV. Mitra Techindo, dengan rincian.
 - a. Sewa Lisensi *Secure Socket Layer (SSL)* sebesar Rp5.000.000,00 dengan masa manfaat 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2026 terdapat sisa manfaat sebesar Rp416.666,67;
 - b. Sewa Lisensi *Management Hosting* dan Lisensi *Antivirus* sebesar Rp96.350.000,00 dengan masa manfaat 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2026 terdapat sisa manfaat sebesar Rp8.029.166,67;
 - c. Sewa Sistem Operasi *Proxmox VE* sebesar Rp58.941.000,00 dengan masa manfaat 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2026 terdapat sisa manfaat sebesar Rp34.382.250,00.

Mutasi kurang terdiri dari.

1. Pada Tahun 2017 ada enam Bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat karena:
 - Dua bidang tanah terdapat pengajuan ganda dengan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp700.000,00;
 - Satu bidang tanah tumpang tindih dengan sertifikat atas nama Kemenkumham sebesar Rp1.300.000,00;
 - Satu bidang tanah tumpang tindih dengan sertifikat atas nama Perorangan sebesar Rp190.000,00;
 - Satu bidang tanah tumpang tindih dengan sertifikat PTPN sebesar Rp707.600,00;
 - Satu bidang tanah sudah terbit di tahun 2017 sebesar Rp3.654.000,00;
2. Pada tahun 2018 ada satu bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat karena statusnya adalah Tanah Kas Desa sebesar Rp907.680,00;
3. Pada tahun 2019 ada dua bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat karena:
 - Satu bidang tanah status nya adalah Tanah Kas Desa sebesar Rp1.970.000,00;
 - Satu bidang tanah terdapat pengajuan ganda dengan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp384.800,00.
4. Pada Tahun 2020 ada satu bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat karena statusnya adalah Tanah Kas Desa sebesar Rp487.700,00;
5. Pada tahun 2022 ada 49 bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat karena:
 - 28 bidang tanah tumpang tindih penuh kawasan hutan sebesar Rp15.456.800,00;
 - Satu bidang tanah tercatat pendaftaran ganda dengan NIB 01245 sebesar Rp498.200,00;
 - Satu bidang tanah tumpang tindih dengan Aset PT. KAI sebesar Rp103.000,00;
 - Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HGU.46 (Hak Guna Usaha) atas nama PTPN XI sebesar Rp533.800,00;
 - Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HGU.46 (Hak Guna Usaha) dan Kawasan hutan sebesar Rp794.200,00;
 - Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HGU.46/Andungbiru (Hak Guna Usaha) sebesar Rp168.400,00;
 - Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HGU.46/Andungbiru (Hak Guna Usaha) sebesar Rp293.000,00;
 - Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HGU.46/Andungbiru (Hak Guna Usaha) sebesar Rp146.800,00;

- Satu bidang tanah di kecamatan Bantaran tumpang tindih dengan HP.8/Tempuran (Hak Pakai) sebesar Rp1.556.600,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Dringu tumpang tindih dengan HP.6/Tamansari (Hak Pakai) sebesar Rp325.400,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Gading tumpang tindih dengan HP.9/Gading (Hak Pakai) sebesar Rp691.600,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Gading tumpang tindih dengan HP. 16/Condong (Hak Pakai) sebesar Rp217.800,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Gending tumpang tindih dengan HP.5/Klaseman (Hak Pakai) sebesar Rp655.800,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Lumbang tumpang tindih dengan HP.9/Purut (Hak Pakai) sebesar Rp181.200,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Lumbang tumpang tindih dengan HP.9/Purut (Hak Pakai) sebesar Rp403.400,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Maron tumpang tindih dengan HP.4/Satreyan (Hak Pakai) sebesar Rp165.000,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Sukapura tumpang tindih dengan HP.28/Sapikerep (Hak Pakai) sebesar Rp454.000,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Tegalsiwalan tumpang tindih dengan HP.8 dan 9/ Sumberbulu (Hak Pakai) sebesar Rp1.927.600,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Tegalsiwalan tumpang tindih dengan HP.3/Sumberkledung (Hak Pakai) sebesar Rp944.400,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Tegalsiwalan tumpang tindih dengan HP.8/Banjarsawah (Hak Pakai) sebesar Rp507.600,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HP.46 (Hak Pakai) sebesar Rp352.400,00;
- Satu bidang tanah di kecamatan Tiris tumpang tindih dengan HP.11/Ranuagung (Hak Pakai) sebesar Rp152.600,00.

Adapun rincian belanja jasa pengukuran tanah yang tidak bisa terbit sebanyak 49 bidang tanah terdapat pada **Lampiran 7.1** dan yang belum terbit sertifikat pada Tahun 2025 sebanyak 704 sertifikat terdapat pada **Lampiran 7.2**.

D.1.1.16	Persediaan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		41.203.407.050,57	38.425.175.632,90

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Pencatatan persediaan dilakukan dengan menggunakan.

1. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinyu dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga jumlah dan nilai persediaan selalu *ter-update*.
2. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Untuk Pengakuan Beban Persediaan menggunakan metode pendekatan beban yang menjelaskan bahwa setiap pembelian barang dan jasa akan diakui atau dicatat sebagai beban. Untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian atas beban dan stok persediaan pada akhir periode.

Klasifikasi rekening persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Persediaan pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan metode:

1. *First In First Out* (FIFO) adalah harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Metode ini dipakai untuk menilai persediaan selain obat.
2. *First Expired First Out* (FEFO) adalah barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar lebih dulu. Metode ini dipakai untuk menilai persediaan obat yang terdapat pada Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas dan 33 Puskesmas.

Saldo Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp41.203.407.050,57, naik 7,23% atau sebesar Rp2.778.231.417,67 dari saldo Persediaan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 118 Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Persediaan Barang Pakai Habis		
1.1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	152.473.320,00	261.415.705,00
1.2	Bahan Kimia	522.139.802,43	366.845.917,00
1.3	Bahan Bakar dan Pelumas	666.000,00	0,00
1.4	Bahan/Bibit Tanaman	1.350.000,00	0,00
1.5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.923.850,00	0,00
1.6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	84.896.350,00
1.7	Bahan Lainnya	1.883.275.887,54	1.735.153.194,53
1.8	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	44.722.685,00
1.9	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.277.231,00	1.526.500,00
1.10	Alat Tulis Kantor	697.486.190,63	470.750.564,50
1.11	Kertas dan Cover	216.215.783,39	171.464.890,00
1.12	Bahan Cetak	404.957.463,38	572.455.412,75
1.13	Benda Pos	2.514.000,00	2.522.523,00
1.14	Bahan Komputer	940.352.046,42	864.647.199,00
1.15	Perabot Kantor	251.905.894,04	417.295.480,27
1.16	Alat Listrik	243.428.567,95	186.197.660,00
1.17	Perlengkapan Dinas	2.380.950,00	0,00
1.18	Suvenir/Cendera Mata	33.590.290,00	0,00
1.19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	757.094.734,35	742.812.383,75
1.20	Obat	30.380.199.339,52	27.202.683.547,60
1.21	Obat-Obatan Lainnya	242.483.940,00	7.000,00
1.22	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.868.250.088,00	5.058.897.884,00
1.23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	86.599.514,00	0,00
1.24	Natura	1.407.722.157,92	236.470.736,50
1.25	Natura dan Pakan Lainnya	102.120.000,00	4.410.000,00
	Jumlah Persediaan Barang Pakai Habis	41.203.407.050,57	38.425.175.632,90
2	Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
3	Persediaan Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
	Jumlah (1+2+3)	41.203.407.050,57	38.425.175.632,90

Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 per SKPD terdapat pada **Lampiran 8.1** dan Rincian Perhitungan Mutasi Tambah dan Kurang Persediaan per 31 Desember 2025 per SKPD terdapat pada **Lampiran 8.2**.

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 memiliki.

1. Obat kadaluarsa sebesar Rp2.243.839.642,93;
2. Karcis rusak sebesar Rp262.249.331,20;
3. Bahan lainnya yang kadaluarsa sebesar Rp21.049.200,00;
4. Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang kadaluarsa sebesar Rp11.792.000,00;
5. Bibit ikan mati sebesar Rp3.029.500,00;
6. Perencanaan pembangunan yang tidak dilanjutkan pembangunannya sebesar Rp324.774.000,00;
7. Bibit ikan dari hasil pemijahan indukan ikan; serta
8. Persediaan hibah pada Dinas Kesehatan yang diterima tanpa harga perolehan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan menyatakan bahwa persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut rincian persediaan dengan kondisi kadaluarsa, rusak atau mati untuk diusulkan penghapusan pada tahun berikutnya.

Tabel 119 Rincian SKPD yang Terdapat Persediaan Obat Kadaluarsa

No	Uraian	Tahun 2019-2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1	Persediaan Barang Pakai Habis					
1.1	Obat					
1.1.1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	504.135.027,97	148.940.080,36
1.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.056.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Puskesmas Bago	0,00	0,00	0,00	3.741.831,50	2.245.669,27
1.1.4	Puskesmas Bantaran	0,00	0,00	0,00	5.020.072,10	1.061.796,00
1.1.5	Puskesmas Banyuwang	0,00	0,00	0,00	5.428.205,01	3.917.812,80
1.1.6	Puskesmas Besuk	0,00	0,00	0,00	2.935.331,00	1.624.950,00
1.1.7	Puskesmas Condong	0,00	0,00	0,00	12.764.826,50	4.038.594,36
1.1.8	Puskesmas Curah Tulis	0,00	0,00	0,00	1.571.008,47	6.021.896,00
1.1.9	Puskesmas Dringu	0,00	0,00	0,00	15.084.495,31	7.585.477,87
1.1.10	Puskesmas Gending	0,00	0,00	0,00	3.779.234,00	4.401.481,00
1.1.11	Puskesmas Glagah	0,00	0,00	0,00	11.008.421,10	4.497.811,56
1.1.12	Puskesmas Jabungsir	0,00	0,00	0,00	3.750.781,00	2.502.357,00
1.1.13	Puskesmas Jorong	0,00	0,00	0,00	542.870,00	423.100,00
1.1.14	Puskesmas Klenang Kidul	0,00	0,00	0,00	4.704.521,40	2.070.872,30
1.1.15	Puskesmas Kotaanyar	0,00	0,00	0,00	10.071.490,30	12.574.130,00
1.1.16	Puskesmas Kraksaan	0,00	0,00	0,00	12.132.872,25	7.063.689,30
1.1.17	Puskesmas Krejengan	0,00	0,00	0,00	3.966.922,80	4.672.139,00
1.1.18	Puskesmas Krucil	0,00	0,00	0,00	5.408.721,00	2.782.408,00
1.1.19	Puskesmas Kuripan	0,00	0,00	0,00	4.295.861,10	2.591.700,00
1.1.20	Puskesmas Leces	0,00	0,00	0,00	4.029.666,00	2.777.337,78
1.1.21	Puskesmas Lumbang	0,00	0,00	0,00	2.231.569,00	3.400.968,00
1.1.22	Puskesmas Maron	0,00	0,00	0,00	7.861.116,83	15.703.629,48
1.1.23	Puskesmas Paiton	0,00	0,00	0,00	14.393.367,31	3.777.492,09
1.1.24	Puskesmas Pajajaran	0,00	0,00	0,00	5.712.663,20	8.946.093,40
1.1.25	Puskesmas Pakuniran	0,00	0,00	0,00	7.993.500,00	8.161.311,68
1.1.26	Puskesmas Ranagedang	0,00	0,00	0,00	2.724.875,00	3.087.330,58
1.1.27	Puskesmas Sukapura	0,00	0,00	0,00	1.086.671,00	2.336.569,00
1.1.28	Puskesmas Suko	0,00	0,00	0,00	5.017.360,45	853.701,00
1.1.29	Puskesmas Sumber	0,00	0,00	0,00	953.246,00	2.375.714,00
1.1.30	Puskesmas Sumberasih	0,00	0,00	0,00	2.077.950,00	3.564.949,99
1.1.31	Puskesmas Tegalsiwalan	0,00	0,00	0,00	223.688,00	2.097.017,00
1.1.32	Puskesmas Tiris	0,00	0,00	0,00	2.664.196,00	2.944.895,50
1.1.33	Puskesmas Tongas	0,00	0,00	0,00	780.251,00	2.960.553,00
1.1.34	Puskesmas Wangkal	0,00	0,00	0,00	6.011.141,22	3.873.733,54

No	Uraian		Tahun 2019-2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
	1.1.35	Puskesmas Wonomerto	0,00	0,00	0,00	4.112.621,74	500.853,40
	1.1.36	RSUD Waluyoaji Kraksaan	878.740.544,00	85.076.480,00	177.767.366,97	26.203.078,00	35.172.500,00
	1.1.37	RSUD Tongas	0,00	0,00	0,00	24.613.743,87	42.615.419,27
Jumlah			887.796.565,00	85.076.480,00	177.767.366,97	729.033.197,43	364.166.033,53

Pada Tahun 2025 telah dilakukan pemusnahan dan penghapusan persediaan obat kadaluarsa, yaitu.

1. Pemusnahan

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 500.5.7.7/179/426.115/2025 perihal Laporan Pelaksanaan Pemusnahan alat, obat dan bahan habis pakai Kadaluarsa Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, telah dilakukan kegiatan pemusnahan alat, obat kontrasepsi dan bahan habis pakai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari periode Tahun 2019 s.d. 2021 dengan nilai total sebesar Rp9.056.021,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 belum terbit Surat Keputusan Penghapusan, maka nilai persediaan alat, obat kontrasepsi dan bahan lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Penghapusan

Berdasarkan SK Nomor: 000.2.3.2/34/426.32/2025 tentang Penghapusan Barang Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan penghapusan persediaan obat kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan 33 Puskesmas dari periode Tahun 2019 s.d. 2023 sebesar Rp4.138.471.681,56.

Berikut rincian SKPD yang terdapat persediaan karcis rusak dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 120 Rincian Persediaan Karcis Rusak per SKPD

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Persediaan Barang Pakai Habis			
1.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		44.722.685,00	13.067.872,50
1.2	Dinas Perhubungan		153.408.441,75	0,00
1.3	Puskesmas Bago		0,00	1.116.130,00
1.4	Puskesmas Bantaran		0,00	1.624.360,00
1.5	Puskesmas Banyuwang		0,00	1.075.010,50
1.6	Puskesmas Besuk		0,00	650.746,50
1.7	Puskesmas Curah Tulis		0,00	531.470,50
1.8	Puskesmas Dringu		0,00	862.938,00
1.9	Puskesmas Gending		2.309.440,00	2.830.334,00
1.10	Puskesmas Glagah		0,00	645.496,50
1.11	Puskesmas Jabungsir		0,00	1.788.516,00
1.12	Puskesmas Jorong		0,00	1.330.282,00
1.13	Puskesmas Klenang Kidul		0,00	416.329,00
1.14	Puskesmas Kraksaan		0,00	2.345.611,50
1.15	Puskesmas Krucil		0,00	734.640,00
1.16	Puskesmas Kuripan		0,00	1.820.596,95
1.17	Puskesmas Leces		0,00	9.331.498,00
1.18	Puskesmas Lumbang		0,00	2.065.701,50
1.19	Puskesmas Maron		2.591.560,00	0,00
1.20	Puskesmas Paiton		0,00	2.195.618,00
1.21	Puskesmas Pajajaran		0,00	2.227.110,00
1.22	Puskesmas Pakuniran		0,00	2.712.536,50
1.23	Puskesmas Ranugedang		0,00	545.039,50
1.24	Puskesmas Sukapura		0,00	1.155.521,00
1.25	Puskesmas Sumber		0,00	563.214,00
1.26	Puskesmas Sumberasih		0,00	5.788.830,00

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.27	Puskesmas Tegalsiwalan		0,00	915.740,50
1.28	Puskesmas Wonomerto		0,00	876.061,50
Jumlah			203.032.126,75	59.217.204,45

Berikut rincian persediaan kadaluarsa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

Tabel 121 Rincian Persediaan Kadaluarsa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)
1	Persediaan Barang Pakai Habis		
1.1	Bahan Lainnya		
1.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21.049.200,00
1.2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		
1.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		11.792.000,00
Jumlah			32.841.200,00

Berikut rincian kematian bibit ikan pada Dinas Perikanan Tahun 2025.

Tabel 122 Rincian Kematian Bibit Ikan pada Dinas Perikanan

No	Uraian		Tahun 2025 (Rp)
1	Persediaan Barang Pakai Habis		
1.1	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		
1.1.1	Dinas Perikanan		3.029.500,00
Jumlah			3.029.500,00

Berikut rincian perencanaan pembangunan yang tidak dilanjutkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 123 Rincian Perencanaan Pembangunan yang Tidak dilanjutkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Kegiatan	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi, dan Air Bersih Kecamatan Dringu Dst, 602.1/2.138/SPK.JKr/426.113/2020 Tanggal 10 Februari 2020 (DBHCHT)	2020	86.675.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Sumur Kecamatan Banyuwangi 602.1/2.123/SPK.JKr/426.113/2020 Tanggal 3 Februari 2020 (DAU)	2020	52.450.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Sumur Kecamatan Gading dan Kecamatan Gending 602.1/2.124/SPK.JKr/426.113/2020 Tanggal 3 Februari 2020 (DAU)	2020	72.024.000,00
4	Perencanaan Pembangunan Broncaptering Desa Renteng Kecamatan Gading dan Peningkatan SPAM Desa Wonokerso Kecamatan Sumber 602.1/2.122/SPK.JKr/426.113/2020 Tanggal 10 Februari 2020 (DAU)	2020	52.200.000,00
5	Perencanaan Pembangunan Kawasan Kumuh Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Paiton 602.1/2.116/SPK.JKr/426.113/2020 Tanggal 10 Februari 2020 (DAU)	2020	61.425.000,00
Jumlah			324.774.000,00

Berikut rincian bibit ikan dari hasil pemijahan indukan ikan pada Dinas Perikanan Tahun 2025.

Tabel 124 Bibit Ikan dari Hasil Pemijahan Indukan Ikan pada Dinas Perikanan

No	Jenis	Ukuran	Jumlah (Ekor)
1	Benih Ikan Nila	1-2 cm	31.500
2	Benih Ikan Lele	3-4 mm	52.500

Berikut rincian persediaan hibah pada Dinas Kesehatan yang diterima tanpa harga perolehan.

Tabel 125 Persediaan Hibah pada Dinas Kesehatan yang Diterima Tanpa Harga Perolehan Tahun 2025

No	Tanggal BAST	Nomor BAST	Asal Hibah	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	08/01/25	400.7.18.3/0124/102.5/VAKSIN/II/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	193	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Tanggal BAST	Nomor BAST	Asal Hibah	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
2	08/01/25	400.7.18.3/0124/102.5/VAKSIN/II/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	878	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
3	05/02/25	400.7.18.3/0499/102.5/VAKSIN/II/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut BCG	278	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
4	15/04/25	400.7.18.3/1408/102.5/VAKSIN/IV/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut BCG	357	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
5	06/05/25	400.7.18.3/1685/102.5/VAKSIN/V/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	568	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
6	04/06/25	400.7.18.3/2113/102.5/VAKSIN/VI/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	851	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
7	08/07/25	400.7.18.3/2563/102.5/VAKSIN/VII/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	1.530	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
8	10/07/25	BJ.0202/E.IV.10/1202-PK/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Prufen Hemoglobin meter	33	pcs	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
9	07/08/25	400.7.18.3/3093/102.5/VAKSIN/VIII/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	552	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
10	03/09/25	BJ.0202/EIV.10/1850-PK/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Onemed Hb Meter	34	pcs	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
11	04/09/25	400.7.18.3/3400/102.5/VAKSIN/IX/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut BCG	780	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
12	04/09/25	400.7.18.3/3400/102.5/VAKSIN/IX/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	1.701	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
13	07/10/25	400.7.18.3/3839/102.5/VAKSIN/X/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut BCG	355	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
14	07/10/25	400.7.18.3/3839/102.5/VAKSIN/X/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Dropper Polio	851	pcs	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
15	07/10/25	400.7.18.3/3839/102.5/VAKSIN/X/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	520	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
16	28/10/25	400.7.18.3/4118/102.5/VAKSIN/X/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	233	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
17	05/11/25	400.7.18.3/4189/102.5/VAKSIN/XI/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Vaksin PCV	1.596	vial	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
18	05/11/25	400.7.18.3/4189/102.5/VAKSIN/XI/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Dropper Polio	568	pcs	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
19	05/11/25	400.7.18.3/4189/102.5/VAKSIN/XI/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	851	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
20	19/11/25	442/609/425.102/KabProbolinggo/XI/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Kontrol Hematologi	6	botol	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
21	04/12/25	400.7.18.3/4805/102.5/Vaksin/XII/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Dropper Polio	1.135	pcs	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan
22	04/12/25	400.7.18.3/4805/102.5/Vaksin/XII/2025	Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur	Pelaut MR	851	ampul	Berita Acara Tanpa Harga Perolehan

Berikut perlakuan persediaan hibah pada Dinas Kesehatan yang diterima tanpa harga perolehan.

1. Barang berupa pelaut dan *dropper* tidak terdapat harga perolehan dikarenakan bersifat *bundling* dengan vaksin yang sebagaimana telah dirinci pada **Lampiran 12**;

2. Terdapat mutasi barang hibah tanpa harga perolehan berupa Onemed Hb Meter dari Dinas Kesehatan pada 31 Puskesmas di Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari:

- 1) Puskesmas Bago;
- 2) Puskesmas Bantaran;
- 3) Puskesmas Besuk;
- 4) Puskesmas Condong;
- 5) Puskesmas Curah Tulis;
- 6) Puskesmas Dringu;
- 7) Puskesmas Glagah;
- 8) Puskesmas Jabungsisir;
- 9) Puskesmas Jorongan;
- 10) Puskesmas Klenang Kidul;
- 11) Puskesmas Kotaanyar;
- 12) Puskesmas Kraksaan;
- 13) Puskesmas Krejengan;
- 14) Puskesmas Krucil;
- 15) Puskesmas Kuripan;
- 16) Puskesmas Leces;
- 17) Puskesmas Lumbang;
- 18) Puskesmas Maron;
- 19) Puskesmas Paiton;
- 20) Puskesmas Pajarak;
- 21) Puskesmas Pakuniran;
- 22) Puskesmas Ranugedang;
- 23) Puskesmas Sukapura;
- 24) Puskesmas Suko;
- 25) Puskesmas Sumber;
- 26) Puskesmas Sumberasih;
- 27) Puskesmas Tegalsiwalan;
- 28) Puskesmas Tiris;
- 29) Puskesmas Tongas;
- 30) Puskesmas Wangkal;
- 31) Puskesmas Wonomerto.

D.1.2	Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		35.758.000.859,00	36.164.150.899,00

Investasi Jangka Panjang Tahun 2025 sebesar Rp35.758.000.859,00 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 126 Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	35.758.000.859,00	36.164.150.899,00
Jumlah		35.758.000.859,00	36.164.150.899,00

D.1.2.1	Investasi Non Permanen	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan nilai Dana Bergulir yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Pada Neraca, Dana Bergulir disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan mengelompokkan umur Dana Bergulir

sesuai dengan tanggal jatuh temponya (*Aging Schedule*) yaitu dua tahun setelah tanggal realisasi Dana Bergulir diberikan kepada masyarakat. Semua debitur sampai dengan 31 Desember 2025 termasuk dalam kategori macet sehingga persentase perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih sebesar 100%. Adapun saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

**Tabel 127 Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
2	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
3	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
4	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
5	Dana Bergulir	0,00	0,00
6	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
7	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
8	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

D.1.2.1.1 Dana Bergulir	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	5.915.992.470,74	5.972.603.811,58

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.915.992.470,74 mengalami penurunan sebesar (Rp56.611.340,84) atau (0,95%) dari Saldo Dana Bergulir Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 128 Rekapitulasi Mutasi Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	5.114.831.829,58	0,00	(56.611.340,84)	5.058.220.488,74
2	Dinas Pertanian (Usaha Ternak)	349.171.981,00	0,00	0,00	349.171.981,00
3	Dinas Pertanian (Disbunhut/ Mekanisasi/ Pembelian Gabah)	508.600.001,00	0,00	0,00	508.600.001,00
	Jumlah	5.972.603.811,58	0,00	(56.611.340,84)	5.915.992.470,74

Dalam rangka penyelesaian pengurusan piutang Dana Bergulir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2019 tentang Pengurusan Piutang Negara. Upaya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

- Mengajukan usulan penghapusan piutang debitur Dana Bergulir yang sudah masuk kategori macet atau PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) melalui KPKNL Jember.
- KPKNL Jember menerbitkan SP3N (Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara) apabila dokumen telah memenuhi persyaratan.
- KPKNL Jember menerbitkan Surat Paksa apabila debitur tidak melunasi piutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- KPKNL Jember menerbitkan SPPNL (Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas) apabila debitur telah melunasi kewajibannya.

Adapun dasar penilaian Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.058.220.488,74 adalah dana bergulir

sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2020 untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada Tahun 2025 terdapat pelunasan dari perorangan/kelompok penerima sebesar Rp56.611.340,84. Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian menggunakan jasa perbankan (*Channeling*) dengan membuka rekening giro khusus penerimaan angsuran pokok Dana Bergulir pada BPD Jatim Cabang Kraksaan, BPD Jatim Cabang Probolinggo dan BPR Jatim Cabang Probolinggo.

Sampai dengan 31 Desember 2025 seluruh pembayaran Pokok Dana Bergulir KMK telah disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan Pokok Dana Bergulir Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan dilimpahkan ke RKUD. Sehingga saldo rekening penampungan pada Bank Jatim Kraksaan maupun BPD Jatim Probolinggo per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Adapun rincian per tahun Investasi Non Permanen-Dana Bergulir KMK bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

**Tabel 129 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pokok KMK
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	UKM				
	2002	32.800.000,00	0,00	0,00	32.800.000,00
	2003	54.723.833,25	0,00	0,00	54.723.833,25
	2004	91.575.533,24	0,00	0,00	91.575.533,24
	2005	110.156.391,02	0,00	0,00	110.156.391,02
	2006	155.165.999,92	0,00	0,00	155.165.999,92
	MIKRO 2006	195.424.271,37	0,00	0,00	195.424.271,37
	2007	188.587.490,85	0,00	(16.450.000,00)	172.137.490,85
	MIKRO 2007	165.258.635,88	0,00	(3.000.000,00)	162.258.635,88
	2008	173.936.136,44	0,00	0,00	173.936.136,44
	MIKRO 2008	13.090.909,07	0,00	0,00	13.090.909,07
	2009	105.858.318,15	0,00	0,00	105.858.318,15
	2010	119.261.312,57	0,00	(10.227.272,74)	109.034.039,83
	2011	147.090.572,75	0,00	0,00	147.090.572,75
	2012	76.526.181,86	0,00	(1.360.736,00)	75.165.445,86
	2013	104.094.490,72	0,00	0,00	104.094.490,72
	2014	244.980.700,00	0,00	0,00	244.980.700,00
	2015	159.847.727,30	0,00	0,00	159.847.727,30
	2016	133.350.800,00	0,00	0,00	133.350.800,00
	2017	102.208.045,49	0,00	0,00	102.208.045,49
	2018	125.285.000,00	0,00	(10.000.000,00)	115.285.000,00
	2019	238.804.018,27	0,00	0,00	238.804.018,27
	2020	41.261.997,10	0,00	(11.229.997,10)	30.032.000,00
	Jumlah UKM	2.779.288.365,25	0,00	(52.268.005,84)	2.727.020.359,41
2	DAC				
	2009	339.000.000,00	0,00	0,00	339.000.000,00
	2010	217.857.142,86	0,00	0,00	217.857.142,86
	2012	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	Jumlah DAC	856.857.142,86	0,00	0,00	856.857.142,86
3	KPRI				
	2011	34.090.909,03	0,00	0,00	34.090.909,03
	2012	146.190.909,08	0,00	0,00	146.190.909,08
	Jumlah KPRI	180.281.818,11	0,00	0,00	180.281.818,11
4	Usaha Produktif				
	2008	4.550.000,05	0,00	0,00	4.550.000,05
	2010	56.825.000,00	0,00	0,00	56.825.000,00
	2011	53.250.000,00	0,00	0,00	53.250.000,00
	2012	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2013	75.600.000,00	0,00	0,00	75.600.000,00
	2014	152.784.256,00	0,00	(4.343.335,00)	148.440.921,00
	2015	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	2018	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2020	3.670.247,31	0,00	0,00	3.670.247,31
	Jumlah Usaha Produktif	596.679.503,36	0,00	(4.343.335,00)	592.336.168,36

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
5	Senkuko				
	2013	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2015	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Senkuko	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
6	Mikro				
	2011	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00
	2012	113.025.000,00	0,00	0,00	113.025.000,00
	2013	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	2015	243.500.000,00	0,00	0,00	243.500.000,00
	2016	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	Jumlah Mikro	501.725.000,00	0,00	0,00	501.725.000,00
	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	5.114.831.829,58	0,00	(56.611.340,84)	5.058.220.488,74

Perguliran dana Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2020 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam rangka mengembangkan potensi koperasi. Namun pada praktiknya beberapa debitur berpotensi tidak dapat melunasi cicilan pokok atas pinjaman modal dan tidak mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah. Selain itu, beberapa debitur telah berstatus meninggal dunia dan beberapa status kelompok penerima telah bubar. Kondisi demikian mendorong Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan untuk mengajukan usulan penghapusan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Jumlah debitur KMK yang belum lunas per 31 Desember 2025 sebanyak 587 debitur dari total 3.730 debitur. Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan telah menyerahkan penyelesaian piutang kepada KPKNL Jember sebanyak 8 dengan rincian 7 debitur Usaha Produktif dari 24 debitur yang masih mempunyai tunggakan dan 1 debitur Mikro dari 13 debitur yang masih mempunyai tunggakan. Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan telah menyerahkan penyelesaian piutang kepada KPKNL Jember sebanyak 20 debitur UKM (Usaha Kredit Mikro) dari 546 debitur yang masih mempunyai tunggakan berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tanggal 25 September 2023 Nomor 518/2199/426.110/2023 sampai dengan Nomor 518/2218/426.110/2023 perihal Penyerahan Berkas Piutang Negara. Sehingga per 31 Desember 2025 jumlah debitur KMK yang telah diserahkan pengurusan piutangnya kepada KPKNL sebanyak 27 debitur dimana 13 debitur sudah terbit SPPNL (Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas) dan 14 debitur belum lunas.

4. Dinas Pertanian

a. KMUT (Kredit Modal Usaha Ternak)

Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir KMUT pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp349.171.981,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 130 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pokok KMUT Dinas Pertanian
per 31 Desember 2025 dan 2024**

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2008 (4 Tahun)	72.018.614,00	0,00	0,00	72.018.614,00
2	2009 (4 Tahun)	139.266.832,00	0,00	0,00	139.266.832,00
3	2010 (4 Tahun)	35.886.535,00	0,00	0,00	35.886.535,00
4	2011 (4 Tahun)	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
5	2012 (4 Tahun)	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	Jumlah	349.171.981,00	0,00	0,00	349.171.981,00

Realisasi penerimaan angsuran piutang Dana Bergulir dari KMUT pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Untuk realisasi Dana Bergulir Tahun 2008 hingga Tahun 2012 Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan melalui skema *Channeling*. Dalam pelaksanaan pemberian Dana Bergulir kepada perorangan/kelompok Dinas Pertanian membuka rekening Giro khusus penerimaan angsuran pokok dan bunga secara terpisah.

Pencatatan pelunasan Dana Bergulir KMUT pada Dinas Pertanian dilakukan pada saat dana di rekening pembayaran Bank disetor ke rekening Bendahara Penerimaan Pokok atau Bunga Dana Bergulir Dinas Pertanian dan dilimpahkan ke RKUD. Saldo rekening penampungan pada BPD Jatim Kraksaan per 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Perguliran dana Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka membantu peternak untuk mengembangkan potensi ternak tiap daerah sebaran komoditas. Jenis hewan ternak yang direalisasikan sesuai kontrak perjanjian dengan ketua kelompok adalah berupa sapi perah, sapi bibit Peranakan *Ongoles* (PO), sapi jantan, ayam buras, itik, dan kambing domba. Namun pada praktiknya beberapa debitur berpotensi tidak dapat melunasi cicilan pokok atas pinjaman modal dan tidak mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah. Lebih dari itu, hewan ternak mati sebelum menghasilkan kontribusi penjualan hewan ternak di bawah nominal pokok pinjaman dan status kelompok penerima telah bubar. Kondisi demikian mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo untuk mengajukan usulan penghapusan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian menyerahkan penyelesaian piutang kepada KPKNL Jember sebanyak 41 debitur dari 65 debitur KMUT yang masih mempunyai tunggakan berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 27 September 2021 Nomor: 524/489/426.120/2021 perihal Permohonan Penyelesaian Pengurusan Piutang. Pada Tahun 2022 Dinas Pertanian menyerahkan penyelesaian piutang sebanyak 24 debitur KMUT ke KPKNL Jember berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tanggal 23 September 2023 Nomor: 524/581/426.118/2022 dan tanggal 26 September 2023 Nomor: 524/687/426.118/2022 perihal Permohonan Fasilitasi Penyelesaian Pengurusan Piutang Dana Bergulir KMUT. Sehingga seluruh penyelesaian piutang Dana Bergulir KMUT Dinas Pertanian telah diserahkan ke KPKNL Jember dan sudah diterbitkan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara).

Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah debitur KMUT yang belum terbit SPPNL (Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas) dari KPKNL sebanyak 17 debitur. Dari 17 debitur tersebut 5 debitur telah menerima Surat Paksa dari KPKNL Jember.

b. Disbunhut/Mekanisasi/Pembelian Gabah

Nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp508.600.001,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 131 Rekapitulasi Mutasi Piutang Pokok Disbunhut, Mekanisasi dan Pembelian Gabah pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Disbunhut	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
	2008	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
2	Mekanisasi	83.500.000,00	0,00	0,00	83.500.000,00
	2006	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	2005	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00
	2004	38.850.000,00	0,00	0,00	38.850.000,00
3	Pembelian Gabah	389.100.001,00	0,00	0,00	389.100.001,00

No	Tahun	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	2003	123.433.334,00	0,00	0,00	123.433.334,00
	2002	265.666.667,00	0,00	0,00	265.666.667,00
	Jumlah	508.600.001,00	0,00	0,00	508.600.001,00

Realisasi penerimaan angsuran piutang Dana Bergulir dari Disbunhut, Mekanisasi dan Pembelian Gabah pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Bantuan kredit Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 digulirkan untuk penguatan kapasitas petani kecil yang tergabung dalam kelompok tani binaan melalui pemberian pinjaman modal untuk pembelian alat mekanisasi pertanian. Sedangkan, untuk pinjaman kredit Tahun 2007 digulirkan sebagai bantuan modal untuk pengembangan usaha kepada kelompok tani penangkar benih. Skema perguliran dana bantuan kepada kelompok tani dilakukan secara langsung dengan pertimbangan bahwa dalam program perguliran dana juga melekat fungsi pemberdayaan petani kecil anggota kelompok tani binaan.

Jumlah debitor Dana Bergulir Disbunhut, Mekanisasi dan Pembelian Gabah yang belum lunas per 31 Desember 2025 sebanyak 25 debitor dari total 34 debitor. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian menyerahkan penyelesaian piutang kepada KPKNL Jember sebanyak 2 debitor Disbunhut dari 2 debitor yang masih mempunyai tunggakan dan telah diterbitkan SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) pada tanggal 2 April 2023.

D.1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	Tidak Tertagih	(5.915.992.470,74)	(5.972.603.811,58)

Saldo Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp5.915.992.470,74) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 132 Perhitungan NRV Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025

No	Investasi Non Permanen	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Dana Bergulir Diragukan Tertagih 31 Desember 2025 (Rp)	Investasi Non Permanen- Dana Bergulir 31 Desember 2025 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.058.220.488,74	(5.058.220.488,74)	0,00
2	Dinas Pertanian (Kredit Modal Usaha Ternak)	349.171.981,00	(349.171.981,00)	0,00
3	Dinas Pertanian (Disbunhut/Mekanisasi/Pembelian Gabah)	508.600.001,00	(508.600.001,00)	0,00
	Jumlah	5.915.992.470,74	(5.915.992.470,74)	0,00

Perhitungan NRV (*Net Realizable Value*) Investasi Non Permanen telah bisa menunjukkan jumlah NRV sebesar Rp0,00 dengan demikian pencatatan dalam Neraca per 31 Desember 2025 mencantumkan nilai bersih Investasi Non Permanen. Perhitungan Klasifikasi Dana Bergulir dihitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 2 tahun setelah tanggal realisasi Dana Bergulir diberikan kepada Masyarakat. Adapun rincian perhitungan penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih untuk masing-masing jenis Dana Bergulir adalah sebagai berikut.

Tabel 133 Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Klasifikasi Dana Bergulir				Jumlah (Rp)
		0-2 Bulan (Rp)	2-4 Bulan (Rp)	4-12 Bulan (Rp)	> 12 Bulan (Rp)	
1	Dana Bergulir Bruto	0,00	0,00	0,00	5.058.220.488,74	5.058.220.488,74
2	% Tidak Tertagih	0%	20%	60%	100%	
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00	0,00	(5.058.220.488,74)	(5.058.220.488,74)

No	Uraian	Klasifikasi Dana Bergulir				Jumlah (Rp)
		0-2 Bulan (Rp)	2-4 Bulan (Rp)	4-12 Bulan (Rp)	> 12 Bulan (Rp)	
	Jumlah NRV Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berikut Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Tidak Tertagih Pada Dinas Pertanian (Kredit Modal Usaha Ternak) per 31 Desember 2025.

Tabel 134 Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Tidak Tertagih Pada Dinas Pertanian (Kredit Modal Usaha Ternak) per 31 Desember 2025

No	Uraian	Klasifikasi Dana Bergulir				Jumlah (Rp)
		0-2 Bulan (Rp)	> 2-4 Bulan (Rp)	>4-12 Bulan (Rp)	> 12 Bulan (Rp)	
1	Dana Bergulir Bruto	0,00	0,00	0,00	349.171.981,00	349.171.981,00
2	% Tidak Tertagih	0%	20%	60%	100%	
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00	0,00	(349.171.981,00)	(349.171.981,00)
	Jumlah NRV Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berikut Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada Dinas Pertanian (Disbunhut/Mekanisasi/Pembelian Gabah) per 31 Desember 2025.

Tabel 135 Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Tidak Tertagih pada Dinas Pertanian (Disbunhut/Mekanisasi/Pembelian Gabah) per 31 Desember 2025

No	Uraian	Klasifikasi Dana Bergulir				Jumlah (Rp)
		0-2 Bulan (Rp)	>2-4 Bulan (Rp)	>4-12 Bulan (Rp)	> 12 Bulan (Rp)	
1	Dana Bergulir Bruto	0,00	0,00	0,00	508.600.001,00	508.600.001,00
2	% Tidak Tertagih	0%	20%	60%	100%	
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00	0,00	(508.600.001,00)	(508.600.001,00)
	Jumlah NRV Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo akhir Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah dilakukan penyisihan Piutang Investasi Non Permanen Tidak Tertagih dengan Metode NRV. Dana Bergulir diragukan tertagih merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen berdasarkan umur Investasi tersebut.

D.1.2.2	Investasi Permanen	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		35.758.000.859,00	36.164.150.899,00

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.758.000.859,00 dengan rincian sebagai berikut.

D.1.2.2.1	Penyertaan Modal	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		35.758.000.859,00	36.164.150.899,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp35.758.000.859,00 mengalami penurunan sebesar (Rp406.150.040,00) atau (1,14%) dari Penyertaan Modal Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 136 Rekapitulasi Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu (Rp)	Labas/(Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	
1	Penyertaan modal pada BPD Jatim (saham)	31.482.863.500,00	0,00	0,00	31.482.863.500,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Koreksi Laba/(Rugi) Tahun Lalu (Rp)	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	
2	Penyertaan modal pada BPR Jatim (saham)	2.200.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Rengganis	2.481.287.399,00	0,00	(406.150.040,00)	2.075.137.359,00
4	Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		36.164.150.899,00	0,00	(406.150.040,00)	35.758.000.859,00

(1) Penyertaan Modal pada BPD Jatim

Tidak ada penambahan maupun pengurangan penyertaan saham pada BPD Jatim pada Tahun 2025, sehingga saldo akhir penyertaan saham per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.482.863.500,00 terdiri dari 125.931.454 lembar saham dan persentase kepemilikan sebesar 0,84% yang dicatat dengan metode biaya. Sesuai dengan Anggaran Dasar BPD Jatim, bukti lembar saham diterbitkan secara kolektif, sehingga jumlah setoran modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai sejak penyeteroran sampai dengan posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp31.482.863.500,00 dijadikan satu lembar saham kolektif dengan Nomor 15 Seri A. Penjelasan atas nilai nominal Rp31.482.863.500,00 sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPD Jatim pada Bab III Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPD Jatim ditetapkan sebesar Rp31.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - Sampai dengan Tahun 2012 Penyertaan Modal Pemerintah pada BPD Jatim sebesar Rp17.500.000.000,00;
 - Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - Tahun 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00;
 - Tahun 2015 sebesar Rp2.700.000.000,00;
 - Tahun 2016 sebesar Rp2.800.000.000,00; dan
 - Tahun 2017 sebesar Rp2.900.000.000,00.
- b. Pada tanggal 25 Juli 2012 BPD Jatim mengirim surat Nomor: 050/020/Dir/Djl-Dn perihal Cadangan yang Dikonversi menjadi Saham, adapun pokok isi dari surat dimaksud adalah sebagai berikut.
 - BPD Jatim melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dan menyampaikan bahwa cadangan umum yang selama ini dibentuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dikonversi menjadi saham.
 - Jumlah cadangan umum yang dikonversi menjadi saham sebesar Rp1.310.000.000.000,00 dan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp13.982.863.526,95.
 - Implikasi dari konversi cadangan umum ke saham dimaksud menyebabkan posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut.

Tabel 137 Konversi Cadangan Umum ke Saham

Uraian	Jumlah (Rp)
Kepemilikan Saham per 31 Desember 2011	14.975.000.000,00
Tambahan Setoran Modal selama Tahun 2012	2525.000.000,00
Cadangan yang Dikonversi	13.982.863.500,00
Sisa Hasil dari Cadangan yang Dikonversi	26,95
Jumlah	31.482.863.526,95

- Sisa hasil dari cadangan yang dikonversi Rp26,95 dilimpahkan ke rekening Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tanggal 4 Mei 2012.
- Dividen Tahun Buku 2024 adalah sebesar 64,12% dari laba bersih Tahun Buku 2024 yang telah disetor Tahun 2025 sebesar Rp821.497.900.066,22 sesuai dasar surat Nomor: 064/564/KRA/OPSDN/SRT tanggal 20 Juni 2025 dan diterima RKUD tanggal 19 Juni 2025.

(2) Penyertaan Modal pada BPR Jatim

Saldo Investasi dalam bentuk penyertaan saham pada BPR Jatim per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.200.000.000,00 terdiri dari 22.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham masing-masing Rp100.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 0,54% yang dicatat dengan metode biaya. Pada Tahun 2025 tidak ada penambahan saldo Investasi Penyertaan Modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPR Jatim ditetapkan sebesar Rp2.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada BPR Jatim.
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada PT BPR Jatim dengan rincian sebagai berikut.
 - Tahun 2013 sebesar Rp200.000.000,00;
 - Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00;
 - Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00;
 - Tahun 2016 sebesar Rp200.000.000,00; dan
 - Tahun 2017 sebesar Rp200.000.000,00.

Terdapat beberapa rincian Surat Kolektif Saham BPR Jatim sebagai berikut.

Tabel 138 Rincian Surat Saham Kolektif BPR Jatim

No	Uraian	Nomor Surat Kolektif Saham	Tanggal Terbit Surat Kolektif Saham	Nominal (Rp)	Nomor Urut Saham
1	BPR Jatim	20/008	28 Juli 2006	100.000.000,00	357.691 s/d 358.690
2	BPR Jatim	20/014	25 Mei 2009	100.000.000,00	563.524 s/d 564.523
3	BPR Jatim	20/013	15 Mei 2009	100.000.000,00	554.691 s/d 555.690
4	BPR Jatim	20/015	14 Oktober 2009	200.000.000,00	572.024 s/d 574.023
5	BPR Jatim	20/017	1 Juni 2010	200.000.000,00	679.724 s/d 681.723
6	BPR Jatim	20/020	28 September 2011	200.000.000,00	985.724 s/d 987.723
7	BPR Jatim	20/022	7 September 2012	200.000.000,00	996.024 s/d 998.023
8	BPR Jatim	20/023	24 Mei 2013	200.000.000,00	1.269.824 s/d 1.271.823
9	BPR Jatim	20/025	10 September 2014	200.000.000,00	1.370.324 s/d 1.372.323
10	BPR Jatim	20/010	13 April 2015	100.000.000,00	380.691 s/d 381.690
11	BPR Jatim	20/026	25 Juli 2016	200.000.000,00	1.992.824 s/d 1.994.823
12	BPR Jatim	20/027	25 Juli 2016	200.000.000,00	4.066.324 s/d 4.068.323
13	BPR Jatim	20/029	11 September 2017	200.000.000,00	4.093.824 s/d 4.095.823
Jumlah				2.200.000.000,00	

Dividen Tahun Buku 2024 yang telah disetor Tahun 2025 sebesar Rp58.706.000,00 sesuai dasar surat Nomor: 0407/Pmr.Tre/2025 tanggal 8 Juli 2025 dan diterima RKUD tanggal 8 Juli 2025.

Dividen Tahun Buku 2025 yang telah disetor Tahun 2026 sebesar Rp79.803.000,00 sesuai dasar surat Nomor: 0227/Pmr.Tre/2026 tanggal 5 Maret 2026 dan diterima RKUD tanggal 5 Maret 2026.

(3) Penyertaan Modal pada Perusda Rengganis (Non Saham)

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda Rengganis per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.158.396.544,00 sebagai berikut.

Tabel 139 Perhitungan Jumlah Penyertaan Modal pada Perusda Rengganis

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Penyertaan Modal Tahun 1986 s.d Tahun 2013 sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Perusda Rengganis sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015	1.170.883.211,00
1.1	Penyertaan Modal Berupa Uang Tunai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Rengganis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1991.	458.380.000,00
1.1.1	Apotek Rengganis	29.800.000,00
1.1.2	Pemandian Jabung Tirta	53.480.000,00
1.1.3	Gor Sasana Krida	250.100.000,00
1.1.4	Lapangan Tennis	15.000.000,00
1.1.5	Stadion Gelora Merdeka	110.000.000,00
1.2	Penyertaan Modal Berupa Pesanggrahan	677.386.544,00
1.2.1	Tanah berukuran 14.000 m2	221.200.000,00
1.2.2	Bangunan Gedung 1 Unit	450.886.544,00
1.2.3	Peralatan (barang)	5.300.000,00
1.2.3.1	Tempat tidur sebanyak 16 buah	1.600.000,00
1.2.3.2	Kasur sebanyak 16 buah	2.590.000,00
1.2.3.3	Sprei/alas kasur sebanyak 16 lembar	1.110.000,00
1.3	Penyertaan Modal Berupa Kolam	35.116.667,00
1.3.1	Kolam Pemancingan	35.116.667,00
2	Penyertaan modal pada Tahun 2015 sebesar Rp2.122.779.000,00 sesuai Nomor: 800/849/426.108/2016, 027/615/426.12/2016 tanggal 19 April 2016 dan 028/189.1/426.108/2016	2.122.779.000,00
2.1	Bangunan Fisik berupa Gedung Tempat Pertemuan Permanen	177.430.000,00
2.2	Bangunan Fisik berupa Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1.945.349.000,00
3	Penyertaan Modal Tahun 2016 berupa uang tunai Sesuai sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah sesuai Nomor: 900/69a./426.21/2016 dan Nomor 900/011/426.702/2016	1.000.000.000,00
4	Penyertaan Modal 2017 sesuai Nomor 900/65/426.43/2017 dan Nomor: 900/010/426.702/2017	1.000.000.000,00
5	Pengembalian Kolam Pancing Stadion Gelora Merdeka sesuai Nomor: 640/093/426.520/2017	(35.116.667,00)
6	Pengembalian Bangunan Stadion Gelora Merdeka sesuai dengan BAST Nomor: 027/014/426.502/2020	(2.055.349.000,00)
7	Pengembalian Apotik Rengganis dan Lapangan Tennis sesuai BAST Nomor: 000.2.3.2/054/426.502/2023 dan Nomor 000.2.3.2/1070/426.203/2023	(44.800.000,00)
7.1	Apotik Rengganis	(29.800.000,00)
7.2	Lapangan Tennis	(15.000.000,00)
Jumlah		3.158.396.544,00

Perhitungan jumlah Investasi Permanen pada Perusda Rengganis berdasarkan Laporan Keuangan Perusda Rengganis Tahun 2025 (*Audited*) dengan metode ekuitas sebesar Rp2.075.137.359,00 sebagai berikut.

Tabel 140 Perhitungan Jumlah Investasi Permanen pada Perusda Rengganis

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Penyertaan Modal per 31 Desember 2025	3.158.396.544,00
2	Akumulasi Laba (rugi) s/d 31 Desember 2025	(1.083.259.185,00)
2.1	Akumulasi Laba (rugi) & Laba Ditahan s/d 31 Desember 2024	(677.109.145,00)
2.2	Laba (rugi) Tahun Berjalan 2025	(406.150.040,00)
Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2025 (1+2)		2.075.137.359,00

Laporan Perubahan Ekuitas Perusda Rengganis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat pada **Lampiran 9**.

(4) Penyertaan Modal pada PDAM (Non Saham)

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada PDAM yang di dalamnya mengatur Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipergunakan untuk kegiatan operasional PDAM Kabupaten Probolinggo. Rincian Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Probolinggo per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.715.645.944,40 terdiri dari.

Tabel 141 Rincian Penyertaan Modal PDAM

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada PDAM berupa Tanah dan Instalasi Air berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	67.960.519,00
2	Penghibahan status tetap Aset eks proyek (P2AB) Jawa Timur dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Probolinggo sesuai dengan BAST Nomor: 5/BA/w.13/97 tanggal 15 Juni 1997 dan Perda Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	3.542.981.707,00
3	Penyerahan Pengelolaan Unit Condong eks Aset proyek Inpres Bantuan Prasarana Dasar Pemukiman (IBPDP) TA 1997/1998 dari Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo sesuai dengan BA Penyerahan Proyek tanggal 2 April 1998 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	266.065.000,00
4	Pembangunan Instalasi SPAM yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo Berdasarkan BA Rekonsiliasi Penatausahaan BMD per 31 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015	28.851.622.140,00
5	Instalasi Air bersih lain-lain (SPAM) pembangunan Tahun 2014 yang diserahkan kepada PDAM sebagai Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	3.221.544.100,00
6	Instalasi Air bersih lain-lain (SPAM) pembangunan Tahun 2015 yang diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	2.979.717.000,00
7	Penyertaan Modal berupa Kas di Tahun 2016 berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	3.500.000.000,00
8	Penyertaan Modal Non Kas yang merupakan hibah terusan dari Pemerintah Pusat untuk menghapus utang PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016	22.105.087.978,40
9	Penyertaan Modal berupa Kas di Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	5.000.000.000,00
10	Penyertaan Modal berupa Kas di Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 diubah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015	3.350.525.000,00
11	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Probolinggo sesuai BAST Nomor: 028/55/426.113/2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015	2.299.286.000,00
12	Penyertaan Modal sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1986	105.900.000,00
13	Penyertaan Modal berupa Kas di Tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018	4.544.000.000,00
14	Instalasi Transmisi dan Distribusi Tahun 2019 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018	2.922.285.000,00
15	Penyertaan Modal berupa Kas di Tahun 2020 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018	2.038.000.000,00
16	Instalasi Transmisi dan Distribusi Tahun 2020 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018	1.993.769.000,00
17	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Probolinggo sesuai Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Nomor 900/250/426.43/2021 dan Nomor: 692/229/426.501/2021 tanggal 23 Desember 2021	1.656.976.500,00
18	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Probolinggo sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diterima tanggal 27 Desember 2021 Nomor: 028/816.1/426.113/2021	1.269.926.000,00
Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2025		89.715.645.944,40

Perhitungan Investasi Permanen pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) dengan metode ekuitas sebesar (Rp4.308.073.249,84) sebagai berikut.

Tabel 142 Perhitungan Jumlah Investasi Permanen pada PDAM

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Penyertaan Modal per 31 Desember 2025	89.715.645.944,40
2	Akumulasi Laba/(Rugi) s/d 31 Desember 2025	(94.023.719.194,24)
	2.1 Akumulasi Laba/(Rugi) s/d 31 Desember 2024	(92.683.380.484,34)
	2.2 Laba (rugi) Tahun Berjalan 2025	(1.340.338.709,90)
	2.2.1 Koreksi Laba/(Rugi) Tahun 2024	(2.246.005.835,27)
	2.2.2 Laba/(Rugi) Tahun 2025	905.667.125,37
Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2025 (1+2)		(4.308.073.249,84)

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2025 (*Audited*) akumulasi Laba/(Rugi) per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp94.023.719.194,24) terdiri dari akumulasi

Laba/(Rugi) per 31 Desember 2024 sebesar (Rp92.683.380.484,34), koreksi Laba/(Rugi) Tahun 2024 sebesar (Rp2.246.005.835,27) dan Laba/(Rugi) Tahun 2025 sebesar Rp905.667.125,37, dari jumlah penyertaan modal sebesar 89.715.645.944,40 sehingga saldo investasi dengan metode ekuitas menjadi sebesar (Rp4.308.073.249,84).

Berdasarkan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 45 apabila nilai investasi menjadi negatif akibat kerugian maka investasi tersebut disajikan di Neraca sebesar nihil dan nilai negatif tersebut tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain penyertaan modal terdapat rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dipinjam-pakai untuk kegiatan operasional PDAM sebagai berikut.

Tabel 143 Rincian Aset Tetap Pemerintah Daerah yang dipinjam-pakai pada PDAM

No	Uraian	Sumber Dana	Nilai (Rp)
1	SPAM Desa Jurangjero Kecamatan Gading dengan BA Nomor: 028/864.1/428.108/2016	DAU	331.234.000,00
2	Pipa Distribusi SPAM Dusun Sumur Lepatan Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwangi dengan BA Nomor: 028/864.1/428.108/2016	DAU	153.162.300,00
3	Pipa Distribusi SPAM Dusun Gulitongan Desa Gununggeni Kecamatan Banyuwangi dengan BA Nomor: 028/864.1/428.108/2016	DAU	153.942.600,00
4	SPAM Desa Ranuagung Kecamatan Tiris dengan BA Nomor: 028/864.1/428.108/2016	DAU	385.167.000,00
5	Kantor Eks Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (gedung) di Dringu dengan BA Nomor: 028/762.1/426.110/2017	DAU	419.802.000,00
6	Kantor Eks Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (tanah) di Dringu dengan BA Nomor: 028/762/426.110/2017	DAU	495.066.666,66
Jumlah			1.938.374.566,66

Laporan Perubahan Ekuitas PDAM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdapat pada **Lampiran 9**.

D.1.3 Aset Tetap	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	2.715.233.640.148,68	2.660.955.545.327,88

Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp2.715.233.640.148,68, mengalami kenaikan sebesar Rp54.278.094.820,80 atau 2,04% dari Aset Tetap Tahun 2024, Terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Tabel mutasi tambah dan kurang atas Aset Tetap selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 144 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	513.161.156.634,63	0,00	9.191.754.000,00	(4.476.103.728,13)	517.876.806.906,50
2	Peralatan dan Mesin	1.184.030.146.018,04	0,00	111.633.112.948,39	(4.793.617.686,82)	1.290.869.641.279,61
3	Gedung dan Bangunan	1.576.060.099.413,38	0,00	125.411.727.020,18	(10.017.676.641,94)	1.691.454.149.791,62
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.095.966.258.883,04	0,00	46.955.250.329,85	(109.061.836,62)	2.142.812.447.376,27
5	Aset Tetap Lainnya	27.096.113.627,30	0,00	10.735.811.516,58	(8.061.163.004,00)	29.770.762.139,88
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.756.337.165,33	0,00	1.571.210.212,00	(1.756.337.165,33)	1.571.210.212,00
	Jumlah	5.398.070.111.741,72	0,00	305.498.866.027,00	(29.213.960.062,84)	5.674.355.017.705,88
7	Akumulasi Penyusutan	(2.737.114.566.413,84)	6.250.200,00	(223.762.945.089,96)	1.749.883.746,60	(2.959.121.377.557,20)
	Jumlah	2.660.955.545.327,88	6.250.200,00	81.735.920.937,04	(27.464.076.316,24)	2.715.233.640.148,68

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.660.955.545.327,88 merupakan saldo akhir tahun 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh BPK.

Selama tahun 2025, terdapat mutasi tambah sebesar Rp81.735.920.937,04, mutasi kurang sebesar (Rp27.464.076.316,24), dan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp6.250.000,00, dengan demikian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.715.233.640.148,68. Adapun uraian dari masing-masing jenis aset sebagai berikut.

D.1.3.1 Tanah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	517.876.806.906,50	513.161.156.634,63

Aset Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp517.876.806.906,50, mengalami kenaikan sebesar Rp4.715.650.271,87 atau 0,92% dari Aset Tetap Tanah Tahun 2024, diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi kurang Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 145 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	513.161.156.634,63
Penambahan Tahun 2025	9.191.754.000,00
Realisasi Belanja Modal Tanah 2025	735.000.000,00
Penambahan Aset dari Hibah Dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya	2.708.914.000,00
Mutasi Tambah dari Perolehan Lainnya	5.747.840.000,00
Pengurangan Tahun 2025	(4.476.103.728,13)
Reklas Ke Properti Investasi	(4.279.991.883,67)
Penghapusan Aset Tahun berjalan	(196.111.844,46)
Saldo per 31 Desember 2025	517.876.806.906,50

Penjelasan dari masing-masing mutasi sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp9.191.754.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

- Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp735.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hibah dan Bantuan dari Pusat, Provinsi dan pihak Lainnya Tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.708.914.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146 Hibah dan Bantuan dari Pusat, Provinsi dan pihak Lainnya Aset Tetap Tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	481.338.000,00	156/SMW/X/2025	Pengembang Perumahan De Tanjung Raya Residence Cluster 8	31/10/2025
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.127.841.000,00	15/SMW/X/2025	Pengembang Perumahan De Tanjung Raya Residence Cluster 9	31/10/2025
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	106.502.000,00	012/PTBERKAH/X/2025	Pengembang Perumahan Griya Pabean Asri	31/10/2025
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	468.548.000,00	011/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 1	31/10/2025
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	119.310.000,00	012/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 2	31/10/2025
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	105.600.000,00	52/SP/KSP/X/2025	Pengembang Perumahan Syailendra Residence 1	31/10/2025
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	138.947.000,00	81/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 1	31/10/2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	97.792.000,00	48/PT.BMP/X/2025	Pengembang Perumahan Tambak Rejo Residence	31/10/2025
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	63.036.000,00	82/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 2	31/10/2025
	Jumlah	2.708.914.000,00			

- c. Mutasi Tambah dari Perolehan Lainnya sebesar Rp5.747.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 147 Mutasi Tambah Tanah dari Perolehan Lainnya per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nominal	BAST/Dokumen Kontrak	Penyebab Perolehan	Tanggal
1	Dinas Pertanian	1.519.000.000,00	TP/1/PROBOWANGIASETPEMDA/VII/2024	Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	01/01/2025
2	Dinas Pertanian	691.600.000,00	TP/2/PROBOWANGITKDTAMAN/V/2024	Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	05/07/2025
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.335.240.000,00	500.17.4/3745/426.101/2025	Utang Belanja Modal Tanah SDN Curahsawo	28/08/2025
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	202.000.000,00	420/3914/426.101/2025	Utang Belanja Modal Tanah SDN Banyuanyar Kidul	08/09/2025
	Jumlah	5.747.840.000,00			

Belanja Modal Tanah sebesar Rp735.000.000,00 dan Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.537.240.000,00 merupakan pembayaran aset dalam sengketa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 148 Rincian Aset dalam Sengketa Tahun 2025

No	Lembaga	Nilai Pasar Hasil Appraisal (Rp)	Total Ganti Rugi (Rp)	Nomor Putusan Pengadilan	Sudah Dibayarkan (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)
1	SDN Condong III	503.000.000,00	483.920.000,00	21/Pdt.G/2025/PN.Krs	Belum ada pembayaran	Belum ada pembayaran
2	SDN Talkandang	398.672.000,00	146.200.000,00	53/Pdt.G/2025/PN.Krs	Belum ada pembayaran	Belum ada pembayaran
3	SDN Banyuanyar Kidul	302.800.000,00	302.000.000,00	48/Pdt.G/2024/PN.Krs	100.000.000,00	202.000.000,00
4	SDN Curahsawo	4.228.600.000,00	3.970.240.000,00	68/Pdt.G/2023/PN.Krs	635.000.000,00	3.335.240.000,00
	Jumlah	5.433.072.000,00	4.902.360.000,00		735.000.000,00	3.537.240.000,00

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp4.476.103.728,13 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Reklasifikasi ke Properti Investasi Tanah sebesar Rp4.279.991.883,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 149 Reklasifikasi ke Properti Investasi Tanah

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	327.858.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.704.928.650,00
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	404.081.900,00
4	Kecamatan Pajarakan	1.270.900.000,00
5	Dinas Kesehatan	164.056.667,00
6	Sekretariat Daerah	408.166.666,67
	Jumlah	4.279.991.883,67

- b. Penghapusan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah Tanah telah terbit SK Penghapusan sebesar Rp196.111.844,46 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 150 Penghapusan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	SK		Jumlah (Rp)	Keterangan
			No. SK	Tgl. SK		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah	000.2.3.2/29/426.32/2025	06/11/2025	139.950.000,00	SK Penghapusan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah 2025 (Dihibahkan ke Kejaksaan Negeri peruntukan Gudang Aset Sitaan)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah	000.2.3.2/29/426.32/2025	06/11/2025	56.161.844,46	Penghapusan pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah 2025 (Dihibahkan kepada Bawaslu)
Jumlah					196.111.844,46	

Dalam rangka mendukung program strategis nasional, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan aset tetap tanah untuk pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menggunakan mekanisme Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasionalkan oleh Pihak Lain. Berdasarkan hasil monitoring progres pembangunan KDKMP pada lokasi aset milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diketahui bahwa penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk pembangunan KDKMP tersebar pada sebelas lokasi.

Dari sebelas lokasi tersebut, delapan lokasi telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tanggal 10 Februari 2026 (dalam proses penandatanganan perjanjian) dan tiga masih dalam proses persetujuan melalui Keputusan Bupati. Adapun rincian aset tersebut sebagai berikut.

Tabel 151 Aset Tetap Tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	Nama Objek Aset	Keputusan Penggunaan Barang	OPD	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Progres	Keterangan
1	Tanah yang digunakan untuk Eks Balai Penyuluh Pertanian	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 50%
2	Tanah yang digunakan untuk Gedung Kesenian (sisi utara)	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 50%
3	Tanah disebelah SMP Negeri 1 Kraksaan	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 60%
4	Tanah kosong di Pasar Kraksaan Wetan	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	Desa Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 10%
5	Tanah Pekarangan	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 50%
6	Tanah Kosong	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Dusun Bintaro, Desa Ranugedang, Kecamatan Tiris	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 50%
7	Tanah Kosong	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor	Badan Pengelolaan	Desa Ranuagung	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan	Sudah Terbangun

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama Objek Aset	Keputusan Penggunaan Barang	OPD	Lokasi	Luas (m ²)	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Progres	Keterangan
		000.2.3.2/91/426.32/2 026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Tiris					BAST	50%
8	Tanah Kosong	Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 000.2.3.2/91/426.32/2 026 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah tanggal 10 Februari 2026	Kecamatan Kraksaan	Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan	1.000	1 Tahun	03/03/2026	02/03/2027	Penandatanganan Perjanjian dan BAST	Sudah Terbangun 30%
9	Lapangan Besuk (Belakang Kantor Kecamatan Besuk)	Belum Terdapat Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Besuk	Dusun Krajan, Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk	1.000	-	-	-	Persetujuan Bupati	Sudah Terbangun 30%
10	Eks Terminal Jorongan	Belum Terdapat Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Dusun Gili Ps., Jorongan, Kecamatan Leces	1.000	-	-	-	Persetujuan Bupati	Belum Terbangun
11	Tanah Kosong	Belum Terdapat Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran	1.000	-	-	-	Persetujuan Bupati	Belum Terbangun

D.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025 (Rp)

Per 31 Desember 2024 (Rp)

1.290.869.641.279,61

1.184.030.146.018,04

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.290.869.641.279,61, mengalami kenaikan sebesar Rp106.839.495.261,57 atau 9,02% dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024, diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi kurang Tahun 2025. Berikut rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025.

Tabel 152 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	1.184.030.146.018,04
Penambahan Tahun 2025	111.633.112.948,39
Belanja Modal Tahun 2025	93.105.679.455,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.930.076.402,80
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	63.380.600,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.894.362,00
Penambahan Aset Atas Hibah Dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi Dan Pihak Lainnya	13.568.168.202,48
Penambahan dari Reklasifikasi Beban Barang	479.582.444,11
Penambahan dari Reklasifikasi Beban Pemeliharaan	1.117.572.482,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.869.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain hasil inventarisasi ke Peralatan dan Mesin Tahun 2025	256.890.000,00
Pengurangan Tahun 2025	(4.793.617.686,82)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(131.541.010,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(1.485.165.140,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	(35.160.000,00)
Pengurangan ke Reklasifikasi Beban Barang	(606.187.855,00)
Pengurangan ke Reklasifikasi Beban Pemeliharaan	(735.296.917,00)
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibawah batasan kapitalisasi Tahun 2025	(167.388.592,82)
Pengurangan Aset Atas Hibah Dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi Dan Pihak Lainnya	(71.590.000,00)
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain hasil inventarisasi tahun 2025	(1.561.288.172,00)
Saldo per 31 Desember 2025	1.290.869.641.279,61

Penjelasan dari masing-masing mutasi sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp111.633.112.948,39 dapat dirinci sebagai berikut.
 - a. Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp93.105.679.455,00;
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.930.076.402,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 153 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin
dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	436.840.200,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	767.637.001,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.725.599.201,80
	Jumlah	2.930.076.402,80

- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp63.380.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp12.894.362,00 pada RSUD Tongas;
- e. Penambahan Aset Atas Hibah dan Bantuan dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya sebesar Rp13.568.168.202,48 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 154 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Atas Hibah dan Bantuan
dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST	Nama Barang
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.750.000,00	360/1688/208.3/2025	BPBD Provinsi Jawa Timur	15/12/2025	Mesin Pompa Air
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	695.000.000,00	166/BNPB/OJLP/LT.02.03/12/2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	01/12/2025	Hibah dari BNPB Mobil Pick Up Double Kabin
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	316.000.000,00	BAST-184/DSP-103/LOGPAL-PROBOLINGGO/D-II/BNPB/01/2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	20/01/2025	Perahu Motor Tempel
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00	BAST-184/DSP-103/LOGPAL-PROBOLINGGO/D-II/BNPB/01/2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	20/01/2025	Perahu Karet dan Dek Perahu
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.763.000,00	360/1431/208.3/2025	BPBD Provinsi Jawa Timur	03/11/2025	Mesin Gergaji
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.446.000,00	360/1688/208.3/2025	BPBD Provinsi Jawa Timur	15/12/2025	Meja Lipat
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.506.100.000,00	BAST-184/DSP-103/LOGPAL-PROBOLINGGO/D-II/BNPB/01/2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	20/01/2025	Tenda Keluarga
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.641.000,00	BAST-184/DSP-103/LOGPAL-PROBOLINGGO/D-II/BNPB/01/2025	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	20/01/2025	Genset
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.700.000,00	"47QRADU128/720-19723N00001"	Usaid	05/05/2025	Laptop
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	179.859.335,38	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Genset
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	175.446.309,70	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Pompa Air
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	298.375.599,01	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Transformator

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST	Nama Barang
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	278.753.304,67	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Elektrik Panel Control
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.467.785,16	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Laci Box
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	252.464.710,25	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Alat Kantor Lainnya (CCTV, Papan Visual, Penangkal Petir, Panic Button System, Sirine)
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	75.815.061,29	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Exhaust Fan
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	508.517.623,37	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Alat Rumah Tangga Lainnya (Lampu, Televisi, Equalizer, Loudspeaker, Soundsystem, Microphone, Tangki Air)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	72.860.884,96	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Alat Pemadam Kebakaran
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	93.071.416,71	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Peralatan Studio dan Audio
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.649.984,27	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Switcher/Patch Panel
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	93.364.634,98	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Switch Rak
22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	8.473.750,92	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025	Peralatan Proses Produksi
23	Dinas Kesehatan	3.658.635,00	KN.01.08/C.IV/2417/2025	Kementerian Kesehatan	15/08/2025	Alat Pendingin
24	Puskesmas Kraksaan	1.498.500,00	001/4.2/PPM.07/XI/2025	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	16/11/2025	Rak Kayu
25	Puskesmas Kraksaan	2.700.000,00	064/292/OPDN/KRA/SRT	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	03/03/2025	Android Post
26	Puskesmas Maron	1.299.999,81	00338/AV-PN4706VIII/2025	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	18/11/2025	Rak Kayu
27	Puskesmas Tongas	1.498.500,00	001/4.2/PPM.07/XI/2025	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	16/11/2025	Rak Kayu
28	RSUD Waluyoaji Kraksaan	1.347.468.187,00	KN.01.08/C.III/3968/2025	Kementerian Kesehatan	30/07/2025	X-Ray Mobile Unit
29	Dinas Lingkungan Hidup	2.656.800.000,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025	Bulldozer
30	Dinas Lingkungan Hidup	2.157.600.000,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025	Excavator
31	Dinas Lingkungan Hidup	510.700.090,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025	Dump Truck
32	Dinas Lingkungan Hidup	510.700.090,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025	Dump Truck
33	Dinas Pertanian	254.673.800,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Tractor Four Wheel (Dengan Kelengkapannya)
34	Dinas Pertanian	251.810.000,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)
35	Dinas Pertanian	251.810.000,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Penyemprot Otomatis

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST	Nama Barang
						(Automatic Sprayer)
36	Dinas Pertanian	251.810.000,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)
37	Dinas Pertanian	251.810.000,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)
38	Dinas Pertanian	251.810.000,00	1227/PSP.KP/BMN/B.1/12/2025	Kementerian Pertanian	31/12/2025	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)
	Jumlah	13.568.168.202,48				

f. Reklasifikasi dari Beban Barang sebesar Rp479.582.444,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 155 Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Beban Barang

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	356.409.900,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1.959.983,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.752.690,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.997.000,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	66.830.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.170.972,11
7	Puskesmas Gending	2.173.899,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.850.000,00
9	Sekretariat Daerah	6.438.000,00
	Jumlah	479.582.444,11

g. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.117.572.482,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 156 Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Beban Pemeliharaan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.500.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.134.900,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34.032.600,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	112.340.000,00
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.850.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	57.064.700,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.492.000,00
8	Dinas Kesehatan	67.388.610,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	7.500.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	85.365.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.782.336,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.601.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.050.000,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.380.000,00
15	Dinas Perhubungan	73.450.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.776.000,00
17	Dinas Pertanian	10.064.000,00
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57.470.000,00
19	Dinas Sosial	24.320.000,00
20	Dinas Tenaga Kerja	15.146.000,00
21	Inspektorat	7.200.000,00
22	Kecamatan Bantaran	4.995.000,00

No	SKPD	Nominal (Rp)
23	Kecamatan Banyuwang	6.200.000,00
24	Kecamatan Besuk	2.700.000,00
25	Kecamatan Gending	5.892.793,00
26	Kecamatan Krejengan	7.792.000,00
27	Kecamatan Krucil	6.600.000,00
28	Kecamatan Lumbang	7.903.200,00
29	Kecamatan Maron	5.750.000,00
30	Kecamatan Paiton	4.400.000,00
31	Kecamatan Wonomerto	3.900.000,00
32	Puskesmas Bago	6.320.000,00
33	Puskesmas Dringu	14.929.500,00
34	Puskesmas Jabungsir	4.290.150,00
35	Puskesmas Klenang Kidul	6.375.000,00
36	Puskesmas Kraksaan	5.239.000,00
37	Puskesmas Krucil	7.995.700,00
38	Puskesmas Leces	17.643.450,00
39	Puskesmas Lumbang	8.000.000,00
40	Puskesmas Maron	4.800.000,00
41	Puskesmas Ranugedang	8.852.817,00
42	Puskesmas Suko	3.996.000,00
43	Puskesmas Sumberasih	2.838.000,00
44	Puskesmas Tiris	11.586.501,00
45	Puskesmas Wangkal	4.020.000,00
46	Puskesmas Wonomerto	9.653.400,00
47	RSUD Tongas	19.375.000,00
48	RSUD Waluyoati Kraksaan	94.580.000,00
49	Satuan Polisi Pamong Praja	8.167.474,00
50	Sekretariat Daerah	52.385.351,00
51	Sekretariat DPRD	22.485.000,00
	Jumlah	1.117.572.482,00

- h. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp98.869.000,00 dengan rincian pada Tabel 181;
 - i. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain hasil inventarisasi ke Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp256.890.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.890.000,00 dan Puskesmas Tiris sebesar Rp246.000.000,00.
2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp4.793.617.686,82 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp131.541.010,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 157 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00
2	Dinas Perhubungan	92.755.000,00
3	Puskesmas Dringu	37.286.010,00
	Jumlah	131.541.010,00

- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.485.165.140,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 158 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	85.747.500,00
2	Dinas Perhubungan	1.384.418.210,00
3	Puskesmas Krucil	14.999.430,00
	Jumlah	1.485.165.140,00

- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.160.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp606.187.855,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.711.700,00
2	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	32.589.600,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	4.329.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.857.144,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.133.000,00
6	Dinas Perhubungan	208.299.980,00
7	Dinas Kesehatan	12.329.450,00
8	Puskesmas Banyuwangi	2.350.000,00
9	Puskesmas Besuk	873.801,00
10	Puskesmas Pajajaran	6.660.000,00
11	Puskesmas Ranagedang	9.712.500,00
12	Puskesmas Wangkal	194.250,00
13	Puskesmas Wonomerto	1.717.000,00
14	RSUD Waluyoaji Kraksaan	5.875.000,00
15	Sekretariat DPRD	180.555.430,00
	Jumlah	606.187.855,00

- e. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp735.296.917,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 160 Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Pemeliharaan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	68.820.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.080.000,00
3	Dinas Perhubungan	498.391.187,00
4	Inspektorat Daerah	129.870.000,00
5	Sekretariat Daerah	23.135.730,00
	Jumlah	735.296.917,00

- f. Penghapusan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.590.000,00 pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dengan nomor BAST: 900.1/256/426.203/2025, penerima hibah Yayasan Raudlatul Qur'an Al Manshuri, tanggal 29 September 2025;
- g. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dibawah batasan kapitalisasi Tahun 2025 sebesar Rp167.388.592,82 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 161 Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
di bawah Batasan Kapitalisasi**

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	854.700,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	999.000,00
3	Dinas Kesehatan	3.230.852,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.565.100,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	745.450,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.406.490,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.842.600,00
8	Puskesmas Bago	7.704.962,00
9	Puskesmas Bantaran	10.229.620,00
10	Puskesmas Banyuwang	1.932.900,00
11	Puskesmas Besuk	11.658.792,00
12	Puskesmas Condong	2.872.680,00
13	Puskesmas Curah Tulis	2.416.500,00
14	Puskesmas Jabungsir	4.293.000,00
15	Puskesmas Jorong	4.068.150,00
16	Puskesmas Klenang Kidul	490.000,00
17	Puskesmas Kotaanyar	6.156.408,82
18	Puskesmas Kraksaan	7.960.365,00
19	Puskesmas Krucil	4.707.062,00
20	Puskesmas Kuripan	431.775,00
21	Puskesmas Leces	3.664.016,00
22	Puskesmas Pajarakan	489.510,00
23	Puskesmas Pakuniran	1.663.890,00
24	Puskesmas Sukapura	777.000,00
25	Puskesmas Tongas	4.404.070,00
26	Puskesmas Wonomerto	17.493.900,00
27	RSUD Tongas	3.507.600,00
28	RSUD Waluyoati Kraksaan	7.915.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	3.907.200,00
Jumlah		167.388.592,82

- h. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain merupakan BMD yang diklasifikasikan sebagai Aset Rusak Berat dari hasil inventarisasi sebesar Rp1.561.288.172,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 162 Rincian Reklasifikasi dari Hasil Inventarisasi

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	32.367.500,00
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.395.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.650.000,00
5	Dinas Perhubungan	154.500.000,00
6	Dinas Perikanan	49.851.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	28.700.000,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.225.000,00
9	Inspektorat Daerah	29.250.000,00
10	Kecamatan Banyuwang	10.030.000,00
11	Kecamatan Besuk	10.030.000,00
12	Kecamatan Gading	35.155.000,00
13	Kecamatan Gending	43.000.000,00
14	Kecamatan Kraksaan	173.497.500,00
15	Kecamatan Krejengan	13.907.500,00
16	Kecamatan Krucil	71.000.000,00
17	Kecamatan Maron	36.170.000,00
18	Kecamatan Wonomerto	29.875.000,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)
19	Puskesmas Bago	8.750.000,00
20	Puskesmas Banyuanyar	15.125.000,00
21	Puskesmas Besuk	11.564.285,00
22	Puskesmas Curah Tulis	29.985.300,00
23	Puskesmas Dringu	10.747.500,00
24	Puskesmas Gending	20.562.500,00
25	Puskesmas Glagah	26.765.000,00
26	Puskesmas Jorongan	920.000,00
27	Puskesmas Klenang Kidul	48.546.103,00
28	Puskesmas Kotaanyar	16.600.000,00
29	Puskesmas Krejengan	21.248.175,00
30	Puskesmas Krucil	28.804.444,00
31	Puskesmas Kuripan	13.695.000,00
32	Puskesmas Leces	14.280.000,00
33	Puskesmas Lumbang	44.220.000,00
34	Puskesmas Maron	186.000.000,00
35	Puskesmas Paiton	300.000,00
36	Puskesmas Pakuniran	56.700.000,00
37	Puskesmas Sukapura	34.763.000,00
38	Puskesmas Suko	13.117.800,00
39	Puskesmas Sumber	47.902.090,00
40	Puskesmas Sumberasih	9.548.175,00
41	Puskesmas Tiris	7.775.000,00
42	Puskesmas Tongas	3.412.500,00
43	Puskesmas Wangkal	13.800.000,00
44	Puskesmas Tegalsiwalan	12.877.800,00
45	Sekretariat Daerah	30.675.000,00
Jumlah		1.561.288.172,00

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima Hibah Aset Peralatan dan Mesin dari Kemendikdasmen melalui program digitalisasi berupa seperangkat layar interaktif (*Interactive Flat Panel/IFP*) yang disalurkan kepada 641 satuan pendidikan, yang terdiri dari 5 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, 562 lembaga Sekolah Dasar, 74 lembaga Sekolah Menengah Pertama. Hibah barang tersebut diperoleh dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Berikut rincian lembaga penerima hibah digitalisasi.

Tabel 163 Lembaga Penerima Hibah Digitalisasi

No	Lembaga Penerima	Bantuan Tipe 1	Bantuan Tipe 2	Total
1	Setingkat PAUD	5	-	5
2	Setingkat SD	532	30	562
3	Setingkat SMP	74	-	74
Jumlah		611	30	641

D.1.3.3 Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025 (Rp)
1.691.454.149.791,62
Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.576.060.099.413,38

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.691.454.149.791,62, mengalami kenaikan sebesar Rp115.394.050.378,24 atau 7,32% dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024, diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi kurang Tahun 2025. Berikut rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025.

Tabel 164 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	1.576.060.099.413,38
Penambahan Tahun 2025	125.411.727.020,18

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	74.337.108.591,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	131.541.010,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.967.770,76
Penambahan Aset Atas Hibah dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya	44.909.749.391,69
Penambahan dari reklasifikasi Beban Pemeliharaan	4.276.893.687,73
Penambahan dari reklasifikasi Beban Barang	755.144.050,00
Penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa	158.585.000,00
Penambahan dari Perolehan Lainnya	254.296.279,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	509.441.240,00
Pengurangan Tahun 2025	(10.017.676.641,94)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(2.930.076.402,80)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(6.112.433.545,70)
Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya	(82.071.338,68)
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(201.796.933,00)
Pengurangan ke Reklasifikasi Beban Pemeliharaan	(75.184.607,00)
Pengurangan ke Reklasifikasi Beban Barang	(178.528.263,00)
Pengurangan Aset Atas Hibah dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya	(324.829.029,80)
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di bawah batasan kapitalisasi Tahun 2025	(112.756.521,96)
Saldo per 31 Desember 2025	1.691.454.149.791,62

Penjelasan dari masing-masing mutasi sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp125.411.727.020,18 dapat dirinci sebagai berikut.
 - a. Realisasi dari Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp74.337.108.591,00;
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp131.541.010,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 165 Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan
dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00
2	Dinas Perhubungan	92.755.000,00
3	Puskesmas Dringu	37.286.010,00
	Jumlah	131.541.010,00

- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp78.967.770,76 pada RSUD Tongas;
 - d. Penambahan dari reklasifikasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp4.276.893.687,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 166 Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan dari Beban Pemeliharaan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.194.215.465,00
2	Dinas Kesehatan	312.744.764,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.327.953,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.887.200,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	216.978.402,73
6	Dinas Perhubungan	228.037.100,00
7	Dinas Perikanan	91.786.000,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.846.390,00
9	Dinas Pertanian	178.720.310,00
10	Inspektorat	223.164.820,00
11	Kecamatan Gading	33.583.000,00

No	SKPD	Nominal (Rp)
12	Kecamatan Gending	20.400.000,00
13	Kecamatan Krejengan	23.520.000,00
14	Kecamatan Paiton	24.840.000,00
15	Kecamatan Pajarakan	49.155.000,00
16	Kecamatan Sukapura	22.800.000,00
17	Kecamatan Tegalsiwalan	24.966.641,00
18	Puskesmas Bago	18.173.000,00
19	Puskesmas Banyuanyar	12.096.000,00
20	Puskesmas Glagah	15.809.481,00
21	Puskesmas Kotaanyar	75.284.111,00
22	Puskesmas Krejengan	27.691.820,00
23	Puskesmas Ranugedang	20.419.677,00
24	Puskesmas Sumberasih	19.718.700,00
25	Puskesmas Tegalsiwalan	44.700.000,00
26	RSUD Tongas	342.879.311,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	28.031.030,00
28	Sekretariat Daerah	476.674.712,00
29	Sekretariat DPRD	198.442.800,00
Jumlah		4.276.893.687,73

- e. Penambahan dari reklasifikasi Beban Barang sebesar Rp755.144.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 167 Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan dari Beban Barang

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	677.817.050,00
2	Dinas Sosial	58.245.000,00
3	Kecamatan Tiris	19.082.000,00
Jumlah		755.144.050,00

- f. Penambahan dari reklasifikasi Beban Jasa sebesar Rp158.585.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp96.038.000,00, pada Dinas Sosial sebesar Rp16.325.000,00, dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp46.222.000,00;
- g. Penambahan dari Perolehan Lainnya sebesar Rp254.296.279,00 terdiri dari Utang Belanja Modal sebesar Rp9.646.279,00 pada Puskesmas Condong dan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp244.650.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa perbaikan darurat atap ruang kelas SDN Resongo 1, perbaikan atap ruang kelas SDN Sekarkare 1, perbaikan darurat pagar bangunan SMP Negeri 2 Lumbang, dan pagar SD Negeri Sapih 1 Lumbang;
- h. Reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp509.441.240,00 dengan rincian pada Tabel 181;
- i. Perolehan hibah sebesar Rp44.909.749.391,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 168 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Perolehan Hibah per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	490.816.537,13	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	362.910.000,00	100.3.7.1/016/426.203/2025	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	28/06/2025

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	195.430.795,28	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	628.217.778,51	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	20.050.898.132,57	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.483.225.636,73	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	460.317.660,14	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.469.451.569,71	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	111.256.521,96	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	428.430.000,00	-	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	28/06/2025
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	137.667.300,00	156/SMW/X/2025	Pengembang Perumahan De Tanjung Raya Residence Cluster 8	31/10/2025
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.323.493.183,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.511.268.046,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.812.824.139,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.773.147.441,00	86.5/BA/DC/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	19/03/2025
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.104.915,61	421.2/5740.BAST.REVITSD.02/426.101.423.2.8/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	29/12/2025
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.108.469,00	421.2/044/426.101.420.2.11/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	27/12/2025
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	133.628.124,00	421.2/5740.BAST.SD.01/426.101.416.2.12/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	30/12/2025
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	970.513.014,00	421.2/082/426.101.423.2.10/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	30/12/2025
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	557.834.197,05	421.2/077/426.101.423.2.8/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	29/12/2025
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	710.205.931,00	421.2/5740.BAST.REVITSD.02/426.101.407.2.34/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	30/12/2025
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.000.000,00	400.3.5.5/130/426.101.420.3.1/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	19/12/2025
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	143.000.000,00	420.3.5.1/004/426.101.412.3.2/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	02/12/2025
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	537.000.000,00	400.3.5.2/101.426.101.437.3.2/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	19/12/2025
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	503.000.000,00	400.3.5.5/071/426.101.421.3.3/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	23/12/2025
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	542.000.000,00	890/029/426.101.422.3.3/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	24/12/2025
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.000.000,00	400.3.5/002/426.101.421.3.4/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	13/12/2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
	Jumlah	44.909.749.391,69			

2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp10.017.676.641,94 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.930.076.402,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 169 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	436.840.200,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	767.637.001,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.725.599.201,80
	Jumlah	2.930.076.402,80

- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp6.112.433.545,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 170 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	917.079.687,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.378.020.467,65
3	Kecamatan Kraksaan	137.453.250,00
4	RSUD Tongas	1.679.880.141,05
	Jumlah	6.112.433.545,70

- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap lainnya sebesar Rp82.071.338,68 pada RSUD Tongas;
- d. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp201.796.933,00 dengan rincian pada Tabel 181;
- e. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp75.184.607,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp9.034.206,00 dan pada Puskesmas Jorong sebesar Rp66.150.401,00;
- f. Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp178.528.263,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp149.068.863,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp29.459.400,00;
- g. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di bawah batasan kapitalisasi Tahun 2025 sebesar Rp112.756.521,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 171 Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di bawah Batasan Kapitalisasi

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	111.256.521,96
	Jumlah	112.756.521,96

- h. Penghapusan Pemindahtanganan melalui mekanisme Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp324.829.029,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 172 Penghapusan Pemindahtanganan melalui Hibah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nominal (Rp)	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	230.328.150,60	000.2.3.2/211/426.203/2025	Kejaksaan Negeri	02/09/2025
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.342.496,00	000.2.3.2/211/426.203/2025	Kejaksaan Negeri	02/09/2025
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.010.756,00	000.2.3.2/211/426.203/2025	Kejaksaan Negeri	02/09/2025
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.147.627,20	900.1/261/426.203/2025	Bawaslu	03/10/2025
	Jumlah	324.829.029,80			

D.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	2.142.812.447.376,27	2.095.966.258.883,04

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.142.812.447.376,27, mengalami kenaikan sebesar Rp46.846.188.493,23 atau 2,24% dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 yang merupakan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025. Adapun mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 173 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	2.095.966.258.883,04
Penambahan Tahun 2025	46.955.250.329,85
Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	24.779.019.625,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.485.165.140,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.112.433.545,70
Penambahan dari Beban Pemeliharaan	1.238.944.574,00
Penambahan dari Beban Barang	618.782.561,89
Penambahan dari KDP	374.788.000,00
Penambahan dari BTT	1.284.774.042,00
Penambahan Aset Atas Hibah dan Bantuan dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya	11.061.342.841,26
Pengurangan Tahun 2025	(109.061.836,62)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(12.894.362,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(78.967.770,76)
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	(1.779.750,00)
Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi di bawah batasan kapitalisasi Tahun 2025	(15.419.953,86)
Saldo per 31 Desember 2025	2.142.812.447.376,27

Penjelasan dari masing-masing mutasi adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp46.955.250.329,85 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp24.779.019.625,00;
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.485.165.140,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 174 Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	85.747.500,00
2	Dinas Perhubungan	1.384.418.210,00
3	Puskesmas Krucil	14.999.430,00
	Jumlah	1.485.165.140,00

- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.112.433.545,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 175 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Kesehatan	917.079.687,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.378.020.467,65
3	Kecamatan Kraksaan	137.453.250,00
4	RSUD Tongas	1.679.880.141,05
	Jumlah	6.112.433.545,70

- d. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.238.944.574,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 176 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Beban Pemeliharaan

No	SKPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	983.428.146,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.134.158,00
3	Dinas Perhubungan	123.980.000,00
4	Puskesmas Ranugedang	25.981.770,00
5	Puskesmas Wangkal	17.260.500,00
6	RSUD Waluyojati Kraksaan	62.160.000,00
	Jumlah	1.238.944.574,00

- e. Reklasifikasi dari Beban Barang sebesar Rp618.782.561,89 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp341.036.963,00 serta pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp277.745.598,89;
- f. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp374.788.000,00 dengan rincian pada Tabel 181;
- g. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.284.774.042,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa perbaikan TPT dan duiker Jalan Ranuagung – Andungbiru, TPT ruas jalan Sukapura – Ngadisari, rehabilitasi plengsengan ruas jalan Sukapura – Ngadisari, dan pembangunan penahan jalan ruas jalan Pesawahan - Tiris;
- h. Perolehan Hibah sebesar Rp11.061.342.841,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 177 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari Perolehan Hibah per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.414.859.902,59	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	554.370.462,77	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.316.825.809,79	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	123.629.381,30	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	365.991.452,49	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	134.121.063,95	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
	Pariwisata				
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	93.317.182,02	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	209.725.335,28	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	235.164.743,41	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	775.268.696,83	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	204.431.878,63	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.116.659,02	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.888.294,84	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	306.283.400,00	81/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 1	31/10/2025
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	309.352.600,00	48/PT.BMP/X/2025	Pengembang Perumahan Tambak Rejo Residence	31/10/2025
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	156.274.900,00	15/SMW/X/2025	Pengembang Perumahan De Tanjung Raya Residence Cluster 9	31/10/2025
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	224.565.200,00	012/PTBERKAH/X/2025	Pengembang Perumahan Griya Pabean Asri	31/10/2025
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.373.095.900,00	011/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 1	31/10/2025
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	252.316.100,00	012/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 2	31/10/2025
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	183.348.000,00	52/SP/KSP/X/2025	Pengembang Perumahan Syailendra Residence 1	31/10/2025
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	124.431.600,00	82/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 2	31/10/2025
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.889.000,00	48/PT.BMP/X/2025	Pengembang Perumahan Tambak Rejo Residence	31/10/2025
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.648.700,00	81/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 1	31/10/2025
24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.055.100,00	52/SP/KSP/X/2025	Pengembang Perumahan Syailendra Residence 1	31/10/2025
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.270.500,00	012/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 2	31/10/2025
26	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	65.334.100,00	011/BAST/MAM-MJ/X/2025	Pengembang Perumahan Mutiara Jingga 1	31/10/2025
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.339.400,00	012/PTBERKAH/X/2025	Pengembang Perumahan Griya Pabean Asri	31/10/2025
28	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	20.044.600,00	15/SMW/X/2025	Pengembang Perumahan De Tanjung Raya Residence Cluster 9	31/10/2025
29	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.415.000,00	82/EMM/X/2025	Pengembang Perumahan Pondok Wonopaten 2	31/10/2025
30	Dinas Pendidikan dan	117.562.711,39	421.2/5740.BAST.REVITSD	Kementerian Pendidikan	29/12/2025

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
	Kebudayaan		.02/426.101.423.2.8/2025	Dasar dan Menengah	
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117.566.265,00	000/083/426.101.416.2.11/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	08/12/2025
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.838.901,95	421.2/077/426.101.423.2.8/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	29/12/2025
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	124.000.000,00	400.3.5.1/154/426.101.412.3.1/2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	19/12/2025
	Jumlah	11.061.342.841,26			

2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp109.061.836,62 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.894.362,00 pada RSUD Tongas;
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.967.770,76 pada RSUD Tongas;
 - c. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.779.750,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dibawah batasan kapitalisasi Tahun 2025 sebesar Rp15.419.953,86 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp8.415.000,00 serta pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp7.004.953,86.

D.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	29.770.762.139,88	27.096.113.627,30

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.770.762.139,88, mengalami kenaikan sebesar Rp2.674.648.512,58 atau 9,87% dari Aset Tetap Lainnya Tahun 2024, yang merupakan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 178 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	27.096.113.627,30
Penambahan Tahun 2025	10.735.811.516,58
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025	8.788.868.081,00
Penambahan Aset Atas Hibah Dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya	1.702.473.846,90
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	35.160.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	82.071.338,68
Reklasifikasi dari Persediaan	81.866.850,00
Penambahan dari Beban Barang	45.371.400,00
Pengurangan Tahun 2025	(8.061.163.004,00)
Penambahan Aset Tetap Lainnya dibawah batasan kapitalisasi Tahun 2025	(7.994.707.404,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(63.380.600,00)
Pengurangan ke Beban Barang	(3.075.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	29.770.762.139,88

Penjelasan dari masing-masing mutasi adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp10.735.811.516,58 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.788.868.081,00;
 - b. Perolehan Hibah Dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya sebesar Rp1.702.473.846,90 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 179 Rincian Aset Tetap Lainnya dari Perolehan Hibah
per 31 Desember 2025**

No	SKPD	Nominal	BAST	Pemberi Hibah	Tanggal BAST
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.197.992.405,90	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	471.352.394,00	100.3.7.1/016/426.203/2025	Kementerian Pekerjaan Umum	14/02/2025
3	Puskesmas Kraksaan	6.641.583,00	51671/4.2/PLK.03.07/XI.2025	Perpustakaan Nasional	13/11/2025
4	Puskesmas Leces	6.602.149,00	50641/4.2/PLK.03.07/XI.2025	Perpustakaan Nasional	25/11/2025
5	Puskesmas Paiton	6.641.583,00	51672/4.2/PLK.03.07/XI.2025	Perpustakaan Nasional	08/11/2025
6	Puskesmas Maron	6.602.149,00	50640/4.2/PLK.03.07/XI.2025	Perpustakaan Nasional	25/11/2025
7	Puskesmas Tongas	6.641.583,00	51673/4.2/PLK.03.07/XI.2025	Perpustakaan Nasional	08/11/2025
	Jumlah	1.702.473.846,90			

- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.160.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp82.071.338,68 pada RSUD Tongas;
 - e. Reklasifikasi dari Persediaan sebesar Rp81.866.850,00 pada Dinas Perikanan berupa persediaan bibit ikan yang telah menjadi indukan ikan;
 - f. Reklasifikasi Beban Barang sebesar Rp45.371.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp8.061.163.004,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Penambahan Aset Tetap Lainnya di bawah batasan kapitalisasi Tahun 2025 sebesar Rp7.994.707.404,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 180 Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya
di bawah Batasan Kapitalisasi**

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.890.308.917,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.269.440,00
3	Puskesmas Kraksaan	6.641.583,00
4	Puskesmas Leces	6.602.149,00
5	Puskesmas Maron	6.602.149,00
6	Puskesmas Paiton	6.641.583,00
7	Puskesmas Tongas	6.641.583,00
	Jumlah	7.994.707.404,00

- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.380.600,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp3.075.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

D.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		1.571.210.212,00	1.756.337.165,33

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.608.854.237,33, mengalami penurunan sebesar (Rp185.126.953,33) atau (10,54%) dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024, yang merupakan mutasi tambah dan mutasi kurang nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025. Adapun rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 181 Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2025**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	1.756.337.165,33
Penambahan Tahun 2025	1.571.210.212,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	201.796.933,00
Penambahan dari Beban Jasa	1.369.413.279,00
Pengurangan Tahun 2025	(1.756.337.165,33)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(98.869.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(509.441.240,00)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(374.788.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(773.238.925,33)
Saldo per 31 Desember 2025	1.571.210.212,00

Penjelasan dari masing-masing mutasi adalah sebagai berikut.

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2025 sebesar Rp1.571.210.212,00 dapat dirinci sebagai berikut.
 - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp201.796.933,00;
 - b. Reklasifikasi dari Beban Jasa sebesar Rp1.369.413.279,00.
2. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2025 sebesar Rp1.756.337.165,33 dapat dirinci sebagai berikut.
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp98.869.000,00;
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp509.441.240,00;
 - c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp374.788.000,00;
 - d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp773.238.925,33 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan.
3. Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.571.210.212,00. Berikut rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025.

**Tabel 182 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per 31 Desember 2025**

No.	Nama		SPK			Keterangan
	SKPD	Pekerjaan	No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	
Saldo Per 1 Januari 2025					1.756.337.165,33	
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025						
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Wangkal - Prasi (R.076)	602.1/40/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.013.407,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Wangkal - Krobungan (R.075)	602.1/39/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.006.636,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Pemel. Berkala Ruas Jalan Semampir - Karangren (R.110)	602.1/42/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	71.268.446,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Maron - Brani Kulon (R. 166)	602.1/43/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	90.260.760,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Tamansari - Banjarsawah (R.179)	602.1/37/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.013.296,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Pajajaran - Condong (R.163)	602.1/47/SPK.BM.JKK.P r/426.112/2025	16/10/2025	292.587.675,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Bantaran - Gunung Tugel (R.027)	602.1/41/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.012.670,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Manggisian - Tiris (R.060)	602.1/48/SPK.BM.JKK.P r/426.112/2025	07/11/2025	250.200.915,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
9	Dinas Pekerjaan	Konsultansi Perancangan	602.1/36/SPK.BM.JKK.P	15/10/2025	95.006.636,00	Reklasifikasi dari

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No.	Nama		SPK			Keterangan
	SKPD	Pekerjaan	No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	
	Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Pajurangan - Banyuwang (R.172)	r.PL/426.112/2025			Beban Jasa
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Condong - Manggis (R.059)	602.1/35/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.021.288,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Condong - Segaran (R.051)	602.1/38/SPK.BM.JKK.P r.PL/426.112/2025	15/10/2025	95.021.550,00	Reklasifikasi dari Beban Jasa
12	RSUD Tongas	Jasa Konsultan Perencanaan Relokasi NICU	000.3.2/305/KPA.SPK/4 26.102.36/2025	12/11/2025	57.253.800,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Ruang Kelas TKN Pembina Banyuwang	420.27/03.51.Paud.02/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	12.609.287,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas TKN Pembina Krucil	420.27/03.51.Paud.03/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	28.556.122,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru TKN Pembina Krucil	420.27/03.51.Paud.03/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	14.770.408,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Toilet TKN Pembina Krucil	420.27/03.51.Paud.03/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	14.770.408,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas TKN Pembina Besuk	420.27/03.51.Paud.01/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	28.526.744,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Guru TKN Pembina Besuk	420.27/03.51.Paud.01/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	14.755.212,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Toilet TKN Pembina Besuk	420.27/03.51.Paud.01/S PK. J.Kr/426.101/2025	28/05/2025	14.755.212,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
20	Puskesmas Ranugedang	Konsultan Perencanaan Pembangunan Kanopi Puskesmas Ranugedang	440/235.3/SPK/426.102.10/2025	29/10/2025	15.799.740,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Jumlah					1.571.210.212,00	
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025						
1	RSUD Waluyoaji Kraksaan	Jasa Konsultasi Perencanaan pembangunan ICVCU	000.3/723/426.102.35/2024	24/10/2024	(93.306.600,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
2	RSUD Waluyoaji Kraksaan	Jasa Konsultasi perencanaan tambah daya listrik	027/01/TD.Listrik/426.10 2.35/2023	27/11/2023	(164.640.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Rehabilitasi Parapet Kanan Hulu DAM Kalisamas	602.1/16/SPK.SDA.JKr. PL/426.112/2024	22/10/2024	(16.786.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Rehabilitasi Jalan Krucil – Tambelang (R.53)	602.1/055/SPK.BM.JKK. Pr.PL/426.112/2024	26/03/2024	(98.623.500,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	DED Peningkatan Sarana Lift di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo	602.1/4.380/SPK.JKr/42 6.113/2024	24/10/2024	(98.869.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin
6	Dinas Kesehatan	Keg.Pembangunan Puskesmas Pemby.Termin I (85%) Pek.Kons Perencanaan Pembangunan PKM Kuripan pada Dinkes TA 2024	000.3.3/006/SP.JKc/426.102/2024	15/11/2024	(123.186.845,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
7	Dinas Kesehatan	Keg.Pembangunan Puskesmas Pemby.Termin I (85%) Pek.Kons Perencanaan Pembangunan PKM Kuripan pada Dinkes TA 2024	000.3.3/006/SP.JKc/426.102/2024	15/11/2024	(123.281.195,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keg. Rehab dan Pemb SarPras Fisik Gedung Pemerintahan Utk Pembayaran Termin I (100%) Perencanaan Pemb dan Rehab SarPras Kantor Kec Gading Kantor Kec Sukapura	602.1/2.149/SPK.JKr/42 6.113/2017	16/10/2017	(38.700.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	Rehabilitasi GOR Sasana Krida di Kraksaan (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/4.325/SPK.JKr/42 6.113/2024	13/02/2024	(97.483.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No.	Nama		SPK			Keterangan
	SKPD	Pekerjaan	No.	Tanggal	Jumlah (Rp)	
	dan Pertanahan					
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perencanaan Pembangunan SPAM IKK Dringu (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/3.P.103/SPK.JK/4 26.113/2018	11/12/2018	(183.400.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Pembangunan Border Penahan Abrasi (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/15/SPK/SDA.JKr. PL/426.112/2020	22/10/2020	(77.880.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Pemeliharaan Berkala Jalan Lumbang - Boto (R.31) (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/006/SPK.BM.JKK. Pr.PL/426.112/2024	06/03/2024	(67.569.585,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jasa Konsultan Peren. Rehabilitasi DAM Seboro (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/18/SPK/SDA.JKr. PL/426.112/2020	22/10/2020	(17.266.150,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Sayap DAM Gending Ds. Sebaung (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/17/SPK/SDA.JKr. PL/426.112/2020	22/10/2020	(13.344.650,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jasa konsultasi perencanaan Pembangunan Saluran Afvour Anjin (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/12/SPK/SDA.JKr. PL/426.112/2020	22/10/2020	(22.825.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Pemeliharaan Berkala Jalan Wangkal - Krobongan (R.65) (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/044/SPK.BM.JKK. Pr.PL/426.112/2024	14/03/2024	(50.016.600,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Ruas Jalan Wangkal – Prasi (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/007/SPK.BM.JKK. Pr.PL/426.112/2024	14/03/2024	(98.079.600,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultansi Perancangan Peningkatan Jalan Desa Andung biru (Ruas Jalan Ranuagung - Andungbiru (R.111)	602.1/013/SPMK.BM.JK K.Pr.PL/426.112/2024	14/03/2024	(67.432.500,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembayaran (100%) Peker. Bpr. Pemel. Berkala Jalan Sumber - Ledokombo (R.15) KM. 4+500, Pemel. Berkala Jalan Paras - Klenang Kidul (R.38) (KDP tidak dilanjutkan)	602.1/8/SPK/BM.JKr.P/4 26.112/2020	19/03/2020	(24.782.340,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan TPT dalam Koridor (Ruas Jl. Sukapura - Ngadisari (R.05))	602.1/39/SPK.BM.JKr/4 26.112/2022	09/11/2022	(94.738.500,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar SMPN 7 Sukapura Satap (KDP tidak dilanjutkan)	420.027/42.02.04/SPK/4 26.101/2020	26/03/2020	(4.555.833,33)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Kamar Mandi Siswa TKN Pembina Sumberasih (KDP tidak dilanjutkan)	420.027/39.02.04/SPK/4 26.101/2020	20/03/2020	(9.177.667,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengurugan Halaman Belakang dan Pembuatan Saluran Drainase SKB Kraksaan (KDP tidak dilanjutkan)	420.027/40.03.01/SPK/4 26.101/2020	20/03/2020	(8.000.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
24	Dinas Perhubungan	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan LPJU (KDP tidak dilanjutkan)	027/1.SP.KKKon/PPK1 .SPR/426.107/2024	08/03/2024	(31.426.000,00)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (KDP tidak dilanjutkan)
25	Dinas Kesehatan	Konsultasi Perencanaan Pembangunan PKM Dringu (DBHCHT)	400.7/1625/PPK/426.10 2/2023	05/02/2023	(130.966.600,00)	Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Jumlah					(1.756.337.165,33)	
Saldo Per 31 Desember 2025					1.571.210.212,00	

D.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2025 (Rp)

(2.959.121.377.557,20)

Per 31 Desember 2024 (Rp)

(2.737.114.566.413,84)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.959.121.377.557,20), mengalami kenaikan sebesar (Rp222.006.811.143,36) atau 8,11% dari Akumulasi Penyusutan Tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 183 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	(2.737.114.566.413,84)
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.250.200,00
Saldo per 1 Januari 2025 Setelah Koreksi	(2.737.108.316.213,84)
Penambahan Tahun 2025	(223.762.945.089,96)
Beban Penyusutan Tahun 2025	(217.342.973.844,72)
Koreksi Akumulasi Penyusutan dari perolehan hibah	(6.163.081.245,24)
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ke Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(256.890.000,00)
Pengurangan Tahun 2025	1.749.883.746,60
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	1.481.164.672,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan dari pemindahtanganan hibah	268.719.074,60
Saldo per 31 Desember 2025	(2.959.121.377.557,20)

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dalam tabel berikut.

Tabel 184 Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025		
		Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.134.021.157,00	(7.531.906.057,00)	602.115.100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.553.931.416,00	(2.330.698.461,10)	223.232.954,90
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.273.168.132,00	(12.332.115.769,00)	3.941.052.363,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	25.344.774.077,50	(19.494.318.199,24)	5.850.455.878,26
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.582.961.628,50	(3.375.700.549,70)	1.207.261.078,80
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.336.085.774,47	(9.303.045.570,65)	2.033.040.203,82
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.218.128.960,00	(12.442.847.123,87)	775.281.836,13
8	Dinas Kesehatan	27.809.974.290,70	(24.435.752.925,37)	3.374.221.365,33
9	Dinas Ketahanan Pangan	2.920.228.473,00	(2.707.203.673,00)	213.024.800,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14.199.066.687,25	(9.212.792.319,65)	4.986.274.367,60
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	12.476.545.427,01	(10.954.268.298,61)	1.522.277.128,40
12	Dinas Lingkungan Hidup	34.166.716.627,76	(25.204.164.474,29)	8.962.552.153,47
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.124.578.935,23	(25.665.988.060,28)	10.458.590.874,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.789.329.643,25	(2.488.180.443,25)	301.149.200,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.592.593.217,00	(7.663.496.003,20)	929.097.213,80
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.065.190.660,00	(12.628.542.481,80)	436.648.178,20
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	246.673.779.033,30	(206.804.192.710,18)	39.869.586.323,12
18	Dinas Perhubungan	32.233.995.495,58	(26.953.099.789,41)	5.280.895.706,17
19	Dinas Perikanan	8.518.956.045,98	(7.650.753.538,48)	868.202.507,50
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.485.586.446,00	(8.860.887.487,80)	624.698.958,20
21	Dinas Pertanahan	25.166.308.258,84	(23.097.995.378,84)	2.068.312.880,00
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.102.098.680,09	(5.861.930.599,80)	2.240.168.080,29
23	Dinas Sosial	3.188.278.570,00	(2.830.615.049,80)	357.663.520,20
24	Dinas Tenaga Kerja	5.662.723.364,98	(5.287.884.824,98)	374.838.540,00
25	Inspektorat Daerah	8.404.341.812,00	(5.204.308.812,50)	3.200.032.999,50
26	Kecamatan Bantaran	952.230.596,00	(697.663.349,33)	254.567.246,67
27	Kecamatan Banyuwangi	1.058.363.700,00	(803.046.322,22)	255.317.377,78
28	Kecamatan Besuk	885.970.550,00	(675.777.403,33)	210.193.146,67
29	Kecamatan Dringu	987.149.713,88	(772.907.333,88)	214.242.380,00
30	Kecamatan Gading	960.450.638,95	(724.509.578,95)	235.941.060,00
31	Kecamatan Gending	1.145.580.713,00	(870.159.008,11)	275.421.704,89
32	Kecamatan Kotaanyar	993.730.130,02	(767.671.306,03)	226.058.823,99
33	Kecamatan Kraksaan	4.511.965.913,00	(4.055.446.484,20)	456.519.428,80
34	Kecamatan Krejengan	1.042.887.093,00	(752.817.224,11)	290.069.868,89
35	Kecamatan Krucil	1.114.127.820,75	(875.518.007,42)	238.609.813,33
36	Kecamatan Kuripan	943.384.197,98	(748.033.917,98)	195.350.280,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025		
		Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
37	Kecamatan Leces	1.026.892.505,00	(784.546.425,00)	242.346.080,00
38	Kecamatan Lumbang	983.437.425,03	(787.464.511,70)	195.972.913,33
39	Kecamatan Maron	974.019.882,93	(685.873.065,15)	288.146.817,78
40	Kecamatan Paiton	911.023.480,00	(671.121.502,22)	239.901.977,78
41	Kecamatan Pajarakan	902.317.700,00	(685.398.900,00)	216.918.800,00
42	Kecamatan Pakuniran	959.644.550,00	(742.783.070,00)	216.861.480,00
43	Kecamatan Sukapura	1.053.486.728,00	(837.545.544,60)	215.941.183,40
44	Kecamatan Sumber	1.007.884.515,99	(789.755.036,19)	218.129.479,80
45	Kecamatan Sumberasih	1.028.857.705,41	(795.799.830,41)	233.057.875,00
46	Kecamatan Tegalsiwalan	1.049.598.493,00	(823.138.713,00)	226.459.780,00
47	Kecamatan Tiris	1.107.828.300,00	(879.796.770,00)	228.031.530,00
48	Kecamatan Tongas	948.258.331,40	(686.481.815,40)	261.776.516,00
49	Kecamatan Wonomerto	1.080.258.750,00	(837.335.646,67)	242.923.103,33
50	Puskesmas Bago	4.924.945.519,90	(3.978.756.223,43)	946.189.296,47
51	Puskesmas Bantaran	5.333.428.131,57	(4.976.687.496,57)	356.740.635,00
52	Puskesmas Banyuanyar	4.857.589.987,87	(4.146.834.687,63)	710.755.300,24
53	Puskesmas Besuk	4.514.636.091,12	(3.599.848.018,61)	914.788.072,51
54	Puskesmas Condong	5.701.358.042,26	(5.046.366.297,56)	654.991.744,70
55	Puskesmas Curah Tulis	4.295.508.302,95	(3.417.608.307,76)	877.899.995,19
56	Puskesmas Dringu	5.620.526.820,95	(3.969.338.348,95)	1.651.188.472,00
57	Puskesmas Gending	6.952.458.451,71	(5.737.527.740,50)	1.214.930.711,21
58	Puskesmas Glagah	4.251.480.477,47	(3.806.716.257,46)	444.764.220,01
59	Puskesmas Jabungsisir	4.207.388.735,83	(3.543.965.919,89)	663.422.815,94
60	Puskesmas Jorongan	3.960.465.438,80	(3.118.515.382,39)	841.950.056,41
61	Puskesmas Klenang Kidul	4.282.918.054,02	(3.282.982.507,99)	999.935.546,03
62	Puskesmas Kotaanyar	5.443.690.291,51	(4.628.936.251,77)	814.754.039,74
63	Puskesmas Kraksaan	7.132.382.018,84	(6.069.928.012,25)	1.062.454.006,59
64	Puskesmas Krejengan	5.535.017.962,54	(5.030.418.000,75)	504.599.961,79
65	Puskesmas Krucil	7.138.179.420,02	(6.197.744.004,22)	940.435.415,80
66	Puskesmas Kuripan	4.994.564.650,85	(4.041.891.782,04)	952.672.868,81
67	Puskesmas Leces	6.259.964.438,88	(4.723.799.850,48)	1.536.164.588,40
68	Puskesmas Lumbang	6.030.259.999,36	(4.981.477.773,96)	1.048.782.225,40
69	Puskesmas Maron	7.871.535.125,51	(6.723.722.045,87)	1.147.813.079,64
70	Puskesmas Paiton	7.623.254.417,93	(6.338.986.561,13)	1.284.267.856,80
71	Puskesmas Pajarakan	5.883.976.883,21	(4.437.500.646,42)	1.446.476.236,79
72	Puskesmas Pakuniran	4.894.663.967,73	(4.352.059.179,49)	542.604.788,24
73	Puskesmas Ranugedang	4.857.595.218,15	(4.296.969.894,76)	560.625.323,39
74	Puskesmas Sukapura	5.761.378.304,67	(4.671.832.412,05)	1.089.545.892,62
75	Puskesmas Suko	3.854.679.665,61	(2.821.531.341,94)	1.033.148.323,67
76	Puskesmas Sumber	6.974.386.535,35	(5.471.102.057,73)	1.503.284.477,62
77	Puskesmas Sumberasih	9.824.278.083,76	(8.095.686.686,23)	1.728.591.397,53
78	Puskesmas Tegalsiwalan	5.219.078.643,19	(4.000.647.387,79)	1.218.431.255,40
79	Puskesmas Tiris	5.711.313.217,46	(4.906.612.187,63)	804.701.029,83
80	Puskesmas Tongas	4.652.765.491,95	(3.879.173.858,97)	773.591.632,98
81	Puskesmas Wangkal	7.060.657.659,42	(6.272.260.113,81)	788.397.545,61
82	Puskesmas Wonomerto	4.464.285.870,10	(3.645.053.551,18)	819.232.318,92
83	RSUD Tongas	108.780.669.247,73	(88.095.240.996,56)	20.685.428.251,17
84	RSUD Waluyoaji Kraksaan	285.034.652.848,14	(221.146.300.888,14)	63.888.351.960,00
85	Satuan Polisi Pamong Praja	19.675.828.844,00	(9.419.754.288,40)	10.256.074.555,60
86	Sekretariat Daerah	63.368.126.188,55	(55.308.802.947,52)	8.059.323.241,03
87	Sekretariat DPRD	19.267.039.983,92	(12.636.030.880,92)	6.631.009.103,00
Jumlah		1.290.869.641.279,61	(1.042.891.890.158,45)	247.977.751.121,16

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dalam tabel berikut.

Tabel 185 Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025		
		Saldo akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.900.127.906,00	(1.398.029.748,18)	1.502.098.157,82
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	660.583.381,00	(170.643.205,96)	489.940.175,04
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.206.727.605,00	(329.095.410,00)	877.632.195,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025		
		Saldo akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	20.248.155.845,00	(8.192.813.058,79)	12.055.342.786,21
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.000.000,00	(750.000,00)	1.250.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	104.930.485.534,97	(17.063.903.276,48)	87.866.582.258,49
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.024.000,00	(38.445.050,00)	96.578.950,00
8	Dinas Kesehatan	19.993.587.916,82	(4.482.076.634,95)	15.511.511.281,87
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.441.094.549,00	(456.184.925,67)	984.909.623,33
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.182.242.000,00	(599.385.050,00)	1.582.856.950,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	159.531.481.417,48	(39.603.930.991,74)	119.927.550.425,74
12	Dinas Lingkungan Hidup	48.723.813.993,50	(12.607.687.734,03)	36.116.126.259,47
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.921.586.476,46	(8.869.585.096,42)	6.052.001.380,04
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.386.723.923,00	(1.620.701.236,46)	6.766.022.686,54
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.176.228.169,82	(2.732.945.977,27)	10.443.282.192,55
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	603.771.905.707,88	(190.919.693.111,67)	412.852.212.596,21
18	Dinas Perhubungan	9.115.503.627,00	(1.356.054.502,81)	7.759.449.124,19
19	Dinas Perikanan	10.467.330.794,00	(2.647.208.540,62)	7.820.122.253,38
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.458.479.390,00	(1.075.968.681,70)	3.382.510.708,30
21	Dinas Pertanian	38.989.216.003,10	(9.899.640.414,84)	29.089.575.588,26
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.573.431.607,56	(1.822.927.041,94)	10.750.504.565,62
23	Dinas Sosial	2.096.829.751,00	(246.185.143,31)	1.850.644.607,69
24	Dinas Tenaga Kerja	6.502.626.953,23	(1.554.092.537,60)	4.948.534.415,63
25	Inspektorat Daerah	4.412.329.427,57	(1.063.486.952,52)	3.348.842.475,05
26	Kecamatan Bantaran	1.165.786.020,20	(203.507.971,52)	962.278.048,68
27	Kecamatan Banyuwanyar	713.345.383,00	(166.485.230,67)	546.860.152,33
28	Kecamatan Besuk	529.903.594,80	(163.039.022,25)	366.864.572,55
29	Kecamatan Dringu	1.363.262.461,36	(568.320.510,43)	794.941.950,93
30	Kecamatan Gading	1.339.080.911,29	(263.315.518,60)	1.075.765.392,69
31	Kecamatan Gending	1.282.084.094,84	(429.156.797,65)	852.927.297,19
32	Kecamatan Kotaanyar	1.906.437.976,91	(498.231.698,99)	1.408.206.277,92
33	Kecamatan Kraksaan	7.665.331.982,51	(2.150.737.447,93)	5.514.594.534,58
34	Kecamatan Krejengan	684.302.841,68	(222.853.774,22)	461.449.067,46
35	Kecamatan Krucil	1.440.769.705,16	(245.426.787,82)	1.195.342.917,34
36	Kecamatan Kuripan	1.132.711.480,00	(353.881.621,45)	778.829.858,55
37	Kecamatan Leces	1.749.567.501,50	(483.304.644,77)	1.266.262.856,73
38	Kecamatan Lumang	693.462.694,00	(298.465.554,08)	394.997.139,92
39	Kecamatan Maron	2.215.835.426,85	(777.178.084,33)	1.438.657.342,52
40	Kecamatan Paiton	1.571.952.439,00	(374.653.814,40)	1.197.298.624,60
41	Kecamatan Pajajaran	1.537.275.949,76	(384.894.779,18)	1.152.381.170,58
42	Kecamatan Pakuniran	1.230.650.463,54	(305.777.310,01)	924.873.153,53
43	Kecamatan Sukapura	1.436.676.569,63	(310.675.262,72)	1.126.001.306,91
44	Kecamatan Sumber	1.440.371.926,60	(395.062.083,09)	1.045.309.843,51
45	Kecamatan Sumberasih	696.722.512,80	(237.620.722,75)	459.101.790,05
46	Kecamatan Tegalsiwalan	975.471.765,34	(506.729.389,76)	468.742.375,58
47	Kecamatan Tiris	1.209.732.302,35	(276.173.131,62)	933.559.170,73
48	Kecamatan Tongas	1.198.046.950,80	(230.393.446,28)	967.653.504,52
49	Kecamatan Wonomerto	841.214.060,00	(359.880.755,67)	481.333.304,33
50	Puskesmas Bago	3.982.057.031,45	(865.331.635,52)	3.116.725.395,93
51	Puskesmas Bantaran	3.971.252.246,94	(996.746.574,65)	2.974.505.672,29
52	Puskesmas Banyuwanyar	4.484.701.449,27	(910.150.936,23)	3.574.550.513,04
53	Puskesmas Besuk	1.851.895.854,61	(667.967.444,60)	1.183.928.410,01
54	Puskesmas Condong	5.761.252.797,27	(1.148.094.806,29)	4.613.157.990,98
55	Puskesmas Curah Tulis	4.337.032.116,81	(932.610.943,81)	3.404.421.173,00
56	Puskesmas Dringu	7.316.679.404,00	(1.028.701.806,91)	6.287.977.597,09
57	Puskesmas Gending	7.327.884.427,76	(2.175.493.536,56)	5.152.390.891,20
58	Puskesmas Glagah	3.153.910.687,16	(657.926.121,09)	2.495.984.566,07
59	Puskesmas Jabungsisir	3.231.407.718,11	(313.225.727,54)	2.918.181.990,57
60	Puskesmas Jorongan	2.991.987.271,80	(652.194.025,36)	2.339.793.246,44
61	Puskesmas Klenang Kidul	3.665.516.417,00	(705.482.536,10)	2.960.033.880,90
62	Puskesmas Kotaanyar	6.561.360.404,41	(1.588.021.785,99)	4.973.338.618,42

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025		
		Saldo akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
63	Puskesmas Kraksaan	11.271.535.323,83	(2.928.703.891,79)	8.342.831.432,04
64	Puskesmas Krejengan	7.239.755.519,92	(1.327.881.275,14)	5.911.874.244,78
65	Puskesmas Krucil	6.763.057.106,89	(1.428.954.814,89)	5.334.102.292,00
66	Puskesmas Kuripan	8.266.377.547,83	(979.492.953,63)	7.286.884.594,20
67	Puskesmas Leces	4.522.060.899,67	(829.701.693,12)	3.692.359.206,55
68	Puskesmas Lumbang	10.208.290.493,25	(1.715.161.936,89)	8.493.128.556,36
69	Puskesmas Maron	14.597.484.220,43	(2.063.667.519,39)	12.533.816.701,04
70	Puskesmas Paiton	6.332.080.149,44	(1.854.797.008,33)	4.477.283.141,11
71	Puskesmas Pajarakan	8.100.894.605,00	(1.561.901.058,24)	6.538.993.546,76
72	Puskesmas Pakuniran	5.574.799.616,53	(1.317.253.512,27)	4.257.546.104,26
73	Puskesmas Ranugedang	4.474.798.605,10	(1.154.641.719,50)	3.320.156.885,60
74	Puskesmas Sukapura	10.892.996.701,01	(2.186.939.476,05)	8.706.057.224,96
75	Puskesmas Suko	6.419.251.331,00	(637.864.723,18)	5.781.386.607,82
76	Puskesmas Sumber	6.799.958.240,50	(1.447.856.255,07)	5.352.101.985,43
77	Puskesmas Sumberasih	8.139.322.043,84	(2.042.871.303,00)	6.096.450.740,84
78	Puskesmas Tegalsiwalan	5.723.474.875,05	(1.429.975.914,95)	4.293.498.960,10
79	Puskesmas Tiris	5.227.878.994,00	(1.086.130.900,77)	4.141.748.093,23
80	Puskesmas Tongas	4.527.956.157,33	(820.547.894,71)	3.707.408.262,62
81	Puskesmas Wangkal	4.356.259.570,06	(1.104.197.385,93)	3.252.062.184,13
82	Puskesmas Wonomerto	4.087.957.148,60	(1.003.315.621,16)	3.084.641.527,44
83	RSUD Tongas	50.342.325.078,27	(11.227.340.447,91)	39.114.984.630,36
84	RSUD Waluyoaji Kraksaan	131.162.199.278,94	(22.943.444.734,64)	108.218.754.544,30
85	Satuan Polisi Pamong Praja	3.456.478.881,68	(1.115.307.984,18)	2.341.170.897,50
86	Sekretariat Daerah	149.121.111.446,55	(36.552.420.763,52)	112.568.690.683,03
87	Sekretariat DPRD	28.361.395.137,00	(10.000.252.036,75)	18.361.143.100,25
Jumlah		1.691.454.149.791,62	(442.359.770.388,81)	1.249.094.379.402,82

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dalam tabel berikut.

Tabel 186 Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025		
		Saldo akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	96.445.000,00	(63.722.760,00)	32.722.240,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.000.000,00	(4.060.000,00)	2.940.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.619.702.118,00	(5.302.728.258,88)	10.316.973.859,12
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	726.163.948,00	(343.597.985,44)	382.565.962,56
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	58.493.500,00	(41.515.320,00)	16.978.180,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	26.313.836.666,53	(8.677.105.468,15)	17.636.731.198,38
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	134.166.000,00	(75.132.960,00)	59.033.040,00
8	Dinas Kesehatan	2.975.779.536,72	(1.107.083.695,20)	1.868.695.841,53
9	Dinas Ketahanan Pangan	105.058.140,00	(50.832.780,00)	54.225.360,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	652.256.500,00	(482.972.550,00)	169.283.950,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	963.316.948,72	(724.360.063,92)	238.956.884,80
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.602.566.278,79	(5.664.278.237,65)	6.938.288.041,14
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.832.768.326.503,02	(1.301.481.925.366,67)	531.286.401.136,35
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.000.000,00	(7.440.000,00)	85.560.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	443.812.650,00	(153.605.546,00)	290.207.104,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.804.147.557,31	(1.914.879.473,50)	1.889.268.083,81
18	Dinas Perhubungan	4.024.447.431,00	(1.872.813.184,20)	2.151.634.246,80
19	Dinas Perikanan	11.960.623.586,00	(5.787.724.530,46)	6.172.899.055,54
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.704.000,00	(43.730.880,00)	23.973.120,00
21	Dinas Pertanian	8.170.906.245,23	(5.925.173.072,95)	2.245.733.172,28
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	164.246.982.564,48	(111.928.131.209,57)	52.318.851.354,91
23	Dinas Sosial	25.553.500,00	(12.265.680,00)	13.287.820,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025		
		Saldo akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
24	Dinas Tenaga Kerja	373.437.291,95	(130.648.984,60)	242.788.307,35
25	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Bantaran	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Banyuwang	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Besuk	5.288.000,00	(3.701.600,00)	1.586.400,00
29	Kecamatan Dringu	10.000.000,00	(2.800.000,00)	7.200.000,00
30	Kecamatan Gading	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Gending	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kotaanyar	2.362.955,15	(2.242.718,74)	120.236,41
33	Kecamatan Kraksaan	14.315.859.020,01	(7.611.102.025,22)	6.704.756.994,79
34	Kecamatan Krejengan	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Krucil	300.000,00	(300.000,00)	0,00
36	Kecamatan Kuripan	3.000.000,00	(2.700.000,00)	300.000,00
37	Kecamatan Leces	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Lumbang	16.111.000,00	(5.155.520,00)	10.955.480,00
39	Kecamatan Maron	1.093.333,33	(1.093.333,33)	0,00
40	Kecamatan Paiton	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Pajarakan	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Pakuniran	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Sukapura	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Sumber	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Sumberasih	2.900.000,00	(2.610.000,00)	290.000,00
46	Kecamatan Tegalsiwalan	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Tiris	1.982.386.800,00	(913.186.800,00)	1.069.200.000,00
48	Kecamatan Tongas	0,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Wonomerto	0,00	0,00	0,00
50	Puskesmas Bago	27.136.818,00	(3.256.418,16)	23.880.399,84
51	Puskesmas Bantaran	63.993.600,00	(21.420.288,00)	42.573.312,00
52	Puskesmas Banyuwang	0,00	0,00	0,00
53	Puskesmas Besuk	0,00	0,00	0,00
54	Puskesmas Condong	57.674.315,00	(16.366.009,80)	41.308.305,20
55	Puskesmas Curah Tulis	49.074.900,00	(19.629.960,00)	29.444.940,00
56	Puskesmas Dringu	31.568.250,00	(2.525.460,00)	29.042.790,00
57	Puskesmas Gending	304.001.363,00	(105.429.995,56)	198.571.367,44
58	Puskesmas Glagah	25.759.600,00	(10.055.904,00)	15.703.696,00
59	Puskesmas Jabungsisir	29.374.360,00	(4.518.923,20)	24.855.436,80
60	Puskesmas Jorong	31.568.250,00	(2.525.460,00)	29.042.790,00
61	Puskesmas Klenang Kidul	226.712.111,00	(77.650.805,68)	149.061.305,32
62	Puskesmas Kotaanyar	87.640.000,00	(19.393.600,00)	68.246.400,00
63	Puskesmas Kraksaan	25.692.000,00	(3.083.040,00)	22.608.960,00
64	Puskesmas Krejengan	80.764.300,00	(3.661.144,00)	77.103.156,00
65	Puskesmas Krucil	46.567.680,00	(3.125.437,20)	43.442.242,80
66	Puskesmas Kuripan	426.888.650,00	(34.907.186,00)	391.981.464,00
67	Puskesmas Leces	31.568.250,00	(2.525.460,00)	29.042.790,00
68	Puskesmas Lumbang	540.040.335,00	(110.516.067,00)	429.524.268,00
69	Puskesmas Maron	123.303.838,00	(11.455.821,52)	111.848.016,48
70	Puskesmas Paiton	0,00	0,00	0,00
71	Puskesmas Pajarakan	104.300.000,00	(28.232.000,00)	76.068.000,00
72	Puskesmas Pakuniran	0,00	0,00	0,00
73	Puskesmas Ranugedang	69.900.020,00	(7.096.730,80)	62.803.289,20
74	Puskesmas Sukapura	578.970.000,00	(144.554.400,00)	434.415.600,00
75	Puskesmas Suko	446.783.699,00	(38.690.287,20)	408.093.411,80
76	Puskesmas Sumber	75.493.250,00	(16.581.460,00)	58.911.790,00
77	Puskesmas Sumberasih	16.830.000,00	(4.712.400,00)	12.117.600,00
78	Puskesmas Tegalsiwalan	49.074.900,00	(19.629.960,00)	29.444.940,00
79	Puskesmas Tiris	69.429.987,00	(4.039.929,48)	65.390.057,52
80	Puskesmas Tongas	998.239.458,00	(81.148.734,96)	917.090.723,04
81	Puskesmas Wangkal	805.650.060,00	(320.226.306,00)	485.423.754,00
82	Puskesmas Wonomerto	57.639.850,00	(23.880.484,00)	33.759.366,00
83	RSUD Tongas	7.652.313.447,59	(1.944.096.831,42)	5.708.216.616,17
84	RSUD Waluyoaji Kraksaan	25.750.208.388,45	(9.753.183.454,64)	15.997.024.933,81
85	Satuan Polisi Pamong Praja	84.939.300,00	(42.082.480,00)	42.856.820,00
86	Sekretariat Daerah	1.270.319.321,99	(648.894.566,84)	621.424.755,15
87	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.142.812.447.376,27	(1.473.869.717.009,94)	668.942.730.366,33

Rincian Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dalam tabel berikut.

Tabel 187 Jumlah Akumulasi Penyusutan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.130.594.063,00	(8.993.658.565,18)	2.136.935.497,82
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.221.514.797,00	(2.505.401.667,06)	716.113.129,94
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.099.597.855,00	(17.963.939.437,88)	15.135.658.417,12
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	46.319.093.870,50	(28.030.729.243,47)	18.288.364.627,03
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.643.455.128,50	(3.417.965.869,70)	1.225.489.258,80
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	142.580.407.975,97	(35.044.054.315,28)	107.536.353.660,69
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.487.318.960,00	(12.556.425.133,87)	930.893.826,13
8	Dinas Kesehatan	50.779.341.744,24	(30.024.913.255,52)	20.754.428.488,72
9	Dinas Ketahanan Pangan	4.466.381.162,00	(3.214.221.378,67)	1.252.159.783,33
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17.033.565.187,25	(10.295.149.919,65)	6.738.415.267,60
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	172.971.343.793,21	(51.282.559.354,27)	121.688.784.438,94
12	Dinas Lingkungan Hidup	95.493.096.900,05	(43.476.130.445,97)	52.016.966.454,09
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.883.814.491.914,72	(1.336.017.498.523,37)	547.796.993.391,34
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.789.329.643,25	(2.488.180.443,25)	301.149.200,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.072.317.140,00	(9.291.637.239,66)	7.780.679.900,34
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26.685.231.479,82	(15.515.094.005,07)	11.170.137.474,75
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	854.249.832.298,49	(399.638.765.295,35)	454.611.067.003,14
18	Dinas Perhubungan	45.373.946.553,58	(30.181.967.476,42)	15.191.979.077,16
19	Dinas Perikanan	30.946.910.425,98	(16.085.686.609,56)	14.861.223.816,42
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.011.769.836,00	(9.980.587.049,50)	4.031.182.786,50
21	Dinas Pertanian	72.326.430.507,17	(38.922.808.866,63)	33.403.621.640,54
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	184.922.512.852,13	(119.612.988.851,31)	65.309.524.000,82
23	Dinas Sosial	5.310.661.821,00	(3.089.065.873,11)	2.221.595.947,89
24	Dinas Tenaga Kerja	12.538.787.610,16	(6.972.626.347,18)	5.566.161.262,98
25	Inspektorat Daerah	12.816.671.239,57	(6.267.795.765,02)	6.548.875.474,55
26	Kecamatan Bantaran	2.118.016.616,20	(901.171.320,85)	1.216.845.295,35
27	Kecamatan Banyuwang	1.771.709.083,00	(969.531.552,89)	802.177.530,11
28	Kecamatan Besuk	1.421.162.144,80	(842.518.025,58)	578.644.119,22
29	Kecamatan Dringu	2.360.412.175,24	(1.344.027.844,31)	1.016.384.330,93
30	Kecamatan Gading	2.299.531.550,24	(987.825.097,55)	1.311.706.452,69
31	Kecamatan Gending	2.427.664.807,84	(1.299.315.805,76)	1.128.349.002,08
32	Kecamatan Kotaanyar	2.902.531.062,07	(1.268.145.723,76)	1.634.385.338,32
33	Kecamatan Kraksaan	26.493.156.915,52	(13.817.285.957,35)	12.675.870.958,17
34	Kecamatan Krejengan	1.727.189.934,68	(975.670.998,33)	751.518.936,35
35	Kecamatan Krucil	2.555.197.525,91	(1.121.244.795,24)	1.433.952.730,67
36	Kecamatan Kuripan	2.079.095.677,98	(1.104.615.539,43)	974.480.138,55
37	Kecamatan Leces	2.776.460.006,50	(1.267.851.069,77)	1.508.608.936,73
38	Kecamatan Lumbang	1.693.011.119,03	(1.091.085.585,78)	601.925.533,25
39	Kecamatan Maron	3.190.948.643,11	(1.464.144.482,81)	1.726.804.160,30
40	Kecamatan Paiton	2.482.975.919,00	(1.045.775.316,62)	1.437.200.602,38
41	Kecamatan Pajajaran	2.439.593.649,76	(1.070.293.679,18)	1.369.299.970,58
42	Kecamatan Pakuniran	2.190.295.013,54	(1.048.560.380,01)	1.141.734.633,53
43	Kecamatan Sukapura	2.490.163.297,63	(1.148.220.807,32)	1.341.942.490,31
44	Kecamatan Sumber	2.448.256.442,59	(1.184.817.119,28)	1.263.439.323,31
45	Kecamatan Sumberasih	1.728.480.218,21	(1.036.030.553,16)	692.449.665,05

No	SKPD	Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
46	Kecamatan Tegalsiwalan	2.025.070.258,34	(1.329.868.102,76)	695.202.155,58
47	Kecamatan Tiris	4.299.947.402,35	(2.069.156.701,62)	2.230.790.700,73
48	Kecamatan Tongas	2.146.305.282,20	(916.875.261,68)	1.229.430.020,52
49	Kecamatan Wonomerto	1.921.472.810,00	(1.197.216.402,34)	724.256.407,66
50	Puskesmas Bago	8.934.139.369,35	(4.847.344.277,11)	4.086.795.092,24
51	Puskesmas Bantaran	9.368.673.978,51	(5.994.854.359,22)	3.373.819.619,29
52	Puskesmas Banyuwanyar	9.342.291.437,14	(5.056.985.623,86)	4.285.305.813,28
53	Puskesmas Besuk	6.366.531.945,73	(4.267.815.463,21)	2.098.716.482,52
54	Puskesmas Condong	11.520.285.154,53	(6.210.827.113,65)	5.309.458.040,88
55	Puskesmas Curah Tulis	8.681.615.319,76	(4.369.849.211,57)	4.311.766.108,19
56	Puskesmas Dringu	12.968.774.474,95	(5.000.565.615,86)	7.968.208.859,09
57	Puskesmas Gending	14.584.344.242,47	(8.018.451.272,62)	6.565.892.969,85
58	Puskesmas Glagah	7.431.150.764,63	(4.474.698.282,55)	2.956.452.482,08
59	Puskesmas Jabungsisir	7.468.170.813,94	(3.861.710.570,63)	3.606.460.243,31
60	Puskesmas Jorongan	6.984.020.960,60	(3.773.234.867,75)	3.210.786.092,85
61	Puskesmas Klenang Kidul	8.175.146.582,02	(4.066.115.849,77)	4.109.030.732,25
62	Puskesmas Kotaanyar	12.092.690.695,92	(6.236.351.637,76)	5.856.339.058,16
63	Puskesmas Kraksaan	18.429.609.342,67	(9.001.714.944,04)	9.427.894.398,63
64	Puskesmas Krejengan	12.855.537.782,46	(6.361.960.419,89)	6.493.577.362,57
65	Puskesmas Krucil	13.947.804.206,91	(7.629.824.256,31)	6.317.979.950,60
66	Puskesmas Kuripan	13.687.830.848,68	(5.056.291.921,67)	8.631.538.927,01
67	Puskesmas Leces	10.813.593.588,55	(5.556.027.003,60)	5.257.566.584,95
68	Puskesmas Lumbang	16.778.590.827,61	(6.807.155.777,85)	9.971.435.049,76
69	Puskesmas Maron	22.592.323.183,94	(8.798.845.386,78)	13.793.477.797,16
70	Puskesmas Paiton	13.955.334.567,37	(8.193.783.569,46)	5.761.550.997,91
71	Puskesmas Pajarakan	14.089.171.488,21	(6.027.633.704,66)	8.061.537.783,55
72	Puskesmas Pakuniran	10.469.463.584,26	(5.669.312.691,76)	4.800.150.892,50
73	Puskesmas Ranugedang	9.402.293.843,25	(5.458.708.345,06)	3.943.585.498,19
74	Puskesmas Sukapura	17.233.345.005,68	(7.003.326.288,10)	10.230.018.717,58
75	Puskesmas Suko	10.720.714.695,61	(3.498.086.352,32)	7.222.628.343,29
76	Puskesmas Sumber	13.849.838.025,85	(6.935.539.772,80)	6.914.298.253,05
77	Puskesmas Sumberasih	17.980.430.127,60	(10.143.270.389,23)	7.837.159.738,37
78	Puskesmas Tegalsiwalan	10.991.628.418,24	(5.450.253.262,74)	5.541.375.155,50
79	Puskesmas Tiris	11.008.622.198,46	(5.996.783.017,88)	5.011.839.180,58
80	Puskesmas Tongas	10.178.961.107,28	(4.780.870.488,64)	5.398.090.618,64
81	Puskesmas Wangkal	12.222.567.289,48	(7.696.683.805,74)	4.525.883.483,74
82	Puskesmas Wonomerto	8.609.882.868,70	(4.672.249.656,34)	3.937.633.212,36
83	RSUD Tongas	166.775.307.773,59	(101.266.678.275,89)	65.508.629.497,70
84	RSUD Waluyoajati Kraksaan	441.947.060.515,53	(253.842.929.077,42)	188.104.131.438,11
85	Satuan Polisi Pamong Praja	23.217.247.025,68	(10.577.144.752,58)	12.640.102.273,10
86	Sekretariat Daerah	213.759.556.957,09	(92.510.118.277,88)	121.249.438.679,21
87	Sekretariat DPRD	47.628.435.120,92	(22.636.282.917,67)	24.992.152.203,25
Jumlah		5.125.136.238.447,50	(2.959.121.377.557,20)	2.166.014.860.890,31

D.1.4 Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	95.865.166.225,51	36.872.148.388,08

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.865.166.225,51, mengalami kenaikan sebesar Rp58.993.017.837,43 atau 159,99% dari Aset Lainnya Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 188 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	16.326.499.302,00	13.748.687.601,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.318.326.290,24)	(10.589.154.668,87)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
3	Aset Lain-Lain	172.395.081.591,36	108.973.617.161,56
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(80.538.088.377,61)	(79.313.813.705,61)
5	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	4.052.812.000,00
Jumlah		95.865.166.225,51	36.872.148.388,08

D.1.4.1 Aset Tidak Berwujud	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	16.326.499.302,00	13.748.687.601,00

Pos Aset Tidak Berwujud terdiri dari Aset non Keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tidak Berwujud adalah *software* komputer, *website*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, hak lainnya dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2025, Aset ini dicatat sebesar nilai tercatatnya.

Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp16.326.499.302,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.577.811.701,00 atau 18,75% dari Aset Tidak Berwujud Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 189 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per awal 1 Januari 2025	13.748.687.601,00
Penambahan :	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	2.289.270.200,00
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	289.991.501,00
Pengurangan :	
Reklas ke Beban Jasa	(1.450.000,00)
Saldo per 31 Desember 2025	16.326.499.302,00

Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp2.579.261.701,00 terdiri dari.

- Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp2.289.270.200,00.
- Penambahan reklasifikasi dari Beban Jasa Rp289.991.501,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - Reklasifikasi dari Beban Jasa pada RSUD Tongas sebesar Rp177.600.000,00 berupa pengembangan dari SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit);
 - Reklasifikasi dari Beban Jasa pada Puskesmas Kraksaan sebesar Rp14.149.000,00 berupa pengembangan dari Pendaftaran *Online*;
 - Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp98.242.501,00 berupa pengadaan aplikasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp24.142.501,00, pengembangan website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebesar Rp24.550.000,00, Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp24.750.000,00, serta Aplikasi Integrasi Aplikasi (IA) Pemerintahan sebesar Rp24.800.000,00.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 terdiri dari.

- Pengurangan reklasifikasi ke Beban Jasa pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.450.000,00.

D.1.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**Per 31 Desember 2025 (Rp)**
(12.318.326.290,24)**Per 31 Desember 2024 (Rp)**
(10.589.154.668,87)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar (Rp12.318.326.290,24), mengalami kenaikan sebesar (Rp1.729.171.621,37) atau (16,33%) dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 190 Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	(10.589.154.668,87)
Penambahan :	
Beban Amortisasi Tahun 2025	(1.729.171.621,37)
Saldo per 31 Desember 2025	(12.318.326.290,24)

Beban Amortisasi Tahun 2025 sebesar (Rp1.729.171.621,37) dirinci pada **Lampiran 10**.

Berikut adalah rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD Tahun 2025.

Tabel 191 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.504.628.300,00	(1.253.168.280,00)	251.460.020,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	303.900.585,00	(189.974.626,25)	113.925.958,75
3	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.840.673.739,00	(1.141.646.421,58)	699.027.317,42
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	490.351.635,00	(337.078.955,00)	153.272.680,00
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	348.301.350,00	(196.984.485,00)	151.316.865,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.451.000,00	(112.451.000,00)	0,00
7	Dinas Kesehatan	1.110.067.785,00	(911.265.216,00)	198.802.569,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	64.800.000,00	(25.920.000,00)	38.880.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian	2.575.648.871,00	(1.832.731.194,96)	742.917.676,04
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	633.013.100,00	(501.473.660,00)	131.539.440,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	187.901.534,00	(132.974.334,00)	54.927.200,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	111.653.500,00	(111.653.500,00)	0,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	991.575.210,00	(837.572.712,00)	154.002.498,00
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	846.772.213,00	(638.503.543,20)	208.268.669,80
15	Dinas Perhubungan	800.405.000,00	(800.405.000,00)	0,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	216.776.395,00	(161.950.377,00)	54.826.018,00
17	Dinas Perikanan	195.203.000,00	(39.040.600,00)	156.162.400,00
18	Dinas Pertanian	144.531.500,00	(59.130.900,00)	85.400.600,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	309.545.060,00	(196.136.836,00)	113.408.224,00
20	Dinas Sosial	114.015.000,00	(114.015.000,00)	0,00
21	Dinas Tenaga Kerja	198.650.000,00	(198.650.000,00)	0,00
22	Inspektorat	424.841.500,00	(351.597.500,00)	73.244.000,00
23	RSUD Tongas	571.357.710,00	(275.045.568,00)	296.312.142,00
24	RSUD Waluyoaji Kraksaan	1.301.068.510,00	(1.121.865.839,17)	179.202.670,83
25	Satuan Polisi Pamong Praja	67.487.500,00	(67.487.500,00)	0,00
26	Sekretariat Daerah	499.187.850,00	(377.128.350,83)	122.059.499,17
27	Sekretariat DPRD	361.691.455,00	(332.474.891,25)	29.216.563,75
Jumlah		16.326.499.302,00	(12.318.326.290,24)	4.008.173.011,76

Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp4.008.173.011,76 dirinci pada **Lampiran 10** adalah Aset Tidak Berwujud yang masih aktif digunakan.

D.1.4.3 Aset Lain-Lain**Per 31 Desember 2025 (Rp)**
172.395.081.591,36**Per 31 Desember 2024 (Rp)**
108.973.617.161,56

Yang termasuk klasifikasi dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Akhir Aset Lain-Lain Tahun 2025

sebesar Rp172.395.081.591,36 mengalami kenaikan sebesar Rp63.421.464.429,80 atau 58,19% dari Aset Lain-Lain Tahun 2024, terdiri dari.

Tabel 192 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024

Rincian		Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset Tetap	108.940.422.007,56	63.702.619.712,20	(256.890.000,00)	172.386.151.720,36
2	Kas yang dibatasi penggunaannya	33.195.154,00	8.307.217,00	(32.572.500,00)	8.929.871,00
Jumlah		108.973.617.161,56	63.710.926.929,20	(289.462.500,00)	172.395.081.591,36

Penjelasan rincian Aset Lain-Lain Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset Tetap

Nilai Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset Tetap adalah Hasil Inventarisasi Tahun 2025 sebesar Rp172.386.151.720,36 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 193 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset Tetap Hasil Inventarisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Peralatan dan Mesin	83.051.823.856,32	1.860.352.401,87	(256.890.000,00)	84.655.286.258,19
2	Gedung dan Bangunan	14.430.321.697,24	0,00	0,00	14.430.321.697,24
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.439.034.146,00	61.069.028.385,60	0,00	72.508.062.531,60
4	Aset Tetap Lainnya	19.242.308,00	0,00	0,00	19.242.308,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	773.238.925,33	0,00	773.238.925,33
Jumlah		108.940.422.007,56	63.702.619.712,80	(256.890.000,00)	172.386.151.720,36

Penjelasan Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Terdapat penambahan atas Reklasifikasi dari Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan perolehan hibah dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi Dan Pihak Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp63.702.619.712,80 dengan rincian sebagai berikut.
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp1.561.288.172,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 194 Rincian Aset Lain-Lain dari Reklasifikasi Aset Tetap Hasil Inventarisasi per 31 Desember 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	32.367.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.395.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.000.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.650.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
5	Dinas Perhubungan	154.500.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
6	Dinas Perikanan	49.851.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
7	Dinas Tenaga Kerja	28.700.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.225.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
9	Inspektorat Daerah	29.250.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
10	Kecamatan Banyuwang	10.030.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
11	Kecamatan Besuk	10.030.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
12	Kecamatan Gading	35.155.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
13	Kecamatan Gending	43.000.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
14	Kecamatan Kraksaan	173.497.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
15	Kecamatan Krejengan	13.907.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
16	Kecamatan Krucil	71.000.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
17	Kecamatan Maron	36.170.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
18	Kecamatan Wonomerto	29.875.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
19	Puskesmas Bago	8.750.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
20	Puskesmas Banyuanyar	15.125.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
21	Puskesmas Besuk	11.564.285,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
22	Puskesmas Curah Tulis	29.985.300,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
23	Puskesmas Dringu	10.747.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
24	Puskesmas Gending	20.562.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
25	Puskesmas Glagah	26.765.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
26	Puskesmas Jorongan	920.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
27	Puskesmas Klenang Kidul	48.546.103,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
28	Puskesmas Kotaanyar	16.600.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
29	Puskesmas Krejengan	21.248.175,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
30	Puskesmas Krucil	28.804.444,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
31	Puskesmas Kuripan	13.695.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
32	Puskesmas Leces	14.280.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
33	Puskesmas Lumbang	44.220.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
34	Puskesmas Maron	186.000.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
35	Puskesmas Paiton	300.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
36	Puskesmas Pakuniran	56.700.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
37	Puskesmas Sukapura	34.763.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
38	Puskesmas Suko	13.117.800,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
39	Puskesmas Sumber	47.902.090,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
40	Puskesmas Sumberasih	9.548.175,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
41	Puskesmas Tiris	7.775.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
42	Puskesmas Tongas	3.412.500,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
43	Puskesmas Wangkal	13.800.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
44	Puskesmas Tegalsiwalan	12.877.800,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
45	Sekretariat Daerah	30.675.000,00	Peralatan dan Mesin Rusak Berat
Jumlah		1.561.288.172,00	

- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp773.238.925,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 195 Rincian Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

No	SKPD	Reklasifikasi	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	131.315.800,00	KDP TIDAK DILANJUTKAN
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Kabupaten	307.880.625,00	KDP TIDAK DILANJUTKAN
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	97.483.000,00	KDP TIDAK DILANJUTKAN
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	183.400.000,00	KDP TIDAK DILANJUTKAN
5	Dinas Perhubungan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	31.426.000,00	KDP TIDAK DILANJUTKAN
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	21.733.500,33	KDP TIDAK DILANJUTKAN
Jumlah			773.238.925,33	

- Perolehan Hibah dan Bantuan Dari Pusat, Provinsi dan Pihak Lainnya sebesar Rp61.368.092.615,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 196 Rincian Aset Lain-Lain dari Perolehan Hibah per 31 Desember 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor BAST	Nominal (Rp)	Pemberi Hibah
Peralatan dan Mesin					
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Bak Sampah	33.1/BA/DC/2025	110.949.366,87	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Pengelolaan Pusat Edukasi Kebersihan Lingkungan	33.1/BA/DC/2025	188.114.863,00	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jalan, Jaringan Dan Irigasi					
1	Dinas Lingkungan Hidup	TPS 3R	33/BA/DC/2025	3.089.245.571,96	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor BAST	Nominal (Rp)	Pemberi Hibah
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Air Limbah	33/BA/DC/2025	64.890.020,76	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 01 (P 540,00 , L 2,95)	33.1/BA/DC/2025	1.520.905.534,69	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 02 (P 881,3 , L 2.32)	33.1/BA/DC/2025	4.624.485.586,98	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 03 (P 202,20m, L 1,48m)	33.1/BA/DC/2025	881.713.288,31	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 04 (P 49,70m, L 0,80m)	33.1/BA/DC/2025	135.485.329,90	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 05 (P 120,02m, L 0,80m)	33.1/BA/DC/2025	350.138.473,01	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Titik Kumpul Pada Persimpangan Jalan Cemorolawang	33.1/BA/DC/2025	3.269.071.279,99	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
9	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pembangunan SPAM IKK Kabupaten Probolinggo (27/PBG/IKK)	553/BA/DC/2023	17.422.152.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pembangunan IPLT Kabupaten Probolinggo	627/BA/DC/2024	6.313.652.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reservoir, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	2.109.438.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, dan Perpipaan di Desa Ranugedang Kec Tiris	1225.4/BA/DC/2022	1.252.006.800,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	3.301.621.400,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan Pemasangan Pipa Submersible, Genset dan Surge Supression Vessel	1225.4/BA/DC/2022	355.965.500,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Desa Gading Kulon Kec Gading	1225.4/BA/DC/2022	1.766.270.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reservior, Pengadaan dan Pemasangan Pipa	1225.4/BA/DC/2022	5.538.888.300,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan Broncaptering, Reservior, R Klorinasi, R Jaga, R Genset, Pengadaan & Pemasangan Pipa	1225.4/BA/DC/2022	6.345.351.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	2.727.748.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah				61.368.092.615,47	

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan BAST Nomor 33.1/BA/DC/2025 tanggal 14 Februari 2025 berupa aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat, yaitu pipa HDPE/PVC tahun perolehan 2009 sebesar Rp3.418.338.000,00. Namun demikian, berdasarkan hasil penelusuran, keberadaan dan lokasi aset tersebut belum dapat diidentifikasi sehingga aset tersebut belum diakui dalam neraca.

- b. Terdapat pengurangan atas Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp256.890.000,00 berupa sepeda motor pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ambulan pada Puskesmas Tiris, setelah dilakukan perbaikan di Tahun 2025 sehingga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 197 Rincian Reklasifikasi ke Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.890.000,00	Reklas ke Aset Tetap
2	Puskesmas Tiris	246.000.000,00	Reklas ke Aset Tetap
Jumlah		256.890.000,00	

2. Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp8.929.871,00 merupakan Saldo Uang Jaminan Pasien dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 pada RSUD Waluyojoati Kraksaan yang terdiri dari saldo rekening uang jaminan pasien sebesar Rp8.666.654,00 dan uang tunai sebesar Rp263.217,00. Kelebihan uang jaminan pasien yang akan dikembalikan ke pasien pada Tahun 2026 sebesar Rp7.952.000,00 dan yang tidak dikembalikan ke pasien sebesar Rp977.871,00.

D.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	(80.538.088.377,61)	(79.313.813.705,61)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2025 sebesar (Rp80.538.088.377,61), mengalami kenaikan sebesar (Rp1.224.274.672,00) atau (1,54%) dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 198 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	(79.313.813.705,61)
Penambahan Tahun 2025	
Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1.481.164.672,00)
Pengurangan Tahun 2025	
Reklas ke Aset Tetap	256.890.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	(80.538.088.377,61)

Perhitungan nilai Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp1.481.164.672,00) dan nilai Reklasifikasi ke Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp256.890.000,00. Aset Lain-Lain tercatat pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 199 Rekapitulasi Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2025

No	Nama SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.603.095.427,05	(1.557.961.177,05)	45.134.250,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	639.850.590,00	(622.954.950,00)	16.895.640,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	475.722.024,00	(365.753.884,00)	109.968.140,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	47.398.094.800,00	(180.632.400,00)	47.217.462.400,00
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.015.258.815,50	(2.008.851.815,50)	6.407.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	953.874.898,00	(913.635.552,00)	40.239.346,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	413.087.375,00	(322.338.075,00)	90.749.300,00
8	Dinas Kesehatan	7.134.738.070,71	(7.093.603.030,71)	41.135.040,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2.939.662.492,66	(2.831.924.935,46)	107.737.557,20

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	2.305.267.727,00	(2.225.878.378,20)	79.389.348,80
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.984.202.045,59	(2.133.734.263,00)	3.850.467.782,59
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.931.111.776,41	(2.648.138.386,96)	7.282.973.389,45
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	303.304.858,75	(289.200.113,00)	14.104.745,75
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.376.305.818,00	(1.359.735.564,00)	16.570.254,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	580.311.500,00	(551.189.500,00)	29.122.000,00
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.905.376.494,22	(6.051.112.838,34)	10.854.263.655,88
17	Dinas Perhubungan	2.768.085.050,42	(2.636.390.246,72)	131.694.803,70
18	Dinas Perikanan	8.451.688.843,00	(8.349.223.843,00)	102.465.000,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	651.753.515,00	(648.425.815,00)	3.327.700,00
20	Dinas Pertanian	10.249.196.820,00	(6.773.289.047,00)	3.475.907.773,00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	17.331.628.410,90	(1.008.706.302,02)	16.322.922.108,88
22	Dinas Sosial	509.690.900,00	(490.415.900,00)	19.275.000,00
23	Dinas Tenaga Kerja	1.099.413.717,83	(1.069.001.077,83)	30.412.640,00
24	Inspektorat Daerah	221.084.750,00	(221.084.750,00)	0,00
25	Kecamatan Bantaran	174.974.867,00	(171.774.867,00)	3.200.000,00
26	Kecamatan Banyuwang	229.641.975,00	(226.486.135,00)	3.155.840,00
27	Kecamatan Besuk	134.064.500,00	(134.064.500,00)	0,00
28	Kecamatan Dringu	217.182.015,00	(202.397.015,00)	14.785.000,00
29	Kecamatan Gading	262.175.953,75	(251.476.510,80)	10.699.442,95
30	Kecamatan Gending	152.784.875,00	(152.374.875,00)	410.000,00
31	Kecamatan Kotaanyar	250.595.900,50	(247.834.740,50)	2.761.160,00
32	Kecamatan Kraksaan	554.305.411,95	(483.331.031,95)	70.974.380,00
33	Kecamatan Krejengan	196.669.750,00	(178.363.750,00)	18.306.000,00
34	Kecamatan Krucil	126.988.670,00	(126.988.670,00)	0,00
35	Kecamatan Kuripan	140.927.375,07	(140.927.375,07)	0,00
36	Kecamatan Leces	185.754.950,00	(182.214.950,00)	3.540.000,00
37	Kecamatan Lumbang	210.687.300,00	(207.607.300,00)	3.080.000,00
38	Kecamatan Maron	204.553.628,00	(179.941.128,00)	24.612.500,00
39	Kecamatan Paiton	310.657.500,00	(304.917.500,00)	5.740.000,00
40	Kecamatan Pajajaran	214.608.000,00	(194.112.000,00)	20.496.000,00
41	Kecamatan Pakuniran	324.193.750,00	(285.213.750,00)	38.980.000,00
42	Kecamatan Sukapura	269.747.500,00	(240.615.300,00)	29.132.200,00
43	Kecamatan Sumber	91.218.500,00	(84.702.500,00)	6.516.000,00
44	Kecamatan Sumberasih	134.382.342,90	(128.597.594,90)	5.784.748,00
45	Kecamatan Tegalsiwalan	220.221.530,00	(218.705.070,00)	1.516.460,00
46	Kecamatan Tiris	248.661.375,00	(247.144.375,00)	1.517.000,00
47	Kecamatan Tongas	174.364.750,60	(174.110.650,60)	254.100,00
48	Kecamatan Wonomerto	186.361.875,00	(176.318.175,00)	10.043.700,00
49	RSUD Tongas	4.749.314.142,67	(3.445.892.849,47)	1.303.421.293,20
50	RSUD Waluyo Jati	7.097.618.526,76	(7.080.378.526,76)	17.240.000,00
51	Satuan Polisi Pamong Praja	364.937.050,00	(280.669.370,00)	84.267.680,00
52	Sekretariat Daerah	7.805.877.296,82	(7.733.081.385,82)	72.795.911,00
53	Sekretariat DPRD	678.165.000,00	(677.597.000,00)	568.000,00
54	Puskesmas Sukapura	424.681.117,17	(424.681.117,17)	0,00
55	Puskesmas Sumber	47.902.090,00	(47.902.090,00)	0,00
56	Puskesmas Kuripan	55.610.690,22	(49.490.690,22)	6.120.000,00
57	Puskesmas Bantaran	34.231.008,69	(34.231.008,69)	0,00
58	Puskesmas Leces	21.132.627,86	(18.412.627,86)	2.720.000,00
59	Puskesmas Jorong	74.691.104,02	(74.691.104,02)	0,00
60	Puskesmas Tegalsiwalan	148.128.029,98	(125.969.321,98)	22.158.708,00
61	Puskesmas Banyuwang	148.903.927,57	(146.047.927,57)	2.856.000,00
62	Puskesmas Klenang Kidul	58.758.032,71	(58.588.032,71)	170.000,00

No	Nama SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
63	Puskesmas Tiris	72.426.991,87	(72.426.991,87)	0,00
64	Puskesmas Ranu gedang	87.303.121,11	(87.303.121,11)	0,00
65	Puskesmas Krucil	478.936.672,23	(476.161.672,23)	2.775.000,00
66	Puskesmas Wangkal	183.176.623,88	(183.176.623,88)	0,00
67	Puskesmas Condong	234.813.887,12	(231.173.887,12)	3.640.000,00
68	Puskesmas Pakuniran	155.133.526,62	(154.983.526,62)	150.000,00
69	Puskesmas Glagah	138.863.978,38	(138.863.978,38)	0,00
70	Puskesmas Kotaanyar	95.150.584,98	(95.150.584,98)	0,00
71	Puskesmas Paiton	88.452.406,59	(88.452.406,59)	0,00
72	Puskesmas Jabung sisir	75.777.180,92	(52.977.180,92)	22.800.000,00
73	Puskesmas Besuk	148.829.459,97	(121.265.459,97)	27.564.000,00
74	Puskesmas Bago	62.047.377,85	(61.001.207,85)	1.046.170,00
75	Puskesmas Kraksaan	22.606.364,89	(22.606.364,89)	0,00
76	Puskesmas Krejengan	49.960.638,93	(49.960.638,93)	0,00
77	Puskesmas Pajarakan	36.100.894,87	(36.100.894,87)	0,00
78	Puskesmas Maron	161.604.906,47	(161.604.906,47)	0,00
79	Puskesmas Suko	84.205.006,20	(83.305.006,20)	900.000,00
80	Puskesmas Gending	237.064.427,60	(233.664.427,60)	3.400.000,00
81	Puskesmas Dringu	78.787.712,04	(78.787.712,04)	0,00
82	Puskesmas Wonomerto	107.452.135,61	(84.652.135,61)	22.800.000,00
83	Puskesmas Lumbang	145.871.726,14	(129.071.726,14)	16.800.000,00
84	Puskesmas Tongas	272.191.159,76	(224.608.693,42)	47.582.466,34
85	Puskesmas Curah Tulis	66.145.323,45	(66.145.323,45)	0,00
86	Puskesmas Sumberasih	135.767.953,60	(113.609.245,60)	22.158.708,00
Jumlah		172.386.151.720,36	(80.538.088.377,61)	91.848.063.342,74

D.1.4.5 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) **Per 31 Desember 2025 (Rp)** **Per 31 Desember 2024 (Rp)**
0,00 **4.052.812.000,00**

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan (100%) dari Dana TDF Tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 200 Rekapitulasi Mutasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	4.052.812.000,00	0,00	(4.052.812.000,00)	0,00
Jumlah		4.052.812.000,00	0,00	(4.052.812.000,00)	0,00

D.1.5 Properti Investasi **Per 31 Desember 2025 (Rp)** **Per 31 Desember 2024 (Rp)**
28.006.993.084,49 **23.938.284.414,96**

Saldo akhir Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp28.006.993.084,49, mengalami kenaikan sebesar Rp4.068.708.669,53 atau 17,00% dari Properti Investasi Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 201 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Properti Investasi Tanah	19.833.147.465,65	15.553.155.581,98
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	10.045.762.264,00	10.045.762.264,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.871.916.645,16)	(1.660.633.431,02)
Jumlah		28.006.993.084,49	23.938.284.414,96

D.1.5.1 Properti Investasi Tanah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	19.833.147.465,65	15.553.155.581,98

Saldo akhir Properti Investasi Tanah Tahun 2025 sebesar Rp19.833.147.465,65, mengalami kenaikan sebesar Rp4.279.991.883,67 atau 27,52% dari Properti Investasi Tanah Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 11.1**. Mutasi tambah atas Properti Investasi Tanah selama Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 202 Rincian Mutasi Properti Investasi per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	15.553.155.581,98
Penambahan Tahun 2025	4.279.991.883,67
Reklasifikasi dari Aset Tanah	4.279.991.883,67
Saldo per 31 Desember 2025	19.833.147.465,65

D.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	10.045.762.264,00	10.045.762.264,00

Saldo akhir Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp10.045.762.264,00, tidak mengalami kenaikan dan penurunan dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 11.2**.

D.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	(1.871.916.645,16)	(1.660.633.431,02)

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar (Rp1.871.916.645,16), mengalami penurunan sebesar (Rp211.283.214,14) atau (12,72%) dari Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 203 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	(1.660.633.431,02)
Penambahan Tahun 2025	(211.283.214,14)
Beban Penyusutan Tahun 2025	(211.283.214,14)
Saldo per 31 Desember 2025	(1.871.916.645,16)

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dalam tabel berikut.

Tabel 204 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Akhir 2025 (Nilai Perolehan) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.805.261.605,00	(1.212.691.509,44)	4.592.570.095,57
2	Dinas Perikanan	3.849.170.659,00	(571.636.903,72)	3.277.533.755,28
3	RSUD Tongas	391.330.000,00	(87.588.232,00)	303.741.768,00
	Jumlah	10.045.762.264,00	(1.871.916.645,16)	8.173.845.618,85

D.2 Kewajiban	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember

2025 sebesar Rp100.702.993.950,32 naik 120,19% atau sebesar Rp54.968.945.122,60 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 205 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72

D.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		100.702.993.950,32	45.734.048.827,72

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.702.993.950,32 naik 120,19% atau sebesar Rp54.968.945.122,60 dibandingkan dengan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 206 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	669.337,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	5.123.787.668,50	4.738.778.885,84
3	Utang Belanja	94.578.159.830,07	39.206.678.514,88
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.000.377.114,75	1.788.591.427,00
	Jumlah	100.702.993.950,32	45.734.048.827,72

D.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		669.337,00	0,00

Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Saldo Utang PFK Tahun 2025 sebesar Rp669.337,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 207 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang PPH Pusat	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
	Utang PPH 23				
	Puskesmas Wangkal	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
2	Utang PPN Pusat	0,00	556.937,00	0,00	556.937,00
	Puskesmas Wangkal	0,00	556.937,00	0,00	556.937,00
	Jumlah	0,00	669.337,00	0,00	669.337,00

D.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
		5.123.787.668,50	4.738.778.885,84

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal Neraca seluruh atau sebagian hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum diserahkan kepada pihak ketiga. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka mengalami kenaikan sebesar 8,12% dibandingkan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 208 Rekapitulasi Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	500.398.635,83	669.225.921,83	(500.398.635,83)	669.225.921,83
2	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.409.430,00	0,00	1.409.430,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0,00	46.062.500,00	0,00	46.062.500,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.058.166,67	41.542.966,67	(33.058.166,67)	41.542.966,67
5	Dinas Perhubungan	4.024.905.416,67	3.976.387.083,33	(4.024.905.416,67)	3.976.387.083,33
6	Dinas Perikanan	99.166.666,67	49.166.666,67	(99.166.666,67)	49.166.666,67
7	Dinas Pertanian	0,00	283.743.100,00	0,00	283.743.100,00
8	RSUD Waluyoaji Kraksaan	81.250.000,00	56.250.000,00	(81.250.000,00)	56.250.000,00
Jumlah		4.738.778.885,84	5.123.787.668,50	(4.738.778.885,84)	5.123.787.668,50

Penjelasan rincian dari masing-masing Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut.

- (1) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari Pajak Reklame sebesar Rp669.225.921,83 dan Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp1.409.430,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 209 Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Masa Pajak	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan yang Sudah Terbayarkan	Bulan yang Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=5x7
1	Januari	42.600.000,00	12	3.550.000,00	11	1	3.550.000,00
2	Februari	87.808.460,00	12	7.317.371,67	10	2	14.634.743,33
3	Maret	75.382.333,33	12	6.281.861,11	9	3	18.845.583,33
4	April	68.722.450,00	12	5.726.870,83	8	4	22.907.483,33
5	Mei	37.089.400,00	12	3.090.783,33	7	5	15.453.916,67
6	Juni	69.467.266,67	12	5.788.938,89	6	6	34.733.633,33
7	Juli	224.028.292,86	12	18.669.024,40	5	7	130.683.170,83
8	Agustus	63.188.312,50	12	5.265.692,71	4	8	42.125.541,67
9	September	29.550.555,56	12	2.462.546,30	3	9	22.162.916,67
10	Oktober	119.085.400,00	12	9.923.783,33	2	10	99.237.833,33
11	November	153.095.454,55	12	12.757.954,55	1	11	140.337.500,00
12	Desember	124.553.599,33	12	10.379.466,61	0	12	124.553.599,33
Jumlah		1.094.571.524,79		91.214.293,73			669.225.921,83

Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp1.409.430,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 210 Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Masa Pajak	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan yang Sudah Terbayarkan	Bulan yang Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8=5x7
1	Desember	1.409.430,00	1	1.409.430,00	0	1	1.409.430,00
Jumlah		1.409.430,00		1.409.430,00			1.409.430,00

- (2) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2025 sebesar Rp46.062.500,00 terdiri dari.

- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp27.500.000,00 berupa pendapatan sewa *Guest House* dan *Tourist Information Center (TIC)*;
- Hasil Sewa BMD sebesar Rp18.562.500,00 berupa pendapatan sewa tanah dan bangunan multifungsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 211 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025

No	Awal Perjanjian	Pendapatan (Rp)	Masa Berlaku s/d	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan yang Sudah Terbayarkan	Bulan yang Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	10/12/2025	30.000.000	10/12/2026	2.500.000,00	1	11	27.500.000,00
2	1/11/2025	55.687.500	31/1/2026	18.562.500,00	2	1	18.562.500,00
Jumlah		85.687.500,00		21.062.500,00			46.062.500,00

- (3) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 sebesar Rp41.542.966,67 berupa pendapatan sewa tanah untuk jembatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 212 Pendapatan Diterima Dimuka pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Awal Pinjam	Pendapatan (Rp)	Masa Berlaku s/d	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan yang Sudah Terbayarkan	Bulan yang Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	13/06/2022	400.000,00	13/06/2027	6.666,67	43	17	113.333,33
2	27/05/2022	1.100.000,00	27/05/2027	18.333,33	44	16	293.333,33
3	06/06/2022	1.170.000,00	06/06/2027	19.500,00	43	17	331.500,00
4	12/07/2022	900.000,00	12/07/2027	15.000,00	42	18	270.000,00
5	02/08/2022	490.000,00	02/08/2027	8.166,67	41	19	155.166,67
6	24/08/2022	400.000,00	24/08/2027	6.666,67	41	19	126.666,67
7	17/06/2022	360.000,00	17/06/2027	6.000,00	43	17	102.000,00
8	07/09/2022	120.000,00	07/09/2027	2.000,00	40	20	40.000,00
9	07/09/2022	120.000,00	07/09/2027	2.000,00	40	20	40.000,00
10	24/10/2022	400.000,00	24/10/2027	6.666,67	39	21	140.000,00
11	08/11/2022	120.000,00	08/11/2027	2.000,00	38	22	44.000,00
12	21/11/2022	240.000,00	21/11/2027	4.000,00	38	22	88.000,00
13	22/11/2022	90.000,00	22/11/2027	1.500,00	38	22	33.000,00
14	28/11/2022	180.000,00	28/11/2027	3.000,00	38	22	66.000,00
15	24/01/2023	350.000,00	24/01/2028	5.833,33	36	24	140.000,00
16	05/07/2023	375.000,00	05/07/2028	6.250,00	30	30	187.500,00
17	21/07/2023	450.000,00	21/07/2028	7.500,00	30	30	225.000,00
18	04/09/2023	1.200.000,00	04/09/2028	20.000,00	28	32	640.000,00
19	27/09/2023	525.000,00	27/09/2028	8.750,00	28	32	280.000,00
20	06/10/2023	280.000,00	06/10/2028	4.666,67	27	33	154.000,00
21	30/10/2023	156.000,00	30/10/2028	2.600,00	27	33	85.800,00
22	30/10/2023	160.000,00	30/10/2028	2.666,67	27	33	88.000,00
23	30/10/2023	250.000,00	30/10/2028	4.166,67	27	33	137.500,00
24	30/10/2023	120.000,00	30/10/2028	2.000,00	27	33	66.000,00
25	03/01/2024	1.280.000,00	03/01/2044	5.333,33	24	216	1.152.000,00
26	24/07/2024	8.000.000,00	27/07/2044	33.333,33	18	222	7.400.000,00
27	29/07/2024	8.000.000,00	29/07/2044	33.333,33	18	222	7.400.000,00
28	29/07/2024	4.500.000,00	29/07/2029	75.000,00	18	42	3.150.000,00
29	07/08/2024	600.000,00	07/08/2029	10.000,00	17	43	430.000,00
30	08/08/2024	2.750.000,00	08/08/2029	45.833,33	17	43	1.970.833,33
31	26/08/2024	700.000,00	26/08/2029	11.666,67	17	43	501.666,67
32	26/08/2024	1.300.000,00	26/08/2029	21.666,67	17	43	931.666,67
33	12/11/2024	1.500.000,00	12/11/2029	25.000,00	14	46	1.150.000,00
34	06/08/2025	4.125.000,00	06/08/2030	68.750,00	5	55	3.781.250,00
35	06/08/2025	6.875.000,00	06/08/2030	114.583,33	5	55	6.302.083,33
36	17/07/2025	2.100.000,00	17/07/2030	35.000,00	6	54	1.890.000,00
37	23/09/2025	700.000,00	23/09/2030	11.666,67	4	56	653.333,33
38	17/12/2025	1.000.000,00	17/12/2030	16.666,67	1	59	983.333,33
Jumlah		53.386.000,00		673.766,67			41.542.966,67

- (4) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.976.387.083,33 pada Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berupa Parkir Berlangganan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 213 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Bulan	Pendapatan (Rp)	Masa Berlaku s/d	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan Terbayarkan	Bulan Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	Januari	486.190.000,00	Januari 2026	40.515.833,33	11	1	40.515.833,33
2	Februari	490.210.000,00	Februari 2025	40.850.833,33	10	2	81.701.666,67
3	Maret	481.905.000,00	Maret 2026	40.158.750,00	9	3	120.476.250,00
4	April	469.485.000,00	April 2026	39.123.750,00	8	4	156.495.000,00
5	Mei	526.430.000,00	Mei 2026	43.869.166,67	7	5	219.345.833,33
6	Juni	527.780.000,00	Juni 2026	43.981.666,67	6	6	263.890.000,00
7	Juli	604.450.000,00	Juli 2026	50.370.833,33	5	7	352.595.833,33
8	Agustus	652.680.000,00	Agustus 2026	54.390.000,00	4	8	435.120.000,00
9	September	599.875.000,00	September 2026	49.989.583,33	3	9	449.906.250,00
10	Oktober	720.935.000,00	Oktober 2026	60.077.916,67	2	10	600.779.166,67
11	November	672.825.000,00	November 2026	56.068.750,00	1	11	616.756.250,00
12	Desember	638.805.000,00	Desember 2026	53.233.750,00	0	12	638.805.000,00
Jumlah		6.871.570.000,00		572.630.833,33			3.976.387.083,33

- (5) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.166.666,67 pada Hasil Sewa BMD yang berupa pendapatan sewa *Integrated Cold Storage* (ICS) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 214 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Awal Perjanjian	Pendapatan (Rp)	Masa Berlaku s/d	Pendapatan per Bulan (Rp)	Bulan yang Sudah Terbayarkan	Bulan yang Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	10/07/2023	120.000.000,00	10/12/2026	3.333.333,33	24	12	40.000.000,00
2	18/12/2024	20.000.000,00	18/12/2026	833.333,33	13	11	9.166.666,67
Jumlah		140.000.000,00		4.166.666,67			49.166.666,67

- (6) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2025 sebesar Rp49.166.666,67 pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa pendapatan sewa tanah eks bengkok dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 215 Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perikanan Tahun 2025

No	Awal Perjanjian	Masa Berlaku s/d	Bulan Terbayarkan	Bulan Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	01/01/2026	31/12/2026	0	12	6.232.800,00
2	01/01/2026	31/12/2026	0	12	6.720.000,00
3	01/01/2026	31/12/2026	0	12	12.810.000,00
4	01/01/2026	31/12/2026	0	12	15.066.000,00
5	01/01/2026	31/12/2026	0	12	5.033.700,00
6	01/01/2026	31/12/2026	0	12	6.606.000,00
7	01/01/2026	31/12/2026	0	12	9.183.000,00
8	01/01/2026	31/12/2026	0	12	10.861.200,00
9	01/01/2026	31/12/2026	0	12	4.438.400,00
10	01/01/2026	31/12/2026	0	12	5.235.200,00
11	01/01/2026	31/12/2026	0	12	10.288.000,00
12	01/01/2026	31/12/2026	0	12	12.377.600,00
13	01/01/2026	31/12/2026	0	12	19.408.000,00
14	01/01/2026	31/12/2026	0	12	2.896.000,00
15	01/01/2026	31/12/2026	0	12	9.446.400,00
16	01/01/2026	31/12/2026	0	12	13.846.400,00
17	01/01/2026	31/12/2026	0	12	15.398.400,00

No	Awal Perjanjian	Masa Berlaku s/d	Bulan Terbayarkan	Bulan Belum Terbayarkan	Pendapatan Diterima Dimuka
18	01/01/2026	31/12/2026	0	12	2.278.400,00
19	01/01/2026	31/12/2026	0	12	7.820.800,00
20	01/01/2026	31/12/2026	0	12	45.248.000,00
21	01/01/2026	31/12/2026	0	12	27.548.800,00
22	01/01/2026	31/12/2026	0	12	15.786.900,00
23	01/01/2026	31/12/2026	0	12	19.213.100,00
Jumlah					283.743.100,00

- (7) Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Waluyoaji Kraksaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp56.250.000,00 pada Pendapatan BLUD berupa pendapatan sewa gedung Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 216 Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Waluyoaji Kraksaan Tahun 2025

Tahun ke-	Tahun diakui Pendapatan	Tanggal Mulai kontrak	Tanggal Selesai Kontrak	Pendapatan diterima di muka (Rp)	Akumulasi Pendapatan (Rp)	Saldo Pendapatan Diterima di Muka (Rp)
1	2018	14/04/2018	31/12/2018	18.750.000,00	18.750.000,00	231.250.000,00
2	2019	01/01/2019	31/12/2019	25.000.000,00	43.750.000,00	206.250.000,00
3	2020	01/01/2020	31/12/2020	25.000.000,00	68.750.000,00	181.250.000,00
4	2021	01/01/2021	31/12/2021	25.000.000,00	93.750.000,00	156.250.000,00
5	2022	01/01/2022	31/12/2022	25.000.000,00	118.750.000,00	131.250.000,00
6	2023	01/01/2023	31/12/2023	25.000.000,00	143.750.000,00	106.250.000,00
7	2024	01/01/2024	31/12/2024	25.000.000,00	168.750.000,00	81.250.000,00
8	2025	01/01/2025	31/12/2025	25.000.000,00	193.750.000,00	56.250.000,00
9	2026	01/01/2026	31/12/2026	25.000.000,00	218.750.000,00	31.250.000,00
10	2027	01/01/2027	31/12/2027	25.000.000,00	243.750.000,00	6.250.000,00
11	2028	01/01/2028	15/04/2028	6.250.000,00	250.000.000,00	0,00

D.2.1.3 Utang Belanja

Per 31 Desember 2025 (Rp) Per 31 Desember 2024 (Rp)

94.578.159.830,07

39.206.678.514,88

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp94.578.159.830,07, naik 141,23% atau sebesar Rp55.371.481.315,19 dibandingkan Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 217 Rekapitulasi Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Pegawai	15.929.894.403,44	(1.231.659,00)	15.928.662.744,44	48.386.886.214,49	(15.928.662.744,44)	48.386.886.214,49
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	23.276.784.111,44	(97.885.042,51)	23.178.899.068,93	42.627.766.415,58	(23.162.278.147,93)	42.644.387.336,58
3	Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	3.537.240.000,00	0,00	3.537.240.000,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	9.646.279,00	0,00	9.646.279,00
Jumlah		39.206.678.514,88	(99.116.701,51)	39.107.561.813,37	94.561.538.909,07	(39.090.940.892,37)	94.578.159.830,07

Penjelasan dari masing-masing Utang Belanja adalah sebagai berikut.

- 1) Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp48.386.886.214,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 218 Rincian Saldo Akhir Utang Belanja Pegawai Tahun 2025

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	48.386.886.214,49
	2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.326.651.942,00
	2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.926.224.412,00
	2.1.06.01.05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	134.009.860,49

Adapun rincian dari Utang Belanja Pegawai per SKPD adalah sebagai berikut.

Tabel 219 Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai per SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	226.394.710,00	0,00	226.394.710,00	215.810.724,00	(226.394.710,00)	215.810.724,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78.326.073,00	0,00	78.326.073,00	84.834.603,00	(78.326.073,00)	84.834.603,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.185.125,00	0,00	68.185.125,00	91.610.813,00	(68.185.125,00)	91.610.813,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.751.141.303,00	(1.231.659,00)	1.749.909.644,00	2.845.798.726,49	(1.749.909.644,00)	2.845.798.726,49
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	161.543.645,00	0,00	161.543.645,00	200.740.014,00	(161.543.645,00)	200.740.014,00
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.020.092,00	0,00	103.020.092,00	130.475.620,00	(103.020.092,00)	130.475.620,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	112.724.186,00	0,00	112.724.186,00	107.406.948,00	(112.724.186,00)	107.406.948,00
8	Dinas Kesehatan	358.417.869,00	0,00	358.417.869,00	302.377.266,00	(358.417.869,00)	302.377.266,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	103.559.627,00	0,00	103.559.627,00	131.800.472,00	(103.559.627,00)	131.800.472,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	125.134.934,00	0,00	125.134.934,00	149.634.168,00	(125.134.934,00)	149.634.168,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	341.671.488,00	0,00	341.671.488,00	387.295.743,00	(341.671.488,00)	387.295.743,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	311.086.376,00	0,00	311.086.376,00	351.871.125,00	(311.086.376,00)	351.871.125,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	268.134.840,00	0,00	268.134.840,00	276.464.338,00	(268.134.840,00)	276.464.338,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.214.531,00	0,00	88.214.531,00	101.212.991,00	(88.214.531,00)	101.212.991,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114.520.343,00	0,00	114.520.343,00	129.065.980,00	(114.520.343,00)	129.065.980,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.304.375,00	0,00	111.304.375,00	144.791.514,00	(111.304.375,00)	144.791.514,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	843.339.330,00	0,00	843.339.330,00	38.219.850.900,00	(843.339.330,00)	38.219.850.900,00
18	Dinas Perhubungan	329.610.327,00	0,00	329.610.327,00	255.262.005,00	(329.610.327,00)	255.262.005,00
19	Dinas Perikanan	121.446.876,00	0,00	121.446.876,00	146.291.282,00	(121.446.876,00)	146.291.282,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.919.089,00	0,00	78.919.089,00	105.446.197,00	(78.919.089,00)	105.446.197,00
21	Dinas Pertanian	426.821.421,00	0,00	426.821.421,00	477.426.579,00	(426.821.421,00)	477.426.579,00
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	135.049.492,00	0,00	135.049.492,00	159.728.114,00	(135.049.492,00)	159.728.114,00
23	Dinas Sosial	106.383.108,00	0,00	106.383.108,00	108.751.748,00	(106.383.108,00)	108.751.748,00
24	Dinas Tenaga Kerja	140.078.043,00	0,00	140.078.043,00	157.740.327,00	(140.078.043,00)	157.740.327,00
25	Inspektorat	297.119.277,00	0,00	297.119.277,00	446.095.558,00	(297.119.277,00)	446.095.558,00
26	Kecamatan Bantaran	49.265.237,00	0,00	49.265.237,00	54.690.949,00	(49.265.237,00)	54.690.949,00
27	Kecamatan Banyuwangi	53.694.272,00	0,00	53.694.272,00	64.004.343,00	(53.694.272,00)	64.004.343,00
28	Kecamatan Besuk	59.278.613,00	0,00	59.278.613,00	73.898.133,00	(59.278.613,00)	73.898.133,00
29	Kecamatan Dringu	39.365.871,00	0,00	39.365.871,00	45.633.125,00	(39.365.871,00)	45.633.125,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
30	Kecamatan Gading	49.771.197,00	0,00	49.771.197,00	50.634.012,00	(49.771.197,00)	50.634.012,00
31	Kecamatan Gending	49.408.377,00	0,00	49.408.377,00	51.087.979,00	(49.408.377,00)	51.087.979,00
32	Kecamatan Kotaanyar	49.328.392,00	0,00	49.328.392,00	57.180.414,00	(49.328.392,00)	57.180.414,00
33	Kecamatan Kraksaan	165.000.631,00	0,00	165.000.631,00	187.648.896,00	(165.000.631,00)	187.648.896,00
34	Kecamatan Krejengan	50.184.702,00	0,00	50.184.702,00	57.457.435,00	(50.184.702,00)	57.457.435,00
35	Kecamatan Krucil	62.001.415,00	0,00	62.001.415,00	65.647.773,00	(62.001.415,00)	65.647.773,00
36	Kecamatan Kuripan	64.548.438,00	0,00	64.548.438,00	64.394.977,00	(64.548.438,00)	64.394.977,00
37	Kecamatan Leces	63.231.371,00	0,00	63.231.371,00	64.579.419,00	(63.231.371,00)	64.579.419,00
38	Kecamatan Lumbang	48.031.133,00	0,00	48.031.133,00	53.707.343,00	(48.031.133,00)	53.707.343,00
39	Kecamatan Maron	52.170.703,00	0,00	52.170.703,00	59.919.691,00	(52.170.703,00)	59.919.691,00
40	Kecamatan Paiton	55.325.076,00	0,00	55.325.076,00	55.387.986,00	(55.325.076,00)	55.387.986,00
41	Kecamatan Pajarakan	60.750.574,00	0,00	60.750.574,00	63.438.157,00	(60.750.574,00)	63.438.157,00
42	Kecamatan Pakuniran	55.384.520,00	0,00	55.384.520,00	65.660.635,00	(55.384.520,00)	65.660.635,00
43	Kecamatan Sukapura	59.752.095,00	0,00	59.752.095,00	56.949.576,00	(59.752.095,00)	56.949.576,00
44	Kecamatan Sumber	66.737.624,00	0,00	66.737.624,00	76.404.357,00	(66.737.624,00)	76.404.357,00
45	Kecamatan Sumberasih	47.748.468,00	0,00	47.748.468,00	59.500.575,00	(47.748.468,00)	59.500.575,00
46	Kecamatan Tegalsiwalan	68.984.442,00	0,00	68.984.442,00	65.661.497,00	(68.984.442,00)	65.661.497,00
47	Kecamatan Tiris	64.972.233,00	0,00	64.972.233,00	70.948.459,00	(64.972.233,00)	70.948.459,00
48	Kecamatan Tongas	52.324.295,00	0,00	52.324.295,00	59.033.067,00	(52.324.295,00)	59.033.067,00
49	Kecamatan Wonomerto	55.640.381,00	0,00	55.640.381,00	65.316.974,00	(55.640.381,00)	65.316.974,00
50	Puskesmas Bago	38.489.175,00	0,00	38.489.175,00	0,00	(38.489.175,00)	0,00
51	Puskesmas Bantaran	101.087.998,00	0,00	101.087.998,00	0,00	(101.087.998,00)	0,00
52	Puskesmas Banyuanyar	49.836.248,00	0,00	49.836.248,00	0,00	(49.836.248,00)	0,00
53	Puskesmas Besuk	70.167.215,00	0,00	70.167.215,00	0,00	(70.167.215,00)	0,00
54	Puskesmas Condong	61.623.673,70	0,00	61.623.673,70	0,00	(61.623.673,70)	0,00
55	Puskesmas Curahtulis	55.867.996,00	0,00	55.867.996,00	0,00	(55.867.996,00)	0,00
56	Puskesmas Dringu	68.541.060,00	0,00	68.541.060,00	0,00	(68.541.060,00)	0,00
57	Puskesmas Gending	149.823.547,00	0,00	149.823.547,00	0,00	(149.823.547,00)	0,00
58	Puskesmas Jabungsisir	163.432.219,00	0,00	163.432.219,00	0,00	(163.432.219,00)	0,00
59	Puskesmas Jorongan	37.014.812,00	0,00	37.014.812,00	0,00	(37.014.812,00)	0,00
60	Puskesmas Klenang Kidul	60.357.821,00	0,00	60.357.821,00	0,00	(60.357.821,00)	0,00
61	Puskesmas Kotaanyar	143.709.198,00	0,00	143.709.198,00	0,00	(143.709.198,00)	0,00
62	Puskesmas Kraksaan	51.024.095,00	0,00	51.024.095,00	0,00	(51.024.095,00)	0,00
63	Puskesmas Krejengan	109.422.950,00	0,00	109.422.950,00	0,00	(109.422.950,00)	0,00
64	Puskesmas Krucil	85.638.674,00	0,00	85.638.674,00	0,00	(85.638.674,00)	0,00
65	Puskesmas Kuripan	58.211.110,00	0,00	58.211.110,00	0,00	(58.211.110,00)	0,00
66	Puskesmas Leces	80.295.926,00	0,00	80.295.926,00	0,00	(80.295.926,00)	0,00
67	Puskesmas Lumbang	64.579.194,00	0,00	64.579.194,00	0,00	(64.579.194,00)	0,00
68	Puskesmas Maron	169.261.660,00	0,00	169.261.660,00	0,00	(169.261.660,00)	0,00
69	Puskesmas Paiton	108.949.065,00	0,00	108.949.065,00	0,00	(108.949.065,00)	0,00
70	Puskesmas Pajarakan	64.881.808,00	0,00	64.881.808,00	0,00	(64.881.808,00)	0,00
71	Puskesmas Pakuniran	68.132.236,00	0,00	68.132.236,00	0,00	(68.132.236,00)	0,00
72	Puskesmas Ranugedang	203.540.895,00	0,00	203.540.895,00	0,00	(203.540.895,00)	0,00
73	Puskesmas Sukapura	62.375.383,00	0,00	62.375.383,00	0,00	(62.375.383,00)	0,00
74	Puskesmas Suko	45.761.353,00	0,00	45.761.353,00	0,00	(45.761.353,00)	0,00
75	Puskesmas Sumber	47.595.723,00	0,00	47.595.723,00	0,00	(47.595.723,00)	0,00
76	Puskesmas Sumberasih	102.900.316,00	0,00	102.900.316,00	0,00	(102.900.316,00)	0,00
77	Puskesmas Tegalsiwalan	90.703.461,00	0,00	90.703.461,00	0,00	(90.703.461,00)	0,00
78	Puskesmas Tiris	74.688.148,74	0,00	74.688.148,74	0,00	(74.688.148,74)	0,00
79	Puskesmas Tongas	115.039.889,00	0,00	115.039.889,00	0,00	(115.039.889,00)	0,00
80	Puskesmas Wangkal	418.725.043,00	0,00	418.725.043,00	0,00	(418.725.043,00)	0,00
81	Puskesmas Wonomerto	106.100.717,00	0,00	106.100.717,00	0,00	(106.100.717,00)	0,00
82	RSUD Tongas	42.215.005,00	0,00	42.215.005,00	0,00	(42.215.005,00)	0,00
83	RSUD Waluyoaji	3.623.713.425,00	0,00	3.623.713.425,00	0,00	(3.623.713.425,00)	0,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Saldo Awal Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Kraksaan						
84	Satuan Polisi Pamong Praja	276.911.907,00	0,00	276.911.907,00	317.698.880,00	(276.911.907,00)	317.698.880,00
85	Sekretariat Daerah	513.687.719,00	0,00	513.687.719,00	638.789.405,00	(513.687.719,00)	638.789.405,00
86	Sekretariat DPRD	100.541.198,00	0,00	100.541.198,00	113.828.402,00	(100.541.198,00)	113.828.402,00
	Jumlah	15.929.894.403,44	(1.231.659,00)	15.928.662.744,44	48.386.886.214,49	(15.928.662.744,44)	48.386.886.214,49

Kenaikan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025 disebabkan karena terdapat pencatatan atas Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah yang penganggarannya dilakukan di Tahun 2026.

- 2) Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp42.644.387.336,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 220 Rincian Saldo Akhir Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	16.618.152.319,58
	2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.468.671,00
	2.1.06.02.01.0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	1.820.471.473,00
	2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	585.080,00
	2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	252.726.123,00
	2.1.06.02.01.0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	13.967.438.917,58
	2.1.06.02.01.0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	540.092.055,00
	2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	25.370.000,00
2	2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	25.886.937.717,00
	2.1.06.02.02.0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	617.217.763,00
	2.1.06.02.02.0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	11.889.700,00
	2.1.06.02.02.0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.100.000,00
	2.1.06.02.02.0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.610.318,00
	2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	11.085.355,00
	2.1.06.02.02.0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	4.293.355,00
	2.1.06.02.02.0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	7.968.355,00
	2.1.06.02.02.0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak	4.350.000,00
	2.1.06.02.02.0049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	500.000,00
	2.1.06.02.02.0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	7.562.552,00
	2.1.06.02.02.0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00
	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	18.888.474,00
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	26.970.650,00
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	258.545.477,00
	2.1.06.02.02.0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.760.000,00
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.333.455,00
	2.1.06.02.02.0064	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	645.000,00
	2.1.06.02.02.0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	240.200,00
	2.1.06.02.02.0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	9.373.000,00
	2.1.06.02.02.0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.998.207,00
	2.1.06.02.02.0937	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	69.799.900,00
	2.1.06.02.02.0992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	180.103.445,00

No	Kode Rekening	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
	2.1.06.02.02.1028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	24.589.702.511,00
3	2.1.06.02.05	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	139.297.300,00
	2.1.06.02.05.0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	138.997.300,00
	2.1.06.02.05.0007	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	300.000,00
Jumlah			42.644.387.336,58

Penjelasan rincian Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut.

- Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan utang belanja asuransi kepada pihak ketiga sebesar Rp29.487.000,00;
- Pada Dinas Perhubungan merupakan utang atas bagi hasil retribusi parkir berlangganan kepada Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Polres sebesar Rp48.930.300,00 periode 16 sampai 31 Desember 2025;
- Pada RSUD Tongas merupakan utang belanja jasa pengolahan darah kepada PMI Kota Probolinggo sebesar Rp60.580.000,00 dan kelebihan pencatatan pendapatan BLUD atas jasa anak magang dari Kemenkes Malang senilai Rp300.000,00 yang akan dilunasi pada periode Praktik Klinik berikutnya.

Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2025 sebesar Rp42.644.387.336,58 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 221 Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Barang	14.322.586.894,51	(93.681.692,51)	14.228.905.202,00	16.618.152.319,58	(14.228.905.202,00)	16.618.152.319,58
	Puskesmas Krucil	78.864.300,00	0,00	78.864.300,00	1.835.629,00	(78.864.300,00)	1.835.629,00
	RSUD Tongas	139.976.043,00	0,00	139.976.043,00	1.234.134.224,00	(139.976.043,00)	1.234.134.224,00
	RSUD Waluyoaji Kraksaan	14.099.890.231,51	(93.681.692,51)	14.006.208.539,00	15.382.182.466,58	(14.006.208.539,00)	15.382.182.466,58
	Puskesmas Dringu	1.958.020,00	0,00	1.958.020,00	0,00	(1.958.020,00)	0,00
	Puskesmas Condong	663.300,00	0,00	663.300,00	0,00	(663.300,00)	0,00
	Puskesmas Pajarakan	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	(1.235.000,00)	0,00
2	Utang Belanja Jasa	8.769.179.916,93	(4.203.350,00)	8.764.976.566,93	25.870.616.796,00	(8.748.655.645,93)	25.886.937.717,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah	16.425.000,00	0,00	16.425.000,00	0,00	(16.425.000,00)	0,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.112.674,00	0,00	24.112.674,00	0,00	(24.112.674,00)	0,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71.465.000,00	0,00	71.465.000,00	0,00	(71.465.000,00)	0,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	422.078.578,00	(4.206.250,00)	417.872.328,00	180.383.445,00	(417.872.328,00)	180.383.445,00
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16.482.500,00	0,00	16.482.500,00	0,00	(16.482.500,00)	0,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	80.811.000,00	0,00	80.811.000,00	141.000,00	(80.811.000,00)	141.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.835.000,00	0,00	48.835.000,00	0,00	(48.835.000,00)	0,00
	Dinas Kesehatan	271.810.545,96	0,00	271.810.545,96	69.799.900,00	(271.810.545,96)	69.799.900,00
	Dinas Ketahanan Pangan	32.424.000,00	0,00	32.424.000,00	592.750,00	(32.424.000,00)	592.750,00
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	0,00
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	200.026.500,00	0,00	200.026.500,00	0,00	(200.026.500,00)	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup	285.047.500,00	0,00	285.047.500,00	156.000,00	(285.047.500,00)	156.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.952.087,00	0,00	120.952.087,00	969.750,00	(120.952.087,00)	969.750,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.260.000,00	0,00	22.260.000,00	0,00	(22.260.000,00)	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71.362.800,00	0,00	71.362.800,00	1.127.850,00	(71.362.800,00)	1.127.850,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.706.007,00	0,00	38.706.007,00	0,00	(38.706.007,00)	0,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	274.886.704,00	0,00	274.886.704,00	821.900,00	(274.886.704,00)	821.900,00
	Dinas Perhubungan	207.342.500,00	0,00	207.342.500,00	0,00	(207.342.500,00)	0,00
	Dinas Perikanan	46.250.500,00	0,00	46.250.500,00	1.162.350,00	(46.250.500,00)	1.162.350,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.650.000,00	0,00	29.650.000,00	396.700,00	(29.650.000,00)	396.700,00
	Dinas Pertanian	100.001.750,00	0,00	100.001.750,00	2.317.550,00	(100.001.750,00)	2.317.550,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.250.000,00	0,00	27.250.000,00	766.750,00	(27.250.000,00)	766.750,00
	Dinas Sosial	26.762.500,00	0,00	26.762.500,00	1.506.500,00	(26.762.500,00)	1.506.500,00
	Dinas Tenaga Kerja	52.422.700,00	0,00	52.422.700,00	481.500,00	(52.422.700,00)	481.500,00
	Inspektorat Daerah	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	3.362.750,00	(21.900.000,00)	3.362.750,00
	Kecamatan Bantaran	8.837.900,00	0,00	8.837.900,00	363.950,00	(8.837.900,00)	363.950,00
	Kecamatan Banyuwangi	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	0,00	(9.625.000,00)	0,00
	Kecamatan Besuk	17.075.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	(17.075.000,00)	0,00
	Kecamatan Dringu	12.363.250,00	0,00	12.363.250,00	493.500,00	(12.363.250,00)	493.500,00
	Kecamatan Gading	9.505.000,00	0,00	9.505.000,00	450.978,00	(9.505.000,00)	450.978,00
	Kecamatan Gending	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	(8.325.000,00)	0,00
	Kecamatan Kotaanyar	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	0,00
	Kecamatan Kraksaan	35.692.500,00	0,00	35.692.500,00	0,00	(35.692.500,00)	0,00
	Kecamatan Krejengan	7.075.000,00	0,00	7.075.000,00	0,00	(7.075.000,00)	0,00
	Kecamatan Krucil	14.250.000,00	0,00	14.250.000,00	0,00	(14.250.000,00)	0,00
	Kecamatan Kuripan	7.375.000,00	0,00	7.375.000,00	0,00	(7.375.000,00)	0,00
	Kecamatan Leces	15.575.000,00	0,00	15.575.000,00	0,00	(15.575.000,00)	0,00
	Kecamatan Lumbang	12.225.000,00	0,00	12.225.000,00	0,00	(12.225.000,00)	0,00
	Kecamatan Maron	14.042.500,00	0,00	14.042.500,00	0,00	(14.042.500,00)	0,00
	Kecamatan Paiton	13.475.000,00	0,00	13.475.000,00	0,00	(13.475.000,00)	0,00
	Kecamatan Pajarak	8.425.000,00	0,00	8.425.000,00	0,00	(8.425.000,00)	0,00
	Kecamatan Pakuniran	14.130.000,00	0,00	14.130.000,00	0,00	(14.130.000,00)	0,00
	Kecamatan Sukapura	7.275.000,00	0,00	7.275.000,00	0,00	(7.275.000,00)	0,00
	Kecamatan Sumber	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	0,00
	Kecamatan Sumberasih	19.825.000,00	0,00	19.825.000,00	0,00	(19.825.000,00)	0,00
	Kecamatan Tegalsiwalan	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	257.550,00	(9.500.000,00)	257.550,00
	Kecamatan Tiris	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	(5.950.000,00)	0,00
	Kecamatan Tongas	15.050.703,00	0,00	15.050.703,00	0,00	(15.050.703,00)	0,00
	Kecamatan Wonomerto	12.303.668,00	0,00	12.303.668,00	0,00	(12.303.668,00)	0,00
	Puskesmas Bago	9.237.067,00	0,00	9.237.067,00	139.017.118,00	(9.237.067,00)	139.017.118,00
	Puskesmas Bantaran	11.305.087,00	0,00	11.305.087,00	345.608.380,00	(11.305.087,00)	345.608.380,00
	Puskesmas Banyuwangi	13.495.456,00	0,00	13.495.456,00	178.102.327,00	(13.495.456,00)	178.102.327,00
	Puskesmas Besuk	11.231.240,00	0,00	11.231.240,00	138.136.482,00	(11.231.240,00)	138.136.482,00
	Puskesmas Condong	15.580.777,11	0,00	15.580.777,11	183.632.116,00	(15.580.777,11)	183.632.116,00
	Puskesmas Curah Tulis	2.936.302,00	0,00	2.936.302,00	139.322.853,00	(2.936.302,00)	139.322.853,00
	Puskesmas Dringu	15.888.647,00	0,00	15.888.647,00	204.454.722,00	(15.888.647,00)	204.454.722,00
	Puskesmas Gending	42.010.955,00	0,00	42.010.955,00	228.699.698,00	(42.010.955,00)	228.699.698,00
	Puskesmas Glagah	4.764.947,00	0,00	4.764.947,00	212.410.105,00	(4.764.947,00)	212.410.105,00
	Puskesmas Jabungsir	28.829.446,00	0,00	28.829.446,00	54.116.520,00	(28.829.446,00)	54.116.520,00
	Puskesmas Jorong	3.121.918,00	0,00	3.121.918,00	132.007.687,00	(3.121.918,00)	132.007.687,00
	Puskesmas Klenang Kidul	16.219.114,00	0,00	16.219.114,00	124.946.488,40	(16.219.114,00)	124.946.488,40
	Puskesmas Kotaanyar	30.971.082,00	0,00	30.971.082,00	160.261.004,00	(30.971.082,00)	160.261.004,00
	Puskesmas Kraksaan	21.710.737,00	0,00	21.710.737,00	250.138.731,00	(21.710.737,00)	250.138.731,00
	Puskesmas Krejengan	28.533.743,00	0,00	28.533.743,00	224.991.182,00	(28.533.743,00)	224.991.182,00
	Puskesmas Krucil	18.617.828,00	0,00	18.617.828,00	203.276.574,00	(18.617.828,00)	203.276.574,00
	Puskesmas Kuripan	11.482.709,00	0,00	11.482.709,00	196.842.090,00	(11.482.709,00)	196.842.090,00
	Puskesmas Leces	18.528.790,00	0,00	18.528.790,00	269.000.956,00	(18.528.790,00)	269.000.956,00
	Puskesmas Lumbang	14.168.014,00	0,00	14.168.014,00	179.220.684,00	(14.168.014,00)	179.220.684,00
	Puskesmas Maron	78.418.695,00	0,00	78.418.695,00	457.098.451,00	(78.418.695,00)	457.098.451,00
	Puskesmas Paiton	25.913.061,00	0,00	25.913.061,00	363.810.942,00	(25.913.061,00)	363.810.942,00
	Puskesmas Pajarak	24.407.150,00	0,00	24.407.150,00	91.056.500,00	(24.407.150,00)	91.056.500,00
	Puskesmas Pakuniran	21.751.184,00	0,00	21.751.184,00	160.061.382,00	(21.751.184,00)	160.061.382,00
	Puskesmas Ranugedang	53.908.758,00	0,00	53.908.758,00	286.445.559,00	(53.908.758,00)	286.445.559,00
	Puskesmas Sukapura	3.822.421,00	0,00	3.822.421,00	172.704.002,00	(3.822.421,00)	172.704.002,00
	Puskesmas Suko	8.667.950,00	0,00	8.667.950,00	66.040.419,00	(8.667.950,00)	66.040.419,00
	Puskesmas Sumber	9.986.428,00	0,00	9.986.428,00	128.048.560,00	(9.986.428,00)	128.048.560,00
	Puskesmas Sumberasih	26.399.643,00	0,00	26.399.643,00	301.882.183,00	(26.399.643,00)	301.882.183,00
	Puskesmas Tegalsiwalan	12.439.946,00	0,00	12.439.946,00	189.489.754,00	(12.439.946,00)	189.489.754,00
	Puskesmas Tiris	32.199.819,46	0,00	32.199.819,46	389.615.705,00	(32.199.819,46)	389.615.705,00
	Puskesmas Tongas	6.359.694,00	0,00	6.359.694,00	176.505.908,00	(6.359.694,00)	176.505.908,00
	Puskesmas Wangkal	68.158.629,00	0,00	68.158.629,00	346.396.891,00	(68.158.629,00)	346.396.891,00
	Puskesmas Wonomerto	51.145.866,00	0,00	51.145.866,00	242.700.288,00	(51.145.866,00)	242.700.288,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	RSUD Tongas	1.756.867.757,40	0,00	1.756.867.757,40	4.728.187.152,00	(1.756.867.757,40)	4.728.187.152,00
	RSUD Waluyoaji Kraksaan	2.756.949.742,00	2.900,00	2.756.952.642,00	13.719.874.725,60	(2.740.631.721,00)	13.736.195.646,60
	Satuan Polisi Pamong Praja	402.550.000,00	0,00	402.550.000,00	0,00	(402.550.000,00)	0,00
	Sekretariat Daerah	189.933.476,00	0,00	189.933.476,00	206.765.904,00	(189.933.476,00)	206.765.904,00
	Sekretariat DPRD	82.049.471,00	0,00	82.049.471,00	14.194.080,00	(82.049.471,00)	14.194.080,00
3	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	185.017.300,00	0,00	185.017.300,00	138.997.300,00	(184.717.300,00)	139.297.300,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28.566.000,00	0,00	28.566.000,00	29.487.000,00	(28.566.000,00)	29.487.000,00
	Dinas Perhubungan	101.271.300,00	0,00	101.271.300,00	48.930.300,00	(101.271.300,00)	48.930.300,00
	RSUD Tongas	55.180.000,00	0,00	55.180.000,00	60.580.000,00	(54.880.000,00)	60.880.000,00
	Jumlah	23.276.784.111,44	(97.885.042,51)	23.178.899.068,93	42.627.766.415,58	(23.162.278.147,93)	42.644.387.336,58

Kenaikan Utang Belanja Jasa Tahun 2025 disebabkan karena terdapat perubahan kodefikasi Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN yang belum terakomodir di SIPD Tahun 2025 yang sebelumnya terdapat pada rekening Utang Belanja Pegawai menjadi Utang Belanja Jasa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3) Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.537.240.000,00 terdiri dari.

Tabel 222 Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	3.537.240.000,00	0,00	3.537.240.000,00
	Jumlah	0,00	3.537.240.000,00	0,00	3.537.240.000,00

Penjelasan dari rincian Utang Belanja Modal Tanah terdiri dari.

Tabel 223 Rincian Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Lembaga	Nilai Pasar Hasil Appraisal (Rp)	Total Ganti Rugi (Rp)	Nomor Putusan Pengadilan	Sudah Dibayarkan (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)
1	SDN Banyuanyar Kidul	302.800.000,00	302.000.000,00	48/Pdt.G/2024/PN.Krs	100.000.000,00	202.000.000,00
2	SDN Curahsawo	4.228.600.000,00	3.970.240.000,00	68/Pdt.G/2023/PN.Krs	635.000.000,00	3.335.240.000,00
	Jumlah	4.531.400.000,00	4.272.240.000,00		735.000.000,00	3.537.240.000,00

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat ganti rugi Tanah pada SDN Condong III dan SDN Talkandang yang belum diakui utang karena pembayarannya akan dianggarkan pada APBD Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 224 Rincian Nilai Hasil Appraisal dan Ganti Rugi Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Lembaga	Nilai Pasar Hasil Appraisal (Rp)	Total Ganti Rugi (Rp)	Nomor Putusan Pengadilan	Sudah Dibayarkan (Rp)	Utang Belanja Modal (Rp)
1	SDN Condong III	503.000.000,00	483.920.000,00	21/Pdt.G/2025/PN.Krs	Belum ada pembayaran	Belum ada pembayaran
2	SDN Talkandang	398.672.000,00	146.200.000,00	53/Pdt.G/2025/PN.Krs	Belum ada pembayaran	Belum ada pembayaran
	Jumlah	901.672.000,00	630.120.000,00			

- 4) Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.646.279,00 terdiri dari.

Tabel 225 Rekapitulasi Mutasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Condong	0,00	9.646.279,00	0,00	9.646.279,00
Jumlah		0,00	9.646.279,00	0,00	9.646.279,00

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Condong merupakan biaya jasa pengawasan kontruksi atas pembangunan paving di halaman puskesmas sebesar Rp9.646.279,00.

D.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
	1.000.377.114,75	1.788.591.427,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.000.377.114,75 mengalami penurunan sebesar 44,07% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 226 Rekapitulasi Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.755.396.273,00	50.635.443,75	1.806.031.716,75	940.811.800,00	(1.755.396.273,00)	991.447.243,75
2	RSUD Waluyoaji Kraksaan	33.195.154,00	0,00	33.195.154,00	8.307.217,00	(32.572.500,00)	8.929.871,00
Jumlah		1.788.591.427,00	50.635.443,75	1.839.226.870,75	949.119.017,00	(1.787.968.773,00)	1.000.377.114,75

- (1) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 sebesar Rp991.447.243,75 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 227 Rekapitulasi Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Koreksi Utang Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Setelah Koreksi (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
					Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	1.755.396.273,00	50.635.443,75	1.806.031.716,75	940.811.800,00	(1.755.396.273,00)	991.447.243,75
Jumlah		1.755.396.273,00	50.635.443,75	1.806.031.716,75	940.811.800,00	(1.755.396.273,00)	991.447.243,75

Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp991.447.243,75 merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak digunakan lagi dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan, apabila Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan atau penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari.

- Koreksi Saldo Utang BKK Tahun Sebelumnya (TA 2021 s/d TA 2024) yang akan disetor ke RKUD Provinsi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp50.567.443,75;
- Koreksi Saldo Utang BKK Tahun Sebelumnya (TA 2021 s/d TA 2024) yang akan disetor ke RKUD Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp68.000,00;

- Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan sebesar Rp51.313.900,00;
- Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp552.900.000,00;
- Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp66.097.900,00;
- Bantuan Keuangan Persatuan Perangkat Desa sebesar Rp270.500.000,00.

- (2) Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Waluyoaji Kraksaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.929.871,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 228 Rekapitulasi Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Waluyoaji per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	33.195.154,00	8.307.217,00	(32.572.500,00)	8.929.871,00
	Jumlah	33.195.154,00	8.307.217,00	(32.572.500,00)	8.929.871,00

D.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	<u>Per 31 Desember 2025 (Rp)</u>	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u>
	0,00	0,00

Saldo akhir Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.3 Ekuitas	<u>Per 31 Desember 2025 (Rp)</u>	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u>
	3.043.157.332.175,38	2.955.689.014.944,49

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.043.157.332.175,38.

D.4 Kewajiban dan Ekuitas	<u>Per 31 Desember 2025 (Rp)</u>	<u>Per 31 Desember 2024 (Rp)</u>
	3.143.860.326.125,70	3.001.423.063.772,21

Saldo akhir Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.143.860.326.125,70.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
E.1 Kegiatan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu

entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.1	Pendapatan Operasional	2.244.863.130.967,10	2.149.515.908.764,91	4,44

Pendapatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp2.244.863.130.967,10 naik 4,44% dari Tahun 2024 berdasarkan kelompok rekening terdiri dari.

**Tabel 229 Rincian Pendapatan Operasional
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	451.080.331.339,87	355.359.625.424,76	26,94
2	Pendapatan Transfer	1.745.556.136.672,00	1.718.028.100.090,00	1,60
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	48.226.662.955,23	76.128.183.250,15	(36,65)
	Jumlah	2.244.863.130.967,10	2.149.515.908.764,91	4,44

Penjelasan secara terperinci untuk masing-masing kelompok Pendapatan di atas adalah sebagai berikut.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	451.080.331.339,87	355.359.625.424,76	26,94

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp451.080.331.339,87 naik 26,94% dari Tahun 2024. Rincian dan uraian lebih lanjut atas Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel 230 Rincian Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Daerah	162.132.255.303,89	106.132.575.525,55	52,76
2	Retribusi Daerah	265.693.821.808,32	25.618.381.154,66	937,12
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.948.415.848,34	6.906.966.783,06	0,60
4	Lain-Lain PAD yang Sah	16.305.838.379,32	216.701.701.961,49	(92,48)
	Jumlah	451.080.331.339,87	355.359.625.424,76	26,94

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	162.132.255.303,89	106.132.575.525,55	52,76

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp162.132.255.303,89 naik 52,76% dari Tahun 2024 terdiri dari.

**Tabel 231 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Pajak Reklame	1.790.492.335,00	1.910.300.621,00	(119.808.286,00)	1.153.320.220,00
2	Pajak Air Tanah	982.365.557,80	1.006.650.901,30	(24.285.343,50)	1.249.803.409,60
3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.973.737.389,60	2.985.737.389,60	(12.000.000,00)	8.202.009.713,25

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.031.088.481,00	23.484.775.183,00	2.546.313.298,00	23.807.531.542,00
5	BPHTB-Pemberian Hak Baru	16.986.393.667,00	16.986.393.667,00	0,00	18.110.289.075,00
6	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	10.134.346.846,04	9.908.367.159,30	225.979.686,74	8.559.990.620,70
7	PBJT-Tenaga Listrik-LO	38.538.192.666,00	38.450.103.758,00	88.088.908,00	39.810.802.514,00
8	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	3.354.831.651,45	3.897.887.798,00	(543.056.146,55)	4.463.741.261,00
9	PBJT-Jasa Parkir-LO	167.423.435,00	171.125.234,00	(3.701.799,00)	226.757.924,00
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	302.244.775,00	320.455.315,00	(18.210.540,00)	548.309.241,00
11	Opsen PKB	42.973.657.400,00	42.973.657.400,00	0,00	0,00
12	Opsen BBNKB	17.897.481.100,00	17.897.481.100,00	0,00	0,00
Jumlah		162.132.255.303,89	159.992.935.526,20	2.139.319.777,69	106.132.555.520,55

Pajak Daerah-LO ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau bukti transaksi penerimaan pendapatan lainnya yang setara. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat diterbitkan ketetapan. Metode penetapan Pajak Daerah dilakukan dengan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan metode *Self Assessment* adalah.

1. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);
2. PBJT-Jasa Parkir;
3. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan;
4. PBJT-Jasa Perhotelan;
5. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
6. PBJT-Tenaga Listrik;
7. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan metode *Official Assessment* adalah.

1. Pajak ABT (Air Bawah Tanah);
2. Pajak Reklame;
3. PBBP2;
4. Opsen PKB;
5. Opsen BBNKB.

Penjelasan Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing rekening Pendapatan Pajak adalah sebagai berikut.

(1) Pajak Reklame – LO

Berikut tabel perhitungan Pajak Reklame – LO.

Tabel 232 Perhitungan Pajak Reklame – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pajak Reklame	1.910.300.621,00
+/- Penambahan Piutang 2025	67.834.000,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(18.815.000,00)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(669.225.921,83)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2024	500.398.635,83
Berdasarkan LO Pajak Reklame	1.790.492.335,00

- Penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp67.834.000,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran piutang sebesar Rp18.815.000,00 yang diterima Tahun 2025;
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp500.398.635,83 berasal dari pembayaran Pajak Reklame Tahun 2024 yang masa berlakunya melewati Tahun 2024;

- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp669.225.921,83 berasal dari pembayaran Pajak Reklame Tahun 2025 yang masa berlakunya melewati Tahun 2025;

Realisasi penerimaan Pajak Reklame-LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.910.300.621,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Pajak Reklame-LO sebesar Rp1.790.492.335,00 terdapat selisih sebesar Rp119.808.286,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Pajak Reklame-LO	Rp1.790.492.335,00
Pajak Reklame-LRA	(Rp1.910.300.621,00)
Selisih	(Rp119.808.286,00)

Penjelasan Selisih :	
Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp1.873.594.621,00
Realisasi SKP 2025	(Rp1.805.760.621,00)
Pelunasan Piutang Pajak Reklame yang diterima di Tahun 2025	(Rp18.815.000,00)
Pendapatan diterima dimuka 2024	Rp500.398.635,83
Pendapatan diterima dimuka 2025	(Rp669.225.921,83)
Selisih	(Rp119.808.286,00)
Total Selisih	Rp0,00

(2) Pajak Air Tanah – LO

Berikut tabel perhitungan Pajak Air Tanah – LO.

Tabel 233 Perhitungan Pajak Air Tanah – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pajak Air Tanah	1.006.650.901,30
+/- Penambahan Piutang 2025	68.379.926,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(91.255.839,50)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(1.409.430,00)
Berdasarkan LO Pajak Air Tanah	982.365.557,80

- Penambahan piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp68.379.926,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp91.255.839,50 yang diterima di Tahun 2025.
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp1.409.430,00 berasal dari pembayaran Pajak Air Tanah Tahun 2025 yang masa berlakunya melewati Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah-LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.006.650.901,30 dibandingkan Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah-LO sebesar Rp982.365.557,80 terdapat selisih sebesar (Rp24.285.343,50) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pajak Air Tanah-LO	Rp982.365.557,80
Pajak Air Tanah-LRA	(Rp1.006.650.901,30)
Selisih	(Rp24.285.343,50)

Penjelasan Selisih :	
Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp978.953.971,40
Realisasi SKP 2025	(Rp910.574.045,40)
Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah yang diterima di Tahun 2025	(Rp91.255.839,50)
Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(Rp1.409.430,00)
Selisih	(Rp24.285.343,50)
Total Selisih	Rp0,00

(3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO

Berikut tabel perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO.

Tabel 234 Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pajak Minerba	2.985.737.389,60
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(12.000.000,00)
Berdasarkan LO Pajak Minerba	2.973.737.389,60

- Pembayaran Piutang Pajak Minerba sebesar Rp12.000.000,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Pajak Minerba–LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.985.737.389,60 bila dibandingkan dengan Realisasi penerimaan Pajak Minerba–LO sebesar Rp2.973.737.389,60 terdapat selisih sebesar (Rp12.000.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pajak Minerba–LO	Rp2.973.737.389,60	
Pajak Minerba–LRA	(Rp2.985.737.389,60)	
Selisih		(Rp12.000.000,00)
Penjelasan Selisih :		
Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp2.973.737.389,60	
Realisasi SKP 2025	(Rp2.973.737.389,60)	
Pelunasan Piutang Pajak Minerba yang diterima Tahun 2025	(Rp12.000.000,00)	
Selisih		(Rp12.000.000,00)
Total Selisih		Rp0,00

(4) Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan – LO

Berikut tabel perhitungan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan – LO

Tabel 235 Perhitungan PBBP2 – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBBP2	23.484.775.183,00
+/- Penambahan Piutang 2025	3.439.816.316,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(893.503.018,00)
Berdasarkan LO PBBP2	26.031.088.481,00

- Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.439.816.316,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran piutang sebesar Rp893.503.018,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi Penerimaan PBBP2–LRA Tahun 2025 sebesar Rp23.484.775.183,00 dibandingkan Realisasi penerimaan PBBP2–LO sebesar Rp26.031.088.481,00 terdapat selisih sebesar (Rp2.546.313.298,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

PBBP2–LO	Rp26.031.088.481,00	
PBBP2–LRA	(Rp23.484.775.183,00)	
Selisih		Rp2.546.313.298,00
Penjelasan Selisih :		
Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp26.031.088.481,00	
Realisasi SKP 2025	(Rp22.591.272.165,00)	
Pelunasan Piutang PBBP2 yang diterima di Tahun 2025	(Rp893.503.018,00)	

Selisih	(Rp2.546.313.298,00)
Total Selisih	Rp0,00

(5) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)–LO sebesar Rp16.986.393.667,00 merupakan perhitungan hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menjadi ketetapan BPHTB Tahun 2025. Realisasi BPHTB–LRA dan realisasi BPHTB–LO Tahun 2025 tidak terdapat selisih.

(6) PBJT-Makanan dan/atau Minuman – LO

Berikut tabel perhitungan PBJT-Makanan dan/atau Minuman – LO.

**Tabel 236 Perhitungan PBJT-Makanan dan/atau Minuman – LO
Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.908.367.159,30
+/- Penambahan Piutang 2025	219.747.875,82
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(47.804.882,00)
+/- Koreksi	54.036.692,92
Berdasarkan LO PBJT-Makanan dan/atau Minuman	10.134.346.846,04

- Penambahan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025 sebesar Rp219.747.875,82 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman Tahun 2024 sebesar Rp47.804.882,00 yang diterima di Tahun 2025.
- Koreksi atas SKP yang telah ditetapkan Tahun 2025 sebesar Rp54.036.692,92.

Realisasi penerimaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman–LRA Tahun 2025 sebesar Rp9.908.367.159,30 dibandingkan Realisasi penerimaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman–LO sebesar Rp10.134.346.846,04 terdapat selisih sebesar (Rp225.979.686,74) dengan penjelasan sebagai berikut.

PBJT-Makanan dan/atau Minuman–LO	Rp10.134.346.846,04
PBJT-Makanan dan/atau Minuman–LRA	(Rp9.908.367.159,30)
Selisih	Rp225.979.686,74

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp10.134.346.846,04	
Realisasi SKP 2025	(Rp9.860.562.277,30)	
Pelunasan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang diterima Tahun 2025	(Rp47.804.882,00)	
Selisih		(Rp225.979.686,74)
Total Selisih		Rp0,00

(7) PBJT-Tenaga Listrik – LO

Berikut tabel perhitungan PBJT-Tenaga Listrik – LO.

Tabel 237 Perhitungan PBJT-Tenaga Listrik – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBJT-Tenaga Listrik	38.450.103.758,00
+/- Penambahan Piutang 2025	3.490.841.728,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(3.402.752.820,00)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LO PBJT-Tenaga Listrik	38.538.192.666,00

- Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp3.490.841.728,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang sebesar Rp3.402.752.820,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan PBJT-Tenaga Listrik-LRA Tahun 2025 sebesar Rp38.450.103.758,00 dibandingkan Realisasi penerimaan PBJT-Tenaga Listrik-LO sebesar Rp38.538.192.666,00 terdapat selisih sebesar (Rp88.088.908,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

PBJT-Tenaga Listrik-LO	Rp38.538.192.666,00
PBJT-Tenaga Listrik-LRA	(Rp38.450.103.758,00)
Selisih	Rp88.088.908,00

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp38.538.192.666,00
Realisasi SKP 2025	(Rp35.047.350.938,00)
Pelunasan Piutang PBJT-Tenaga Listrik yang diterima di Tahun 2025	(Rp3.402.752.820,00)
Selisih	(Rp88.088.908,00)
Total Selisih	Rp0,00

(8) PBJT-Jasa Perhotelan – LO

Berikut tabel perhitungan PBJT-Jasa Perhotelan – LO.

Tabel 238 Perhitungan PBJT-Jasa Perhotelan – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBJT-Jasa Perhotelan	3.897.887.798,00
+/- Penambahan Piutang 2025	292.902.029,45
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(835.958.176,00)
Berdasarkan LO PBJT-Jasa Perhotelan	3.354.831.651,45

- Penambahan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan Tahun 2025 sebesar Rp292.902.029,45 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp835.958.176,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Perhotelan-LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.897.887.798,00 bila dibandingkan dengan Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Perhotelan-LO sebesar Rp3.354.831.651,45 terdapat selisih sebesar Rp543.056.146,55 dengan penjelasan sebagai berikut.

PBJT-Jasa Perhotelan-LO	Rp3.354.831.651,45
PBJT-Jasa Perhotelan-LRA	(Rp3.897.887.798,00)
Selisih	(Rp543.056.146,55)

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp3.354.831.651,45
Realisasi SKP 2025	(Rp3.061.929.622,00)
Pelunasan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan yang diterima Tahun 2025	(Rp835.958.176,00)
Selisih	(Rp543.056.146,55)
Total Selisih	Rp0,00

(9) PBJT-Jasa Parkir – LO

Berikut tabel perhitungan PBJT-Jasa Parkir – LO.

Tabel 239 Perhitungan PBJT-Jasa Parkir – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBJT-Jasa Parkir	171.125.234,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(3.701.799,00)
Berdasarkan LO PBJT-Jasa Parkir	167.423.435,00

- Pembayaran Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp3.701.799,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Parkir-LRA Tahun 2024 sebesar Rp171.125.234,00 dibandingkan Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Parkir-LO sebesar Rp167.423.435,00 terdapat selisih sebesar Rp3.701.799,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

PBJT-Jasa Parkir-LO	Rp167.423.435,00
PBJT-Jasa Parkir-LRA	(Rp171.125.234,00)
Selisih	(Rp3.701.799,00)

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp167.423.435,00
Realisasi SKP 2025	(Rp167.423.435,00)
Pelunasan Piutang PBJT-Jasa Parkir yang diterima di Tahun 2025	(Rp3.701.799,00)
Selisih	(Rp3.701.799,00)
Total Selisih	Rp0,00

(10) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan – LO

Berikut tabel perhitungan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan – LO.

Tabel 240 Perhitungan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	320.455.315,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(18.210.540,00)
Berdasarkan LO PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	302.244.775,00

- Penambahan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp18.210.540,00.

Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA Tahun 2025 sebesar Rp320.455.315,00 dibandingkan Realisasi penerimaan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO sebesar Rp302.244.775,00 terdapat selisih sebesar Rp18.210.540,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	Rp302.244.775,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LRA	(Rp320.455.315,00)
Selisih	(Rp18.210.540,00)

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Pajak 2025	Rp302.244.775,00
Realisasi SKP 2025	(Rp302.244.775,00)
Pelunasan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan yang diterima di Tahun 2025	(Rp 18.210.540,00)
Selisih	(Rp 18.210.540,00)
Total Selisih	Rp0,00

(11) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO

Realisasi Opsen PKB sebesar Rp42.973.657.400,00 merupakan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB provinsi dengan mekanisme pembagian sebesar 66% dari pajak terutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Penerimaan Opsen PKB berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Opsen PKB–LRA dan Realisasi Opsen PKB–LO Tahun 2025 tidak terdapat selisih.

(12) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO

Realisasi Opsen BBNKB sebesar Rp17.897.481.100,00 merupakan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari BBNKB provinsi dengan mekanisme pembagian sebesar 66% dari pajak terutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Penerimaan Opsen BBNKB berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Opsen BBNKB–LRA dan Realisasi Opsen BBNKB–LO Tahun 2025 tidak terdapat selisih.

E.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		265.693.821.808,32	25.618.381.154,66	937,12

Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2025 sebesar Rp265.693.821.808,32 naik 937,12% dari Tahun 2024 terdiri dari.

**Tabel 241 Rincian Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
Retribusi Jasa Umum		251.342.975.247,32	246.124.554.843,98	5.218.420.403,34	17.716.742.241,66
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	235.918.110.921,00	231.187.103.137,00	4.731.007.784,00	3.447.318.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	2.191.400.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.049.187.333,34	7.000.669.000,00	48.518.333,34	6.136.780.708,33
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.698.307.000,00	5.319.237.714,00	379.069.286,00	5.638.165.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	197.595.833,33
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	105.482.500,00
7	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.677.369.992,98	2.617.544.992,98	59.825.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha		10.341.848.009,00	10.490.988.825,00	(149.140.816,00)	6.009.964.500,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	393.003.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	119.694.000,00	119.694.000,00	0,00	145.348.500,00
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	486.572.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	23.150.000,00
6	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	136.900.000,00	136.900.000,00	0,00	156.525.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.600.628.600,00	3.600.628.600,00	0,00	4.538.711.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	263.765.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	559.204.000,00	559.204.000,00	0,00	0,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	350.336.500,00	350.336.500,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.538.484.909,00	5.687.625.725,00	(149.140.816,00)	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	4.008.998.552,00	4.008.998.552,00	0,00	1.891.674.413,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.771.406.952,00	3.771.406.952,00	0,00	1.853.280.413,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	237.591.600,00	237.591.600,00	0,00	38.394.000,00
	Jumlah	265.693.821.808,32	260.624.542.220,98	5.069.279.587,34	25.618.381.154,66

Penjelasan Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing rekening Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Berikut tabel perhitungan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO.

Tabel 242 Perhitungan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Retribusi Pelayanan Kesehatan	231.187.103.137,00
+/- Penambahan Piutang 2025	21.705.802.622,00
+/- Penambahan Piutang 2024	(17.081.711.062,00)
+/- Koreksi Penambahan Piutang	106.916.224,00
Berdasarkan LO Retribusi Pelayanan Kesehatan	235.918.110.921,00

- Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp21.705.802.622,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dari BPJS atas Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang Tahun 2024 sebesar Rp17.081.711.062,00 yang diterima pada Tahun 2025;
- Koreksi Penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp106.916.224,00 karena terdapat perubahan dalam pengkodean kode diagnosa dari hasil verifikasi pasca klaim BPJS.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan–LRA Tahun 2025 sebesar Rp231.187.103.137,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO sebesar Rp235.918.110.921,00 terdapat selisih sebesar (Rp4.731.007.784,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Retribusi Pelayanan Kesehatan–LO	Rp235.918.110.921,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan–LRA	(Rp231.187.103.137,00)
Selisih	Rp4.731.007.784,00

Penjelasan Selisih :

Saldo Piutang Tahun 2025	(Rp21.705.802.622,00)
Saldo Piutang Tahun 2024	Rp17.081.711.062,00
Koreksi Saldo Awal Piutang	(Rp106.916.224,00)
Selisih	(Rp4.731.007.784,00)
Total Selisih	Rp0,00

2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO

Berikut tabel perhitungan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LO.

Tabel 243 Perhitungan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.000.669.000,00
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(3.976.387.083,33)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2024	4.024.905.416,67
Berdasarkan LO Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.049.187.333,34

- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp4.024.905.416,67 berasal dari pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2024 yang masa berlakunya melewati Tahun 2024;
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp3.976.387.083,33 berasal dari pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025 yang masa berlakunya melewati Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA Tahun 2025 sebesar Rp7.000.669.000,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO sebesar Rp7.049.187.333,34 terdapat selisih sebesar (Rp48.518.333,34) dengan penjelasan sebagai berikut.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LO	Rp7.049.187.333,34
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum–LRA	(Rp7.000.669.000,00)
Selisih	Rp48.518.333,34

Penjelasan Selisih :

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025	(Rp3.976.387.083,33)
Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024	Rp4.024.905.416,67
Selisih	Rp48.518.333,34
Total Selisih	Rp0,00

3) Retribusi Pelayanan Pasar – LO

Berikut tabel perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar – LO.

Tabel 244 Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Retribusi Pelayanan Pasar	5.319.237.714,00
+/- Penambahan Piutang 2025	609.335.286,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(230.266.000,00)
Berdasarkan LO Retribusi Pelayanan Pasar	5.698.307.000,00

- Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sebesar Rp609.335.286,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang sebesar Rp230.266.000,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar–LRA Tahun 2025 sebesar Rp5.319.237.714,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar–LO sebesar Rp5.698.307.000,00 terdapat selisih sebesar Rp379.069.286,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Retribusi Pelayanan Pasar–LO	Rp5.698.307.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar–LRA	(Rp5.319.237.714,00)
Selisih	Rp379.069.286,00

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2025	Rp5.696.903.000,00
Realisasi SKRD 2025	(Rp5.087.567.714,00)
Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang diterima di Tahun 2025	(Rp230.266.000,00)
Selisih	Rp379.069.286,00
Total Selisih	Rp0,00

4) Retribusi Pelayanan Kebersihan – LO

Berikut tabel perhitungan Retribusi Pelayanan Kebersihan – LO.

**Tabel 245 Perhitungan Retribusi Pelayanan Kebersihan – LO
Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.617.544.992,98
+/- Penambahan Piutang 2025	68.075.000,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(8.250.000,00)
Berdasarkan LO Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.677.369.992,98

- Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp68.075.000,00 sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- Pembayaran Piutang sebesar Rp8.250.000,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan–LRA Tahun 2025 sebesar Rp2.617.544.992,98 dibandingkan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan–LO sebesar Rp2.677.369.992,98 terdapat selisih sebesar (Rp59.825.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Retribusi Pelayanan Kebersihan –LO	Rp 2.677.369.992,98	
Retribusi Pelayanan Kebersihan –LRA	(Rp2.617.544.992,98)	
Selisih		Rp59.825.000,00
Penjelasan Selisih :		
Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2025	Rp2.611.519.992,98	
Realisasi SKRD 2025	(Rp2.543.444.992,98)	
Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan yang Diterima Tahun 2025	(Rp8.250.000,00)	
Selisih		Rp59.825.000,00
Total Selisih		Rp0,00

5) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO

Berikut tabel perhitungan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO.

**Tabel 246 Perhitungan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.687.625.725,00
+/- Penambahan Piutang 2025	170.587.084,00
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2024	33.058.166,67
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(352.786.066,67)
Berdasarkan LO Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.538.484.909,00

- Penambahan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 sebesar Rp170.587.084,00;
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp33.058.166,67 berasal dari pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024 yang masa berlakunya melewati Tahun 2024.
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp352.786.066,67 berasal dari pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 yang masa berlakunya melewati Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah–LRA Tahun 2025 sebesar Rp5.687.625.725,00 dibandingkan realisasi penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah–LO sebesar Rp5.538.484.909,00 terdapat selisih sebesar Rp149.140.816,00 dengan

penjelasan sebagai berikut.

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah–LO	Rp5.538.484.909,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah–LRA	(Rp5.687.625.725,00)
Selisih	(Rp149.140.816,00)

Penjelasan Selisih :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah 2025	Rp5.516.459.709,00
Realiasi SKRD 2025	(Rp5.345.872.625,00)
Pendapatan diterima dimuka 2024	Rp33.058.166,67
Pendapatan diterima dimuka 2025	(Rp352.786.066,67)
Selisih	(Rp149.140.816,00)
Total Selisih	Rp0,00

	Pendapatan Hasil	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.1.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.948.415.848,34	6.906.966.783,06	0,60

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO Tahun 2025 sebesar Rp6.948.415.848,34 naik 0,60% dari Tahun 2024 terdiri dari.

Tabel 247 Rincian Perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	BPD Jatim	6.889.709.848,34	6.889.709.848,34	0,00	6.849.411.783,06
2	BPR Jatim	58.706.000,00	58.706.000,00	0,00	57.555.000,00
	Jumlah	6.948.415.848,34	6.948.415.848,34	0,00	6.906.966.783,06

Pendapatan dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berasal dari *cash dividend* pada BPD Jatim sebesar Rp6.889.709.848,34 dan pada BPR Jatim sebesar Rp58.706.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	16.305.838.379,32	216.701.701.961,49	(92,48)

Lain-Lain PAD yang Sah–LO Tahun 2025 sebesar Rp16.305.838.379,32 turun (92,48%) dari Tahun 2024 terdiri dari.

Tabel 248 Rincian Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	1.440.136.500,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	39.097.000,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan	1.097.087.043,00	1.088.849.543,00	8.237.500,00	2.042.514.882,66
4	Jasa Giro	1.013.902.803,08	1.013.902.803,08	0,00	1.330.200.665,04
5	Pendapatan Bunga	3.682.876.712,01	3.615.068.492,76	67.808.219,25	4.608.794.619,66
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.826.774.904,74	2.826.774.904,74	0,00	753.130.353,96
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	177.665.848,02	177.665.848,02	0,00	232.806.598,00
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	138.941.181,96	138.941.181,96	0,00	220.465.966,23

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	146.608.309,30	89.475.398,00	57.132.911,30	201.376.511,60
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.420.750,00	6.420.750,00	0,00	4.780.400,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	186.210.772,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	6.534.141.958,30	6.534.141.958,30	0,00	733.785.540,00
13	Pendapatan BLUD	669.318.868,91	635.652.868,91	33.666.000,00	204.908.402.152,34
14	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	810.000,00	(810.000,00)	0,00
Jumlah		16.305.838.379,32	16.139.803.748,77	166.034.630,55	216.701.701.961,49

Penjelasan Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing rekening Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Berikut tabel perhitungan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO.

**Tabel 249 Perhitungan Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan – LO
Tahun 2025**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	1.088.849.543,00
+/- Penambahan Piutang 2025	28.800.000,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(52.000.000,00)
Pendapatan diterima dimuka 2024	99.166.666,67
Pendapatan diterima dimuka 2025	(67.729.166,67)
Berdasarkan LO Pemanfaatan BMD yang tidak di pisahkan	1.097.087.043,00

- Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp28.800.000,00;
- Pembayaran Piutang sebesar Rp52.000.000,00 yang diterima Tahun 2025.
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp99.166.666,67 berasal dari pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan yang masa berlakunya melewati Tahun 2024.
- Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp67.729.166,67 berasal dari pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan yang masa berlakunya melewati Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan–LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.088.849.543,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan–LO sebesar Rp1.097.087.043,00 terdapat selisih sebesar Rp8.237.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan–LO	Rp1.097.087.043,00
Hasil Pemanfaatana BMD yang tidak dipisahkan –LRA	(Rp1.088.849.543,00)
Selisih	Rp8.237.500,00

Penjelasan Selisih :	
Penambahan Piutang 2025	Rp28.800.000,00
Pembayaran Piutang diterima 2025	(Rp52.000.000,00)
Pendapatan diterima dimuka 2024	Rp99.166.666,67
Pendapatan diterima dimuka 2025	(Rp67.729.166,67)
Selisih	Rp8.237.500,00
Total Selisih	Rp0,00

2) Pendapatan Bunga – LO

Berikut tabel perhitungan Pendapatan Bunga – LO.

Tabel 250 Perhitungan Pendapatan Bunga – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan Bunga	3.615.068.492,76
+/- Penambahan Piutang 2025	67.808.219,25
Berdasarkan LO Pendapatan Bunga	3.682.876.712,01

- Penambahan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp67.808.219,25,00;

Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga-LRA Tahun 2025 sebesar Rp3.615.068.492,76 dibandingkan Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp3.682.876.712,01 terdapat selisih sebesar Rp67.808.219,25 dengan penjelasan sebagai berikut.

Pendapatan Bunga-LO	Rp3.682.876.712,01	
Pendapatan Bunga-LRA	(Rp3.615.068.492,76)	
Selisih		Rp67.808.219,25
Penjelasan Selisih :		
Penambahan Piutang 2025	Rp67.808.219,25	
Selisih		Rp67.808.219,25
Total Selisih		Rp0,00

3) Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO

Berikut tabel perhitungan Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO.

Tabel 251 Perhitungan Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan Denda Pajak Daerah	89.475.398,00
+/- Penambahan Piutang 2025	76.668.239,48
+/- Pembayaran Piutang	(59.744.778,00)
+/- Koreksi Penambahan Piutang	40.209.449,82
Berdasarkan LO Pendapatan Denda Pajak Daerah	146.608.309,30

- Penambahan Potensi Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp76.668.239,48. Terdapat koreksi tambah piutang Tahun 2023-2024 sebesar Rp40.209.449,82;
- Pembayaran Piutang sebesar Rp59.744.778,00 atas Piutang Tahun 2024 yang diterima pembayarannya Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA Tahun 2025 sebesar Rp89.475.398,00 dibandingkan Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak-LO sebesar Rp146.608.309,30 terdapat selisih sebesar (Rp57.132.911,30) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	Rp146.608.309,30	
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	(Rp89.475.398,00)	
Selisih		Rp57.132.911,30
Penjelasan Selisih :		
Penambahan Piutang 2025	Rp76.668.239,48	
Pembayaran Piutang diterima 2025	(Rp59.744.778,00)	
Koreksi Penambahan Piutang	Rp40.209.449,82	
Selisih		Rp57.132.911,30
Total Selisih		Rp0,00

4) Pendapatan BLUD – LO

Berikut tabel perhitungan Pendapatan BLUD – LO.

Tabel 252 Perhitungan Pendapatan BLUD – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan BLUD	635.652.868,91
+/- Piutang 2025	8.866.000,00
+/- Piutang 2024	(200.000,00)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(56.250.000,00)
+/- Pendapatan Diterima Dimuka 2024	81.250.000,00
Berdasarkan LO Pendapatan BLUD	669.318.868,91

- Saldo Piutang BLUD Tahun 2025 sebesar Rp8.866.000,00 merupakan pendapatan BLUD atas pembayaran sewa lahan RSUD Waluyoaji untuk tempat parkir;
- Saldo Piutang BLUD Tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 merupakan pendapatan BLUD atas pembayaran sewa gedung RSUD Waluyoaji untuk kantin;
- Saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 sebesar Rp56.250.000,00 merupakan pendapatan BLUD atas pembayaran sewa gedung RSUD Waluyoaji untuk Kantor Kas BPD Jawa Timur selama 10 Tahun terhitung dari 14 April 2018 sampai dengan 15 April 2028;
- Saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 sebesar Rp81.250.000,00 merupakan pendapatan BLUD atas pembayaran sewa gedung RSUD Waluyoaji untuk Kantor Kas BPD Jawa Timur selama 10 Tahun terhitung dari 14 April 2018 sampai dengan 15 April 2028.

Realisasi penerimaan Pendapatan BLUD–LRA Tahun 2025 sebesar Rp635.652.868,91 dibandingkan realisasi penerimaan pendapatan BLUD–LO sebesar Rp669.318.868,91 terdapat selisih sebesar (Rp33.666.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pendapatan BLUD–LO	Rp669.318.868,91
Pendapatan BLUD–LRA	(Rp635.652.868,91)
Selisih	Rp33.666.000,00

Penjelasan Selisih :

Saldo Piutang BLUD Tahun 2025	(Rp8.866.000,00)
Saldo Piutang BLUD Tahun 2024	Rp200.000,00
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Rp56.250.000,00
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka 2025	(Rp81.250.000,00)
Selisih	(Rp33.666.000,00)
Total Selisih	Rp0,00

5) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO

Berikut tabel perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO.

Tabel 253 Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025 (Rp)
Berdasarkan LRA Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir	810.000,00
+/- Penambahan Piutang 2025	0,00
+/- Pembayaran Piutang Tahun 2025	(810.000,00)
Berdasarkan LO Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir	0,00

- Pembayaran Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp810.000,00 yang diterima Tahun 2025.

Realisasi penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LRA Tahun 2025 sebesar Rp810.000,000 dibandingkan Realisasi penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO sebesar Rp0,00 terdapat selisih sebesar (Rp810.000,00) dengan penjelasan sebagai berikut.

Pendapatan Bunga KMK-LO	Rp0,00
Pendapatan Bunga KMK-LRA	(Rp810.000,00)
Selisih	(Rp810.000,00)
Penjelasan Selisih :	
Penambahan Piutang 2025	Rp0,00
Pembayaran Piutang 2025	(Rp810.000,00)
Selisih	(Rp810.000,00)
Total Selisih	Rp0,00

E.1.1.2 Pendapatan Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	1.746.496.948.472,00	1.718.028.100.090,00	1,66

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.746.496.948.472,00 naik 1,66% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 254 Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.615.504.213.922,00	1.619.557.025.922,00	(4.052.812.000,00)	1.519.027.176.784,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.167.295.000,00	322.738.040.000,00	(315.570.745.000,00)	6.053.857.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.825.439.550,00	123.825.439.550,00	0,00	192.947.066.306,00
Jumlah		1.746.496.948.472,00	2.066.120.505.472,00	(319.623.557.000,00)	1.718.028.100.090,00

Penjelasan Perbedaan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dari masing-masing rekening Pendapatan Transfer sebagai berikut.

E.1.1.2.1 Pemerintahan Pusat-Dana Perimbangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	1.615.504.213.922,00	1.519.027.176.784,00	6,35

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.615.504.213.922,00 naik 6,35% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 255 Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO dan LRA
Tahun 2025 dan Tahun 2024**

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	133.215.464.300,00	135.267.028.300,00	(2.051.564.000,00)	111.043.648.000,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	31.498.938.000,00	33.500.186.000,00	(2.001.248.000,00)	29.734.259.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.075.371.349.176,00	1.075.371.349.176,00	0,00	1.043.467.100.603,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.171.016.405,00	10.171.016.405,00	0,00	61.416.967.828,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	365.247.446.041,00	365.247.446.041,00	0,00	273.365.201.353,00

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
	Jumlah	1.615.504.213.922,00	1.619.557.025.922,00	(4.052.812.000,00)	1.519.027.176.784,00

Perbedaan sebesar (Rp4.052.812.000,00) antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LRA dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan–LO	Rp1.615.504.213.922,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan–LRA	(Rp1.619.557.025.922,00)
Selisih	(Rp4.052.812.000,00)

Penjelasan Selisih :

TDF Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024	(Rp2.051.564.000,00)
TDF Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2024	(Rp2.001.248.000,00)
Selisih	
Total Selisih	(Rp4.052.812.000,00)
	Rp0,00

E.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		7.167.295.000,00	6.053.857.000,00	18,39

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO Tahun 2025 sebesar Rp7.167.295.000,00 naik 18,39% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 256 Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dan LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Dana Desa	0,00	315.570.745.000,00	(315.570.745.000,00)	0,00
2	Insentif Fiskal	7.167.295.000,00	7.167.295.000,00	0,00	6.053.857.000,00
	Jumlah	7.167.295.000,00	322.738.040.000,00	(315.570.745.000,00)	6.053.857.000,00

Perbedaan sebesar (Rp315.570.745.000,00) antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LO	Rp7.167.295.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–LRA	(Rp322.738.040.000,00)
Selisih	(Rp315.570.745.000,00)

Penjelasan Selisih :

Dana Desa yang bersumber dari APBN	(Rp315.570.745.000,00)
Selisih	(Rp315.570.745.000,00)
Total Selisih	Rp0,00

E.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintahan Antar Daerah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		122.884.627.750,00	192.947.066.306,00	(36,31)

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah–LO Tahun 2025 sebesar Rp122.884.627.750,00, turun (36,31%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 257 Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	112.999.635.550,00	112.999.635.550,00	0,00	170.492.858.100,00
2	Bantuan Keuangan	9.884.992.200,00	10.825.804.000,00	(940.811.800,00)	22.454.208.206,00
Jumlah		122.884.627.750,00	123.825.439.550,00	(940.811.800,00)	192.947.066.306,00

Perbedaan sebesar (Rp940.811.800,00) antara Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Transfer Antar Daerah–LO	Rp122.884.627.750,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah–LRA	(Rp123.825.439.550,00)
Selisih	(Rp 940.811.800,00)

Penjelasan Selisih :

Silpa Bantuan Keuangan Khusus yang dikembalikan pada Tahun 2026	(Rp940.811.800,00)
Selisih	(Rp940.811.800,00)
Total Selisih	Rp0,00

E.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		48.226.662.955,23	76.128.183.250,15	(36,65)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO Tahun 2025 sebesar (Rp48.226.662.955,23) turun (36,65%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 258 Rincian Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025		Perbedaan (Rp)	Tahun 2024
		Laporan Operasional (LO) (Rp)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Rp)		Laporan Operasional (LO) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	47.585.803.955,23	0,00	(47.585.803.955,23)	75.869.170.350,15
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	640.859.000,00	640.859.000,00	0,00	259.012.900,00
Jumlah		48.226.662.955,23	640.859.000,00	(47.585.803.955,23)	76.128.183.250,15

Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO Tahun 2025 sebagai berikut.

E.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		47.585.803.955,23	75.869.170.350,15	(37,28)

Pendapatan Hibah–LO Tahun 2025 sebesar Rp47.585.803.955,23 atau turun (37,28%) dari Tahun 2024. Perbedaan sebesar (Rp28.283.366.394,92) antara Pendapatan Hibah–LO dan Pendapatan Hibah–LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Hibah–LO	Rp47.585.803.955,23
Pendapatan Hibah–LRA	Rp0,00
Selisih	Rp47.585.803.955,23

Penjelasan Selisih :

Pendapatan Hibah Non APBD	Rp47.585.803.955,23
Selisih	Rp47.585.803.955,23
Total Selisih	Rp0,00

Rincian Pendapatan Hibah Non APBD yang diterima Tahun 2025 terdapat pada **Lampiran.12.**

E.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan			
	Sesuai dengan Ketentuan			
	Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		640.859.000,00	259.012.900,00	147,42

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 sebesar Rp640.859.000,00.

E.1.2	Beban Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		2.269.919.673.820,46	2.218.534.567.563,93	2,32

Beban Operasional Tahun 2025 sebesar Rp2.269.919.673.820,46 naik 2,32% dari Tahun 2024 berdasarkan kelompok rekening terdiri dari.

Tabel 259 Rincian Beban Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.118.613.756.210,05	999.456.041.107,81	11,92
2	Beban Barang	221.967.166.003,13	208.860.946.440,86	6,28
3	Beban Jasa	355.255.745.715,09	307.728.971.326,36	15,44
4	Beban Pemeliharaan	25.978.984.458,27	28.902.724.047,00	(10,12)
5	Beban Perjalanan Dinas	39.525.990.610,00	75.392.512.641,00	(47,57)
6	Beban Bunga	0,00	0,00	-
7	Beban Subsidi	831.792.000,00	2.834.616.000,00	(70,66)
8	Beban Hibah	87.054.332.773,00	168.751.789.911,00	(48,41)
9	Beban Bantuan Sosial	15.646.257.300,00	7.756.432.100,00	101,72
10	Beban Penyisihan Piutang & Investasi Non Permanen	2.645.761.051,69	3.444.005.068,61	(23,18)
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.283.428.680,23	229.933.178.921,29	(4,63)
12	Beban Transfer	176.271.538.000,00	185.042.615.500,00	(4,74)
13	Beban Tak Terduga	6.844.921.019,00	430.734.500,00	1.489,13
	Jumlah	2.269.919.673.820,46	2.218.534.567.563,93	2,32

Beban Tahun 2025 sebesar Rp2.269.919.673.820,46 merupakan pengeluaran Beban pada masing-masing SKPD yang digunakan untuk operasional rutin maupun pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

E.1.2.1	Beban Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		1.118.613.756.210,05	999.456.041.107,81	11,92%

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp1.118.613.756.210,05 naik 11,92% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 260 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok PNS	305.315.962.014,00	325.234.916.507,00	(6,12)
2	Beban Gaji Pokok PPPK	175.023.295.708,00	152.756.128.120,00	14,58
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	28.611.467.811,00	30.648.837.214,00	(6,65)
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	16.588.264.800,00	14.739.016.390,00	12,55
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.132.145.000,00	6.521.808.594,00	(5,97)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	20.433.345.000,00	21.843.990.000,00	(6,46)
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	370.000,00	9.065.000,00	(95,92)
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.025.047.540,00	3.280.555.000,00	(7,79)
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.243.691.667,00	8.904.309.950,00	15,04
10	Beban Tunjangan Beras PNS	15.612.158.760,00	16.857.800.670,00	(7,39)
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	11.621.002.035,00	10.244.822.880,00	13,43
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.201.158.420,00	1.436.807.747,00	331,59
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.861.727,00	4.249.489,00	(9,12)
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.685.982,00	3.218.973,00	14,51
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.094.078.317,00	21.356.335.305,00	(5,91)
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.711.409.878,00	7.485.086.778,00	43,10

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
17	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	624.872.786,00	665.470.908,00	(6,10)
18	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	362.429.040,00	322.134.604,00	12,51
19	Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.874.630.286,00	1.996.424.979,00	(6,10)
20	Beban luran Jaminan Kematian PPPK	1.087.247.424,00	966.367.375,00	12,51
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.834.803.220,00	102.428.122.298,00	(35,73)
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	493.788.145,50	444.897.126,00	10,99
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.291.014.083,00	3.267.364.665,00	0,72
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	154.970.744,00	182.807.456,00	(15,23)
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	37.971.132.973,50	207.760.149,00	18.176,43
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	45.067.512,00	0,00	-
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	35.215.471,00	0,00	-
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	83.920.994,00	0,00	-
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	474.900.273,00	0,00	-
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	539.433.492,00	0,00	-
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.611.399.768,00	0,00	-
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.478.543.202,00	0,00	-
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	609.314.579,00	0,00	-
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	107.821.250,00	(100,00)
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	212.680.836,17	0,00	-
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	5.035.335,00	0,00	-
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.294.191,00	0,00	-
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.108.380,50	0,00	-
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	111.677.176,75	0,00	-
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	86.505.792,17	0,00	-
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	4.309.148,22	0,00	-
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Daerah-Retribusi Pelayanan Kebersihan	105.472.999,30	0,00	-
43	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	19.947.014,00	0,00	-
44	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	11.826.692,20	0,00	-
45	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Daerah-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	198.120.946,69	0,00	-
46	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	144.128.811.900,00	0,00	-

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
47	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	240.000.000,00	0,00	-
48	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.529.385.667,00	0,00	-
49	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	115.924.485.700,00	0,00	-
50	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.191.015.000,00	0,00	-
51	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	1.108.929.850,00	(100,00)
52	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	15.805.825,00	(100,00)
53	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	94.835.000,00	(100,00)
54	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	3.161.158,00	(100,00)
55	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	39.341.602,00	(100,00)
56	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	546.249.600,00	(100,00)
57	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	238.906.026,00	(100,00)
58	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	29.557.634,00	(100,00)
59	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	283.518.306,00	(100,00)
60	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	427.711.567,00	(100,00)
61	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	334.141.109,00	(100,00)
62	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	965.762.832,00	(100,00)
63	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	202.852.317,50	(100,00)
64	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	159.037.734,00	(100,00)
65	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	364.016.441,00	(100,00)
66	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	11.610.000,00	(100,00)
67	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	7.516.728,00	(100,00)
68	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	4.891.050,00	(100,00)
69	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	11.605.938,30	(100,00)
70	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	15.852.301,50	(100,00)
71	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	8.051.368,00	(100,00)
72	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	110.100,00	(100,00)
73	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	35.988.808,00	(100,00)
74	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0,00	539.500,00	(100,00)
75	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	9.108.348,70	(100,00)
76	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	237.506.014,00	(100,00)
77	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	46.801.951,00	(100,00)
78	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	126.705.539,00	(100,00)
79	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	217.000,00	(100,00)
80	Beban TPG PNSD	0,00	118.847.012.648,00	(100,00)
81	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	594.500.000,00	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
82	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.512.647.086,00	(100,00)
83	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.848.103.500,00	(100,00)
84	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	337.353.000,00	(100,00)
85	Beban TPG PPPK	0,00	29.146.950.300,00	(100,00)
86	Beban Tamsil Guru PPPK	0,00	4.659.000.000,00	(100,00)
87	Beban Uang Representasi DPRD	1.107.960.000,00	1.100.820.000,00	0,65
88	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	137.571.000,00	136.657.500,00	0,67
89	Beban Tunjangan Beras DPRD	143.147.520,00	143.845.120,00	(0,48)
90	Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	94.794.000,00	0,75
91	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.606.542.000,00	1.596.189.000,00	0,65
92	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00	139.004.250,00	9,09
93	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.761.200.000,00	0,67
94	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.455.300.000,00	51,52
95	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	473.196.676,00	427.156.380,00	10,78
96	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	96.383.520,00	97.109.870,00	(0,75)
97	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.304.748,00	3.938.368,00	9,30
98	Beban Jaminan Kematian DPRD	5.380.932,00	4.922.960,00	9,30
99	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.832.138.000,00	5.603.000.000,00	4,09
100	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.375.600.000,00	6.072.000.000,00	5,00
101	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	412.965.000,00	(100,00)
102	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	43.358.640,00	0,00	-
103	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.006.000,00	0,00	-
104	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.780.000,00	18.900.000,00	348,57
105	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.372.960,00	0,00	-
106	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	684.107,00	828.520,00	(17,43)
107	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	840,00	0,00	-
108	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.430.160,00	756.000,00	486,00
109	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00	-
110	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00	-
111	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.947.289,00	1.837.500,00	386,93
112	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.921.133,00	1.431.500,00	383,49
113	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.771.988,00	7.000.000,00	96,74
114	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	95.819.369,00	14.319.067,00	569,17
115	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	86.484.565,00	25.000.000,00	245,94
116	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	323.032.152,00	75.696.119,00	326,75
117	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	169.798.404,00	0,00	-
118	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	71.575.180,00	0,00	-
119	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	6.445.200,00	(100,00)
120	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	4.321.200,00	(100,00)
121	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	47.034.049,08	9.899.300,00	375,12
122	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	200.501,00	(100,00)
123	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	942.759,00	(100,00)
124	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.182.399,06	586.494,00	101,60
125	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Parkir	0,00	510.575,00	(100,00)
126	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat	304.000,00	60.000,00	406,67

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Penginapan/Pesanggrahan/Vila			
127	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	626.115,50	355.500,00	76,12
128	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.224.372,25	10.348.910,00	153,40
129	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	439.840,00	(100,00)
130	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	19.242.125,08	0,00	-
131	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	966.231,93	0,00	-
132	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	24.767.484,70	0,00	-
133	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	4.684.498,64	0,00	-
134	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2.675.491,60	0,00	-
135	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.273.860,65	0,00	-
136	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	360.360.000,00	9,09
137	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	653.469.948,00	550.000.000,00	18,81
138	Beban Pegawai BLUD	77.449.149.619,56	77.124.882.065,81	0,42
Jumlah		1.118.613.756.210,05	999.456.041.107,81	11,92

Rincian perhitungan atas Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 261 Rincian Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2025

Belanja Pegawai			1.086.155.532.740,00
1	Belanja Gaji Pokok PNS	305.315.962.014,00	
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	175.023.295.708,00	
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.611.467.811,00	
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.588.264.800,00	
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.132.145.000,00	
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.433.345.000,00	
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	370.000,00	
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.025.047.540,00	
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.243.691.667,00	
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.612.158.760,00	
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.621.002.035,00	
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.201.158.420,00	
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.861.727,00	
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.685.982,00	
15	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.127.063.219,00	
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.711.409.878,00	
17	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	624.872.786,00	
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	362.429.040,00	
19	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.874.630.286,00	
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.087.247.424,00	
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	67.939.301.417,00	
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	486.782.740,50	
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.110.470.677,00	
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	156.382.183,00	
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	35.126.751.723,50	
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	41.932.329,00	
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	32.951.693,00	
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	65.349.142,00	
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	389.939.696,00	
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea	513.251.376,00	

Belanja Pegawai			1.086.155.532.740,00
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.776.383.988,00	
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	575.423.938,00	
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsean Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	244.750.503,00	
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	86.768.505,00	
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	58.174.155,00	
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	107.821.250,00	
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	219.801.582,17	
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2.699.231,00	
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	6.617.444,00	
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.820.874,00	
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	98.815,00	
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.380.643,00	
43	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	485.100,00	
44	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	5.900.166,50	
45	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	192.948.460,75	
46	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.550.494,00	
47	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	113.152.693,17	
48	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.082.902,22	
49	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	45.343.790,30	
50	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.819.125,00	
51	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.749.999,20	
52	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	139.196.863,69	
53	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	123.479.190.200,00	
54	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	220.000.000,00	
55	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.692.947.762,00	
56	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	99.300.600.000,00	
57	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.964.015.000,00	
58	Belanja Uang Representasi DPRD	1.107.960.000,00	
59	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	137.571.000,00	
60	Belanja Tunjangan Beras DPRD	143.147.520,00	
61	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	
62	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.606.542.000,00	
63	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.641.000,00	
64	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	
65	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	
66	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	473.196.676,00	
67	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.383.520,00	
68	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.304.748,00	
69	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.380.932,00	
70	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.832.138.000,00	
71	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.375.600.000,00	
72	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.358.640,00	
73	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.006.000,00	
74	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.780.000,00	

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

Belanja Pegawai			1.086.155.532.740,00
75	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.372.960,00	
76	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	684.107,00	
77	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	840,00	
78	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.430.160,00	
79	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	
80	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	9.873.438,00	
82	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	7.648.188,00	
83	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.196.250,00	
84	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	115.811.197,00	
85	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	113.000.000,00	
86	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	368.390.357,00	
87	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J.PKB)],	141.801.175,00	
88	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor [(J.BBNKB)],	60.273.479,00	
89	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	9.667.800,00	
90	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.481.800,00	
91	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	32.259.343,83	
92	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	300.750,00	
93	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	737.320,00	
94	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	662.374,00	
95	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.010,00	
96	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.602.300,00	
97	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	114.000,00	
98	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	937.178,50	
99	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	35.279.668,25	
100	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	729.860,00	
101	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	19.409.393,83	
102	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	678.270,78	
103	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	10.647.254,70	
104	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	427.500,00	
105	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.248.492,80	
106	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	32.595.765,31	
107	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	
108	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	653.469.948,00	
109	Belanja Pegawai BLUD	84.191.832.564,00	
Mutasi Tambah			48.386.886.214,49
-	Penambahan Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	48.386.886.214,49	
Mutasi Kurang			(15.928.662.744,44)
-	Pelunasan Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	(15.928.662.744,44)	
Jumlah Beban Pegawai			1.118.613.756.210,05

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
E.1.2.2 Beban Barang	221.967.166.003,13	208.860.946.440,86	6,28

Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp221.967.166.003,13 naik 6,28% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 262 Rincian Beban Barang Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.712.126.069,00	10.259.609.024,00	(34,58)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.822.494.457,57	2.123.072.472,00	32,94
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.554.675.929,00	7.282.770.651,00	17,46
4	Beban Bahan-Bahan Baku	109.789.743,00	0,00	-
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	799.904.834,00	190.400.814,00	320,12
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.477.630,00	22.549.540,00	114,98
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	328.990.213,00	343.849.965,00	(4,32)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	11.030.000,00	14.739.150,00	(25,17)
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.323.130.835,99	7.453.939.987,62	(28,59)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	672.080.359,00	550.736.105,00	22,03
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	19.476.621,00	34.541.845,00	(43,61)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.109.879,00	2.409.001,00	1.191,40
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	1.557.000,00	1.949.700,00	(20,14)
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.006.502,00	7.095.820,00	(1,26)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.677.300,00	1.140.000,00	485,73
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.499.000,00	1.565.000,00	(4,22)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	29.528.299,00	0,00	-
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.993.859.165,87	8.014.353.278,00	(0,26)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.812.859.794,61	3.832.223.569,20	(0,51)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.518.235.081,62	10.904.451.309,00	5,63
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	196.129.302,00	197.935.687,00	(0,91)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.499.257.380,58	3.315.536.381,50	5,54
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.777.126.518,23	3.718.611.453,83	28,47
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.811.830.993,05	1.604.298.477,00	12,94
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.256.560.627,00	3.267.675.128,00	30,26
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	298.995.474,00	223.903.415,00	33,54
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.044.343.968,00	423.071.319,00	146,85
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.324.253.282,04	8.430.200.289,25	46,19
29	Beban Obat-Obatan-Obat	75.950.300.186,99	62.759.818.055,96	21,02
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	437.635.265,00	279.654.500,00	56,49
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.214.907.584,00	6.882.206.379,00	(24,23)
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.262.426.885,00	16.475.498.432,00	(49,85)
33	Beban Natura dan Pakan-Natura	11.793.067.549,58	16.822.975.313,50	(29,90)
34	Beban Natura dan Pakan-Pakan	101.596.545,00	206.473.900,00	(50,79)
35	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	478.960.552,00	602.923.500,00	(20,56)
36	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40.346.775.995,00	30.069.343.929,00	34,18
37	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	767.854.042,00	454.337.560,00	69,01
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	600.858.675,00	217.393.000,00	176,39
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	382.832.500,00	759.476.000,00	(49,59)
40	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.799.998,00	0,00	-
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	99.655.343,00	26.600.000,00	274,64
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	160.054.792,00	35.944.000,00	345,29
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.150.000,00	16.145.000,00	6,22
44	Beban Pakaian Penyelamatan	3.160.000,00	2.370.000,00	33,33
45	Beban Pakaian Siaga	29.805.934,00	17.500.000,00	70,32
46	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	5.800.000,00	(100,00)
47	Beban Pakaian Adat Daerah	46.825.000,00	288.870.000,00	(83,79)
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	103.275.932,00	92.000.000,00	12,26
49	Beban Pakaian Olahraga	77.440.088,00	133.976.000,00	(42,20)
50	Beban Pakaian Paskibraka	42.819.000,00	66.023.600,00	(35,15)
51	Beban Barang Sampel Pangan	6.805.000,00	0,00	-

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
52	Beban Komponen-Komponen Peralatan	28.050.980,00	47.870.100,00	(41,40)
53	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	101.898,00	50.000,00	103,80
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	18.300.000,00	(100,00)
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	158.717.790,00	(100,00)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	0,00	157.750.000,00	(100,00)
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	0,00	16.800.000,00	(100,00)
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	0,00	23.500.000,00	(100,00)
	Jumlah	221.967.166.003,13	208.860.946.440,86	6,28

Rincian perhitungan atas Beban Barang adalah sebagai berikut.

Tabel 263 Rincian Perhitungan Beban Barang Tahun 2025

Saldo Awal Persediaan		38.425.175.632,90
- Bahan Bangunan dan Konstruksi	261.415.705,00	
- Bahan Kimia	366.845.917,00	
- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	84.896.350,00	
- Bahan Lainnya	1.735.153.194,53	
- Suku Cadang Alat Angkutan	44.722.685,00	
- Suku Cadang Alat Kedokteran	1.526.500,00	
- Alat Tulis Kantor	470.750.564,50	
- Kertas dan Cover	171.464.890,00	
- Bahan Cetak	572.455.412,75	
- Benda Pos	2.522.523,00	
- Bahan Komputer	864.647.199,00	
- Perabot Kantor	417.295.480,27	
- Alat Listrik	186.197.660,00	
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	742.812.383,75	
- Obat	27.202.683.547,60	
- Obat-obatan Lainnya	7.000,00	
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.058.897.884,00	
- Natura	236.470.736,50	
- Natura dan Pakan Lainnya	4.410.000,00	
Mutasi Tambah		256.006.370.665,11
- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.884.978.004,00	
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.956.807.441,00	
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.192.498.204,00	
- Belanja Bahan-Bahan Baku	1.752.000,00	
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	661.892.534,00	
- Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	18.281.550,00	
- Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.905.000,00	
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.723.865.502,00	
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	628.850.030,00	
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	288.600,00	
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.109.879,00	
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.239.202,00	
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	29.528.299,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.350.515.008,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.226.284.303,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.611.324.720,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.596.558.807,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.989.058.688,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	730.631.060,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.837.172.227,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	167.138.550,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.033.971.362,00	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	859.140.373,00	

Saldo Awal Persediaan		38.425.175.632,90
-	Belanja Obat-Obat-Obatan	7.819.135.356,00
-	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	679.437.755,00
-	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	632.391.080,00
-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.689.754.782,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.195.232.270,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	100.309.170,00
-	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	573.612.552,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.389.849.655,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	640.763.692,00
-	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.995.500,00
-	Belanja Pakaian Siaga	11.994.993,00
-	Belanja Barang Sampel Pangan	6.805.000,00
-	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	101.898,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	3.100.000,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	505.050,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	359.507.224,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	3.750.000,00
-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	2.380.950,00
-	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	989.733.621,00
-	Belanja Barang dari Dana BOK	7.384.530.853,00
-	Belanja Barang BLUD	62.416.053.120,00
-	Belanja Barang BOS	19.106.721.638,00
-	Penerimaan Hibah Barang Persediaan (Pendapatan Hibah Non-APBD)	30.308.389.357,42
-	Reklas Masuk dari Aset Tetap (KIB B) ke Beban Barang	606.187.855,00
-	Reklas Masuk dari Aset Tetap (KIB C) ke Beban Barang	178.528.263,00
-	Reklas Masuk dari Aset Tetap (KIB E) ke Beban Barang	3.075.000,00
-	Reklas Masuk dari Aset Lain-lain	14.234.999.315,47
-	Reklas Masuk dari Extracompitable (KIB B) ke Beban Barang	167.388.592,82
-	Reklas Masuk dari Extracompitable (KIB C) ke Beban Barang	112.756.521,96
-	Reklas Masuk dari Extracompitable (KIB D) ke Beban Barang	15.419.953,86
-	Reklas Masuk dari Extracompitable (KIB E) ke Beban Barang	7.994.707.404,00
-	Persediaan Dari Utang Tahun Berjalan	16.618.152.319,58
-	Pelunasan Piutang atas Pengembalian Belanja Barang	308.580,00
Mutasi Kurang		(72.464.380.294,88)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Aset tetap (KIB B)	(479.582.444,11)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Aset tetap (KIB C)	(755.144.050,00)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Aset tetap (KIB D)	(618.782.561,89)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Aset tetap (KIB E)	(127.238.250,00)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Beban Jasa	(2.997.000,00)
-	Reklas Keluar dari Beban Barang ke Beban Pemeliharaan	(207.623.800,00)
-	Defisit Dari Persediaan Kadaluararsa/Rusak/Usang/Mati/Tidak Digunakan	(603.068.860,28)
-	Pelunasan Utang Belanja Barang Tahun 2024	(14.228.905.202,00)
-	Koreksi Kurang Saldo Awal 2025	(2.631.760,56)
-	Saldo Akhir Persediaan Tahun 2025	(55.438.406.366,04)
Jumlah		221.967.166.003,13

E.1.2.3	Beban Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		355.255.745.715,09	307.728.971.326,36	15,44

Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp355.255.745.715,09 naik 15,44% dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 264 Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	4.482.800,00	(100,00)
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.669.798.600,00	6.570.633.300,00	108,04
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	132.300.000,00	252.900.000,00	(47,69)
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	70.000.000,00	1.050.000,00	6.566,67
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.100.000,00	9.900.000,00	(38,38)
6	Beban Honorarium Rohaniwan	4.000.000,00	7.450.000,00	(46,31)
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	108.425.000,00	(100,00)
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	32.383.146.353,00	33.000.326.026,00	(1,87)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	354.300.000,00	379.200.000,00	(6,57)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	429.400.000,00	0,00	-
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	14.491.606.294,00	21.566.868.093,30	(32,81)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.412.030.082,00	1.174.582.859,00	20,22
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.646.736.706,00	1.434.223.915,00	84,54
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.990.225.000,00	6.287.120.000,00	11,18
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	156.000.000,00	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	562.100.000,00	751.810.000,00	(25,23)
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	392.650.000,00	560.150.000,00	(29,90)
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	465.500.000,00	41.600.000,00	1.018,99
19	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	18.000.000,00	(100,00)
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	230.501.800,00	35.500.000,00	549,30
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	55.411.724.865,00	51.539.770.627,00	7,51
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	57.630.000,00	53.860.000,00	7,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.408.203.410,60	14.374.751.127,00	(20,64)
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.138.596.320,00	3.430.212.980,00	(37,65)
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.272.978.487,00	6.249.023.176,00	64,39
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.696.961.095,00	554.801.000,00	386,11
27	Beban Jasa Tenaga Supir	311.954.214,00	80.480.299,00	287,62
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	347.650.000,00	254.250.000,00	36,74
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	72.539.890,00	78.250.000,00	(7,30)
30	Beban Jasa Audit/Surveilliance ISO	585.383.000,00	276.148.250,00	111,98
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.956.000,00	30.564.000,00	(31,44)
32	Beban Jasa Tata Rias	6.400.000,00	5.215.000,00	22,72
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.754.000,00	131.769.500,00	(78,18)
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	236.598.699,00	344.293.709,00	(31,28)
35	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.559.400,00	0,00	-
36	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	49.219.792,00	0,00	-
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	49.558.170,00	0,00	-
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	6.759.467.363,00	4.392.391.500,00	53,89
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	40.000.000,00	(25,00)
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	79.768.100,00	32.283.880,00	147,08
41	Beban Jasa Kalibrasi	531.342.268,00	641.857.868,00	(17,22)
42	Beban Jasa Pengolahan Sampah	527.980.957,00	427.202.835,00	23,59
43	Beban Jasa Pengukuran Tanah	729.000,00	7.196.000,00	(89,87)
44	Beban Jasa Jalan/Tol	14.537.000,00	10.531.000,00	38,04
45	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.079.516.312,00	1.796.966.100,00	15,72
46	Beban Tagihan Telepon	455.339.849,00	1.960.609.782,00	(76,78)
47	Beban Tagihan Air	425.298.205,00	437.845.914,00	(2,87)
48	Beban Tagihan Listrik	23.880.137.821,00	23.004.120.526,00	3,81
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	190.605.000,00	277.651.706,00	(31,35)
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.209.061.872,00	2.768.184.837,00	15,93
51	Beban Paket/Pengiriman	14.691.880,00	6.691.941,00	119,55

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
52	Beban Penambahan Daya	12.145.650,00	0,00	-
53	Beban Registrasi/Keanggotaan	5.945.815,00	5.145.000,00	15,56
54	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	851.767.380,00	575.296.682,00	48,06
55	Beban Pengolahan Air Limbah	96.818.250,00	78.543.636,00	23,27
56	Beban Medical Check Up	0,00	313.379.961,00	(100,00)
57	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	27.932.347.777,43	3.021.871.595,10	824,34
58	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	241.155.000,00	0,00	-
59	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.633.496.420,00	1.715.313.160,00	228,42
60	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	62.204.189.300,00	51.870.643.595,00	19,92
61	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.119.500,00	3.043.798.800,00	(99,93)
62	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.240.048.917,00	7.859.789.421,00	(46,05)
63	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	426.965.406,90	1.148.378.323,51	(62,82)
64	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	276.439.894,10	1.157.285.583,49	(76,11)
65	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	291.141.666,68	399.479.329,00	(27,12)
66	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	304.989.594,04	242.137.464,96	25,96
67	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	2.445.970.000,00	0,00	-
68	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.663.259.600,00	0,00	-
69	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	0,00	2.500.000,00	(100,00)
70	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	296.875.000,00	457.665.400,00	(35,13)
71	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	46.993.992,00	31.200.000,00	50,62
72	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	1.400.000,00	(100,00)
73	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.200.000,00	1.600.000,00	(25,00)
74	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	504.508.044,00	32.286.900,00	1.462,58
75	Beban Sewa Mebel	84.683.700,00	141.007.500,00	(39,94)
76	Beban Sewa Alat Dapur	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
77	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	804.510.921,00	1.443.759.600,00	(44,28)
78	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	33.670.000,00	(100,00)
79	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	267.800.000,00	460.150.000,00	(41,80)
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.493.500,00	0,00	-
81	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.386.000,00	78.000.000,00	(30,27)
82	Beban Sewa Taman	48.000.000,00	37.500.000,00	28,00
83	Beban Sewa Hotel	1.800.000,00	8.497.488,00	(78,82)
84	Beban Sewa Jaringan Transmisi	4.848.484,67	5.185.545,00	(6,50)
85	Beban Sewa Alat Musik	38.443.000,00	20.500.000,00	87,53
86	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	35.894.000,00	0,00	-
87	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.949.999,00	0,00	-
88	Beban Sewa Tanaman	17.500.000,00	0,00	-
89	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	274.732.416,67	138.077.572,00	98,97
90	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	198.070.800,00	224.400.000,00	(11,73)
91	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	39.286.785,00	(100,00)
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	9.879.000,00	10.000.000,00	(1,21)
93	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	35.751.000,00	(100,00)
94	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	105.600.565,00	71.631.090,00	47,42
95	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	104.812.100,00	2.974.000,00	3.424,28
96	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.273.048.070,00	469.400.895,00	171,21
97	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	127.603.935,00	(100,00)
98	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.065.475,00	6.000.000,00	151,09

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
99	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	80.497.859,00	2.100.000,00	3.733,23
100	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.617.600,00	0,00	-
101	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.177.000,00	0,00	-
102	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	83.209.929,00	50.000.000,00	66,42
103	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	99.855.600,00	81.640.500,00	22,31
104	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.012.000,00	69.830.000,00	41,79
105	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	453.990,00	7.403.000,00	(93,87)
106	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	672.085.555,00	444.104.100,00	51,34
107	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan	98.612.400,00	0,00	-
108	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	488.883.445,00	8.000.000,00	6.011,04
109	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.315.576.348,00	1.348.022.167,00	71,78
110	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.484.228.506,00	1.249.703.370,00	18,77
111	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	176.667.883,00	53.641.860,00	229,35
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	262.539.330,00	353.005.393,00	(25,63)
113	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	0,00	152.404.887,00	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata- Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	119.903.900,00	30.000.000,00	299,68
115	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
116	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	95.000.000,00	(100,00)
117	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.887.478.659,00	2.763.757.502,00	40,66
118	Beban Sosialisasi	25.200.000,00	0,00	-
119	Beban Bimbingan Teknis	3.203.178.328,00	6.253.679.717,00	(48,78)
120	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	174.924.622,00	144.045.078,00	21,44
121	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	204.607.568,00	0,00	-
122	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.275.859,00	0,00	-
123	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	3.967.500,00	(100,00)
124	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	23.805.000,00	(100,00)
125	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	793.500,00	(100,00)
126	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.128.613,00	9.771.637,00	(47,52)
127	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	137.116.800,00	(100,00)
128	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	515.775,00	(100,00)
129	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.128.789,00	7.338.624,00	(43,74)
130	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.368.750,00	28.062.250,00	(84,43)
131	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	440.046.185,00	470.508.237,00	(6,47)
132	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	47.312.500,00	141.495.000,00	(66,56)
133	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas	0,00	98.854.836,00	(100,00)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)			
134	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	32.500.000,00	0,00	-
135	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	684.750.000,00	362.175.000,00	89,07
136	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	224.739.263,00	315.472.541,00	(28,76)
137	Beban Beasiswa	2.151.000.000,00	0,00	-
138	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	22.768.648.000,00	24.012.500.000,00	(5,18)
139	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	388.599.000,00	353.222.750,00	10,02
140	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.219.155.191,00	6.968.823.469,00	3,59
141	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	789.650.000,00	803.310.000,00	(1,70)
	Jumlah	355.255.745.715,09	307.728.626.304,36	15,44

Rincian perhitungan atas Beban Jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 265 Rincian Perhitungan Beban Jasa Tahun 2025

Belanja Jasa			249.104.250.158,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.475.275.000,00	
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	132.300.000,00	
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	70.000.000,00	
4	Honorarium Rohaniwan	4.000.000,00	
5	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	354.300.000,00	
6	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	429.400.000,00	
7	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.391.579.529,00	
8	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	912.257.200,00	
9	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	677.923.000,00	
10	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7.503.960.000,00	
11	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	609.240.000,00	
12	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	392.650.000,00	
13	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	465.500.000,00	
14	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	230.501.800,00	
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.760.959.020,00	
16	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	57.630.000,00	
17	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.105.099.215,00	
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.020.271.000,00	
19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.751.413.348,00	
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	964.281.740,00	
21	Belanja Jasa Tenaga Supir	159.600.000,00	
22	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	193.850.000,00	
23	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	71.540.890,00	
24	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	61.314.000,00	
25	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.956.000,00	
26	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000,00	
27	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.754.000,00	
28	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	225.483.100,00	
29	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	49.219.792,00	
30	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	49.558.170,00	
31	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.750.467.363,00	
32	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	68.684.850,00	
34	Belanja Jasa Kalibrasi	344.047.149,00	
35	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	153.848.753,00	
36	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	729.000,00	
37	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.003.956.497,00	
38	Belanja Tagihan Telepon	312.792.966,00	

Belanja Jasa			249.104.250.158,00
39	Belanja Tagihan Air	317.473.000,00	
40	Belanja Tagihan Listrik	19.721.311.078,00	
41	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	133.945.000,00	
42	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.454.864.870,00	
43	Belanja Paket/Pengiriman	6.043.630,00	
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	574.888.582,00	
45	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.748.250,00	
46	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	139.190.652,00	
47	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	241.155.000,00	
48	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.633.496.420,00	
49	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	62.204.189.300,00	
50	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	2.119.500,00	
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.446.582.358,00	
52	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	209.557.670,00	
53	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	260.707.600,00	
54	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	499.100.000,00	
55	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	305.453.539,00	
56	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	2.445.970.000,00	
57	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.663.259.600,00	
58	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	296.875.000,00	
59	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.925.000,00	
60	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	484.403.844,00	
61	Belanja Sewa Mebel	84.683.700,00	
62	Belanja Sewa Alat Dapur	1.300.000,00	
63	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	804.510.921,00	
64	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	267.800.000,00	
65	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.493.500,00	
66	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.386.000,00	
67	Belanja Sewa Taman	48.000.000,00	
68	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	5.289.256,00	
69	Belanja Sewa Alat Musik	38.443.000,00	
70	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	35.894.000,00	
71	Belanja Sewa Tanaman	17.500.000,00	
72	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	93.052.015,00	
73	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	151.034.100,00	
74	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.273.048.070,00	
75	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.369.413.279,00	
76	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultasi Jasa Rekayasa Konstruksi	96.038.000,00	
77	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	49.235.287,00	
78	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.617.600,00	
79	Belanja Jasa Konsultasi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	2.727.000,00	
80	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan	83.209.929,00	
81	Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	99.855.600,00	
82	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	99.012.000,00	
83	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kepuasan	542.031.005,00	
84	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Pendidikan	98.612.400,00	
85	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kesehatan	419.083.545,00	
86	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.297.181.098,00	

Belanja Jasa			249.104.250.158,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.484.228.506,00	
88	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	176.667.883,00	
89	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	205.686.330,00	
90	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	119.903.900,00	
91	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.834.908.135,00	
92	Belanja Sosialisasi	25.200.000,00	
93	Belanja Bimbingan Teknis	2.436.707.940,00	
94	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.491.113,00	
95	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.969.289,00	
96	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.368.750,00	
97	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	441.086.984,00	
98	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	111.537.500,00	
99	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J,PBJT],	273.779.458,00	
100	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(J,PKB],	204.607.568,00	
101	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.275.859,00	
102	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	317.560.500,00	
103	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	198.070.800,00	
104	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.213.736.263,00	
105	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.051.408.800,00	
Mutasi Tambah			117.055.842.970,00
-	Penambahan Utang Belanja Jasa Tahun 2025	25.870.616.796,00	
-	Reklas dari Beban Jasa BOS	32.380.646.353,00	
-	Reklas dari Beban Jasa BLUD	58.398.224.521,00	
-	Reklas dari Beban Jasa BOK	131.131.000,00	
-	Reklas dari Persediaan	2.997.000,00	
-	Reklas dari ATB	1.450.000,00	
-	Penambahan Utang Uang Tahun 2025	138.997.300,00	
-	Reklas dari Beban Pemeliharaan	131.780.000,00	
Mutasi Kurang			(10.904.347.412,91)
-	Pengurangan Utang Belanja Jasa Tahun 2024	(8.748.655.645,93)	
-	Reklas ke KIB C	(158.585.000,00)	
-	Reklas ke KIB F	(1.369.413.279,00)	
-	Beban Dibayar Dimuka	(251.227.187,98)	
-	Reklas ke ATB	(191.749.000,00)	
-	Pelunasan Utang Tahun 2024	(184.717.300,00)	
Jumlah Beban Jasa			355.255.745.715,09

E.1.2.4 Beban Pemeliharaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	25.978.984.458,27	28.902.724.047,00	(10,12)

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp25.978.984.458,27 turun (10,12%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 266 Rincian Perbedaan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	% (Kenaikan/ Penurunan)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	59.171.573,00	66.118.260,00	(10,51)
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	260.840.100,00	201.302.850,00	29,58
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar	161.775.000,00	59.900.000,00	170,08

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	% (Kenaikan/ Penurunan)
	Darat-Alat Besar Darat Lainnya			
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	71.037.850,00	77.333.000,00	(8,14)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	49.494.900,00	0,00	-
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	141.319.300,00	335.670.250,00	(57,90)
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.457.318.970,00	3.310.289.792,00	4,44
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	663.976.498,00	680.205.918,00	(2,39)
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	241.777.683,00	216.861.577,00	11,49
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.085.000,00	3.149.000,00	(2,03)
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	263.082.069,00	298.202.226,00	(11,78)
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	16.156.050,00	15.427.450,00	4,72
13	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	38.023.000,00	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	860.000,00	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	14.245.824,00	2.864.000,00	397,41
16	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	111.587.661,00	121.414.800,00	(8,09)
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.587.311.060,00	2.134.486.044,00	21,21
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	98.215.000,00	72.427.500,00	35,60
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	228.281.368,00	302.407.040,00	(24,51)
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.145.330,00	108.928.641,00	98,43
21	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	19.700.000,00	350.000,00	5.528,57
22	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	1.500.000,00	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	3.579.750,00	0,00	-
24	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	24.000.000,00	22.500.000,00	6,67
25	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	30.000.000,00	(100,00)
26	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0,00	2.923.000,00	(100,00)
27	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	663.181.784,00	354.279.350,00	87,19
28	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	72.624.170,00	60.900.000,00	19,25
29	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	2.500.000,00	(100,00)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	% (Kenaikan/ Penurunan)
30	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	29.637.000,00	0,00	-
31	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	2.507.689.696,00	1.402.624.538,00	78,79
32	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	282.797.750,00	(100,00)
33	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	23.840.000,00	0,00	-
34	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	4.600.000,00	0,00	-
35	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	4.995.000,00	0,00	-
36	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	444.000,00	0,00	-
37	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	0,00	118.350.000,00	(100,00)
38	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	155.265.500,00	194.146.000,00	(20,03)
39	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	137.651.306,00	116.362.192,00	18,30
40	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	38.701.328,00	28.998.771,00	33,46
41	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.823.399,00	4.200.000,00	(56,59)
42	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	81.558.361,00	54.640.150,00	49,26
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	72.877.501,00	15.132.450,00	381,60
44	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	22.710.999,00	7.900.000,00	187,48
45	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	639.950.687,00	48.138.000,00	1.229,41
46	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	21.999.000,00	(100,00)
47	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	161.430.000,00	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.413.539.608,27	15.171.882.265,00	(77,50)
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	80.182.000,00	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	480.651.901,00	309.193.500,00	55,45
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	23.380.000,00	0,00	-
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.070.776.587,00	0,00	-
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	98.060.546,00	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	58.900.000,00	(100,00)
55	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	15.375.000,00	(100,00)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	699.016.885,00	522.948.070,00	33,67
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	2.141.550,00	0,00	-

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	% (Kenaikan/ Penurunan)
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	448.597.100,00	(100,00)
59	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	1.900.000,00	0,00	-
60	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	416.782.266,00	(100,00)
61	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	860.000,00	0,00	-
62	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	722.300,00	0,00	-
63	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	633.231.791,00	(100,00)
64	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	5.970.000,00	(100,00)
65	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	0,00	60.008.000,00	(100,00)
66	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	16.380.000,00	(100,00)
67	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	16.650.000,00	0,00	-
68	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1.980.000,00	0,00	-
69	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	48.893.910,00	72.503.050,00	(32,56)
70	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	15.167.910,00	(100,00)
71	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	68.820.000,00	0,00	-
Jumlah		25.978.984.458,27	28.902.724.047,00	(10,12)

Rincian perhitungan atas Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

Tabel 267 Rincian Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2025

Belanja Pemeliharaan		16.838.488.967,00
-	Belanja Pemeliharaan Tanah	424.346.333,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.345.076.982,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.285.715.711,00
-	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.714.529.941,00
-	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	68.820.000,00
Mutasi Tambah		16.003.928.736,00
-	Reklas Masuk dari KIB B	735.296.917,00
-	Reklas Masuk dari KIB C	75.184.607,00
-	Reklas Masuk dari KIB D	1.779.750,00
-	Reklas Masuk dari Beban Barjas BOS	8.070.776.587,00
-	Reklas Masuk dari Beban Barjas BLUD	6.912.597.738,00
-	Reklas Masuk dari Beban Persediaan	207.623.800,00
-	Reklas dari Utang PFK	669.337,00
Mutasi Kurang		(6.863.433.244,73)
-	Reklas Keluar ke KIB B	(1.117.572.482,00)
-	Reklas Keluar ke KIB C	(4.276.893.687,73)
-	Reklas Keluar ke KIB D	(1.238.944.574,00)
-	Reklas ke Aset Lain-lain	(98.242.501,00)
-	Reklas ke Beban Jasa	(131.780.000,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan		25.978.984.458,27

E.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		39.525.990.610,00	75.392.512.641,00	(47,57)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp39.525.990.610,00 turun (47,57%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 268 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.796.471.049,00	49.484.847.945,00	(62,02)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	8.720.000,00	(100,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.386.660.430,00	19.910.084.972,00	(7,65)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.356.480.054,00	3.447.397.240,00	(60,65)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	986.379.077,00	2.471.295.840,00	(60,09)
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	70.166.644,00	(100,00)
Jumlah		39.525.990.610,00	75.392.512.641,00	(47,57)

Rincian atas perhitungan Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut.

Tabel 269 Rincian Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Beban Perjalanan Dinas		28.146.194.950,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.620.736.770,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.062.234.470,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.254.623.710,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	208.600.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
Mutasi Tambah		11.379.795.660,00
-	Reklas dari beban barang dan jasa BOS	433.614.600,00
-	Reklas dari beban barang dan jasa BLUD	1.660.850.700,00
-	Reklas dari beban barang dan jasa BOK	9.285.330.360,00
Mutasi Kurang		0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		39.525.990.610,00

E.1.2.6	Beban Subsidi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		831.792.000,00	2.834.616.000,00	(70,66)

Beban Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp831.792.000,00 turun (70,66%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 270 Rincian Beban Subsidi Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	78.486.000,00	(100,00)
2	Beban Subsidi kepada Koperasi	831.792.000,00	2.756.130.000,00	(69,82)
Jumlah		831.792.000,00	2.834.616.000,00	(70,66)

E.1.2.7	Beban Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		87.054.332.773,00	168.751.789.911,00	(48,41)

Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp87.054.332.773,00 turun (48,41%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 271 Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	75.339.550.000,00	(100,00)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.297.198.000,00	45.788.206.000,00	(70,96)
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.739.947.908,00	22.009.819.448,00	(78,46)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	525.000.000,00	(23,81)
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.931.981.415,00	10.848.291.230,00	(8,45)
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.881.250.000,00	12.605.500.000,00	2,19

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	245.646.250,00	70.517.000,00	248,35
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.681.438.800,00	0,00	-
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	14.596.676.900,00	0,00	-
10	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.607.175.000,00	1.564.906.233,00	2,70
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	17.465.393.500,00	0,00	-
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.207.625.000,00	0,00	-
Jumlah		87.054.332.773,00	168.751.789.911,00	(48,41)

E.1.2.8	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		15.646.257.300,00	7.756.432.100,00	101,72

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp15.646.257.300,00 naik 101,72% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 272 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	8.648.600.000,00	6.417.800.000,00	34,76
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	278.257.300,00	185.132.100,00	50,30
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	75.000.000,00	0,00	-
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	6.644.400.000,00	1.153.500.000,00	476,02
Jumlah		15.646.257.300,00	7.756.432.100,00	101,72

E.1.2.9	Beban Penyisihan Piutang dan Investasi Non Permanen	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		2.645.761.051,69	3.444.005.068,61	(23,18)

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp2.645.761.051,69 turun (23,18%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 273 Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Uraian	Penyisihan Piutang 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang 2025 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang		31.989.950.416,66	(29.287.578.024,13)	2.702.372.392,53
1	Piutang Pajak Reklame	18.868.200,00	(4.800.000,00)	14.068.200,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	21.508.207,20	(15.945.621,00)	5.562.586,20
3	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.126.746,30	0,00	114.126.746,30
4	Piutang PBBP2	18.733.852.227,60	(17.570.651.333,00)	1.163.200.894,60
5	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	176.982.125,00	(98.052.038,80)	78.930.086,20
6	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	144.811.092,80	(89.457.455,80)	55.353.637,00
7	Piutang PBJT-Jasa Parkir	5.308.334,00	0,00	5.308.334,00
8	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	37.431.276,00	0,00	37.431.276,00
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	499.964.947,80	(505.150.828,90)	(5.185.881,10)
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.979.375.992,40	(1.435.984.393,60)	543.391.598,80
12	Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	13.330.000,00	(6.440.000,00)	6.890.000,00
13	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
14	Piutang Hasil Sewa BMD (DISPORAPAR)	51.681.000,00	(33.306.800,00)	18.374.200,00
15	Piutang Hasil Sewa BMD (DPMPTSP)	9.403.200,00	(3.134.400,00)	6.268.800,00
16	Piutang Hasil Sewa BMD (DKUPP)	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
17	Piutang Pendapatan Denda PBBP2	8.426.524.190,56	(7.842.864.278,43)	583.659.912,13
19	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir (Bunga)	219.049.006,00	(216.692.003,60)	2.357.002,40

No	Uraian	Penyisihan Piutang 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)	Beban Penyisihan Piutang 2025 (Rp)
	(DKUPP)			
20	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir (Bunga) (DISPERTA)	21.198.750,00	(21.198.750,00)	0,00
21	Piutang Pendapatan BLUD RSUD Waluyoaji Kraksaan	0,00	0,00	0,00
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.443.900.121,00	(1.443.900.121,00)	0,00
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen		5.915.992.470,74	(5.972.603.811,58)	(56.611.340,84)
1	Beban Penyisihan Dana Bergulir (DKUPP) Investasi Non Permanen (Pokok)	5.058.220.488,74	(5.114.831.829,58)	(56.611.340,84)
2	Beban Penyisihan Dana Bergulir (DISPERTA) Investasi Non Permanen (Pokok)	349.171.981,00	(349.171.981,00)	0,00
3	Beban Penyisihan Dana Bergulir (DISPERTA) Investasi Non Permanen (Pokok)	508.600.001,00	(508.600.001,00)	0,00
Jumlah Beban Penyisihan		37.905.942.887,40	(35.260.181.835,71)	2.645.761.051,69

E.1.2.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		219.283.428.680,23	229.933.178.921,29	(4,63)

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp219.283.428.680,23 turun sebesar (Rp10.649.750.241,06) atau (4,63%) dari Tahun 2024, merupakan total perhitungan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp217.342.973.844,72 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 274 Rincian Beban Penyusutan pada Masing-Masing SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp)	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Irigasi (Rp)	Total Beban Penyusutan (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	432.826.600,00	51.321.509,00	3.558.520,00	487.706.629,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.889.962,40	10.207.086,98	280.000,00	109.377.049,38
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.048.181.768,80	23.405.967,28	633.120.564,72	1.704.708.300,80
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1.491.573.778,93	424.369.007,51	21.286.997,92	1.937.229.784,36
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	291.387.359,40	50.000,00	2.139.740,00	293.577.099,40
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	978.116.919,53	2.137.630.114,95	1.737.772.629,56	4.853.519.664,04
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	654.862.457,27	3.259.300,00	5.366.640,00	663.488.397,27
8	Dinas Kesehatan	1.850.925.612,23	386.736.725,39	118.298.313,02	2.355.960.650,64
9	Dinas Ketahanan Pangan	118.442.700,00	26.849.099,22	4.491.894,00	149.783.693,22
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.644.493.967,00	54.493.550,00	64.725.650,00	1.763.713.167,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	624.291.399,00	3.115.396.812,84	35.786.368,48	3.775.474.580,32
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.187.537.241,96	1.020.314.897,81	504.296.923,63	3.712.149.063,40
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.180.070.959,65	343.995.273,03	80.158.481.243,27	82.682.547.475,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	123.201.302,00	0,00	0,00	123.201.302,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	388.936.536,90	174.225.704,93	3.720.000,00	566.882.241,83
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	568.271.082,20	219.022.355,80	15.202.506,00	802.495.944,00
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.596.858.550,84	11.588.139.789,24	133.596.470,35	31.318.594.810,43
18	Dinas Perhubungan	2.517.537.766,10	182.695.498,96	386.229.313,10	3.086.462.578,16
19	Dinas Perikanan	395.722.901,50	213.758.559,62	446.843.906,86	1.056.325.367,98
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	309.160.629,30	84.358.608,39	2.648.160,00	396.167.397,69
21	Dinas Pertanian	896.960.793,70	747.079.024,10	246.242.235,07	1.890.282.052,87
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	507.091.760,52	262.923.260,59	5.241.511.682,79	6.011.526.703,90
23	Dinas Sosial	99.126.974,00	41.722.779,17	1.022.140,00	141.871.893,17

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp)	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Irigasi (Rp)	Total Beban Penyusutan (Rp)
24	Dinas Tenaga Kerja	217.337.260,70	149.205.979,72	9.956.683,68	376.499.924,10
25	Inspektorat Daerah	741.976.750,30	80.952.976,06	0,00	822.929.726,36
26	Kecamatan Bantaran	71.592.403,33	21.743.761,98	0,00	93.336.165,31
27	Kecamatan Banyuwang	63.895.422,22	11.160.411,27	0,00	75.055.833,49
28	Kecamatan Besuk	44.740.103,33	10.455.794,88	528.800,00	55.724.698,21
29	Kecamatan Dringu	61.758.670,00	24.857.967,35	400.000,00	87.016.637,35
30	Kecamatan Gading	60.316.240,00	25.253.063,58	0,00	85.569.303,58
31	Kecamatan Gending	71.464.138,11	21.239.419,58	0,00	92.703.557,69
32	Kecamatan Kotaanyar	51.236.556,00	33.503.625,67	60.118,21	84.800.299,88
33	Kecamatan Kraksaan	264.136.001,60	156.194.096,43	810.892.969,89	1.231.223.067,92
34	Kecamatan Krejengan	70.104.931,11	9.613.522,25	0,00	79.718.453,36
35	Kecamatan Krucil	47.101.986,67	27.217.970,78	0,00	74.319.957,45
36	Kecamatan Kuripan	42.152.570,00	20.073.091,86	300.000,00	62.525.661,86
37	Kecamatan Leces	68.076.370,00	31.113.954,34	0,00	99.190.324,34
38	Kecamatan Lumbang	38.901.336,67	15.621.235,83	644.440,00	55.167.012,50
39	Kecamatan Maron	64.209.632,22	37.525.566,77	0,00	101.735.198,99
40	Kecamatan Paiton	68.993.522,22	26.354.251,88	0,00	95.347.774,10
41	Kecamatan Pajarakan	55.651.500,00	25.781.856,19	0,00	81.433.356,19
42	Kecamatan Pakuniran	58.876.270,00	21.665.097,53	0,00	80.541.367,53
43	Kecamatan Sukapura	57.743.287,80	24.959.725,37	0,00	82.703.013,17
44	Kecamatan Sumber	63.357.569,80	25.864.832,00	0,00	89.222.401,80
45	Kecamatan Sumberasih	61.710.075,00	13.668.849,67	290.000,00	75.668.924,67
46	Kecamatan Tegalsiwalan	56.877.630,00	19.121.204,72	0,00	75.998.834,72
47	Kecamatan Tiris	59.790.020,00	19.303.632,28	39.600.000,00	118.693.652,28
48	Kecamatan Tongas	64.273.504,00	23.094.058,09	0,00	87.367.562,09
49	Kecamatan Wonomerto	69.425.426,67	16.551.004,60	0,00	85.976.431,27
50	Puskesmas Bago	376.394.930,63	70.515.585,10	1.085.472,72	447.995.988,45
51	Puskesmas Bantaran	223.977.864,20	69.594.330,27	2.559.744,00	296.131.938,47
52	Puskesmas Banyuwang	322.344.907,64	82.211.071,09	0,00	404.555.978,73
53	Puskesmas Besuk	325.779.703,90	40.513.420,08	0,00	366.293.123,98
54	Puskesmas Condong	374.977.662,70	104.827.415,28	2.722.592,60	482.527.670,58
55	Puskesmas Curah Tulis	373.130.874,60	80.806.403,39	1.962.996,00	455.900.273,99
56	Puskesmas Dringu	517.962.763,06	160.741.113,29	1.262.730,00	679.966.606,35
57	Puskesmas Gending	526.398.928,26	130.053.328,44	12.160.054,52	668.612.311,22
58	Puskesmas Glagah	249.421.483,20	55.940.717,87	1.675.984,00	307.038.185,07
59	Puskesmas Jabungsisir	321.748.875,46	61.728.621,89	1.174.974,40	384.652.471,75
60	Puskesmas Jorongan	372.525.938,40	53.337.764,60	1.262.730,00	427.126.433,00
61	Puskesmas Klenang Kidul	433.621.644,57	64.711.293,13	9.068.484,44	507.401.422,14
62	Puskesmas Kotaanyar	431.691.024,74	107.887.615,82	3.505.600,00	543.084.240,56
63	Puskesmas Kraksaan	541.673.082,40	217.634.738,09	1.027.680,00	760.335.500,49
64	Puskesmas Krejengan	296.757.288,80	133.217.078,92	3.230.572,00	433.204.939,72
65	Puskesmas Krucil	439.375.880,20	126.450.366,42	1.862.707,20	567.688.953,82
66	Puskesmas Kuripan	468.430.188,60	161.045.338,74	33.644.456,00	663.119.983,34
67	Puskesmas Leces	469.653.775,00	78.948.403,05	1.262.730,00	549.864.908,05
68	Puskesmas Lumbang	481.056.888,46	187.494.364,08	21.977.813,40	690.529.065,94
69	Puskesmas Maron	545.944.656,02	265.400.562,35	11.455.821,52	822.801.039,89
70	Puskesmas Paiton	500.803.499,26	119.180.096,49	0,00	619.983.595,75
71	Puskesmas Pajarakan	488.431.850,06	151.649.389,04	4.172.000,00	644.253.239,10
72	Puskesmas Pakuniran	383.283.592,20	101.179.115,89	0,00	484.462.708,09
73	Puskesmas Ranugedang	291.745.818,81	82.374.222,03	2.796.000,80	376.916.041,64
74	Puskesmas Sukapura	402.862.151,66	198.261.565,88	24.092.400,00	625.216.117,54
75	Puskesmas Suko	357.319.221,70	132.862.068,99	31.447.557,20	521.628.847,89
76	Puskesmas Sumber	492.138.209,80	124.045.037,28	3.019.730,00	619.202.977,08
77	Puskesmas Sumberasih	704.724.680,39	148.930.537,63	673.200,00	854.328.418,02
78	Puskesmas Tegalsiwalan	450.061.542,00	105.034.188,87	1.962.996,00	557.058.726,87
79	Puskesmas Tiris	377.276.978,37	91.841.055,96	2.777.199,48	471.895.233,81
80	Puskesmas Tongas	402.475.233,00	84.154.511,81	39.929.578,32	526.559.323,13
81	Puskesmas Wangkal	366.108.424,29	77.026.512,61	33.261.632,40	476.396.569,30
82	Puskesmas Wonomerto	379.009.650,27	72.653.606,76	1.786.794,00	453.450.051,03
83	RSUD Tongas	6.790.822.150,78	927.401.184,08	406.194.656,61	8.124.417.991,47
84	RSUD Waluyoaji Kraksaan	24.952.602.438,60	2.516.019.225,41	1.328.749.064,54	28.797.370.728,55
85	Satuan Polisi Pamong Praja	2.052.184.255,70	54.783.230,05	3.037.980,00	2.110.005.465,75
86	Sekretariat Daerah	1.988.032.118,12	2.362.814.239,87	55.760.810,09	4.406.607.168,08
87	Sekretariat DPRD	1.522.659.089,00	458.215.530,06	0,00	1.980.874.619,06
Jumlah		92.595.577.465,83	32.065.536.726,10	92.681.859.652,79	217.342.973.844,72

- b) Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp211.283.214,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 275 Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025

No	SKPD	Beban Penyusutan Properti Investasi (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	128.326.186,48
2	Dinas Perikanan	75.169.610,46
3	RSUD Tongas	7.787.417,20
Jumlah		211.283.214,14

- c) Beban Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp1.729.171.621,37 dengan rincian sebagaimana pada Lampiran 10.

E.1.2.12 Beban Transfer	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	176.271.538.000,00	185.042.615.500,00	(4,74)

Beban Transfer Tahun 2025 sebesar Rp176.271.538.000,00 turun (4,74%) dari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 276 Rincian Beban Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	14.853.490.000,00	8.760.000.000,00	69,56
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.572.165.000,00	2.608.682.000,00	36,93
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	119.902.883.000,00	118.091.926.000,00	1,53
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	37.943.000.000,00	55.582.007.500,00	(31,74)
Jumlah		176.271.538.000,00	185.042.615.500,00	(4,74)

Rincian perhitungan atas Beban Transfer adalah sebagai berikut.

Tabel 277 Rincian Perhitungan Beban Transfer Tahun 2025

Belanja Transfer			491.842.283.000,00
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	14.853.490.000,00	
-	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.572.165.000,00	
-	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	119.902.883.000,00	
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	37.943.000.000,00	
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	315.570.745.000,00	
Mutasi Kurang			(315.570.745.000,00)
-	Realisasi Dana Desa	(315.570.745.000,00)	
Jumlah Beban Transfer			176.271.538.000,00

E.1.2.13 Beban Tidak Terduga	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	6.844.921.019,00	430.734.500,00	6.414.186.519,00

Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp6.844.921.019,00 naik 1.489,13% dari tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 278 Rincian Perhitungan Beban Tidak Terduga Tahun 2025

Belanja Tidak Terduga			10.129.741.334,00
-	Belanja Tidak Terduga	10.129.741.334,00	
Mutasi Kurang			(3.284.820.315)
-	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan 2024	(1.755.396.273,00)	
-	Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Gedung Tempat Pendidikan dan Pagar) pada Dinas Pendidikan	(244.650.000,00)	

Belanja Tidak Terduga			10.129.741.334,00
-	Reklas ke Aset Tetap Jalan Kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.284.774.042,00)	
Jumlah Beban Tidak Terduga			6.844.921.019,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	(25.056.542.853,36)	(69.018.658.799,02)	(63,70)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi Tahun 2025 adalah sebesar (Rp25.056.542.853,36) atau turun (63,70%) dari Tahun 2024.

E.2 Kegiatan Non-Operasional

E.2.1	Surplus dari Kegiatan Non-Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		0,00	0,00	0,00
E.2.2	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		1.009.218.900,28	14.863.823.937,45	(93,21)

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.009.218.900,28, turun (93,21%) dari Tahun 2024.

E.2.2.1	Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		0,00	13.543.217.874,07	(100,00)

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

E.2.2.2	Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		1.009.218.900,28	1.320.606.063,38	(23,58)

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp1.009.218.900,28, turun (23,58%) dari Tahun 2024 terdiri dari.

1. Nilai defisit dari persediaan kadaluarsa/rusak/usang/mati/tidak dapat digunakan Tahun 2025 berdasarkan laporan persediaan barang rusak SIPERDA dan laporan obat kadaluarsa SIMPUS EVO dan SIMRS sebesar (Rp603.068.860,28).
2. Nilai kerugian penyertaan modal pada Perusahaan Rengganis Tahun 2025 sebesar (Rp406.150.040,00).

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	(1.009.218.900,28)	(14.863.823.937,45)	(93,21)

Surplus Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2025 adalah sebesar (Rp1.009.218.900,28), turun (93,21%) dari Tahun 2024.

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
	(26.065.761.753,64)	(83.882.482.736,47)	(68,93)

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar (Rp26.065.761.753,64), turun (68,93%) dari Tahun 2024.

E.3	Surplus/Defisit	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
		(26.065.761.753,64)	(83.882.482.736,47)	(68,93)

Surplus/Defisit Tahun 2025 sebesar (Rp26.065.761.753,64), turun (68,93%) dari Tahun 2024.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	221.665.789.896,29	149.596.831.759,35

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp221.665.789.896,29.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.510.454.961.816,29	2.450.396.561.493,34

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.510.454.961.816,29 terdiri dari.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah	159.992.935.526,20	104.459.105.973,05

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp159.992.935.526,20.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah	260.624.542.220,98	25.284.094.729,00

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp260.624.542.220,98.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.948.415.848,34	6.906.966.783,06

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp6.948.415.848,34.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.127.703.748,77	210.616.984.667,23

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp16.127.703.748,77.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	135.267.028.300,00	119.522.271.000,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 sebesar Rp135.267.028.300,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.500.186.000,00	42.161.966.000,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2025 sebesar Rp33.500.186.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.075.371.349.176,00	1.043.467.100.603,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 sebesar Rp1.075.371.349.176,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	10.171.016.405,00	61.416.967.828,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Tahun 2025 sebesar Rp10.171.016.405,00.

F.1.1.9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		365.247.446.041,00	295.970.883.154,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Tahun 2025 sebesar Rp365.247.446.041,00.

F.1.1.10	Penerimaan Dana Desa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		315.570.745.000,00	347.071.330.000,00

Penerimaan Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp315.570.745.000,00.

F.1.1.11	Penerimaan Insentif Fiskal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		7.167.295.000,00	6.053.857.000,00

Penerimaan Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 sebesar Rp7.167.295.000,00.

F.1.1.12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		112.999.635.550,00	163.546.795.856,00

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp112.999.635.550,00.

F.1.1.13	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		10.825.804.000,00	22.723.225.000,00

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp10.825.804.000,00.

F.1.1.14	Penerimaan Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		0,00	936.000.000,00

Penerimaan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

F.1.1.15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		640.859.000,00	259.012.900,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 sebesar Rp640.859.000,00.

F.1.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		2.288.789.171.920,00	2.300.799.729.733,99

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.288.789.171.920,00 terdiri dari.

F.1.2.1	Pembayaran Pegawai	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		1.086.155.532.740,00	1.000.328.023.269,00

Pembayaran Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp1.086.155.532.740,00.

F.1.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		597.129.232.773,00	585.772.857.759,99

Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp597.129.232.773,00.

F.1.2.3	Pembayaran Subsidi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		831.792.000,00	2.834.616.000,00

Pembayaran Subsidi Tahun 2025 sebesar Rp831.792.000,00.

F.1.2.4	Pembayaran Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		87.054.332.773,00	171.313.904.712,00

Pembayaran Hibah Tahun 2025 sebesar Rp87.054.332.773,00.

F.1.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		15.646.257.300,00	7.756.432.100,00

Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp15.646.257.300,00.

F.1.2.6	Pembayaran Tak Terduga	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		10.129.741.334,00	2.081.957.893,00

Pembayaran Tak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp10.129.741.334,00.

F.1.2.7	Transfer Bagi Hasil	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		18.425.655.000,00	11.368.682.000,00

Transfer Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp18.425.655.000,00.

F.1.2.8	Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		473.416.628.000,00	519.343.256.000,00

Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp473.416.628.000,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp221.665.789.896,29 merupakan selisih lebih antara jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 279 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	2.510.454.961.816,29	2.450.396.561.493,34
Jumlah Arus Kas Keluar	2.288.789.171.920,00	2.300.799.729.733,99
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	221.665.789.896,29	149.596.831.759,35

F.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		(204.022.845.952,00)	(268.698.973.394,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar (Rp204.022.845.952,00).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan Kas dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dikurangi dengan pengeluaran Kas untuk pembentukan Dana Cadangan, perolehan

Aset Tetap, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2025.

F.2.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		12.100.000,00	1.440.136.500,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp12.100.000,00 terdiri dari.

F.2.1.1	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		9.550.000,00	0,00

Penjualan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp9.550.000,00.

F.2.1.2	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		2.550.000,00	2.520.000,00

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.550.000,00.

F.2.1.3	Penjualan atas Aset Lain-lain	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		0,00	1.437.616.500,00

Penjualan atas Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

F.2.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		204.034.945.952,00	270.139.109.894,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp204.034.945.952,00 terdiri dari.

F.2.2.1	Perolehan Tanah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		735.000.000,00	825.000.000,00

Perolehan Tanah Tahun 2025 sebesar Rp735.000.000,00.

F.2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		93.105.679.455,00	114.249.090.560,00

Perolehan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp93.105.679.455,00.

F.2.2.3	Perolehan Gedung dan Bangunan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		74.337.108.591,00	69.119.424.441,00

Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp74.337.108.591,00.

F.2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		24.779.019.625,00	79.091.932.786,00

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp24.779.019.625,00.

F.2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		8.788.868.081,00	5.468.383.614,00

Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp8.788.868.081,00.

F.2.2.6	Perolehan Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		2.289.270.200,00	1.385.278.493,00

Perolehan Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.289.270.200,00.

Arus Kas Bersih dari Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2025 sebesar (Rp204.022.845.952,00) merupakan selisih kurang antara jumlah Arus Kas Masuk dari Investasi Aset Non Keuangan dikurangi dengan jumlah Arus Kas Keluar dari Investasi Aset Non Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 280 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	12.100.000,00	1.440.136.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar	204.034.945.952,00	270.139.109.894,00
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(204.022.845.952,00)	(268.698.973.394,00)

F.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		56.611.340,84	233.274.752,62

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp56.611.340,84.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan Kas dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dikurangi dengan Pemberian Pinjaman melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) dan Dinas Pertanian Tahun 2025.

F.3.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		56.611.340,84	233.274.752,62

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp56.611.340,84 terdiri dari.

F.3.1.1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		56.611.340,84	233.274.752,62

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun 2025 sebesar Rp56.611.340,84.

Arus Kas Bersih dari Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp56.611.340,84 merupakan selisih lebih antara jumlah Arus Kas Masuk dari Pendanaan dikurangi dengan jumlah Arus Kas Keluar dari Pendanaan sebagai berikut.

Tabel 281 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	56.611.340,84	233.274.752,62
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	56.611.340,84	233.274.752,62

F.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		669.337,00	(891.323,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp669.337,00 yang berasal dari pencatatan kurang bayar Utang PFK PPN sebesar Rp556.937,00 dan PPh 23 sebesar Rp112.400,00 pada Puskesmas Wangkal.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan/pengeluaran Kas berupa pajak potongan ataupun penerimaan/pengeluaran lainnya yang menjadi hak pihak ketiga.

F.4.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		104.682.936.567,00	127.229.956.700,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp104.682.936.567,00 yang terdiri dari.

Tabel 282 Rekapitulasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Penerimaan PFK - Taspen	28.159.196.688,00	29.054.824.610,00
Penerimaan PFK - Askes	31.186.902.210,00	32.490.681.467,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	13.598.568.765,00	25.039.045.962,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.396.815.637,00	1.880.194.171,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	485.321.414,00	428.832.707,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 ayat (2)	2.177.988.594,00	2.881.809.774,00
Penerimaan PFK - PPh Pusat	23.728.589.323,00	31.500.468.278,00
Penerimaan PFK - Pajak Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	987.395.426,00	987.605.512,00
Penerimaan PFK - Iuran Jaminan Kematian	2.962.158.510,00	2.966.494.219,00
Jumlah Arus Kas Masuk	104.682.936.567,00	127.229.956.700,00

F.4.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		104.682.267.230,00	127.230.848.023,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp104.682.267.230,00 yang terdiri dari.

Tabel 283 Rekapitulasi Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Penerimaan PFK - Taspen	(28.159.196.688,00)	(29.054.824.610,00)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan PFK - Iuran Jaminan Kesehatan	(31.186.902.210,00)	(32.490.741.467,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	(13.598.568.765,00)	(25.039.877.285,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	(1.396.815.637,00)	(1.880.194.171,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	(485.209.014,00)	(428.832.707,00)
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4 ayat (2)	(2.177.988.594,00)	(2.881.809.774,00)
Penerimaan PFK - PPn Pusat	(23.728.032.386,00)	(31.500.468.278,00)
Penerimaan PFK - Pajak Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan PFK - Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	(987.395.426,00)	(987.605.512,00)
Penerimaan PFK - Iuran Jaminan Kematian	(2.962.158.510,00)	(2.966.494.219,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(104.682.267.230,00)	(127.230.848.023,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp669.337,00 merupakan selisih antara jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran dikurangi dengan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 284 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	104.682.936.567,00	127.229.956.700,00
Jumlah Arus Kas Keluar	(104.682.267.230,00)	(127.230.848.023,00)
Jumlah Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	669.337,00	(891.323,00)

F.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	17.700.224.622,13	(118.869.758.205,03)

Rincian Arus Kas Bersih dari masing-masing aktivitas adalah sebagai berikut.

Tabel 285 Rincian Arus Kas Bersih dari Masing-Masing Aktivitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	221.665.789.896,29	149.596.831.759,35
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(204.022.845.952,00)	(268.698.973.394,00)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	56.611.340,84	233.274.752,62
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	669.337,00	(891.323,00)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	17.700.224.622,13	(118.869.758.205,03)

F.6 Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	173.314.992.293,12	292.184.688.335,17

Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp173.314.992.293,12.

F.7 Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	191.015.216.915,25	173.314.930.130,14

Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp191.015.216.915,25.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.8 Koreksi SiLPA Tahun Lalu	274,16	62.162,98

Koreksi SiLPA Tahun Lalu Tahun 2025 sebesar Rp274,16 merupakan koreksi SILPA Dana BOSP.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.9 Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas setelah Reklasifikasi	191.015.217.189,41	173.314.992.293,12

Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOSP & Kas Dana BOK Puskesmas & Dana Cadangan setelah Reklasifikasi Tahun 2025 sebesar Rp191.015.217.189,41.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.10 Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00

Saldo Akhir Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
F.11 Saldo Akhir Kas	191.015.217.189,41	173.314.992.293,12

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp191.015.217.189,41.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
G.1 Saldo Ekuitas Awal	2.955.689.014.944,49	3.034.642.291.166,08

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp2.955.689.014.944,49.

	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
G.2 Surplus/Defisit-LO	(26.065.761.753,64)	(83.882.482.736,47)

Surplus/Defisit-LO tahun 2025 sebesar (Rp26.065.761.753,64) merupakan Defisit atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	113.534.078.984,53	4.929.206.514,88

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp113.534.078.984,53 terdiri dari.

	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
G.3.1 Koreksi Saldo Awal Kas	274,16	0,00

Koreksi Saldo Awal Kas Tahun 2025 sebesar Rp274,16 merupakan koreksi Saldo Awal Kas Dana BOSP SDN Tandosentul II.

	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
G.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang	(246.212.461,92)	(479.143.981,00)

Koreksi Saldo Awal Piutang sebesar (Rp246.212.461,92) merupakan koreksi saldo awal Piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 286 Rincian Koreksi Piutang Tahun Sebelumnya

No	Uraian	Koreksi Saldo Awal (Rp)
1	Piutang PBJT-Restoran	(54.036.692,92)
2	Piutang PBJT-Hotel	(85.259.545,00)
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Tongas	(37.420.300,00)
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waluyoaji	(69.495.924,00)
Jumlah		(246.212.461,92)

- Koreksi Piutang PBJT-Restoran sebesar (Rp54.036.692,92) dikarenakan permohonan wajib pajak Cala Coffee & Eatery untuk pembetulan kesalahan perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPKAD Nomor 900.1.13.1/1447/426.203/2025 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah Karena Permohonan Wajib Pajak.
- Koreksi Piutang PBJT-Jasa Hotel sebesar (Rp85.259.545,00) dikarenakan permohonan wajib pajak Hotel Sumber Makmur Bromo untuk pembetulan kesalahan perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPKAD Nomor 900.1.13.1/1535/426.203/2025 tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah Karena Permohonan Wajib Pajak.
- Koreksi Pengurangan Piutang pada RSUD Tongas sebesar (Rp37.420.300,00) berdasarkan Dokumen Berita Acara Pengembalian Dana Lebih Bayar Hasil Verifikasi Pasca Klaim Nomor: 510/BA/VII-06/0125 dinyatakan bahwa terdapat perubahan dalam

pengkodean kode diagnosa sebesar Rp37.420.300,00 sehingga pihak BPJS akan melakukan pemotongan klaim bulan pelayanan Desember 2024.

- Terdapat Koreksi Pengurangan Piutang pada RSUD Waluyoaji sebesar (Rp69.495.924,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - Berdasarkan Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Data Pembiayaan Klaim JKN INACBG BPJS Kesehatan pada FKRTL s.d. Agustus Tahun 2023 Nomor: 8037/BA/VII-06/1223 telah disampaikan bahwa per Agustus 2023 yang diakui belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan sebesar nihil. Sehingga piutang dari Covid tahun 2023 sebesar Rp332.900,00, piutang BPJS yang statusnya Pending Tahun 2017 sebesar Rp48.682.000,00 dan piutang BPJS yang statusnya Pending Tahun 2018 sebesar Rp14.636.200,00 status pengajuannya dinyatakan ditolak.
 - Berdasarkan Surat dari RSUD Waluyoaji kepada PT Jasa Raharja Nomor: 790/471/426.102.35/2025 Tanggal 17 Maret 2025 Perihal Tagihan yang belum dibayar dan Berdasarkan Surat balasan dari Jasa Raharja Nomor: PL/R/13/2025 perihal Penolakan Pembayaran Tagihan telah disampaikan bahwa terdapat Piutang Jasa Raharja Tahun 2017 sebesar Rp4.506.170,00 dan Tahun 2016 sebesar Rp1.338.654,00 status pengajuannya dinyatakan kadaluarsa.

G.3.3 Koreksi Beban Dibayar Dimuka	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(36.841.780,00)	0,00

Koreksi Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025 sebesar (Rp36.841.780,00) terdiri dari.

- Tahun 2017 ada enam Bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat sebesar Rp6.551.600,00 karena tumpang tindih dengan pihak lain;
- Tahun 2018 ada satu Bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat sebesar Rp907.680,00 karena statusnya adalah Tanah Kas Desa;
- Tahun 2019 ada enam Bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat sebesar Rp2.354.800,00 karena tumpang tindih dengan pihak lain;
- Tahun 2020 ada satu bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat sebesar Rp487.700,00 karena statusnya adalah Tanah Kas Desa;
- Tahun 2022 ada 49 bidang tanah yang tidak bisa menjadi sertifikat sebesar Rp26.540.000,00 karena tumpang tindih dengan bidang atas nama pihak lain.

G.3.4 Koreksi Saldo Awal Persediaan	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	(2.631.760,56)	0,00

Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025 sebesar (Rp2.631.760,56) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 287 Rincian Koreksi Saldo Awal Persediaan Tahun 2025

No	Uraian	Koreksi Saldo Awal (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	(2.566.805,00)
2	Puskesmas Sumberasih	(64.955,56)
Jumlah		(2.631.760,56)

- Koreksi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp2.566.805,00) untuk barang berupa Karcis Polowijo, Karcis Roda 2, Karcis Roda 4, Karcis Ternak Kecil dan Karcis Ternak Besar dikarenakan ditemukannya perbedaan jumlah barang ketika dilakukan inspeksi ulang.

- Koreksi pada Puskesmas Sumberasih sebesar (Rp64.955,56) dikarenakan terdapat data pada SIMPUS Desa yang belum di-update.

G.3.5 Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

G.3.6 Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen - Penyertaan Modal	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	0,00	1.956.127.966,68

Koreksi tambah saldo awal Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

G.3.7 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	58.291.302.810,26	2.638.261.000,00

Koreksi Saldo Awal Aset Tetap sebesar Rp58.291.302.810,26 merupakan hibah masuk tahun sebelumnya sebesar Rp56.673.233.684,52, hibah keluar tahun sebelumnya sebesar (Rp592.530.874,26) dan menerima hasil tukar menukar tanah terdampak tol sebesar Rp2.210.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 288 Rincian Koreksi Aset Tetap

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor Dokumen Pendukung	Nominal (Rp)	Pemberi/Penerima	Keterangan
Tanah						
1	Dinas Pertanian	Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	TP/1/PROBOWAN GIASETPEMDA/VII/2024	1.519.000.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Hasil Tukar Menukar Tanah Terdampak Tol
2	Dinas Pertanian	Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	TP/2/PROBOWAN GITKDTAMAN/V/2024	691.600.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Hasil Tukar Menukar Tanah Terdampak Tol
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri peruntukan Gudang Aset Sitaan	000.2.3.2/29/426.32/2025	(139.950.000,00)	Kejaksaan Negeri	Memberi Hibah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah yang dihibahkan kepada Bawaslu	000.2.3.2/29/426.32/2025	(56.161.844,46)	Bawaslu	Memberi Hibah
Peralatan dan Mesin						
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Genset	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	179.859.335,38	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pompa Air	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	175.446.309,70	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Transformator	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	298.375.599,01	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Elektrik Panel Control	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	278.753.304,67	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Laci Box	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	4.467.785,16	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Alat Kantor Lainnya (CCTV, Papan Visual, Penangkal Petir,	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	252.464.710,25	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor Dokumen Pendukung	Nominal (Rp)	Pemberi/Penerima	Keterangan
		Panic Button System, Sirine)				
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Exhaust Fan	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	75.815.061,29	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Alat Rumah Tangga Lainnya (Lampu, Televisi, Equalizer, Loudspeaker, Soundsystem, Microphone, Tangki Air)	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	508.517.623,37	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Alat Pemadam Kebakaran	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	72.860.884,96	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peralatan Studio dan Audio	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	93.071.416,71	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Switcher/Patch Panel	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	18.649.984,27	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Switch Rak	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	93.364.634,98	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Peralatan Proses Produksi	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	8.473.750,92	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
14	Dinas Lingkungan Hidup	Bulldozer	86.5/BA/DC/2025	2.656.800.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
15	Dinas Lingkungan Hidup	Excavator	86.5/BA/DC/2025	2.157.600.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
16	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck	86.5/BA/DC/2025	510.700.090,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
17	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck	86.5/BA/DC/2025	510.700.090,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Kendaraan Bermotor Perorangan	000.2.3.2/29/426.32 /2025	(57.000.000,00)	Yayasan Raudlatul Qur'an Al Manshuri	Memberi Hibah
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Sepeda Motor	000.2.3.2/29/426.32 /2025	(14.590.000,00)	Yayasan Raudlatul Qur'an Al Manshuri	Memberi Hibah
Gedung Dan Bangunan						
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan MCK	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	490.816.537,13	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Musholla di Kawasan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	362.910.000,00	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	Menerima Hibah
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	195.430.795,28	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Pos Jaga	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	628.217.778,51	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Fasilitas Umum (Bangunan Penerangan Jalan)	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	20.050.898.132,57	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Parkir	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	2.483.225.636,73	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Taman	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	460.317.660,14	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pagar	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	2.469.451.569,71	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan	Bangunan Penerangan Jalan	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	111.256.521,96	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor Dokumen Pendukung	Nominal (Rp)	Pemberi/Penerima	Keterangan
	Pariwisata	(Extracom)				
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Gedung SDN Suko	86.5/BA/DC/2025	3.323.493.183,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Gedung SDN Satreyan III	86.5/BA/DC/2025	2.511.268.046,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Gedung SDN Tegalwatu	86.5/BA/DC/2025	2.812.824.139,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Gedung SDN Watupanjang	86.5/BA/DC/2025	3.773.147.441,00	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	000.2.3.2/29/426.32/2025	(61.147.627,20)	Bawaslu	Memberi Hibah
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	000.2.3.2/29/426.32/2025	(230.328.150,60)	Kejaksaan Negeri	Memberi Hibah
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rumah Negara	000.2.3.2/29/426.32/2025	(15.342.496,00)	Kejaksaan Negeri	Memberi Hibah
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rumah Negara	000.2.3.2/29/426.32/2025	(18.010.756,00)	Bawaslu	Memberi Hibah
Jalan, Jaringan Dan Irigasi						
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jalan Khusus Kompleks	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	1.414.859.902,59	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Saluran Drainase	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	554.370.462,77	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	3.316.825.809,79	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	123.629.381,30	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instalasi Air Tanah Dalam	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	365.991.452,49	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instalasi Air Buangan Domestik	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	134.121.063,95	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instalasi Gardu Listrik	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	93.317.182,02	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instalasi Penangkal Petir	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	209.725.335,28	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Instalasi Building Automation System (BAS)	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	235.164.743,41	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jaringan Cabang Distribusi	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	775.268.696,83	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jaringan Listrik	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	204.431.878,63	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum (Extracom)	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	2.116.659,02	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jaringan Listrik (Extracom)	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	4.888.294,84	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
Aset Tetap Lainnya						
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Patung	100.3.7.1/016/426.2 03/2025	1.197.992.405,90	Kementerian Pekerjaan Umum	Menerima Hibah
2	Dinas Kepemudaan,	Tanaman	100.3.7.1/016/426.2	471.352.394,00	Kementerian	Menerima Hibah

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor Dokumen Pendukung	Nominal (Rp)	Pemberi/Penerima	Keterangan
	Olahraga dan Pariwisata		03/2025		Pekerjaan Umum	
Jumlah				58.291.302.810,26		

G.3.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo 2025 (Rp) (5.888.111.970,64)	Saldo 2024 (Rp) (556.656.834,80)
--	---	---

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp5.888.111.970,64) terdiri atas Akumulasi Penyusutan dari Hibah Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar (Rp5.894.362.170,64) dan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Puskesmas Kuripan sebesar Rp6.250.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 289 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	SKPD	Koreksi Tahun 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin		
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(1.057.338.574,02)
2	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	71.590.000,00
3	Puskesmas Kuripan	6.250.200,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	(1.167.160.036,00)
Gedung dan Bangunan		
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(1.762.126.780,79)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(796.529.550,12)
Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(1.182.797.229,71)
Jumlah		(5.888.111.970,64)

G.3.9 Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	Saldo 2025 (Rp) 61.368.092.615,47	Saldo 2024 (Rp) 0,00
--	--	---------------------------------------

Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya sebesar Rp61.368.092.615,47 merupakan penerimaan hibah aset lain-lain di tahun sebelumnya dengan BAST yang terbit di tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 290 Rincian Koreksi saldo Aset lainnya atas Hibah Tahun Sebelumnya

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor BAST	Nominal (Rp)	Pemberi Hibah
Peralatan dan Mesin					
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengadaan Bak Sampah	33.1/BA/DC/2025	110.949.366,87	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Pengelolaan Pusat Edukasi Kebersihan Lingkungan	33.1/BA/DC/2025	188.114.863,00	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jalan, Jaringan Dan Irigasi					
1	Dinas Lingkungan Hidup	TPS 3R	33/BA/DC/2025	3.089.245.571,96	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
2	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Air Limbah	33/BA/DC/2025	64.890.020,76	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 01 (P 540,00 , L 2,95)	33.1/BA/DC/2025	1.520.905.534,69	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 02 (P 881,3 , L 2.32)	33.1/BA/DC/2025	4.624.485.586,98	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 03 (P 202,20m, L 1,48m)	33.1/BA/DC/2025	881.713.288,31	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 04 (P 49,70m, L 0,80m)	33.1/BA/DC/2025	135.485.329,90	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Lingkungan Type 05 (P 120,02m, L 0,80m)	33.1/BA/DC/2025	350.138.473,01	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Nama SKPD	Nama Barang	Nomor BAST	Nominal (Rp)	Pemberi Hibah
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Titik Kumpul Pada Persimpangan Jalan Cemorolawang	33.1/BA/DC/2025	3.269.071.279,99	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
9	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pembangunan SPAM IKK Kabupaten Probolinggo (27/PBG/IKK)	553/BA/DC/2023	17.422.152.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pembangunan IPLT Kabupaten Probolinggo	627/BA/DC/2024	6.313.652.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reservoir, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	2.109.438.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, dan Perpipaan di Desa Ranugedang Kec Tiris	1225.4/BA/DC/2022	1.252.006.800,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	3.301.621.400,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan Pemasangan Pipa Submersible, Genset dan Surge Supression Vessel	1225.4/BA/DC/2022	355.965.500,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa di Desa Gading Kulon Kec Gading	1225.4/BA/DC/2022	1.766.270.000,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reservior, Pengadaan dan Pemasangan Pipa	1225.4/BA/DC/2022	5.538.888.300,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan Broncaptering, Reservior, R Klorinasi, R Jaga, R Genset, Pengadaan & Pemasangan Pipa	1225.4/BA/DC/2022	6.345.351.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah	Pekerjaan Pembangunan G.Reser, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan HU di Kabupaten Probolinggo	1225.4/BA/DC/2022	2.727.748.100,00	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah				61.368.092.615,47	

G.3.10 Koreksi Saldo Awal Kewajiban**Saldo 2025 (Rp)****48.481.257,76****Saldo 2024 (Rp)****1.370.618.364,00**

Koreksi Saldo Awal Kewajiban sebesar Rp48.481.257,76 terdiri dari.

Tabel 291 Rincian Koreksi Kewajiban Tahun 2025

No	Uraian	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	241.695,00
2	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	162.045,00
3	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	371.224,00
4	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	7.519,00
5	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	18.433,50
6	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	275,00
7	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	40.057,00
8	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	7.776,00
9	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	226.382,50
10	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	18.246,00

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

No	Uraian	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
11	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Persetujuan Bangunan Gedung	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	137.464,00
12	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	542,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	RSUD Waluyoaji Kraksaan	(9.999,27)
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	RSUD Waluyoaji Kraksaan	93.691.691,78
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	4.206.250,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	RSUD Waluyoaji Kraksaan	(2.900,00)
17	Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	(50.635.443,75)
Jumlah			48.481.257,76

G.3.11 Koreksi Ekuitas Lainnya	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

G.4 Ekuitas Akhir	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)
	3.043.157.332.175,38	2.955.689.014.944,49

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar Rp3.043.157.332.175,38.

H. PENGUNGKAPAN INFORMASI LAINNYA

1. Perubahan APBD

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melakukan beberapa kali *refocussing* dan realokasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dalam menentukan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah juga harus dapat mewujudkan *public trust building strategy* dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan kontrol serta pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengelola keuangan daerah, yaitu.

a. Pergeseran Kesatu Setelah Penetapan APBD Tahun 2025

Perbup No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup No. 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD tahun 2025.

Dinamika setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang bersifat mendesak, perlu dilakukannya pergeseran anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya pergeseran anggaran tersebut antara lain:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Propinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025 dalam rangka APBN dan APBD tahun anggaran 2025;
- 3) Penyesuaian atas kesalahan penganggaran pada rekening belanja SKPD.

b. Perubahan APBD Tahun 2025

Perda No 4 tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025.

Perbup No 20 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan APBD tahun 2025.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dapat dilakukan saat terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 5) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 6) Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- 7) Keadaan darurat; dan/atau
- 8) Keadaan luar biasa.

c. Pergeseran Kesatu Setelah Perubahan APBD Tahun 2025

Perbup No. 25 tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup No. 20 tahun 2025.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 pada tanggal 26 Agustus 2025 dan

sebagaimana ketentuan pasal 163 – 164 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa.

- 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- 2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Untuk itu, perubahan kesatu atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025, dengan dasar antara lain.

- 1) Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
- 2) Surat Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa Nomor : 500.3/2076/BPD tanggal 27 Mei 2025 tentang Kodefikasi Subgiat dan Belanja APBD untuk Pemberian Bantuan Pembuatan Akta Notaris Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih;
- 3) Surat dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo tertanggal 19 September 2025 Nomor : 000.7.2.3/709/426.103/2025 tentang Usulan Pergeseran Anggaran antar Rekening Belanja;
- 4) Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja tertanggal 18 September 2025 Nomor : 500.1/151/426.106/2025 tentang Permohonan Dana Tidak Terduga (DTT) untuk Fasilitas Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia dari Negara Malaysia an. Musleh;
- 5) Penyesuaian/Pergeseran antar rincian objek Belanja Gaji dan Tunjangan pada Satuan Perangkat Daerah karena penyesuaian pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Tunjangan PPh Khusus yang mengalami kekurangan.

d. Pergeseran Kedua Setelah Penetapan Perubahan APBD Tahun 2025

Perbup No. 28 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbup No. 20 Tahun 2025

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 pada tanggal 26 Agustus 2025 dan sebagaimana ketentuan pasal 163 – 164 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa.

- 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;
- 2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Untuk itu, perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025, dengan dasar.

- 1) Bahwa dalam rangka penyesuaian penerimaan pajak daerah khususnya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Domisili dan Operasional Entitas

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7° 40' – 8° 10' Lintang Selatan (LS) dan 112° 50' – 113° 30' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 Ha atau ± 1.696,16 Km².

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan.

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
- Sebelah Utara : Bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

Dilihat dari topografinya, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Mempunyai ciri-ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

Dilihat dari ketinggiannya, Kabupaten Probolinggo berada pada 0 - 2.500 meter di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C-30°C. Hal ini yang menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750 – 2.500 meter di atas permukaan laut.

Tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150 – 750 meter di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya. Wilayah yang sangat tepat untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil dan Tiris.

Secara yuridis formal, Kabupaten Probolinggo dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan, 325 Desa dan lima Kelurahan, 1.581 Dusun, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 6050 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo menurut hasil estimasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 292 Perkembangan Jumlah Penduduk Hasil Estimasi Badan Pusat Statistik
Kabupaten Probolinggo**

No.	Uraian	Ket	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1	Laki-laki	Jiwa	570.237	587.828	573.945	592.531	600.818
2	Perempuan	Jiwa	585.657	572.137	589.914	608.400	617.116
Jumlah Penduduk		Jiwa	1.155.894	1.159.965	1.163.859	1.200.931	1.217.934

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo

- Penjelasan mengenai Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya
Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.
- Ketentuan Perundang-Undangan yang menjadi Kegiatan Operasionalnya
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan
Pada periode Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas, masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah diatur mengenai nomenklatur nama perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang telah berlaku sejak Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 293 Daftar Urusan, Bidang, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo**

Urusan	Bidang	Perangkat Daerah	Sub Unit Perangkat Daerah
Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD Waluyoaji Kraksaan	RSUD Waluyoaji Kraksaan
			RSUD Waluyoaji Kraksaan BLUD
		RSUD Tongas	RSUD Tongas
			RSUD Tongas BLUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

Urusan	Bidang	Perangkat Daerah	Sub Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Pertanian	Dinas Pertanian	Pertanian
	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan
			Bagian Hukum
			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
			Bagian Administrasi Pembangunan
			Bagian Layanan Pengadaan
			Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
			Bagian Umum
			Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga
			Bagian Organisasi
		Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Kecamatan Sukapura	Kecamatan Sukapura
		Kecamatan Sumber	Kecamatan Sumber
		Kecamatan Kuripan	Kecamatan Kuripan
		Kecamatan Bantaran	Kecamatan Bantaran
		Kecamatan Leces	Kecamatan Leces
		Kecamatan Banyuwang	Kecamatan Banyuwang
		Kecamatan Tiris	Kecamatan Tiris
		Kecamatan Krucil	Kecamatan Krucil
		Kecamatan Gading	Kecamatan Gading
		Kecamatan Pakuniran	Kecamatan Pakuniran
		Kecamatan Kotaanyar	Kecamatan Kotaanyar
		Kecamatan Paiton	Kecamatan Paiton
		Kecamatan Besuk	Kecamatan Besuk
		Kecamatan Kraksaan	Kelurahan Semampir
			Kelurahan Patokan
			Kelurahan Sidomukti
			Kelurahan Kraksaan Wetan
			Kelurahan Kandangjati Kulon
		Kecamatan Krejengan	Kecamatan Krejengan
		Kecamatan Pajajaran	Kecamatan Pajajaran
		Kecamatan Maron	Kecamatan Maron
		Kecamatan Gending	Kecamatan Gending
		Kecamatan Dringu	Kecamatan Dringu
		Kecamatan Tegalsiwalan	Kecamatan Tegalsiwalan
		Kecamatan Sumberasih	Kecamatan Sumberasih
		Kecamatan Wonomerto	Kecamatan Wonomerto
		Kecamatan Tongas	Kecamatan Tongas
		Kecamatan Lumbang	Kecamatan Lumbang

Urusan	Bidang	Perangkat Daerah	Sub Unit Perangkat Daerah
	Pengawasan	Inspektorat	Inspektorat
	Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Keuangan	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah - SKPD
			Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah - PPKD
	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

3. Penerbitan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada periode Tahun Anggaran 2025 telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati sebagai berikut.

a. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

b. Peraturan Bupati

- 1) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo;
- 3) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 7) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- 8) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2025 tentang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

- 9) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo;
- 10) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Probolinggo Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- 11) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025;
- 12) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 ini disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Bupati Probolinggo



Mohammad Haris